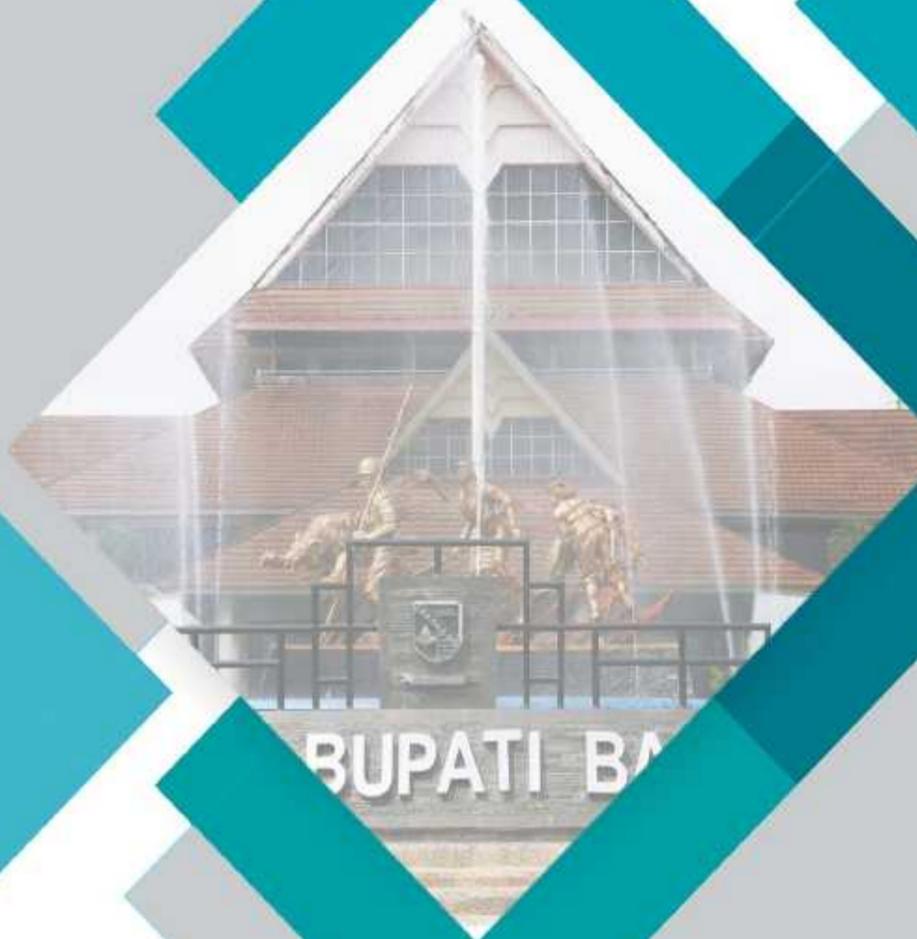


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG**



**BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah disusun sebagai landasan dan pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan antar dokumen perencanaan agar dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan daerah diperlukan rencana pembangunan Daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - c. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 perlu disesuaikan dengan rencana dan perkembangan pembangunan daerah sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31).
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi Dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
9. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap.
14. Sasaran Pokok adalah penjabaran kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan.
15. Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Arah kebijakan dan Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Bandung periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJPD Daerah Kabupaten Bandung tahun 2005-2025
- (2) Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 tahun, yaitu sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan.

4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang yang tertuang dalam dokumen RPJPD dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan Pembangunan Jangka Menengah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis
- BAB IV : Visi dan Misi Daerah
- BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah
- BAB VI : Penutup

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANDUNG,



DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,



TEDDY KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:
(15/365/2019)

KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirobbilalamin,***

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan izinNya, pelaksanaan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 dapat diselesaikan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung melalui Tim Penyusun Review RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.

Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 ini diharapkan dapat meningkatkan keakuratan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung selama 7 tahun mendatang. Arah kebijakan tersebut menjadi panduan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat luas.


BUPATI BANDUNG,
DADANG M. NASER

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
1.5 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Bandung	II-1
2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah	II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-16
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-28
2.1.4 Aspek Demografi	II-34
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-38
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-38
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-56
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-59
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-60
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	II-60
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	II-112
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-118
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-119
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-120
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-122
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-127
2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	II-128
2.5.1 Kondisi Umum Capaian TPB	II-128
2.5.2 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial	II-131
2.5.3 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi	II-132
2.5.4 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup	II-132
2.5.5 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan	II-133
2.6 Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya	II-133
2.6.1 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	II-133
2.6.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025	II-142
2.6.3 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025	II-145
2.6.4 Penelaahan RPJPD Daerah Lain	II-146
2.6.5 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029	II-154
2.6.6 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036	II-155



BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Bandung	III-1
3.1.1	Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	III-1
3.2	Isu Strategis	III-19
3.2.1	Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung	III-19
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1	Visi	IV-1
4.2	Misi	IV-2
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	V-1
5.1	Arah Kebijakan Daerah	V-1
5.1.1	Periode I (2005-2009)	V-2
5.1.2	Periode II (2010-2015)	V-3
5.1.3	Periode III (2016-2021)	V-4
5.1.4	Periode IV (2021-2025)	V-6
5.2	Sasaran Pokok Daerah	V-17
5.2.1	Penyesuaian Target Sasaran Pokok dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	V-25
BAB VI	PENUTUP	VI-1
6.1	Pedoman Transisi	VI-1
6.2	Kaidah Pelaksanaan	VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Daerah Kabupaten Bandung Menurut Kecamatan	II-2
Tabel II.2	Klasifikasi Topografi Wilayah Kabupaten Bandung	II-3
Tabel II.3	Kondisi Morfologi di Kabupaten Bandung	II-8
Tabel II.4	Produktivitas Aquifer di Kabupaten Bandung	II-9
Tabel II.5	Kondisi Sub DAS Citarum di Kabupaten Bandung	II-9
Tabel II.6	Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2015	II-10
Tabel II.7	Penggunaan Lahan Berdasarkan Interpretasi Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Tahun 2011	II-11
Tabel II.8	Alokasi Luas Kawasan Lindung dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bandung	II-12
Tabel II.9	Alokasi Luas Kawasan Budidaya dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bandung	II-12
Tabel II.10	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah dan Pertanian Lahan Kering di Kabupaten Bandung	II-17
Tabel II.11	Potensi Unggulan Pertanian Hortikultura di Kabupaten Bandung	II-18
Tabel II.12	Potensi Unggulan Peternakan di Kabupaten Bandung	II-19
Tabel II.13	Potensi Unggulan Perkebunan di Kabupaten Bandung	II-21
Tabel II.14	Potensi Unggulan Perikanan di Kabupaten Bandung	II-22
Tabel II.15	Rencana Pengembangan Potensi Kawasan Peruntukan Pariwisata di Kabupaten Bandung	II-24
Tabel II.16	Daerah Rawan Bencana Kabupaten Bandung Tahun 2013	II-29
Tabel II.17	Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2017	II-37
Tabel II.18	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2013 - 2017 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	II-42
Tabel II.19	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2013 - 2017 Atas Dasar Harga Berlaku	II-43
Tabel II.20	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2013 - 2017	II-44
Tabel II.21	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2013 - 2017	II-46
Tabel II.22	Tipologi Klassen Sektor Ekonomi Kabupaten Bandung	II-47
Tabel II.23	Rata-rata Indeks Location Quotient (LQ) Sektor di Kabupaten Bandung Terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 - 2016	II-48
Tabel II.24	Perhitungan Indikator – Indikator Shift Share Analysis Kabupaten Bandung Terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	II-50
Tabel II.25	Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2013 - 2016	II-51
Tabel II.26	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2017	II-58
Tabel II.27	Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2015 - 2017	II-59
Tabel II.28	Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga Kabupaten Bandung Tahun 2014 - 2015	II-60
Tabel II.29	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-61



Tabel II.30	Rasio Ketersediaan Sekolah Berdasarkan Usia Sekolah di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-63
Tabel II.31	Jumlah Guru dan Murid Per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-64
Tabel II.32	Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-64
Tabel II.33	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-65
Tabel II.34	Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-65
Tabel II.35	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-66
Tabel II.36	Rasio Tenaga Medis/ Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2017	II-67
Tabel II.37	Jumlah Kematian Ibu, Jumlah Kematian Balita, Jumlah Persalinan Medis dan Non Medis Tahun 2012 - 2017	II-67
Tabel II.38	Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017 ...	II-68
Tabel II.39	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-69
Tabel II.40	Proporsi Jembatan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017	II-70
Tabel II.41	Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-70
Tabel II.42	Kondisi Areal Irigasi di Kabupaten Bandung Tahun 2017	II-71
Tabel II.43	Lokasi Titik Genangan, Tinggi Genangan, dan Waktu Genangan di Kabupaten Bandung Tahun 2017	II-72
Tabel II.44	Kondisi DAS Citarum Kabupaten Bandung	II-74
Tabel II.45	Kondisi Drainase di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-75
Tabel II.46	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-75
Tabel II.47	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan Per Satuan Wilayah di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-76
Tabel II.48	Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2013 - 2017	II-76
Tabel II.49	Persentase Permukiman Layak Huni dan Jumlah RT yang Menempati Rumah Layak Huni Tahun 2012 - 2017	II-78
Tabel II.50	Cakupan Pelayanan Air Bersih Berdasarkan Sumber Pembangunannya Tahun 2017	II-79
Tabel II.51	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-79
Tabel II.52	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-80
Tabel II.53	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-81
Tabel II.54	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017	II-82
Tabel II.55	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-82
Tabel II.56	Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-83
Tabel II.57	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2015	II-84
Tabel II.58	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2017	II-85

Tabel II.59	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2017	II-85
Tabel II.60	Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2017	II-85
Tabel II.61	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2016	II-88
Tabel II.62	Target Capaian Skor PPH Konsumsi Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017	II-89
Tabel II.63	Target Capaian Skor PPH Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017	II-89
Tabel II.64	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-90
Tabel II.65	Persentase Volume Sampah yang Tertangani di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-90
Tabel II.66	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-91
Tabel II.67	Status Penataan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-91
Tabel II.68	Pengujian Air dan Udara di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-94
Tabel II.69	Persentase Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (% PI-SKT) di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-95
Tabel II.70	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-95
Tabel II.71	Rasio Penduduk Ber-KK Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-96
Tabel II.72	Rasio Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-96
Tabel II.73	Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 017	II-96
Tabel II.74	Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-97
Tabel II.75	Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-97
Tabel II.76	Rasio Akseptor KB di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-98
Tabel II.77	Rasio Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2017	II-99
Tabel II.78	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-101
Tabel II.79	Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2016	II-102
Tabel II.80	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-103
Tabel II.81	Jumlah Pelaku UKM dan Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-104
Tabel II.82	Jumlah Volume Koperasi dan Omzet Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bandung Tahun 2013 – 2017	II-104
Tabel II.83	Jumlah Investor PMA/ PMDN Tahun 2012 – 2017	II-105
Tabel II.84	Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-105
Tabel II.85	Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-107
Tabel II.86	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2016	II-108



Tabel II.87	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya Tahun 2015 – 2016	II-108
Tabel II.88	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-109
Tabel II.89	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-109
Tabel II.90	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-110
Tabel II.91	Jumlah Arsiparis di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-111
Tabel II.92	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2016	II-111
Tabel II.93	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2013	II-111
Tabel II.94	Indikator Perikanan di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2016	II-112
Tabel II.95	Indikator Capaian Pariwisata di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017 .	II-113
Tabel II.96	Indikator Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-114
Tabel II.97	Indikator Peternakan di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-115
Tabel II.98	Indikator Kehutanan di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2016	II-115
Tabel II.99	Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2015	II-117
Tabel II.100	Indikator Capaian Perdagangan di Kabupaten Bandung Tahun 2013 – 2017	II-117
Tabel II.101	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-118
Tabel II.102	Jumlah Transmigrasi Menurut Jenis di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2016	II-118
Tabel II.103	Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-119
Tabel II.104	Angka Konsumsi Pangan Rata-Rata Rumah Tangga Per Kapita di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2013	II-119
Tabel II.105	Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017	II-120
Tabel II.106	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2016	II-120
Tabel II.107	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-121
Tabel II.108	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2015	II-121
Tabel II.109	Jumlah Demonstrasi di Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2014 – 2017	II-122
Tabel II.110	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Bandung Tahun 2014 – 2017	II-124
Tabel II.111	Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-126
Tabel II.112	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-127
Tabel II.113	Rasio Lulusan S1, S2, dan S3 di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2015	II-127
Tabel II.114	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2017	II-128
Tabel II.115	Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Bandung	II-129
Tabel II.116	Tujuan dan Target Sustainable Development Goals (SDGs)	II-135
Tabel II.117	Sasaran Pokok RPJP Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025	II-143
Tabel II.118	Identifikasi RPJP Daerah Lain	II-146

Tabel II.119	Alokasi Luas Kawasan Lindung dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bandung	II-158
Tabel II.120	Alokasi Luas Kawasan Budidaya dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bandung	II-159
Tabel III.1	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pendidikan	III-2
Tabel III.2	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kesehatan	III-2
Tabel III.3	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III-3
Tabel III.4	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	III-5
Tabel III.5	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	III-6
Tabel III.6	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Sosial	III-7
Tabel III.7	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Tenaga Kerja	III-8
Tabel III.8	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III-8
Tabel III.9	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pangan	III-9
Tabel III.10	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pertanahan	III-9
Tabel III.11	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Lingkungan Hidup .	III-9
Tabel III.12	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III-10
Tabel III.13	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-11
Tabel III.14	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	III-11
Tabel III.15	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perhubungan	III-12
Tabel III.16	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Komunikasi dan Informatika	III-12
Tabel III.17	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	III-13
Tabel III.18	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Penanaman Modal .	III-14
Tabel III.19	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	III-14
Tabel III.20	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Statistik	III-14
Tabel III.21	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perpustakaan	III-15
Tabel III.22	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kearsipan	III-15
Tabel III.23	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kelautan dan Perikanan	III-15
Tabel III.24	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pariwisata	III-16
Tabel III.25	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pertanian	III-17
Tabel III.26	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perdagangan	III-18
Tabel III.27	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perindustrian	III-18
Tabel III.28	Keterkaitan Permasalahan Kabupaten Bandung dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung	III-20
Tabel III.29	Skoring Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah	III-21
Tabel III.30	Sinkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Bandung	III-23
Tabel IV.1	Perumusan Visi	IV-1



Tabel IV.2	Penyusunan Penjelasan Visi	IV-1
Tabel IV.3	Perumusan Misi RPJPD	IV-2
Tabel V.1	Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025	V-9
Tabel V.2	Perumusan Sasaran Pokok	V-17
Tabel V.3	Prioritas Pembangunan Jangka Panjang	V-20
Tabel V.4	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung	V-22
Tabel V.5	Sinergi TPB dengan Misi Kabupaten Bandung	V-25
Tabel V.6	Target TPB yang Memiliki Kesenjangan	V-26

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Bagan Alir Penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung	I-3
Gambar I.2	Posisi RPJP Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	I-5
Gambar I.3	Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Bandung dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
Gambar II.1	Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Bandung	II-3
Gambar II.2	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bandung	II-4
Gambar II.3	Peta Topografi Kabupaten Bandung	II-7
Gambar II.4	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung	II-14
Gambar II.5	Peta Kawasan Resapan Air Kabupaten Bandung	II-15
Gambar II.6	Peta Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bandung	II-30
Gambar II.7	Peta Kawasan Resiko Gunung Berapi Kabupaten Bandung	II-31
Gambar II.8	Peta Rawan Gempa Bumi Kabupaten Bandung	II-32
Gambar II.9	Peta Rawan Gerakan Tanah Kabupaten Bandung	II-33
Gambar II.10	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2011-2017	II-34
Gambar II.11	Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2016	II-35
Gambar II.12	Peta Persebaran Penduduk Kabupaten Bandung	II-36
Gambar II.13	Kedudukan Ekonomi Kabupaten Bandung terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017	II-38
Gambar II.14	Kedudukan Ekonomi Provinsi Jawa Barat terhadap Provinsi - Provinsi di Indonesia Tahun 2017	II-39
Gambar II.15	Grafik Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2010-2017	II-40
Gambar II.16	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2017	II-40
Gambar II.17	Kontribusi Setiap Sektor Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bandung Tahun 2017	II-41
Gambar II.18	Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017	II-45
Gambar II.19	Perbandingan Indeks Gini Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2017	II-52
Gambar II.20	Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017	II-53
Gambar II.21	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Per Kabupaten/Kota Tahun 2017	II-54
Gambar II.22	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2002-2017	II-55
Gambar II.23	Peta Persebaran Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bandung Tahun 2015	II-55
Gambar II.24	Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017	II-56
Gambar II.25	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017	II-57
Gambar II.26	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017	II-58
Gambar II.27	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2017	II-62
Gambar II.28	Grafik Perkembangan Panjang Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2014-2017	II-69
Gambar II.29	Persentase Anak Terlantar Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	II-83
Gambar II.30	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Per Kabupaten/Kota Tahun 2017	II-86
Gambar II.31	Perkembangan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2017	II-87
Gambar II.32	Persentase UKM Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2017	II-104



Gambar II.33	Perbandingan Kunjungan Wisatawan Provinsi Jawa Barat Per Kabupaten/Kota Tahun 2016	II-113
Gambar II.34	Alur Mekanisme Perizinan Kabupaten Bandung	II-123
Gambar II.35	Persentase Capaian TPB Kabupaten Bandung	II-129
Gambar II.36	Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Bandung	II-131
Gambar II.37	Persentase Capaian Target Indikator Pilar Sosial	II-132
Gambar II.38	Persentase Capaian Target Indikator Pilar Ekonomi	II-132
Gambar II.39	Persentase Capaian Target Indikator Pilar Lingkungan Hidup	II-133
Gambar II.40	Persentase Capaian Target Indikator Pilar Lingkungan Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan	II-133
Gambar V.1	Tema Pembangunan Dua Puluh Tahunan	V-2



1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah seperti yang tertuang pada Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Daerah sendiri dilaksanakan melalui tiga *time frame* perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk perencanaan 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk perencanaan 5 tahunan, dan Rencana Pembangunan Tahunan. Ketiga *time frame* tersebut diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Perencanaan ini disusun ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang pada prosesnya dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA).

RPJPD Kabupaten Bandung memuat visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah selama 20 tahun. Visi pembangunan jangka panjang daerah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD yang menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dengan periode RPJMD. Penyusunan RPJPD menjadi penting dan strategis karena keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. RPJPD menjadi koridor dan landasan dalam penyusunan tahapan pembangunan lima tahunan maupun tahunan. Saat ini, periode pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 sudah memasuki tahap ketiga. Dalam kurun waktu dari 2005-2010 dan 2010-2015 hingga pada periode ketiga, belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan maupun hasil penyelenggaraan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. Padahal, pengendalian dan evaluasi untuk RPJPD diperlukan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang.

Mengingat kedudukannya yang strategis dan panjangnya jangka waktu yang tertuang dalam rencana pembangunan, RPJPD diperkenankan untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan agar tetap menjadi dokumen perencanaan yang strategis dan berkesinambungan dengan keadaan dan kondisi yang ada saat ini. Pertimbangan perbaikan/penyempurnaan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 ini dilakukan sesuai dengan Pasal 298 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa perbaikan/penyempurnaan RPJPD dapat dilakukan apabila pada hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan. Adapun perbaikan/penyempurnaan terhadap Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang dimuat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017.
2. Substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017; dan
3. Adanya perubahan mendasar berupa perubahan kebijakan nasional.

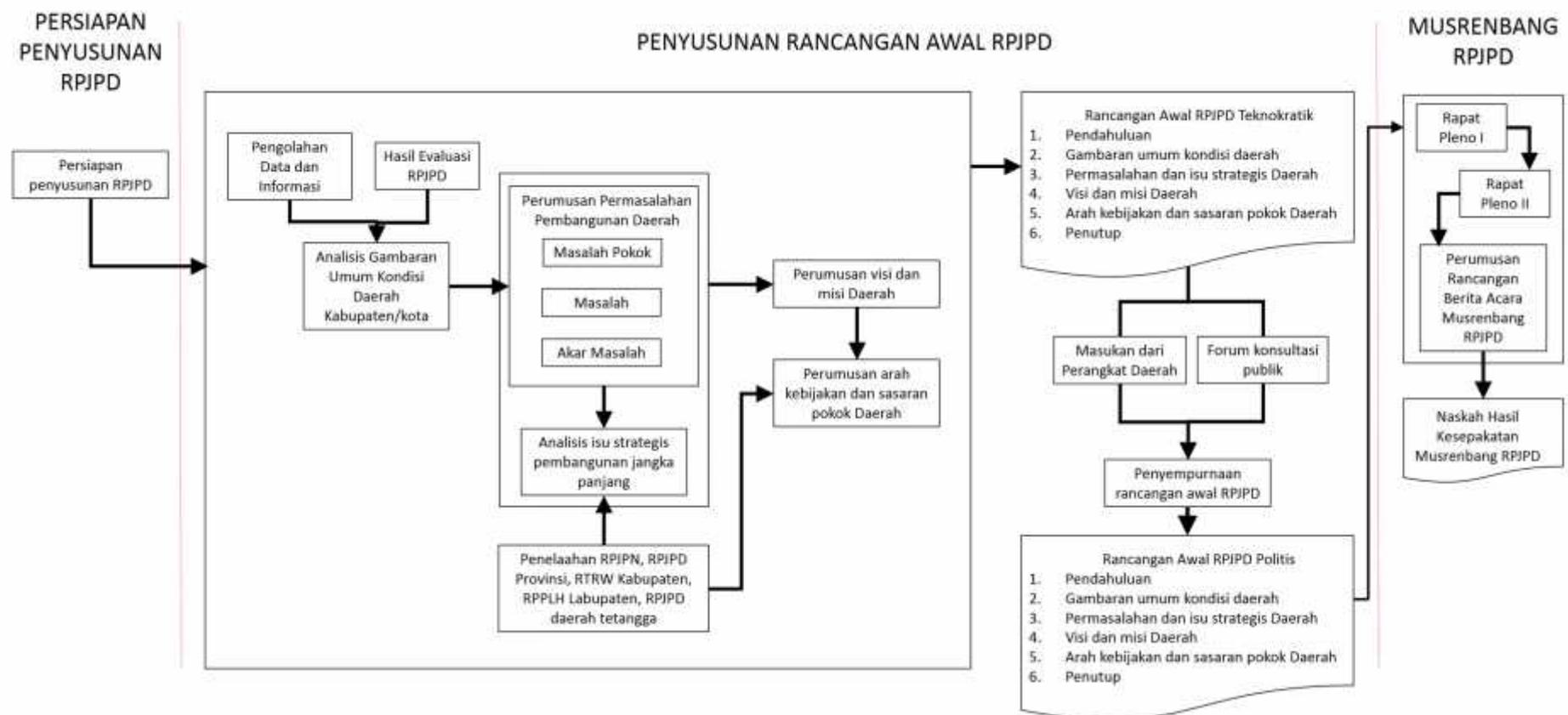
Secara prosesnya, perumusan dan penyusunan RPJPD menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas.

- a. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
- b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan teknokratis pada penyusunan revidi RPJPD ini digunakan untuk evaluasi kinerja pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan pengolahan data dan informasi, gambaran umum kondisi daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang, penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Kabupaten, RPPLH Kabupaten, RPJPD daerah tetangga, perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung. Forum konsultasi publik merupakan salah satu bentuk pendekatan partisipatif yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan. Perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok merupakan bentuk penjabaran dari pendekatan politik, yang juga diperkuat melalui penyelarasan dalam forum musrenbang RPJPD dengan menggunakan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas.



Gambar 0.1 Bagan Alir Penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung



Sumber: Hasil Permendagri 86 Tahun 2017



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Pada penyusunan Reviu RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, beberapa landasan hukum menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun RPJPD, antara lain:

- a. Landasan Idiil Pancasila
- b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 ayat 6
- c. Landasar Operasional, yaitu:
 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

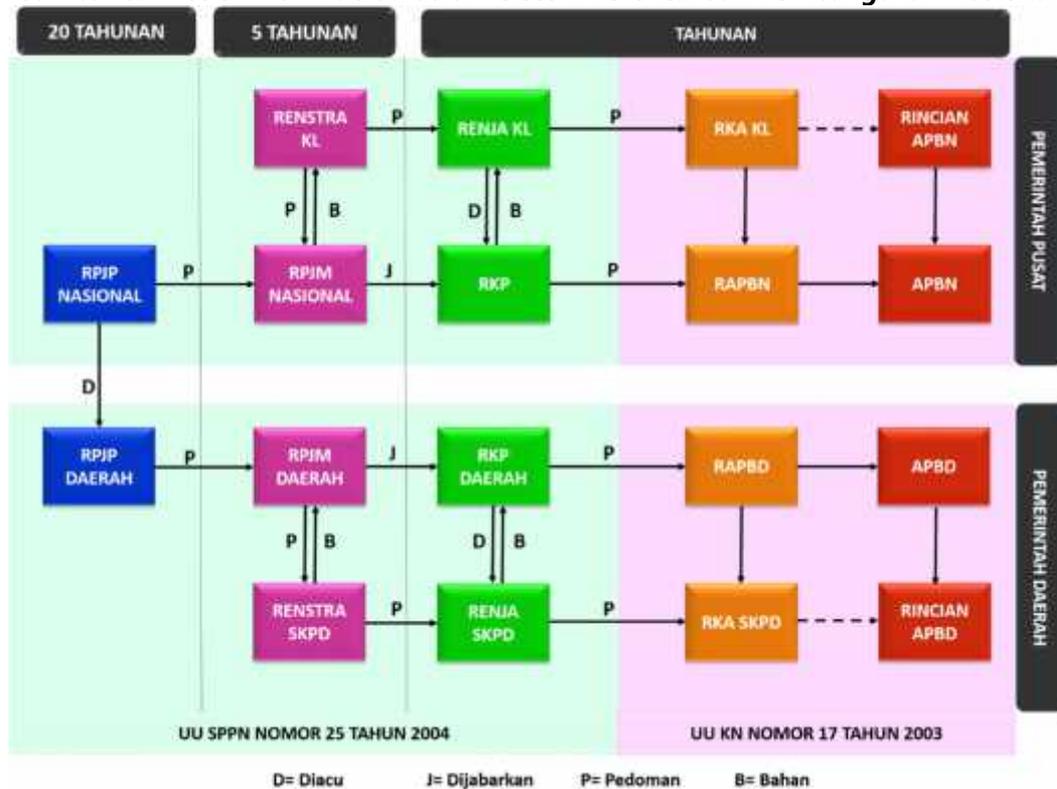
Penyusunan RPJPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat. RPJPN dipedomani dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 untuk menyelaraskan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan nasional dan provinsi. Sesuai dengan amanat pada pasal 160 Permendagri 86 Tahun 2017, pada penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

2025 juga harus mempedomani RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah. Diperlukan juga pengintegrasian sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dengan RPPLH Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, RPJPD daerah lain juga perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJPD dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung dengan daerah lainnya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut).

Gambar 0.2 Posisi RPJP Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Sumber: Hasil Modifikasi dari UU SPPN Nomor 25 Tahun 2004 dan UU KN Nomor 17 Tahun 2003

Sebagai bagian dari suatu sistem perencanaan, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 perlu ditelaah, baik dari tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Adapun beberapa dokumen yang akan ditelaah dalam reviu penyusunan RPJPD ini antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat (RPJPD) Tahun 2005-2025
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Gambar 0.3 Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Bandung dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA, 2018

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 adalah melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. Adapun tujuan penyusunan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 adalah menyelaraskan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran penyusunan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 adalah untuk:

- Teridentifikasinya gambaran umum kondisi daerah dan hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025
- Ditemukeralinya permasalahan pembangunan jangka panjang dan isu – isu strategis Kabupaten Bandung
- Terdefinisinya visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung
- Tersusunnya indikator capaian kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan reviu RPJPD Kabupaten Bandung, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen, dan sistematika penulisan.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan dan isu – isu strategis sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalahnya. Penyajian isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan dijelaskan berdasarkan bidang urusan pembangunan daerah, baik secara internal maupun eksternal.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran mengenai visi dan misi RPJPD. Visi dan misi RPJPD akan menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bab ini memuat arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah untuk tiap tahapan 5 (lima) tahunan selama kurun waktu 20 (dupa puluh) tahun dan prioritas masing – masing tahapan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung.



Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung digunakan sebagai basis data yang akan menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung pada jangka panjang. Adapun aspek yang dianalisis dalam gambaran umum kondisi daerah adalah aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Bandung

Pada subbab ini akan diuraikan mengenai penjelasan aspek geografi dan demografi Kabupaten Bandung yang mencakup karakteristik lokasi wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan aspek demografi.

2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah

1) Luas, Letak, dan Kondisi Geografi

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara geografis, letak Kabupaten Bandung berada $107^{\circ} 22'$ – $108^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 41'$ – $7^{\circ} 19'$ Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung adalah sebesar $1.762,39 \text{ km}^2$ (4,99% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat seluas $35.377,76 \text{ km}^2$) dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

-)] Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang
-)] Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
-)] Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur
-)] Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Bandung Barat
-)] Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi

Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 270 Desa dan 10 Kelurahan yang terbagi ke dalam 8 Wilayah Pengembangan (WP). Berikut adalah luas wilayah administratif masing-masing kecamatan yang dikelompokkan berdasarkan WP.



Tabel II.1 Luas Daerah Kabupaten Bandung Menurut Kecamatan

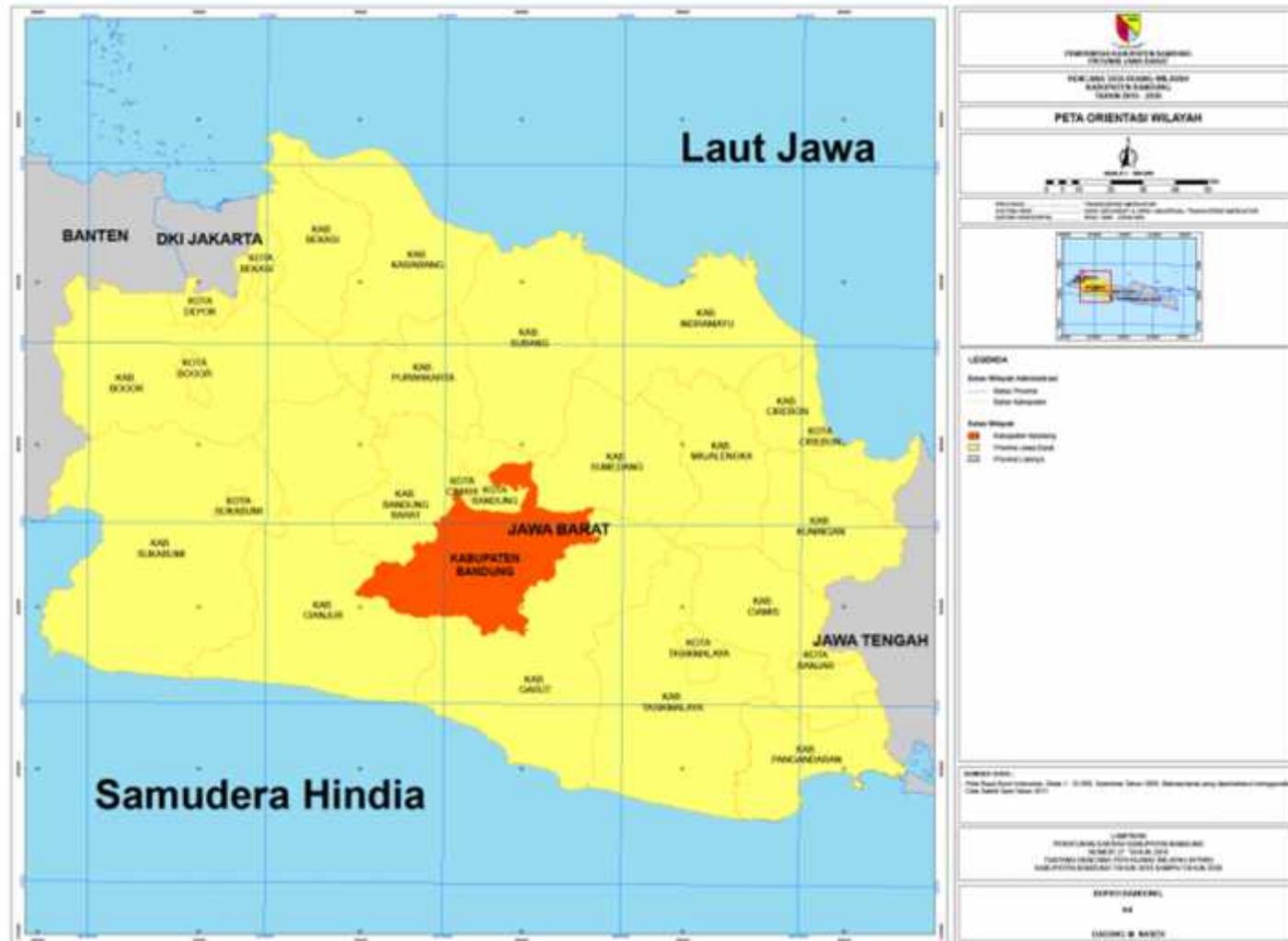
No	Wilayah Pengembangan	Kecamatan	Luas		Jumlah Desa/ Kelurahan
			Km ²	%	
1	WP Soreang	Kec. Soreang	25,51	1,45	10
		Kec. Kutawaringin	47,30	2,68	11
		Kec. Katapang	15,72	0,89	7
		Kec. Rancabali	148,37	8,42	5
		Kec. Pasirjambu	239,58	13,59	10
		Kec. Ciwidey	48,47	2,75	7
2	WP Baleendah	Kec. Baleendah	41,56	2,36	8
		Kec. Dayeuhkolot	11,03	0,63	6
		Kec. Bojongsoang	27,81	1,58	6
3	WP Banjaran	Kec. Banjaran	42,92	2,44	11
		Kec. Pangalengan	195,41	11,09	13
		Kec. Canguang	24,61	1,40	7
		Kec. Cimaung	55,00	3,12	10
		Kec. Arjasari	64,98	3,69	11
		Kec. Pameungpeuk	14,62	0,83	6
4	WP Majalaya	Kec. Majalaya	25,36	1,44	11
		Kec. Ciparay	46,18	2,62	14
		Kec. Pacet	91,94	5,22	13
		Kec. Kertasari	152,07	8,63	8
		Kec. Paseh	51,03	2,90	12
		Kec. Ibun	54,57	3,10	12
		Kec. Solokan Jeruk	24,01	1,36	7
5	WP Cicalengka	Kec. Cicalengka	35,99	2,04	12
		Kec. Nagreg	49,30	2,80	8
		Kec. Cikancung	40,14	2,28	9
6	WP Cileunyi	Kec. Cileunyi	31,58	1,79	6
		Kec. Rancaekek	45,25	2,57	14
7	WP Cimencyan - Cilengkrang	Kec. Cimencyan	53,08	3,01	9
		Kec. Cilengkrang	30,12	1,71	6
8	WP Margaasih- Margahayu	Kec. Margaasih	18,35	1,04	6
		Kec. Margahayu	10,54	0,60	5

Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2017

Secara spasial, orientasi wilayah Kabupaten Bandung dalam konstelasi Provinsi Jawa Barat serta batas wilayah administratif Kabupaten Bandung ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



Gambar II.1 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Bandung



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung merupakan wilayah pegunungan atau daerah perbukitan dengan ketinggian di atas permukaan laut bervariasi dari ±500 m sampai 2.429 mdpl, semakin terjal ke arah selatan. Beberapa desa berada di tepian hutan namun sebagian besarnya berada di luar kawasan hutan. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Bandung merupakan pegunungan dengan puncak yang rata – rata ketinggiannya lebih dari 2.500 mdpl. Gunung – gunung tersebut antara lain di sebelah selatan Kabupaten Bandung terdapat Gunung Wayang (2.181 mdpl), Gunung Patuha (2.334 mdpl) Kecamatan Cipeundeuy, Gunung Malabar (2.321 mdpl), serta Gunung Papandayan (2.262 mdpl) dan Gunung Guntur (2.249 mdpl), yang keduanya berada di perbatasan dengan Kabupaten Garut.

2) Topografi

Dominasi lahan di Kabupaten Bandung adalah berbukit sampai bergunung dengan kelas lereng agak curam sampai sangat curam. Kabupaten Bandung termasuk ke dalam wilayah dataran tinggi dengan kemiringan lereng antara 0-8%, 8 - 15% hingga di atas 45%. Kemiringan lereng di Kabupaten Bandung dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- J Kemiringan 0 - <8% (datar), tersebar di seluruh kecamatan khususnya di Kecamatan Banjaran, Pameungpeuk, Katapang, Ciparay, Bojongsoang, Dayeuhkolot, Rancaekek, Solokanjeruk, Margaasih, Margahayu, Canguang. Kondisi tanah ini potensial untuk dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman dan usaha tani lahan sawah.
- J Kemiringan 8 - <15% (landai), tersebar di Kecamatan Majalaya, Kutawaringin, Soreang. Kondisi tanah ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha namun diperlukan usaha untuk konservasi tanah dan air.
- J Kemiringan 15 - <25% (miring agak curam), tersebar di Kecamatan Paseh, Pacet, Cimaung, Arjasari, dan Cicalengka. Tanah dengan kemiringan demikian cukup rawan dan kurang baik untuk dibudidayakan sebagai tanaman pertanian. Tanah dengan kemiringan tersebut dapat dikelola dengan pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai konservasi.
- J Kemiringan 25 - <45% (curam) merupakan kemiringan yang paling mendominasi di wilayah Kabupaten Bandung seperti Kecamatan Pasirjambu, Cimaung, Rancabali, Cileunyi, dan Cilengkrang. Kondisi lahan seperti ini rawan dan berpotensi untuk terkenal erosi sehingga diperlukan upaya pelestarian hutan lindung.
- J Kemiringan >45% (sangat curam) merupakan bagian hulu dari wilayah Kabupaten Bandung seperti Kecamatan Cimencyan, Kertasari, dan Pangalengan. Kondisi tanah ini berpotensi untuk terkena erosi sehingga diperlukan upaya konservasi tanah dan air juga upaya pelestarian hutan.

Tabel II.2 Klasifikasi Topografi Wilayah Kabupaten Bandung

No.	Wilayah Pengembangan	Kecamatan	Topografi Wilayah	Ketinggian (mdpl)
1	WP Soreang	Kec. Soreang	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	700 – 825
		Kec. Kutawaringin	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	500 – 1.100
		Kec. Katapang	Dataran	675 – 700
		Kec. Rancabali	Lereng/Punggung Bukit	1.200 – 1.550
		Kec. Pasirjambu	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	1.000 – 1.200
		Kec. Ciwidey	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	700 – 1.200
2	WP Baleendah	Kec. Baleendah	Dataran	600 – 715
		Kec. Dayeuhkolot	Dataran	600
		Kec. Bojongsoang	Dataran	681 – 687



No.	Wilayah Pengembangan	Kecamatan	Topografi Wilayah	Ketinggian (mdpl)
3	WP Banjaran	Kec. Banjaran	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	750 – 800
		Kec. Pangalengan	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	984 – 1571
		Kec. Cangkuang	Dataran, Lereng/ Punggung Bukit	700 – 710
		Kec. Cimaung	Lereng/Punggung Bukit	765 – 1.057
		Kec. Arjasari	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	550 – 1.000
		Kec. Pameungpeuk	Dataran	650 – 675
4	WP Majalaya	Kec. Majalaya	Dataran	681 – 796
		Kec. Ciparay	Dataran	678 – 805
		Kec. Pacet	Dataran, Lereng/Punggung Bukit, Lembah/ DAS	700 – 1.116
		Kec. Kertasari	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	1.250 – 1.812
		Kec. Paseh	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	600 – 800
		Kec. Ibum	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	700 – 1.200
		Kec. Solokan Jeruk	Dataran	671 – 700
5	WP Cicalengka	Kec. Cicalengka	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	667 – 850
		Kec. Nagreg	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	715 – 948
		Kec. Cikancung	Dataran	600 – 1.200
6	WP Cileunyi	Kec. Cileunyi	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	600 – 700
		Kec. Rancaekek	Dataran	608 – 686
7	WP Cimenyan - Cilengkrang	Kec. Cimenyan	Lereng/Punggung Bukit	750 – 1.300
		Kec. Cilengkrang	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	600 – 1.700
8	WP Margaasih- Margahayu	Kec. Margaasih	Dataran	600
		Kec. Margahayu	Dataran	700

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2012



3) Morfologi

Morfologi merupakan pengelompokan bentang alam berdasarkan rona, kemiringan lereng secara umum, dan ketinggiannya pada beberapa satuan morfologi. Satuan morfologi dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian yaitu satuan morfologi daratan, satuan morfologi perbukitan, serta satuan morfologi tubuh gunung/puncak gunung. Berdasarkan klasifikasinya, morfologi Kabupaten Bandung terdiri dari:

-) Darata dengan kelerengan 0-8%
-) Perbukitan Landai dengan kelerengan 8 – 15%
-) Perbukitan Sedang dengan kelerengan 15 – 25%
-) Perbukitan Terjal dengan kelerengan lebih dari 25 – 45%
-) Puncak Gunung dengan ketinggian Gunung Wayang (2.181 mdpl), Gunung Patuha (2.334 mdpl) Kecamatan Cipeundeuy, Gunung Malabar (2.321 mdpl), serta Gunung Papandayan (2.262 mdpl) dan Gunung Guntur (2.249 mdpl)

Tabel II.3 Kondisi Morfologi di Kabupaten Bandung

No	Morfologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Dataran	65.979,18	37,44
2	Perbukitan Landai	23.435,86	13,30
3	Perbukitan Sedang	47.696,83	27,06
4	Perbukitan Terjal	35.188,93	19,97
5	Pegunungan	3.937,87	2,23
	Jumlah	176.238,67	100

Sumber: Interpretasi GIS Peta Ketinggian dan Kelerengan, Bappeda, 2016

4) Geologi

Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang berada dalam Kawasan Cekungan Bandung. Cekungan Bandung merupakan wilayah berbentuk cekungan dengan luas kurang lebih 343.087 Ha. Posisi cekungan ini berada pada *volcanic arc* dan mengisi lembah yang terbentuk diantara dua jalur pegunungan (intra-montane basin) dengan *basement* yang masih merupakan Cekungan Bogor. Cekungan Bandung dikelilingi oleh banyak gunung – gunung dengan elevasi mencapai lebih dari 2.000 m di atas permukaan laut. Bentang alam gunung – gunung yang mengelilingi Cekungan Bandung umumnya berbentuk kerucut gunung api yang menampilkan bentukan fasies sentral (puncak gunung), fasies proksimal (lereng atas), fasies medial (lereng bawah), dan fasies distal (kaki gunung dan dataran). Berikut adalah pegunungan yang mengelilingi Kawasan Cekungan Bandung:

-) Di Utara terdapat Bukit Tunggu dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta
-) Di Selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m, dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Garut
-) Di bagian Barat terdapat sederetan intrusi andesit dan dasit yang membentuk punggung – punggung tidak teratur
-) Di bagian Timur diapit oleh Gunung Krenceng dan Gunung Mandalawangi

Cekungan Bandung dan sekitarnya tersusun oleh batuan gunung api sehingga sumber daya geologinya berupa energi, lingkungan, dan mineral serta yang berasal dari kegiatan gunung api. Hingga saat ini sumber daya energi yang telah dimanfaatkan dan melewati tahap eksplorasi adalah energi air (PLTA Saguling) dan panas bumi (Lapangan Darajat, Kamojang, Wayang – Windu, Patuha). Litologi yang menyusun Kawasan Cekungan Bandung adalah aluvium, endapan danau, batuan sedimen, batuan gunung api dan batuan intrusi. Berdasarkan pada ukuran butir dan teksturnya, bahan permukaan yang membentuk Kawasan Cekungan Bandung adalah lanau



pasir lempungan, lanau, pasir lanauan, lanau lempungan, lanau pasiran, lanau lempung berdebu, breksi, dan lava.

5) Hidrologi

Dari segi hidrologi, Kabupaten Bandung terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu aquifer dengan aliran melalui ruang antar butir, aquifer dengan aliran melalui celah dan ruang antar butir, dan aquifer dengan aliran melalui rekahan, kekar, saluran, dan rongga. Dilihat dari persentasenya, aquifer paling besar yang ada di Kabupaten Bandung adalah jenis aquifer dengan aliran melalui celah dan ruang antar butir dengan nilai persentase sebesar 63,16% dari seluruh total jenis aquifer. Aquifer dengan aliran melalui ruang antar butir adalah sebesar 17,98% dan aquifer dengan aliran melalui rekahan, kekar, saluran dan rongga persentasenya adalah sebesar 18,85%.

Tabel II.4 Produktivitas Aquifer di Kabupaten Bandung

No	Jenis Aquifer dan Produktifitasnya	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Dengan aliran melalui ruang antar butir		
	Produktif sedang dengan penyebaran luas	31.099,95	17,65
	Produktif sedang dengan penyebaran setempat	580,64	0,33
2	Dengan aliran melalui celah dan ruang antar butir		
	Produktif tinggi	2.563,28	1,45
	Produktif sedang	41.476,86	23,53
	Setempat akuifer produktif	67.281,54	38,18
3	Dengan aliran melalui rekahan, kekar, saluran dan rongga		
	Produktif kecil dan setempat produktif	2.264,01	1,28
	Air tanah langka	30.972,39	17,57
Luas Total (Ha)		176.238,67	100

Sumber: Laporan Akhir Fakta dan Analisis Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk RTRW, 2011

Air permukaan yang ada di Kabupaten Bandung bersumber dari sungai, mata air, danau, dan rawa. Air permukaan tersebut umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sumber air baku, irigasi pertanian, sumber bagi pembangkit tenaga listrik tenaga air, serta sebagai pemasok air untuk kegiatan industri. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24-60 m) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM terutama di wilayah perkotaan. Sementara itu, pemanfaatan air tanah dalam (60-200 m) biasanya dipergunakan untuk keperluan industri, non industri, dan sebagian kecil untuk rumah tangga.

Kabupaten Bandung memiliki 4 danau alam, 3 danau buatan, serta 172 buah sungai dan anak – anak sungai. Sebagian besar sungai di Kabupaten Bandung merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Dilihat dari luas tangkapan DAS, Kabupaten Bandung memiliki 4 Sub DAS yang potensial sebagai sumber air baku antara lain Sub DAS Citarik, Sub DAS Cisarea, Sub DAS Cisangkuy, dan Sub DAS Ciwidey. Panjang sungai DAS Citarum adalah 279 km dengan luas DAS mencapai 6.617 km² (Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Citarum, 2016).

Tabel II.5 Kondisi Sub DAS Citarum di Kabupaten Bandung

SUBDAS	Luas (Ha)			Air Limpasan Permukaan (m ³ /detik)	Cakupan Wilayah
	Total	Di Kabupaten Bandung	Di Kabupaten Lain		
Citarik	22.952	17.295	5.657	10,90	Z Kecamatan Cikancung Z Kecamatan Cileunyi Z Kecamatan Cilengkrang Z Kecamatan Bojongsoang Z Kecamatan Cicalengka



SUBDAS	Luas (Ha)			Air Limpasan Permukaan (m ³ /detik)	Cakupan Wilayah
	Total	Di Kabupaten Bandung	Di Kabupaten Lain		
					Z Kecamatan Nagreg Z Kecamatan Rancaekek Z Kecamatan Cimendan
Cirasea	38.110	37.219	891	22,1	Z Kecamatan Kertasari Z Kecamatan Pacet Z Kecamatan Ibum Z Kecamatan Majalaya Z Kecamatan Paseh Z Kecamatan Solokanjeruk Z Kecamatan Ciparay Z Kecamatan Baleendah
Ciwidey	22.169	-	-	12,3	Z Kecamatan Pangalengan Z Kecamatan Cimaung Z Kecamatan Arjasari Z Kecamatan Pamengpeuk Z Kecamatan Banjaran Z Kecamatan Canguang Z Kecamatan Baleendah
Cisangkuy	34.159	-	-	17,7	Z Kecamatan Rancabali Z Kecamatan Ciwidey Z Kecamatan Pasirjambu Z Kecamatan Soreang Z Kecamatan Katapang Z Kecamatan Canguang Z Kecamatan Kutawaringin

Sumber: Laporan Akhir Fakta dan Analisis Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk RTRW, 2011

6) Klimatologi

Kabupaten Bandung merupakan wilayah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson. Rata – rata curah hujan di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 adalah 6,55 mm/hari. Dalam setahun, rata-rata curah hujan di Kabupaten Bandung berkisar antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun dengan curah hujan tertinggi rata-rata terjadi antara Bulan Desember hingga Bulan Maret. Kondisi curah hujan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.6 Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2015

No	Bulan	Curah Hujan (mm)				Rata-rata Hujan (mm/hari)			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1	Januari	168	238	238	271	5,41	7,69	7,69	8,74
2	Februari	233	286	286	127	8,05	10,21	10,21	4,54
3	Maret	162	247	247	371	5,23	7,96	7,96	11,98
4	April	265	314	314	297	8,83	10,46	10,46	9,88
5	Mei	150	233	233	177	4,83	7,51	7,51	5,71
6	Juni	34	98	98	137	1,14	3,26	3,26	4,58
7	Juli	3	109	109	76	0,10	3,53	3,53	2,44
8	Agustus	2	13	13	53	0,05	0,41	0,41	1,71



No	Bulan	Curah Hujan (mm)				Rata-rata Hujan (mm/hari)			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
9	September	43	61	61	*)	1,44	2,04	2,04	*)
10	Oktober	79	138	138	*)	2,53	4,08	4,08	*)
11	November	290	165	165	246	9,66	5,27	5,27	8,21
12	Desember	412	409	409	239	1328	12,96	12,96	7,71

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2017, 2016, 2014

Kondisi topografi Kabupaten Bandung mempengaruhi iklim di Kabupaten Bandung. Iklim di Kabupaten Bandung cenderung sejuk dengan suhu berkisar antara 12°C hingga 24°C dengan kelembaban antara 78% pada musim hujan dan 70% pada musim kemarau.

7) Penggunaan lahan

Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bandung dibagi ke dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan persentase masing – masing kawasan adalah sebesar 21,63% dan 78,37%. Kawasan lindung di Kabupaten Bandung adalah seluas 38.121,77 Ha yang terbagi ke dalam hutan, sungai, danau/waduk, rawa, dan taman. Sementara itu, kawasan budidaya di Kabupaten Bandung adalah seluas 138.116,90 Ha yang dibagi ke dalam sawah, sawah tadah hujan, perkebunan/kebun, kebun campur, industri, tambang, perumahan, institusi, pasar / pertokoan, lapangan golf, stadion / lapangan, bandara, jalan, jalan KA, stasiun/terminal, belukar, rumput, semak, tanah kosong, tegal/ladang. Tabel di bawah ini menunjukkan luas dan persebaran penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Tahun 2011.

Tabel II.7 Penggunaan Lahan Berdasarkan Interpretasi Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Tahun 2011

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
I.	LINDUNG	38.121,77	21,63
1	Hutan	37.290,79	21,16
2	Sungai	441,60	0,25
3	Danau / Waduk	357,40	0,20
4	Rawa	12,72	0,01
5	Taman	19,26	0,01
II.	BUDIDAYA	138.116,90	78,37%
1	Sawah	40.983,84	23,25
2	Sawah Tadah Hujan	10,97	0,01
3	Perkebunan / Kebun	22.577,66	12,81
4	Kebun Campur	8.171,12	4,64
5	Industri	1.408,90	0,80
6	Tambang	37,44	0,02
7	Perumahan / Komplek Perumahan	16.306,68	9,25
8	Institusi	339,70	0,19
9	Pasar / Pertokoan	3,94	0,002
10	Lapngan Golf	122,03	0,07
11	Stadion / Lapangan	26,21	0,01
12	Bandara	67,80	0,04
13	Jalan	3.567,59	2,02
14	Jalan KA	26,77	0,02
15	Stasiun / Terminal	2,44	0,001
16	Belukar	17.696,59	10,04
17	Rumput	52,81	0,03
18	Semak	3.821,50	2,17
19	Tanah Kosong	839,14	0,48



No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
20	Tegal / Ladang	22.053,77	12,51

Sumber: Buku Rencana RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

Berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Bandung yang tertera dalam RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, akan direncanakan penambahan luas kawasan lindung di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2011, luas kawasan lindung di Kabupaten Bandung adalah sebesar 38.121,77 Ha atau 21,63% dari total luas wilayah. Dalam rentang waktu 20 tahun hingga tahun 2036, direncanakan bahwa luasan kawasan lindung di Kabupaten Bandung dapat bertambah menjadi 53.232,99 Ha atau 30,21% dari total luas wilayah. Sementara itu, direncanakan terdapat pengurangan untuk luas kawasan budidaya dari 138.116,90 Ha menjadi 123.005,68 Ha atau sebesar 69,79% dari total luas wilayah.

Tabel II.8 Alokasi Luas Kawasan Lindung dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bandung

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Cagar Alam	15.157,42	8,6
2	Taman Buru	1.043,45	0,59
3	Taman Hutan Raya	230,21	0,13
4	Taman Wisata Alam	549,18	0,31
5	Sempadan	1.198,26	0,68
6	Hutan Lindung	34.204,02	19,41
7	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	339,79	0,19
8	Perairan	483,92	0,27
9	Kolam Retensi	26,75	0,02
Total		53.232,99	30,21

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

Tabel II.9 Alokasi Luas Kawasan Budidaya dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bandung

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Hutan Produksi	4.323,19	2,45
2	Hutan Produksi Terbatas	57,01	0,03
3	Tanaman Tahunan / Perkebunan	35.449,37	20,11
4	Hutan Rakyat	913,91	0,52
5	Pertanian Lahan Basah	31.046,74	17,62
6	Pertanian Lahan Kering	8.376,22	4,75
7	Perikanan	573,52	0,33
8	Peternakan	80,07	0,05
9	Kawasan Peruntukan Industri	4.386,00	2,49
10	Pemerintahan / Fasum	488,99	0,28
11	Kawasan Permukiman	33.458,53	18,98
12	Perdagangan / Jasa	3.253,72	1,85
13	Kawasan Hankam	598,41	0,34
Total		123.005,68	69,79

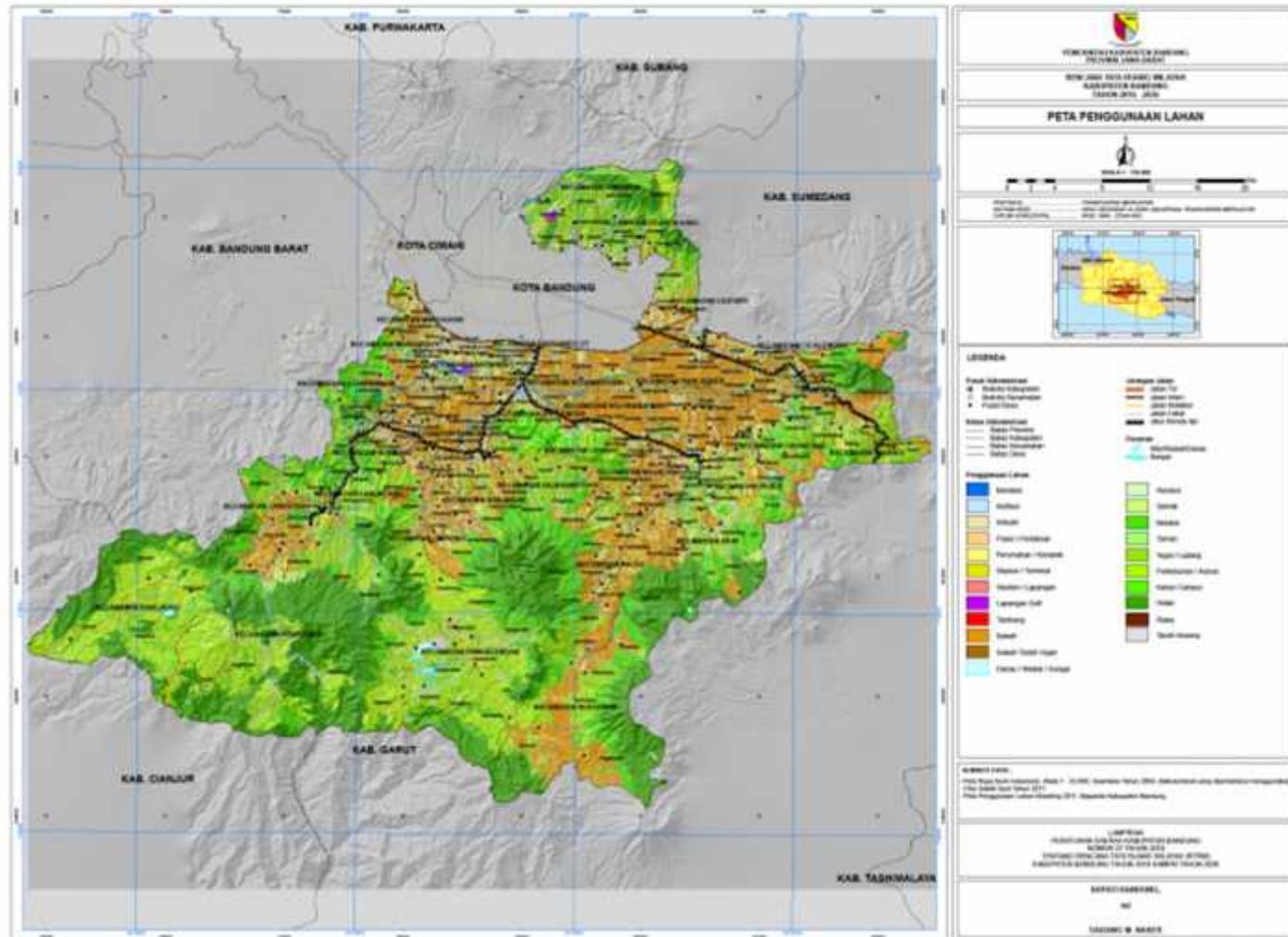
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

Rencana peningkatan kawasan lindung di Kabupaten Bandung dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi arahan nasional terkait kawasan lindung sebesar 30% di wilayah kabupaten. Ketersediaan kawasan lindung dan ruang terbuka di Kabupaten Bandung berpotensi dijadikan sebagai kawasan resapan air dalam rangka menanggulangi bencana khususnya banjir yang ada di Kabupaten Bandung. Pengelolaan potensi kawasan resapan air dengan baik akan mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka sebagai pengendali banjir yang alami di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung sendiri memiliki 5 kategori untuk kawasan resapan air yaitu daerah resapan utama, daerah resapan tambahan, daerah resapan tak berarti,



daerah pelepasan air tanah, dan daerah kedap air. Daerah resapan utama paling banyak tersebar di bagian selatan Kabupaten Bandung diantaranya di Kecamatan Rancabali, Pasirjambu, dan Ciwidey. Sementara itu, daerah kedap air berada di Kecamatan Kutawaringin dan daerah pelepasan air tanah tersebar di Kecamatan Margahayu, Katapang, Bojongsoang, Baleendah, Rancaekek, Solokanjeruk, dan Majalaya. Daerah-daerah tersebut adalah daerah dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi di musim penghujan.

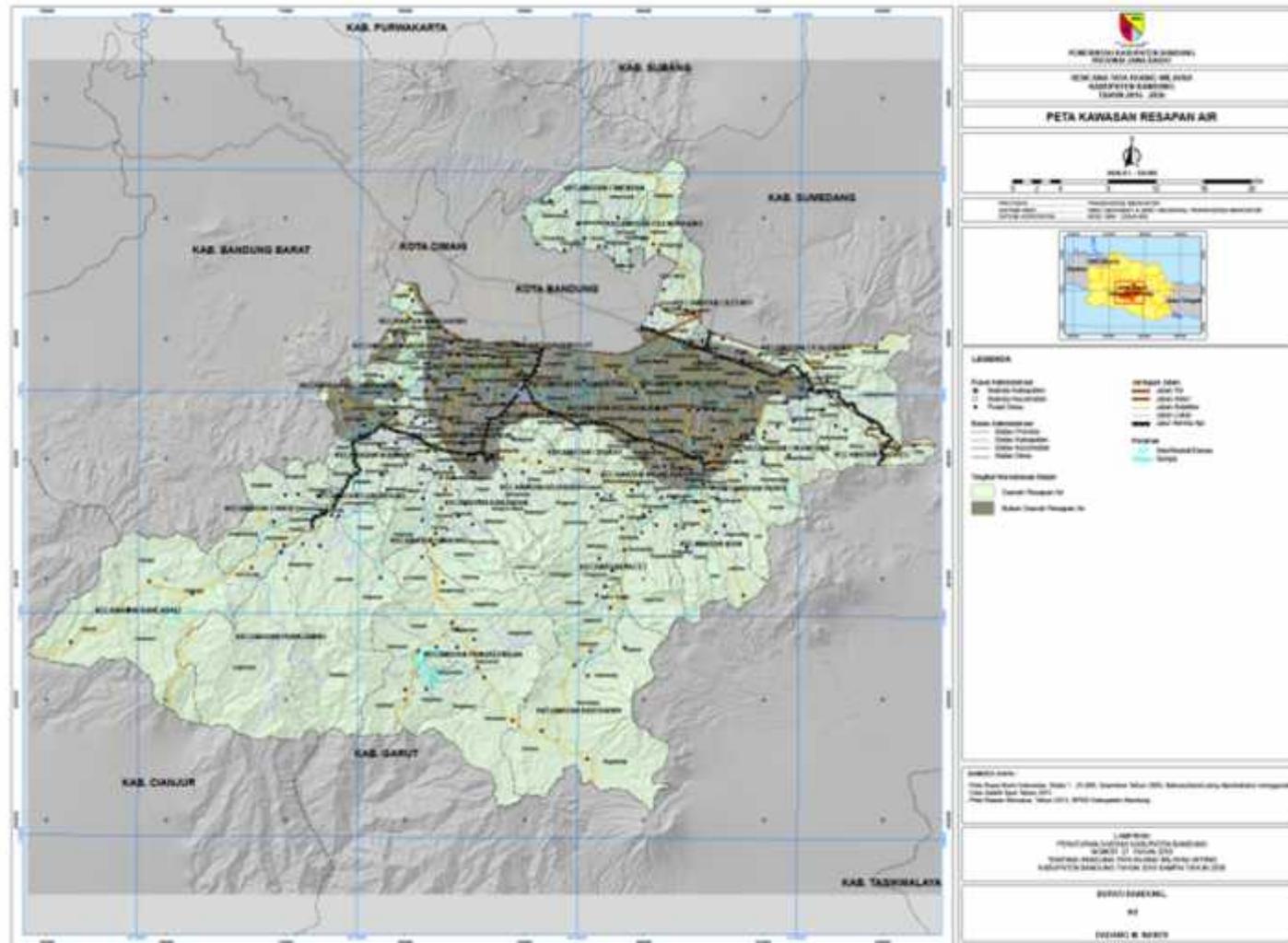
Gambar II.4 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



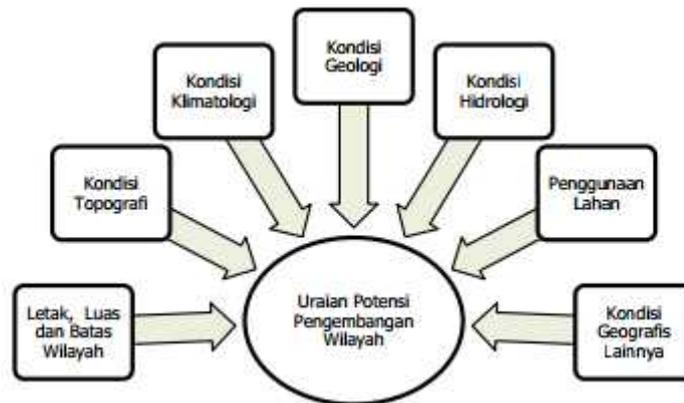
Gambar II.5 Peta Kawasan Resapan Air Kabupaten Bandung



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bandung diarahkan sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap wilayah. Potensi – potensi tersebut dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhinya antara lain letak, luas dan batas wilayah, kondisi topografi, kondisi klimatologi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, penggunaan lahan, serta kondisi geografis lainnya. Faktor – faktor tersebut menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana pola ruang serta rencana pengembangan komoditas di setiap wilayah.



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Potensi kawasan budidaya berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 adalah seluas 123.005,68 Ha atau sebesar 69,79% dari total luas wilayah kabupaten. Sebagian besar dari lahan budidaya tersebut merupakan lahan yang diperuntukkan untuk pertanian. Sebesar 17,62% lahan dialokasikan untuk pertanian lahan basah dan 4,75% dialokasikan untuk pertanian lahan kering. Selain itu, lahan di Kabupaten Bandung juga didominasi oleh peruntukan perkebunan yaitu sebesar 20,11% dari total wilayah. Luasnya alokasi lahan untuk pertanian dan perkebunan tersebut merupakan sebuah potensi yang dapat dikembangkan oleh Kabupaten Bandung untuk mendorong perekonomian.

Tidak hanya dipengaruhi oleh luasan kawasan budidaya, topografi dan bentang alam Kabupaten Bandung telah memperkaya variasi komoditas pertanian di Kabupaten Bandung. Masing – masing wilayah memiliki komoditas yang unik dan unggul sesuai dengan kondisi geografisnya. Komoditas unggulan Kabupaten Bandung ini tidak hanya unggul di tingkat kabupaten saja melainkan juga di tingkat provinsi dan nasional. Bahkan untuk beberapa komoditas sudah mampu dipasarkan ke pasar internasional. Keunggulan tersebut dikarenakan jenisnya dan juga besarnya produksi yang dihasilkan oleh Kabupaten Bandung. Beberapa komoditas pertanian yang menjadi unggulan Kabupaten Bandung antara lain kopi, strawberry, sapi perah dan produk turunannya.

Selain potensi pertanian, Kabupaten Bandung juga memiliki potensi di sektor industri. Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Bandung. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kabupaten Bandung Dalam Angka, pada tahun 2016, jumlah perusahaan di Kabupaten Bandung mencapai 2.293 perusahaan yang terdiri dari perusahaan industri besar sebanyak 462 perusahaan sedangkan industri sedang sebanyak 1.851 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja mencapai 317.558. Kegiatan industri pengolahan ini dilakukan di lahan kawasan budidaya non pertanian khususnya lahan industri. Pada tahun 2011, lahan yang tercatat untuk kegiatan industri mencapai 1.408,88 Ha dengan jumlah unit industri sebanyak 711 industri. Sesuai dengan pedoman RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, kawasan peruntukan industri mengalami peningkatan menjadi 4.386 Ha. Hal ini sejalan dengan semakin pesatnya pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Bandung.



Potensi lain yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung ialah potensi pertambangan dan potensi pariwisata. Kabupaten Bandung memiliki berbagai potensi energi sumber daya terbarukan dan juga berbagai galian tipe B dan tipe C. Berbicara mengenai sektor pariwisata, Kabupaten Bandung memiliki potensi yang sangat banyak baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap wilayah – wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya baik sebagai kawasan pertanian, kawasan industri, kawasan pariwisata, maupun kawasan pertambangan. Identifikasi potensi pengembangan wilayah ini dapat mengoptimalkan potensi – potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung agar dapat menjadi sektor penggerak perekonomian Kabupaten Bandung.

1) Pertanian

a. Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian Lahan Basah

Pengembangan kawasan pertanian lahan basah didasarkan pada pertimbangan kondisi eksisting dan potensi wilayah dengan merujuk pada ketentuan Keppres No. 57/89 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya. Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Bandung tersebar di Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Katapang, Rancabali, Pasirjambu, Ciwidey, Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Pangalengan, Cangkuang, Cimaung, Arjasari, Pameungpeuk, Majalaya, Ciparay, Pacet, Kertasari, Paseh, Ibum, Solokanjeruk, Cicalengka, Nagreg, Cikancung, Cileunyi, Rancaekek, Cimenyang, dan Cilengkrang.

Pertanian Lahan Kering

Pengembangan kawasan pertanian lahan kering didasarkan pada pertimbangan kondisi eksisting (berupa kebun campuran, tegalan, padang rumput, ilalang, dan semak belukar) dan potensi wilayahnya merujuk pada ketentuan Keppres No. 57/89 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya. Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten Bandung tersebar di Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Katapang, Rancabali, Pasirjambu, Ciwidey, Baleendah, Pangalengan, Cangkuang, Arjasari, Pameungpeuk, Ciparay, Pacet, Kertasari, Paseh, Ibum, Cicalengka, Nagreg, Cikancung, Cileunyi, Cimenyan, Cilengkrang, dan Margaasih.

Tabel II.10 Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah dan Pertanian Lahan Kering di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering
1	Kec. Soreang	√	√
2	Kec. Kutawaringin	√	√
3	Kec. Katapang	√	√
4	Kec. Rancabali	√	√
5	Kec. Pasirjambu	√	√
6	Kec. Ciwidey	√	√
7	Kec. Baleendah	√	√
8	Kec. Dayeuhkolot	√	
9	Kec. Bojongsoang	√	
10	Kec. Banjaran		
11	Kec. Pangalengan	√	√
12	Kec. Cangkuang	√	√
13	Kec. Cimaung	√	
14	Kec. Arjasari	√	√
15	Kec. Pameungpeuk	√	√
16	Kec. Majalaya	√	
17	Kec. Ciparay	√	√
18	Kec. Pacet	√	√
19	Kec. Kertasari	√	√



No	Kecamatan	Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering
20	Kec. Paseh	√	√
21	Kec. Ibum	√	√
22	Kec. Solokan Jeruk	√	
23	Kec. Cicalengka	√	√
24	Kec. Nagreg	√	√
25	Kec. Cikancung	√	√
26	Kec. Cileunyi	√	√
27	Kec. Rancaekek	√	
28	Kec. Cimenyan	√	√
29	Kec. Cilengkrang	√	√
30	Kec. Margaasih		√
31	Kec. Margahayu		

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

b. Pertanian Hortikultura

Kawasan hortikultura di Kabupaten Bandung dapat dikembangkan untuk kegiatan kebun campuran mencakup budidaya palawija (antara lain jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan lainnya), sayuran, dan buah-buahan. Berdasarkan potensi pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Bandung, maka rencana pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Bandung meliputi:

- a. Lahan hortikultura yang menjadi bagian kawasan pertanian di bagian selatan Kabupaten Bandung di Kecamatan Pangalengan, Kertasari, Pasirjambu, Cikancung, dan Ciwidey
- b. Pengembangan buah-buahan di Kecamatan Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu, Pangalengan, Cimaung, Arjasari, Kertasari, Pacet, Ibum, dan Paseh
- c. Pengembangan sayuran di Kecamatan Pasirjambu, Rancabali, Ciwidey, Pacet, Kertasari, Arjasari, dan Pangalengan

Tabel II.11 Potensi Unggulan Pertanian Hortikultura di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Komoditas		
		Palawija	Buah-buahan	Sayuran
1	Kec. Soreang			
2	Kec. Kutawaringin			
3	Kec. Katapang			
4	Kec. Rancabali		√	√
5	Kec. Pasirjambu	√	√	√
6	Kec. Ciwidey	√	√	√
7	Kec. Baleendah			
8	Kec. Dayeuhkolot			
9	Kec. Bojongsoang			
10	Kec. Banjaran			
11	Kec. Pangalengan	√	√	√
12	Kec. Canguang			
13	Kec. Cimaung		√	
14	Kec. Arjasari		√	√
15	Kec. Pameungpeuk			
16	Kec. Majalaya			
17	Kec. Ciparay			
18	Kec. Pacet		√	√
19	Kec. Kertasari	√	√	√
20	Kec. Paseh		√	
21	Kec. Ibum		√	
22	Kec. Solokan Jeruk			



No	Kecamatan	Komoditas		
		Palawija	Buah-buahan	Sayuran
23	Kec. Cicalengka			
24	Kec. Nagreg			
25	Kec. Cikancung	√		
26	Kec. Cileunyi			
27	Kec. Rancaekek			
28	Kec. Cimenyan			
29	Kec. Cilengkrang			
30	Kec. Margaasih			
31	Kec. Margahayu			

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

c. Peternakan

Kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan peternakan di Kabupaten Bandung perlu memenuhi beberapa kriteria seperti ketinggian, kelerengan, jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah. Hal ini dilakukan karena pengembangan kawasan peternakan diperuntukan bagi peternakan hewan besar dan padang penggembalaan ternak. Pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Bandung meliputi ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas.

Tabel II.12 Potensi Unggulan Peternakan di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Komoditas			
		Ternak Besar	Ternak Kecil		Unggas
		Sapi	Kambing	Domba	Ayam ras, Ayam buras, Bebek
1	Kec. Soreang	√	√	√	
2	Kec. Kutawaringin	√	√	√	
3	Kec. Katapang				
4	Kec. Rancabali	√			
5	Kec. Pasirjambu	√	√		√
6	Kec. Ciwidey	√	√		
7	Kec. Baleendah			√	
8	Kec. Dayeuhkolot				
9	Kec. Bojongsoang				
10	Kec. Banjaran				√
11	Kec. Pangalengan	√			
12	Kec. Cangkuang	√			
13	Kec. Cimaung	√	√		
14	Kec. Arjasari	√	√		
15	Kec. Pameungpeuk				
16	Kec. Majalaya				√
17	Kec. Ciparay	√	√		
18	Kec. Pacet	√	√	√	
19	Kec. Kertasari	√			
20	Kec. Paseh	√	√	√	
21	Kec. Ibun		√	√	
22	Kec. Solokan Jeruk			√	
23	Kec. Cicalengka	√			√
24	Kec. Nagreg	√			√
25	Kec. Cikancung	√			
26	Kec. Cileunyi	√			
27	Kec. Rancaekek		√	√	√
28	Kec. Cimenyan	√			



No	Kecamatan	Komoditas			
		Ternak Besar	Ternak Kecil		Unggas
		Sapi	Kambing	Domba	Ayam ras, Ayam buras, Bebek
29	Kec. Cilengkrang	√			
30	Kec. Margaasih				
31	Kec. Margahayu				

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

Apabila dilihat berdasarkan jumlah populasinya pada tahun 2015, Kecamatan Pangalengan adalah kecamatan dengan jumlah populasi sapi perah paling banyak dengan total 14.795 sapi perah. Kecamatan Cikancung adalah kecamatan dengan jumlah populasi sapi potong paling banyak dengan total 20.588 sapi potong. Kecamatan Ibun adalah kecamatan dengan jumlah populasi domba paling banyak dengan total 58.951 domba. Kecamatan Paseh adalah kecamatan dengan jumlah populasi kambing paling banyak dengan total 6.837 kambing. Kecamatan Pacet adalah kecamatan dengan jumlah ayam buras paling banyak dengan total 313.027 ayam buras. Terakhir, Kecamatan Ciparay adalah kecamatan dengan jumlah ayam petelur paling banyak dengan total 235.238 ayam petelur.

d. Perkebunan

Sesuai dengan morfologi wilayah dimana sebagian besar wilayah di Kabupaten Bandung merupakan daerah perbukitan, maka komoditas yang menjadi andalan di Kabupaten Bandung antara lain teh, kopi, tembakau, dan cengkeh. Terdapat 3 jenis perkebunan teh di Kabupaten Bandung yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar, dan perkebunan negara. Pada tahun 2016 terdapat peningkatan produksi teh pada perkebunan rakyat dan perkebunan besar sementara produksi teh pada perkebunan negara mengalami penurunan. Pada tahun 2016, luas tanam dan produksi cengkeh mengalami peningkatan dimana luas tanam mencapai 1.024 Ha dan produksi mencapai 535,29 ton untuk bahan mentah dan 133,82 ton untuk hasil olahan. Kecamatan Arjasari merupakan kecamatan dengan luas tanam cengkeh terbesar yaitu 131 Ha. Luas tanam dan produksi tembakau juga mengalami peningkatan yaitu luas tanam mencapai 1.524 Ha dan produksi mencapai 6.810,65 ton untuk bahan mentah dan 1.362,13 ton untuk hasil olahan. Kecamatan Paseh merupakan kecamatan dengan luas tanam tembakau terbesar yaitu 337 Ha. Luas tanam dan produksi kopi juga mengalami peningkatan dengan luas tanam mencapai 10.027 Ha dan produksi mencapai 27.625,11 ton untuk bahan mentah dan 6.906,28 ton untuk hasil olahan. Kecamatan Pangalengan merupakan kecamatan dengan luas tanam kopi terbesar yaitu 2.071 Ha.

Kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sektor perkebunannya ditetapkan berdasarkan luas tanam dan hasil produksi di wilayah tersebut. Sesuai dengan arahan pengembangan kawasan peruntukan perkebunan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan komoditas unggulannya adalah sebagai berikut:

- a. Perkebunan rakyat
 - 1) Cengkeh di Kecamatan Arjasari, Cicalengka, Cikancung, Cileunyi, Cimaung, Nagreg, Pangalengan, Soreang, Kutawaringin
 - 2) Kelapa di Kecamatan Arjasari, Banjaran, Cicalengka, Cikancung, Cileunyi, Ciparay, Canguang, Ibun, Katapang, Nagreg, Paseh, Soreang, Kutawaringin
 - 3) Kopi di Kecamatan Arjasari, Cicalengka, Cikancung, Cileunyi, Cimaung, Nagreg, Pangalengan, Soreang, Kutawaringin
 - 4) Teh di Kecamatan Ciwidey, Kertasari, Pangalengan, Pasirjambu, Cicalengka, Rancabali
 - 5) Tembakau di Kecamatan Cicalengka, Cikancung, Paseh, Nagreg



- b. Perkebunan besar negara
 - 1) Teh di Kecamatan Rancabali, Cimenyan, Pasirjambu, Pangalengan, Kertasari
 - 2) Kina di Kecamatan Rancabali, Cimenyan, Pangalengan, Kertasari
- c. Perkebunan besar swasta
 - 1) Teh di Kecamatan Pasirjambu, Rancabali, Kertasari, Pangalengan
 - 2) Cengkeh di Kecamatan Arjasari

Tabel II.13 Potensi Unggulan Perkebunan di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Komoditas					
		Cengkeh	Kelapa	Kopi	Teh	Tembakau	Kina
1	Kec. Soreang	√	√	√			
2	Kec. Kutawaringin	√	√	√			
3	Kec. Katapang		√				
4	Kec. Rancabali				√		√
5	Kec. Pasirjambu				√		
6	Kec. Ciwidey				√		
7	Kec. Baleendah						
8	Kec. Dayeuhkolot						
9	Kec. Bojongsoang						
10	Kec. Banjaran		√				
11	Kec. Pangalengan	√		√	√		√
12	Kec. Cangkuang		√				
13	Kec. Cimaung	√		√			
14	Kec. Arjasari	√	√	√			
15	Kec. Pameungpeuk						
16	Kec. Majalaya						
17	Kec. Ciparay		√				
18	Kec. Pacet						
19	Kec. Kertasari				√		√
20	Kec. Paseh		√			√	
21	Kec. Ibum		√				
22	Kec. Solokan Jeruk						
23	Kec. Cicalengka	√	√	√	√	√	
24	Kec. Nagreg	√	√	√		√	
25	Kec. Cikancung	√	√	√		√	
26	Kec. Cileunyi	√	√	√			
27	Kec. Rancaekek						
28	Kec. Cimenyan				√		√
29	Kec. Cilengkrang						
30	Kec. Margaasih						
31	Kec. Margahayu						

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

e. Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Bandung seringkali pemanfaatannya bersamaan/ tumpang-sari dengan kegiatan pertanian khususnya pertanian lahan basah dan penggunaan median perairan seperti waduk/situ/sungai. Oleh karenanya, kawasan peruntukan perikanan menjadi bagian dari kegiatan kawasan utamanya yaitu kawasan pertanian. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, peruntukan kawasan perikanan di Kabupaten Bandung direncanakan melalui pengembangan budidaya air tawar pada lahan seluas kurang lebih 573 Ha. Pengembangan kegiatan perikanan di Kabupaten Bandung meliputi:



- a. Intensifikasi budidaya perikanan di Kecamatan Ibum, Majalaya, Ciparay, Pacet, dan Bojongsoang dan pemanfaatan/pengelolaan situ-situ di Kecamatan Pangalengan, Rancabali, Ibum, dan Kertasari
- b. Pengembangan budidaya perikanan di Kecamatan Bojongsoang
- c. Pengembangan budidaya perikanan melalui pembenihan ikan di Kecamatan Ciparay, Pacet, Ibum, dan Majalaya
- d. Kawasan budidaya perikanan melalui pembesaran (kolam air deras) tersebar di Kecamatan Ciwidey, Soreang, Pacet, Banjaran, Cangkuang, Majalaya, dan Ibum
- e. Kawasan pengolahan ikan melalui pendedelan ikan tersebar di Kecamatan Banjaran, Dayeuhkolot, Cileunyi, Bojongsoang, Pameungpeuk, Pacet, Majalaya, Ciparay, dan Rancaekek

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Bandung juga dapat melalui pengembangan Kawasan Minapolitan sesuai dengan potensi kecamatan yang ada. Berikut adalah identifikasi terhadap potensi perikanan masing – masing kecamatan dilihat dari luas dan produksinya.

Tabel II.14 Potensi Unggulan Perikanan di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Komoditas				
		Pembenihan	Kolam Air Tenang	Mina Padi	Kolam Air Deras	Perairan Umum
1	Kec. Soreang			√	√	
2	Kec. Kutawaringin					
3	Kec. Katapang					
4	Kec. Rancabali					√
5	Kec. Pasirjambu					
6	Kec. Ciwidey	√			√	
7	Kec. Baleendah					
8	Kec. Dayeuhkolot					
9	Kec. Bojongsoang		√			
10	Kec. Banjaran				√	
11	Kec. Pangalengan	√				√
12	Kec. Cangkuang				√	
13	Kec. Cimaung	√		√	√	
14	Kec. Arjasari					
15	Kec. Pameungpeuk					
16	Kec. Majalaya		√	√	√	
17	Kec. Ciparay		√	√		
18	Kec. Pacet		√	√	√	
19	Kec. Kertasari	√				
20	Kec. Paseh	√	√	√		
21	Kec. Ibum	√	√	√	√	
22	Kec. Solokan Jeruk			√		
23	Kec. Cicalengka					
24	Kec. Nagreg					
25	Kec. Cikancung					
26	Kec. Cileunyi					
27	Kec. Rancaekek					
28	Kec. Cimenyan					
29	Kec. Cilengkrang					
30	Kec. Margaasih					
31	Kec. Margahayu					

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2017



f. Kehutanan

Kawasan hutan negara yang ada di Kabupaten Bandung dikelola oleh Perhutani dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jabar I. Beberapa tanaman kehutanan yang menjadi unggulan di Kabupaten Bandung antara lain getah pinus, kopi, dan rumput gajah. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Bandung yang memiliki fungsi lindung dan konservatif meliputi:

- a. Hutan produksi Gunung Tilu, Manglayang, Kutawaringin, Pameungpeuk, Baleendah, Arjasari, Paseh, Cimenyan, Cikancung, dan Nagreg
- b. Hutan produksi terbatas di Kecamatan Rancabali, Kertasari, Ibum, Paseh, Pasirjambu, Cimenyan, Nagreg, Cicalengka, Cimaung, dan Pacet

Kabupaten Bandung juga memiliki kawasan hutan rakyat dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Kawasan hutan rakyat tersebut tersebar di Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Pasirjambu, Ciwidey, Pangalengan, Cangkuang, Cimaung, Arjasari, Pameungpeuk, Ciparay, Pacet, Paseh, Ibum, Cicalengka, Nagreg, dan Cimenyan.

2) Pariwisata

Pengembangan pariwisata Kabupaten Bandung dilakukan dengan penetapan kawasan strategis, kawasan andalan, dan kawasan potensial pengembangan pariwisata. Kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kawasan andalan merupakan kawasan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya dengan pengembangan pariwisata. Sementara itu, kawasan potensial pariwisata merupakan kawasan yang memiliki potensi pariwisata untuk dikembangkan di luar kawasan strategis dan kawasan andalan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, Kabupaten Bandung memiliki 19 (sembilan belas) kawasan strategis pariwisata, 5 (lima) kawasan andalan pariwisata, dan 19 (sembilan belas) kawasan potensial pariwisata.



Tabel II.15 Rencana Pengembangan Potensi Kawasan Peruntukan Pariwisata di Kabupaten Bandung

No	Peruntukan Pariwisata	Atraksi/Kegiatan (eksisting)	Rencana	Ket.
1.	Budaya/ Sejarah	Candi Bojongmenje yang dibangun abad ke-7 dan ke-8	Wisata sejarah	Kawasan Potensial Situs Bojong Menje
		Situs Gunung Padang Ciwidey, tempat seni budaya, kuliner tradisional, perkebunan, dan tempat memproduksi berbagai macam terong belanda (dodol terong dan puding terong)	Pengembangan Situs Gunung Padang Ciwidey, tempat seni budaya, kuliner tradisional, perkebunan, agrowisata	Kawasan Strategis Pariwisata Desa Wisata Rawabogo
		Pusat berbagai kesenian Sunda (wayang golek, lukisan, tari-tarian, pencak silat, dan lain-lain). Wisatawan tidak hanya dapat melihat pementasan namun juga bisa berbelanja dan mempelajari kesenian. Terdapat pula wisata alam Gentong dimana wisatawan dapat menikmati pemandangan yang indah	Pusat berbagai wisata budaya seni Sunda	Kawasan Strategis Jelekong
		Rumah adat sunda yang menyimpan benda-benda pusaka/perkakas sunda buhun seperti Kujang, Pedang, Keris, Tumbak, Sekin dan lainnya. Rutin mengadakan ritual adat budaya seperti ngebakeun pada tanggal 12 Mulud	Wisata sejarah budaya adat Sunda	Kawasan Strategis Situs Bumi Alit Kabuyutan
		Wisata sejarah rumah villa, saung peristirahatan dan kuburan Boscha	Wisata sejarah Boscha	Kawasan Strategis Villa Bosscha
		Kesenian tradisional daerah, produksi makanan khas (opak, kripik peuyeum)	Wisata budaya dan kuliner	Kawasan Strategis Desa Wisata Laksana
		Budaya masyarakat tradisional	Wisata budaya tradisional	Kawasan Andalan Kampung Mahmud
		Situs	Situs	Kawasan Andalan Situs Sumur Bandung Lagadar
		Rumah adat Cikondang, adat istiadat budaya masih kental, situs Batu Eon	Wisata budaya Desa Lamajang (mengingat dan berinteraksi dengan masyarakat di <i>replica</i>)	Kawasan Potensial Desa Wisata Lamajang
		Peninggalan sejarah kerajaan Kendan yang telah ada sejak tahun 536 Masehi, yang berkembang menjadi kerajaan besar bernama Galuh pada tahun 612 Masehi	Peninggalan sejarah kerajaan Kendan yang telah ada sejak tahun 536 Masehi, yang berkembang menjadi kerajaan besar bernama Galuh pada tahun 612 Masehi	Kawasan Potensial Situs Batu Kerajaan Kendan Nagreg
Desa wisata dengan daya tarik budaya (Kampung Manglayang)	Desa wisata budaya	Kawasan Potensial Desa Wisata Cinunuk		
2.	Alam	Pemandangan alam kawah putih, bentang alam Gunung Patuha	Geowisata, kegiatan ekowisata	Kawasan Strategis Kawah Putih
		Pemandangan alam danau, perkebunan dan pengolahan teh rancabali,	Wisata rekreasi alam	Kawasan Strategis Situ Patengan
		Sauna di kawah berkhasiat, adat istiadat masyarakat yang unik	Budaya tradisional (kehidupan masyarakat dan pengobatan)	Kawasan Strategis Kawah Cibuni
		Wisata alam pemandangan perkebunan teh	Wisata alam pemandangan perkebunan teh	Kawasan Strategis Perkebunan Teh Malabar



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

No	Peruntukan Pariwisata	Atraksi/Kegiatan (eksisting)	Rencana	Ket.
		Wisata alam pemandangan danau	Wisata alam pemandangan danau	Kawasan Strategis Situ Cisanti
		Kawah kereta api, kawah manuk, kawah hujan (untuk pengobatan), kawah kundang dan lain-lain	Geowisata panas bumi	Kawasan Strategis Kawah Kamojang
		Pemandangan alam danau, tracking	Ekowisata	Kawasan Strategis Situ Ciharus
		Bumi perkemahan, penangkaran rusa, bekas kawah purba berupa rawa	Wisata petualangan dan geowisata	Kawasan Strategis Rancaupas
		Wisata olahraga petualangan (arung jeram, paintball, outbond)	Wisata olahraga petualangan (arung jeram, paintball, outbond)	Kawasan Potensial Arung Jeram Cisangkuy
		Bumi Perkemahan	Bumi Perkemahan	Kawasan Potensial Gunung Puntang
		Wisata olahraga petualangan (arung jeram, paintball, outbond)	Wisata olahraga petualangan	Kawasan Potensial Arum Jeram Palayangan
		Pemandangan alam danau, berperahu di sekitar danau	Wisata rekreasi alam	Kawasan Potensial Situ Cileunca
		Pemandangan alam air terjun	Pemandangan alam air terjun	Kawasan Potensial Curug Eti
		Wisata alam, wisata spiritual, kawasan hutan dengan jumlah monyet yg mendiaminya tidak pernah berubah yaitu 40 ekor	Wisata alam, wisata spiritual	Kawasan Potensial Karang Gantungan
		Pemandangan alam air terjun,	Pemandangan air terjun Rehabilitasi karena kondisinya sudah sangat menurun	Kawasan Potensial Curug Cinulang
		Pemandangan alam perbukitan	Pemandangan alam perbukitan	Kawasan Potensial Pasir Serewen
		Budidaya sayuran, seni budaya, peternakan, pelatihan khusus pembudidayaan lebah madu, berada di sekitar lokasi THR Djuanda	Agrowisata sayuran dan wisata alam	Kawasan Potensial Desa Wisata Ciburial
		Pemandangan alam air terjun	Ekowisata air terjun	Kawasan Potensial, Curug Cilengkrang
		Wisata alam perbukitan	Wisata alam perbukitan	Kawasan Potensial Oray Tapa
3.	Buatan	Kuliner, budaya	Pusat Seni dan Budaya, pusat kuliner, MICE	Kawasan Andalan Kota Soreang
		Tempat produksi kopi luwak, aktivitas trekking di kebun salada dan strawberry	Agrowisata kopi luwak dan sayur buah buahan	Kawasan Strategis Desa Wisata Lebakmuncang
		Wisata peternakan kelinci, pertanian (stroberi, seledri, bawang, tomat, kol, dan lain-lain), perikanan, dan kerajinan tangan	Agrowisata edukatif hortikultura dan kerajinan	Kawasan Strategis Desa Wisata Panundaan
		Rekreasi, wisata stroberi petik sendiri, dan agrowisata edukatif (sayuran dan stroberi)	Agrowisata edukatif (sayuran dan stroberi), wisata stroberi petik sendiri, dan rekreasi,	Kawasan Strategis Desa Wisata Alamendah
		Kolam pemandian air panas, bekas kawah purba berupa rawa	Rekreasi dan geowisata	Kawasan Strategis Cimanggu
		Kolam pemandian air panas, perkebunan teh rancabali, wahana permainan alam, arena permainan Walini Adventure	Wisata rekreasi dan kesehatan	Kawasan Strategis Cilawini
		Kolam pemandian air panas	Kolam pemandian air panas	Kawasan Strategis Cibolang



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

No	Peruntukan Pariwisata	Atraksi/Kegiatan (eksisting)	Rencana	Ket.
		Even olahraga tingkat regional dan nasional (terutama sepakbola)	Pusat even olahraga tingkat regional dan nasional (terutama sepakbola) dan rekreasi olahraga masyarakat	Kawasan Andalan Stadion Si Jalak Harupat
		Padang golf dan kolam renang	Padang golf dan kolam renang	Kawasan Andalan Bandung Indah dan Water Park
		Terdapat sejumlah toko yang menjual oleh-oleh khas Kabupaten Bandung di jalur utama lintas kota/kabupaten	Pusat oleh-oleh yang lebih tertata	Kawasan Potensial Pusat Oleh-Oleh Nagreg
		Lokasi hiking, tracking (kegiatan-kegiatan lintas alam), situs batu dengan bentuk seperti tapal kuda	Wisata petualangan tracking pegunungan	Kawasan Potensial Batu Kuda
		Wisata pemandangan kota (city sightseeing), wisata kuliner	Wisata pemandangan kota (city sightseeing), dan wisata kuliner yang ramah lingkungan	Kawasan Potensial Caringin Tilu
		Terdapat banyak tempat makan dan minum, mulai dari makanan tradisional sampai modern, terdapat hotel berbintang yang memiliki fasilitas MICE	Pusat wisata kuliner dan MICE	Kawasan Potensial Kawasan Kuliner Cimenyan

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



3) **Industri**

Kawasan peruntukan industri yang telah berkembang di Kabupaten Bandung sebagian besar berlokasi di wilayah selatan Kabupaten Bandung seperti di Kecamatan Margaasih, Katapang, Dayeuhkolot, Pameungpeuk, Baleendah, Bojongsoang, Solokanjeruk, Banjaran, Arjasari, Cileunyi, Majalaya, Paseh, Cikancung, Rancaekek, Cicalengka, Margahayu, Kutawaringin, dan Ibum. Jenis industri yang banyak berkembang adalah industri rumah tangga seperti pengolahan makanan dengan karakteristik industri yang tidak menggunakan banyak air. Pada RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, telah ditetapkan kawasan industri atau zona industri yang berpotensi dikembangkan untuk kegiatan perindustrian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu lingkungan dan mengurangi beban pencemaran dari masing – masing industri. Kawasan yang berpotensi bagi peruntukan industri yang ada di Kabupaten Bandung antara lain:

- a. Kawasan peruntukan industri besar, terdapat di Kecamatan Katapang, Banjaran, Pameungpeuk, Baleendah, Dayeuhkolot, Majalaya, Ciparay, Rancaekek, Cicalengka, Cikancung, dan Solokanjeruk
- b. Kawasan peruntukan industri menengah, terdapat di Kecamatan Arjasari, Ciamung, Ibum, Pacet, dan Margaasih
- c. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung

4) **Pertambangan**

Sumberdaya mineral yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Bandung diantaranya sumber daya mineral / bahan galian berupa galian B (emas) dan sumber daya galian berupa galian C (andesit dan tanah urug). Potensi kawasan pertambangan di Kabupaten Bandung meliputi:

1. Keberadaan sumberdaya mineral di Kabupaten Bandung adalah berupa andesit, tanah urug dan emas yang tersebar di Kecamatan Margaasih, Baleendah, Nagreg, Kutawaringin, Pameungpeuk, dan Banjaran (sumber: RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025)
2. Potensi bahan galian yang utama di Kabupaten Bandung terdiri dari andesit dengan total kandungan 13.573 ton dan tanah urug di Ciparay dan Ciwidey, sedangkan kandungan trass terbesar terdapat di Kecamatan Cililin dengan 1.563 juta ton (sumber: Laporan Antara Review RTRW Kab. Bandung Tahun 2005, Bappeda Tahun 2007)
3. Bahan galian B (emas) atau pertambangan emas berada di Desa Cibodas dan Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin yang merupakan pertambangan rakyat
4. Potensi lainnya (Buku Rencana RTRW Kabupaten Bandung 2016-2036) meliputi:
 - a. Tambang andesit di Kecamatan Baleendah, Cangkuang, Cicalengka, Cikancung, Cileunyi, Cimenyan, Ciparay, Margaasih, Nagreg, Pacet, Pameungpeuk, Pangalengan, Rancabali, Rancaekek, Soreang, dan Kutawaringin
 - b. Tambang kaolin di Kecamatan Cicalengka
 - c. Tanah urug di Kecamatan Cicalengka, Soreang, dan Kutawaringin
 - d. Tambang tras di Kecamatan Cicalengka, Nagreg, Pacet, dan Pasirjambu
 - e. Tambang pasir di Kecamatan Cikancung, Nagreg, Pacet, Paseh, Soreang, dan Kutawaringin
 - f. Tambang obsidian di Kecamatan Cikancung, Nagreg, dan Pangalengan
 - g. Tambang lempung di Kecamatan Ciparay, Margaasih, Pacet, Solokanjeruk, dan Kutawaringin
 - h. Tambang tufa di Kecamatan Nagreg
 - i. Gamping di Kecamatan Kutawaringin
 - j. Pasir baru di Kecamatan Soreang dan Kutawaringin



2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi bentang alam Kabupaten Bandung yang merupakan dataran tinggi dan berbentuk cekungan menjadi muara bagi anak-anak sungai. Hal ini mengakibatkan Kabupaten Bandung rentan terhadap bencana alam baik berupa banjir, longsor, erosi, dan bencana lainnya. Berdasarkan data dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Kabupaten Bandung menduduki peringkat ke 4 (empat) tingkat rawan bencana diantara 494 kabupaten yang ada di Indonesia (Indeks Rawan Bencana Indonesia, 2011). Sebanyak 26 dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung termasuk ke dalam kecamatan yang rawan terjadi bencana alam (BPBD Kabupaten Bandung, 2017).

Beberapa faktor telah meningkatkan kerentanan bencana alam di Kabupaten Bandung. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bandung baik dari pertanian dan daerah resapan menjadi permukiman atau dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian musiman telah menyebabkan tingginya sedimentasi, banjir, pergerakan tanah (longsor), erosi, dan bertambahnya lahan kritis di Kabupaten Bandung. Adanya permukiman warga yang berlokasi di daerah perbukitan semakin meningkatkan kerentanan bencana longsor. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukkan khususnya pemanfaatan lahan untuk pertanian dan daerah perbukitan dengan tingkat kemiringan tertentu telah berkontribusi pada tingginya tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Bandung. Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan tersebut, khususnya beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, telah menyebabkan terganggunya sistem jaringan irigasi dan drainase. Kawasan tersebut merupakan daerah pelepasan air tanah dimana air tidak dapat terserap. Akibatnya, timbul genangan dan banjir di beberapa titik terutama di kawasan permukiman seperti banjir di Cieunteung – Baleendah, Dayeuhkolot, serta jalan terusan Kopo.

Kecamatan dengan kerentanan tinggi terhadap banjir adalah Kecamatan Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan Kecamatan Baleendah. Sementara kecamatan dengan luas kawasan rawan paling besar adalah Kecamatan Rancaekek dengan total 1.965,97 Ha diikuti oleh Kecamatan Bojongsoang dengan 1.799,72 Ha. Kecamatan yang rawan terhadap bencana gempa bumi dengan resiko tinggi antara lain Kecamatan Rancabali, Pasirjambu, Pangalengan, Cimaung, Banjaran, Ibum, Cikancung, Cicalengka, serta sebagian Kecamatan Rancaekek. Kecamatan lainnya berada pada tingkat kerentanan gempa dengan status menengah. Kecamatan Pasirjambu dan Arjasari merupakan kecamatan dengan luasan rawan gerakan tanah paling luas dibandingkan kecamatan lainnya. Kecamatan dengan bahaya gunung berapi di Kabupaten Bandung masih berada pada zona I dan zona II dimana tingkat kerentanannya bukan paling tinggi. Kecamatan yang berada di zona I bahaya gunung berapi antara lain Kecamatan Kertasari, Ibum, dan Paseh. Sementara kecamatan yang berada di zona II adalah Kecamatan Kertasari dan sebagian kecil daerah di Kecamatan Ibum dan Paseh. Terakhir adalah kecamatan – kecamatan dengan tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi yaitu hanya terdapat di sebagian kecil di daerah di Kecamatan Rancabali dan Pasirjambu. Berikut adalah kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Bandung, diantaranya:

- J Kawasan rawan banjir di Kecamatan Margaasih, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Baleendah, Rancaekek, Pameungpeuk, Banjaran, Ciparay, Majalaya, dan Cicalengka
- J Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kecamatan pangalengan, Banjaran, Cimaung, Kertasari, dan Cilengkrang
- J Kawasan rawan bencana aliran lahar di Kecamatan Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan, Ciwidey, Pasirjambu, Rancabali, dan Kertasari
- J Kawasan rawan bencana puting beliung di Kecamatan Soreang, Pangalengan, Bojongsoang, Baleendah, Margaasih, Katapang, Cicalengkap, Cileunyi, dan Nagreg
- J Kawasan rawan bencana kekeringan di wilayah Kecamatan Rancabali, Kertasari, dan Cilengkrang



Berdasarkan hasil interpretasi terhadap peta Daerah Rawan Bencana Bappeda Kabupaten Bandung, sebaran dan luas daerah rawan bencana di Kabupaten Bandung dapat dirinci pada tabel di bawah ini.

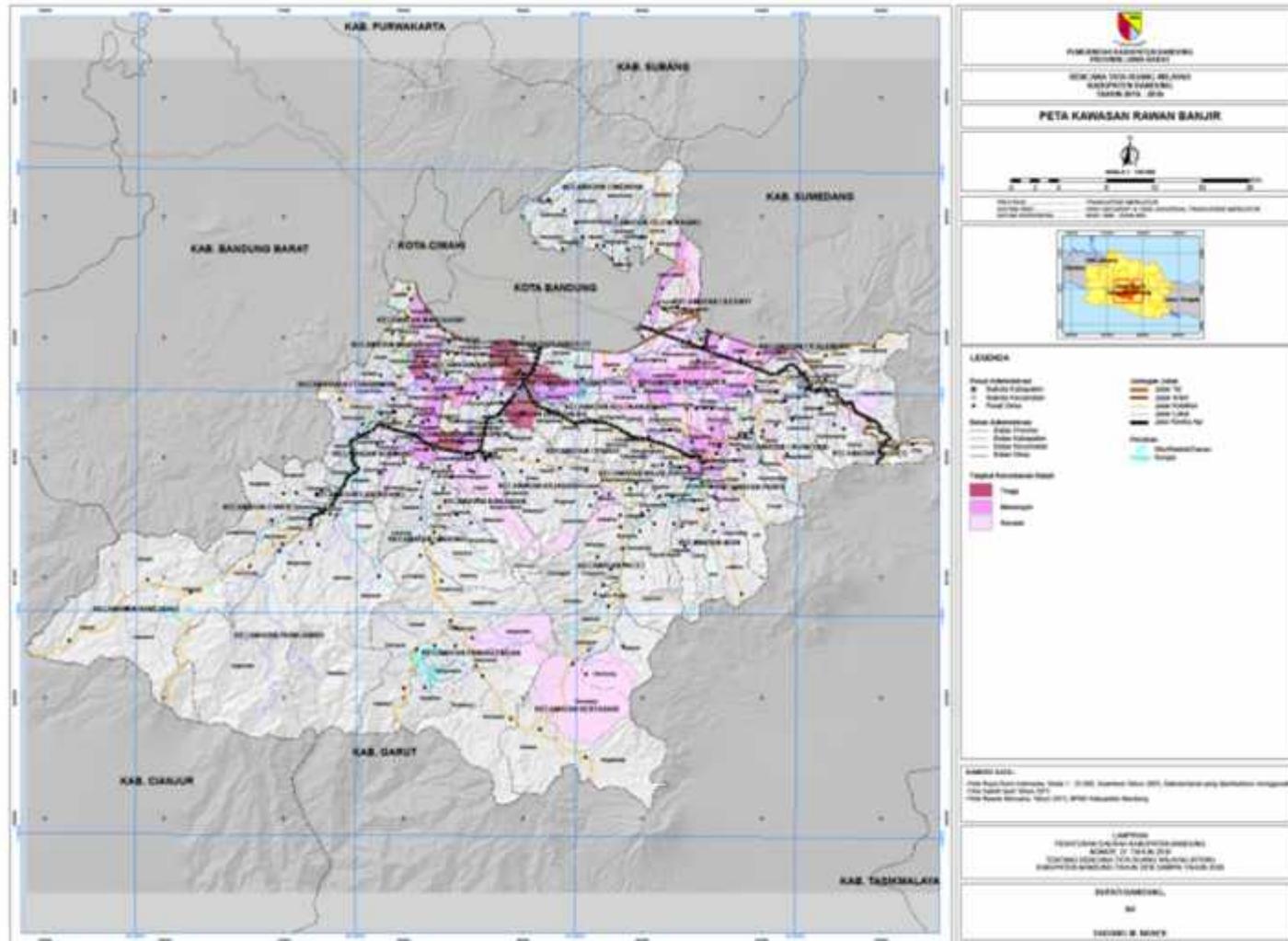
Tabel II.16 Daerah Rawan Bencana Kabupaten Bandung Tahun 2013

No	Kecamatan	Rawan Banjir	Rawan Gerakan Tanah	Rawan Lintasan Lahar	Tanah Pondasi Buruk	Luas (ha)
1	Soreang	-	660,30	-	-	660,30
2	Kutawaringin	-	1.175,90	-	-	1.175,90
3	Katapang	-	-	-	-	-
4	Ciwidey	-	3.602,55	356,95	-	3.959,50
5	Pasirjambu	-	4.009,41	1.387,37	-	5.396,78
6	Rancabali	-	584,06	1.131,07	-	1.715,13
7	Baleendah	1.514,37	494,27	-	-	2.008,64
8	Dayeuhkolot	272,38	-	-	-	272,38
9	Bojongsoang	1.799,72	-	-	837,85	2.637,57
10	Banjaran	-	1.682,89	-	-	1.682,89
11	Pameungpeuk	36,27	2,02	-	-	38,29
12	Cangkuang	-	1.028,68	-	-	1.028,68
13	Arjasari	-	4.170,00	-	-	4.170,00
14	Cimaung	-	2.800,56	-	-	2.800,56
15	Pangalengan	-	213,09	-	-	213,09
16	Majalaya	-	159,33	-	-	159,33
17	Ciparay	797,28	1.633,21	-	-	2.430,49
18	Solokanjeruk	1.123,11	-	-	567,66	1.690,77
19	Pacet	-	1.830,38	-	-	1.830,38
20	Kertasari	-	-	1.607,32	-	1.607,32
21	Paseh	373,16	823,77	-	128,44	1.325,37
22	Ibun	-	203,53	-	-	203,53
23	Cileunyi	22,10	562,56	211,94	347,71	1.144,31
24	Rancaekek	1.965,97	-	-	2.581,35	4.547,32
25	Cicalengka	-	1.559,08	-	440,05	1.999,13
26	Nagreg	-	1.313,95	-	-	1.313,95
27	Cikancung	71,05	574,58	-	631,34	1.276,97
28	Margahayu	-	-	-	-	-
29	Margaasih	-	-	-	-	-
30	Cilengkrang	-	1.297,62	252,14	-	1.549,76
31	Cimendan	-	3.951,93	78,68	-	4.030,61
Jumlah (Ha)		7.975,41	34.333,67	5.025,47	5.534,40	52.868,95
Prosentase		15,09	64,94	9,51	10,47	100,00

Sumber: Peta Rawan Bencana, BPBD Kabupaten Bandung, 2013



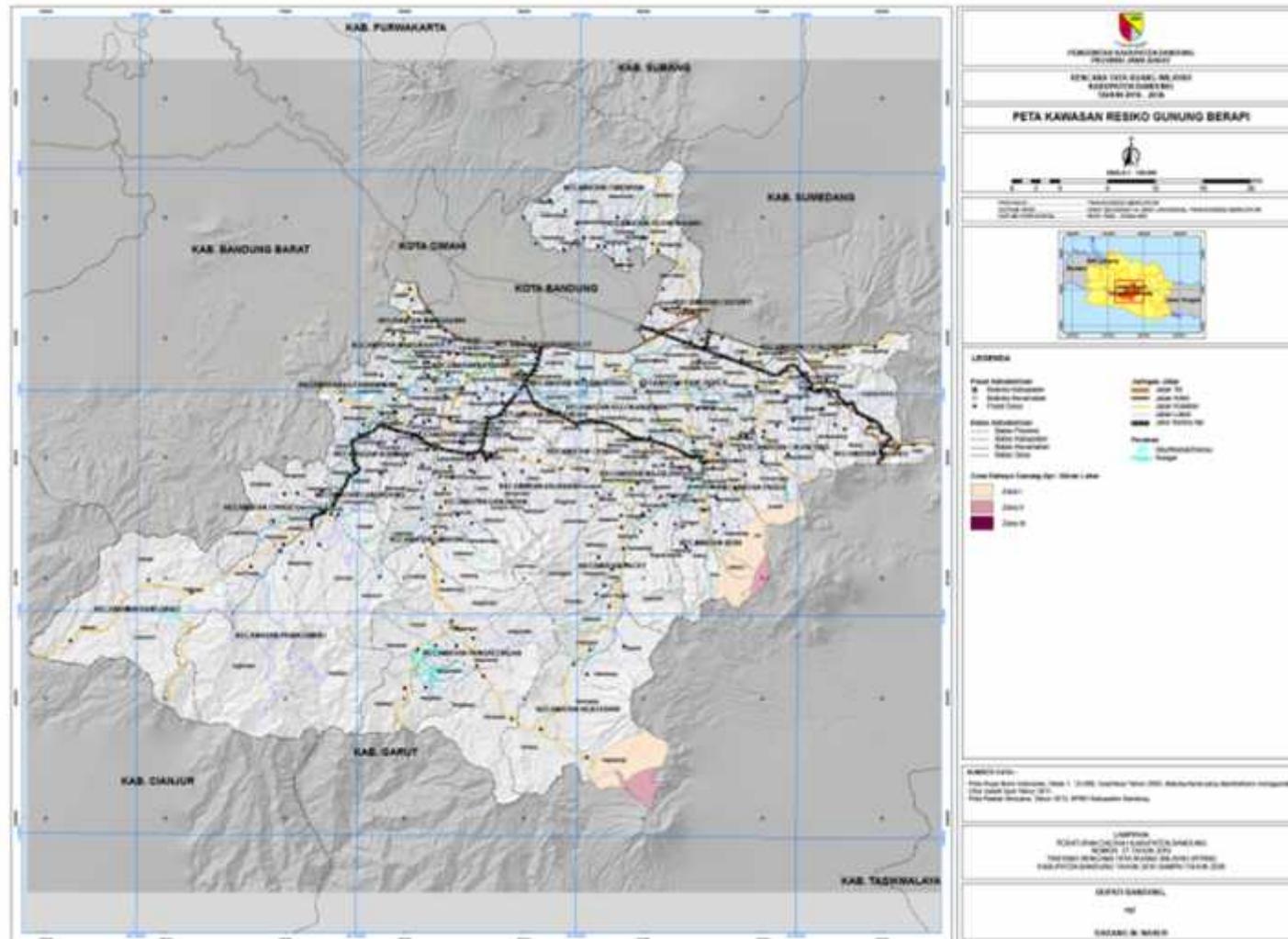
Gambar II.6 Peta Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bandung



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



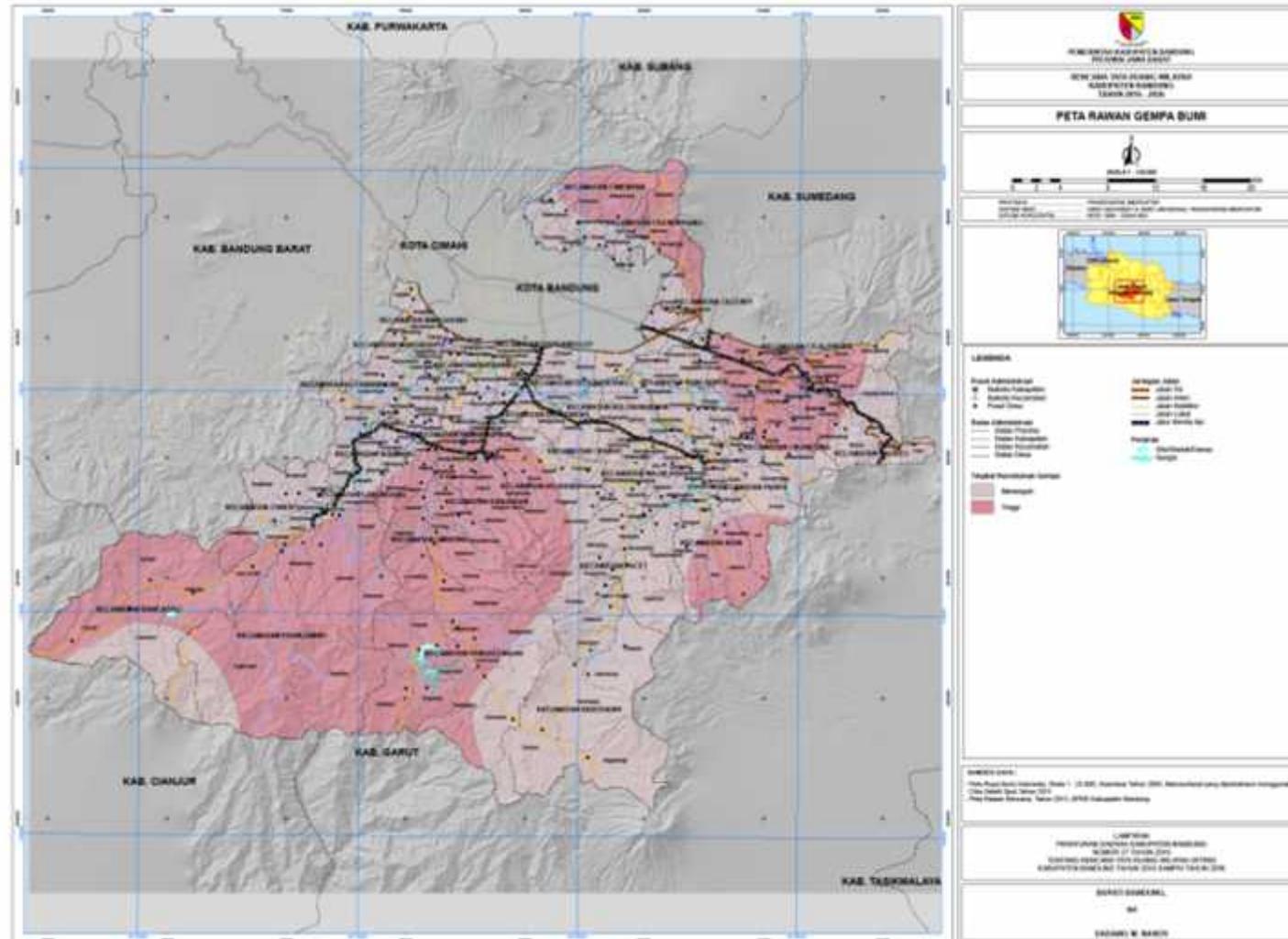
Gambar II.7 Peta Kawasan Resiko Gunung Berapi Kabupaten Bandung



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



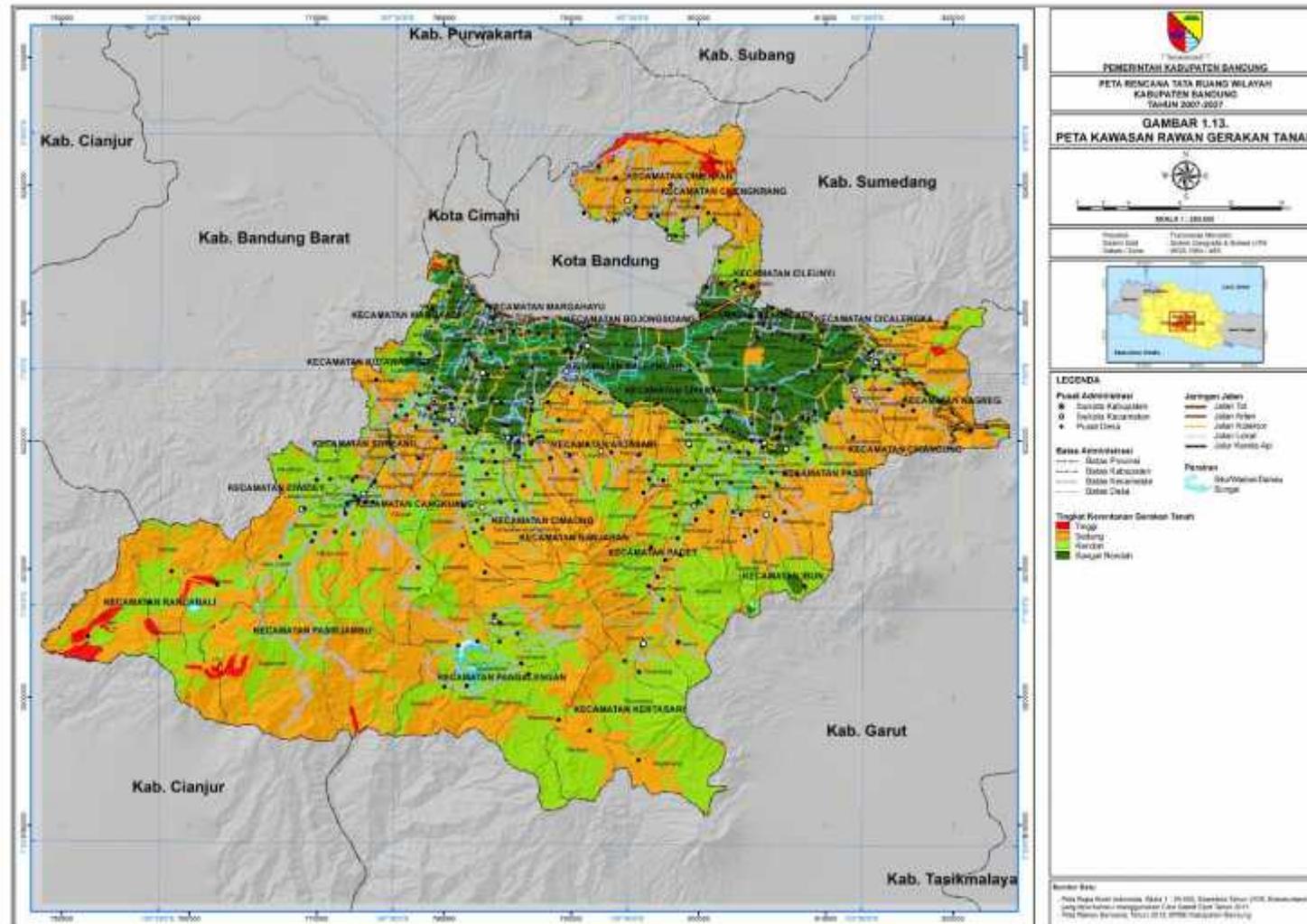
Gambar II.8 Peta Rawan Gempa Bumi Kabupaten Bandung



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



Gambar II.9 Peta Rawan Gerakan Tanah Kabupaten Bandung

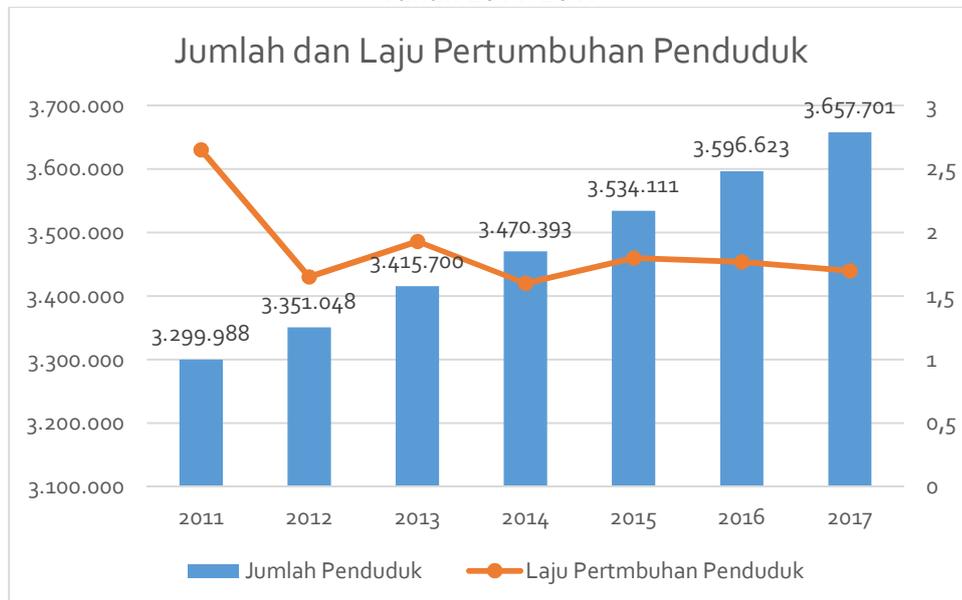


Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

2.1.4 Aspek Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung menempati urutan kedua jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2017 mencapai 3.657.701 jiwa dengan komposisi penduduk laki – laki berjumlah 1.853.715 jiwa dan perempuan 1.803.986 jiwa. *Sex ratio* Kabupaten Bandung adalah 102,86 yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki – laki. Tren jumlah penduduk di Kabupaten Bandung selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Bandung hanya sebesar 3.299.988 jiwa. Namun, apabila dilihat dari laju pertumbuhannya, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung fluktuatif dari tahun 2011-2017. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2017 adalah sebesar 1,70% per tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2012 yaitu 1,65%. Meskipun tren laju pertumbuhan penduduk cenderung naik turun dari tahun 2011 hingga 2015, mulai terdapat penurunan laju pertumbuhan penduduk antara tahun 2015 hingga 2017.

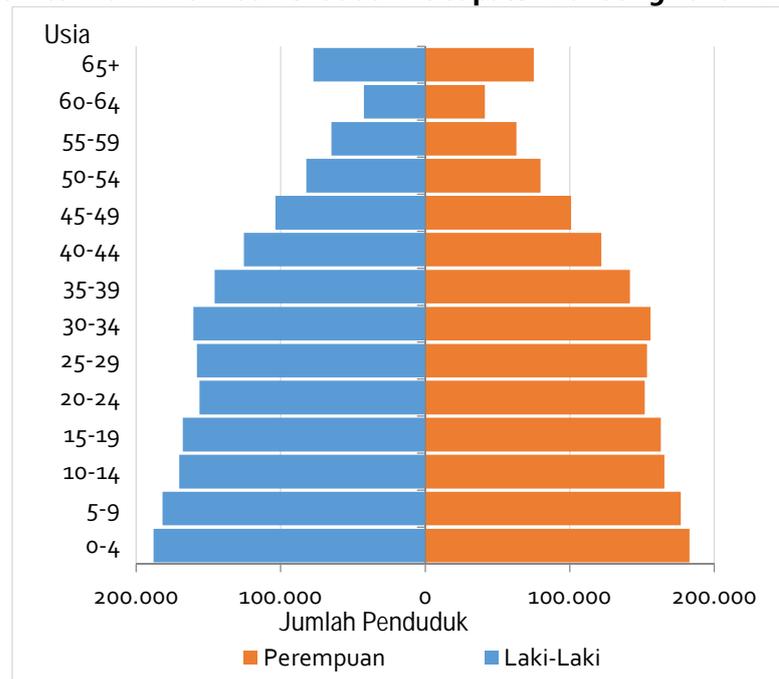
Gambar II.10 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2011-2017



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Ditinjau berdasarkan gender, penduduk Kabupaten Bandung memiliki struktur gender yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga ditunjukkan oleh sex ratio yang hanya sebesar 102,86. Pada tahun 2017, persentase jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah sebesar 50,67% dan persentase jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan adalah sebesar 49,33%. Apabila ditinjau berdasarkan struktur usia, populasi penduduk di Kabupaten Bandung didominasi oleh penduduk usia produktif. Komposisi penduduk Kabupaten Bandung berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dapat dilihat pada piramida penduduk berikut.

Gambar II.11 Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2016



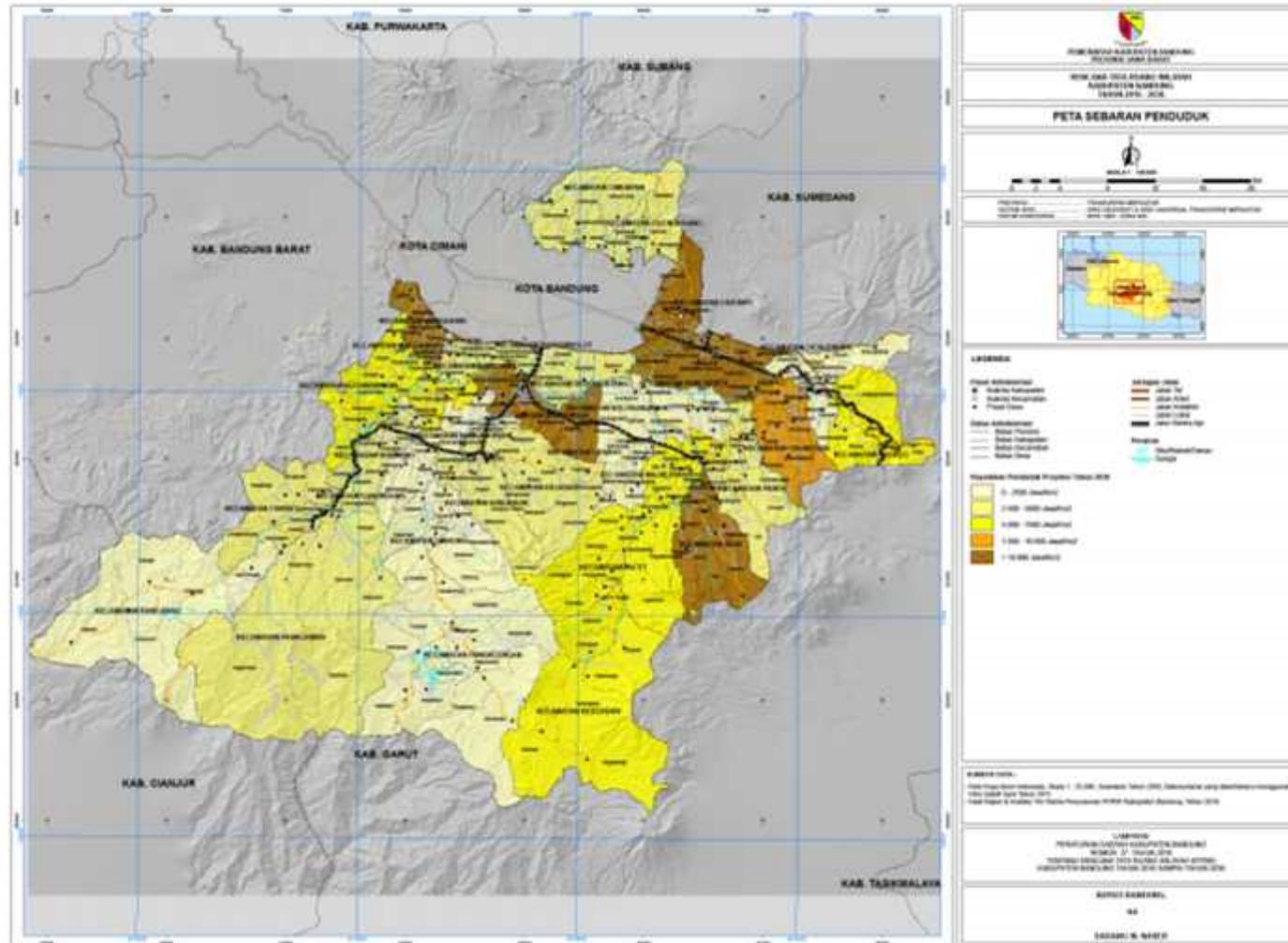
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2017

Dengan luas wilayah sebesar 1.762,4 km², rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2015 adalah sebanyak 2.075 jiwa per km². Dibandingkan dengan kepadatan penduduk di tahun 2011, terdapat peningkatan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2011 adalah 1.872 jiwa/km². Selama kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat peningkatan kepadatan penduduk sebesar 9%. Kecamatan Margahayu merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu sebesar 12.405 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Dayeuhkolot dengan 11.021 jiwa/km². Sementara itu, Kecamatan Rancabali adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk yang paling rendah yaitu sebesar 346 jiwa/km².

Secara spasial, dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung terkonsentrasi di bagian utara kabupaten terutama di kecamatan – kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung seperti Kecamatan Margahayu, Margaasih, Dayeuhkolot, dan Cileunyi. Sementara itu, wilayah yang jauh dari pusat kota seperti Kecamatan Rancabali, Pasirjambu, Kertasari, dan Pangalengan memiliki kepadatan penduduk yang rendah.



Gambar II.12 Peta Persebaran Penduduk Kabupaten Bandung



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



Tabel II.17 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012-2017

Tahun	Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah	%	LPP (%)	Dependency Ratio (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
		Muda (0-14)	Produktif (15-64)	Tua (65+)					
2012	Laki-laki	510.482	1.122.776	70.277	1.703.535	50,84			
	Perempuan	488.140	1.080.000	79.373	1.647.513	49,16			
	Jumlah	998.622	2.202.776	149.650	3.351.048	100	1,55	52,13	1.901
	%	29,80	65,73	4,47					
2013	Laki-laki	501.497	1.130.846	80.496	1.712.839	50,14			
	Perempuan	498.575	1.124.258	80.028	1.702.861	49,86			
	Jumlah	1.000.072	2.255.104	160.524	3.415.700	100	1,93	51,47	1.938
	%	29,28	66,02	4,70					
2014	Laki-laki	490.073	1.188.363	83.024	1.761.460	50,76			
	Perempuan	469.576	1.147.222	92.135	1.708.933	49,24			
	Jumlah	959.649	2.335.585	175.159	3.470.393	100	1,60	48,59	1.963
	%	27,65	67,30	5,05					
2015	Laki- Laki	534.003	1.189.512	69.349	1.792.864	50,73			
	Perempuan	512.389	1.148.918	79.941	1.741.248	49,27			
	Jumlah	1.046.392	2.338.430	149.290	3.534.112	100	1,8	51,13	2.005
	%	29,61	66,17	4,22					
2016	Laki- Laki	539.932	1.206.507	77.269	1.823.708	50,71			
	Perempuan	524.894	1.172.904	75.117	1.772.915	49,29			
	Jumlah	1.064.823	2.379.411	152.386	3.596.623	100	1,77	51,16	2.041
	%	29,60	66,16	4,24					
2017	Laki- Laki				1.853.715	50,67			
	Perempuan				1.803.986	49,33			
	Jumlah				3.657.701	100	1,70	41,79	2.075
	%								

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2017

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

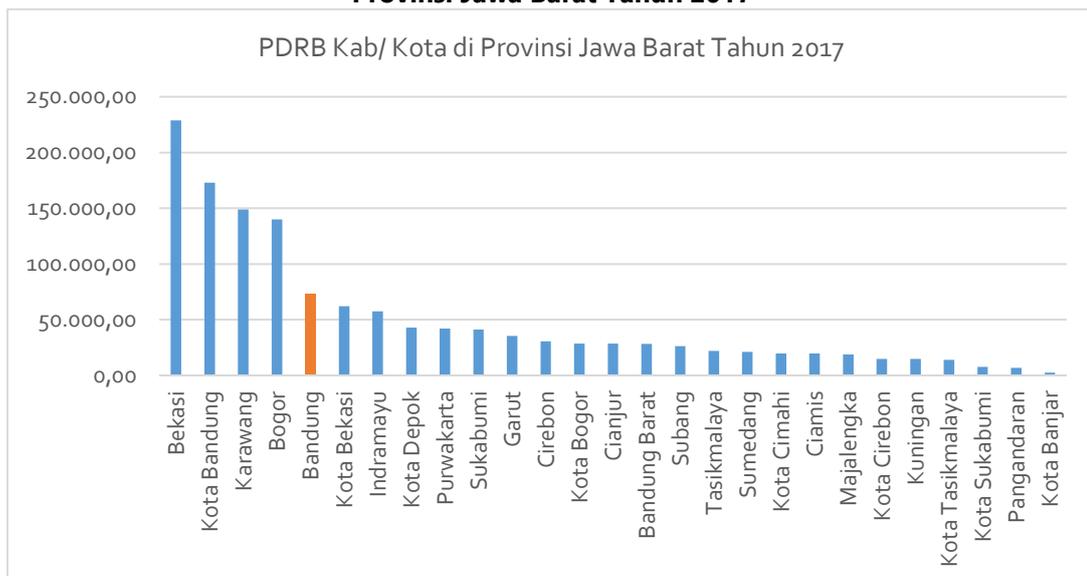
Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung dijelaskan melalui 3 (tiga) hal yaitu kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

Guna melihat struktur ekonomi Kabupaten Bandung, maka dilakukan analisis kedudukan ekonomi Kabupaten Bandung yang dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya diikuti dengan melihat kedudukan ekonomi Provinsi Jawa Barat terhadap nasional. PDRB Kabupaten Bandung berada pada peringkat ke 5 dari 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan nilai PDRB atas harga konstan pada tahun 2017 adalah sebesar 73.051,18. Sementara itu, persentase kontribusi PDRB Kabupaten Bandung terhadap perekonomian Jawa Barat adalah sebesar 5,41% lebih kecil dibandingkan tahun 2016 dimana kontribusi Kabupaten Bandung sebesar 5,65%. Kabupaten Bandung telah memiliki kedudukan yang cukup penting bagi perekonomian Provinsi Jawa Barat dan memiliki kontribusi PDRB yang cukup besar bagi Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor.

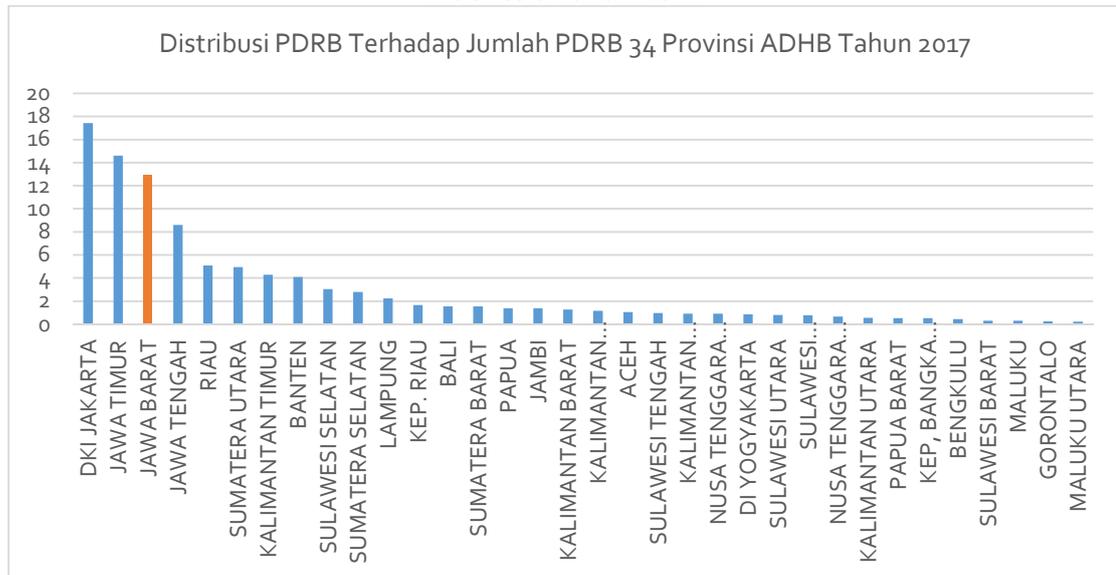
Gambar II.13 Kedudukan Ekonomi Kabupaten Bandung terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2018

Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki kedudukan yang cukup baik di tingkat nasional atau berada pada urutan ke 3 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Jawa Barat menempati urutan ke 3 setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur. Dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam wilayah dengan sumber daya ekonomi yang besar untuk perkembangan perekonomian Indonesia. Dapat diinterpretasikan bahwa kontribusi Kabupaten Bandung terhadap cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah dengan sumber daya ekonomi yang tinggi.

Gambar II.14 Kedudukan Ekonomi Provinsi Jawa Barat terhadap Provinsi - Provinsi di Indonesia Tahun 2017



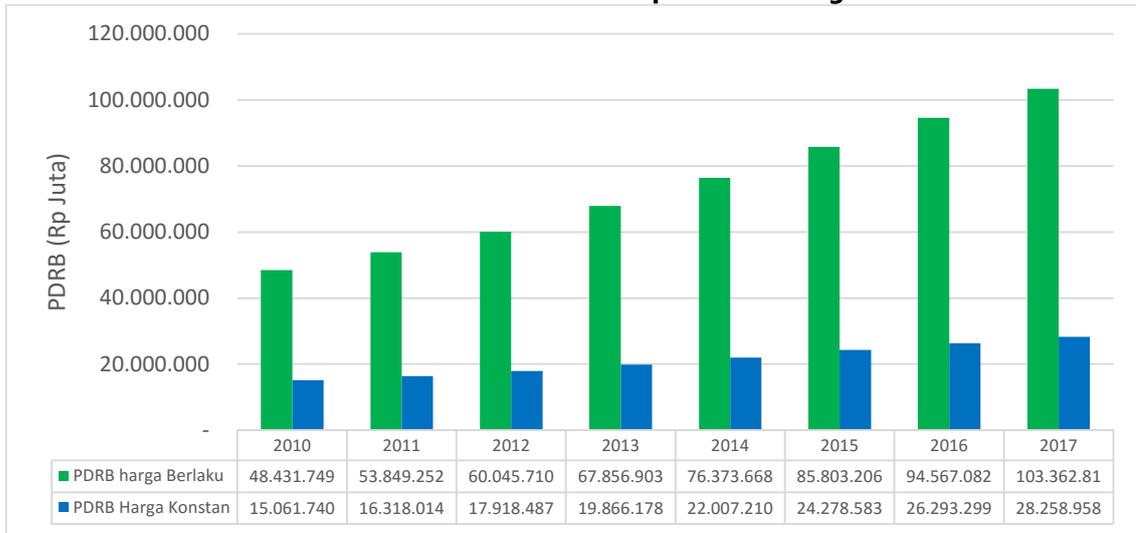
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2018

Setelah mengetahui struktur perekonomian Kabupaten Bandung dalam konstelasi regional, selanjutnya dianalisis mengenai kondisi perekonomian Kabupaten Bandung secara *inward looking*. PDRB digunakan untuk mengukur pendapatan yang timbul karena adanya kegiatan produksi. Data PDRB menjadi penting dan krusial mengingat fungsi dari komponen PDRB mampu mengidentifikasi laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang merupakan indikator utama perekonomian daerah. Setiap indikator ini dapat menjadi tolak ukur yang menggambarkan kondisi kesejahteraan dan pemerataan aspek ekonomi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten Bandung baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB adalah sebesar 5,76% per tahun sementara rata-rata pertumbuhan PDRB ADHK adalah sebesar 11,90% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari proses produksi barang dan jasa di Kabupaten Bandung meningkat setiap tahunnya sejak 2010 hingga 2017.



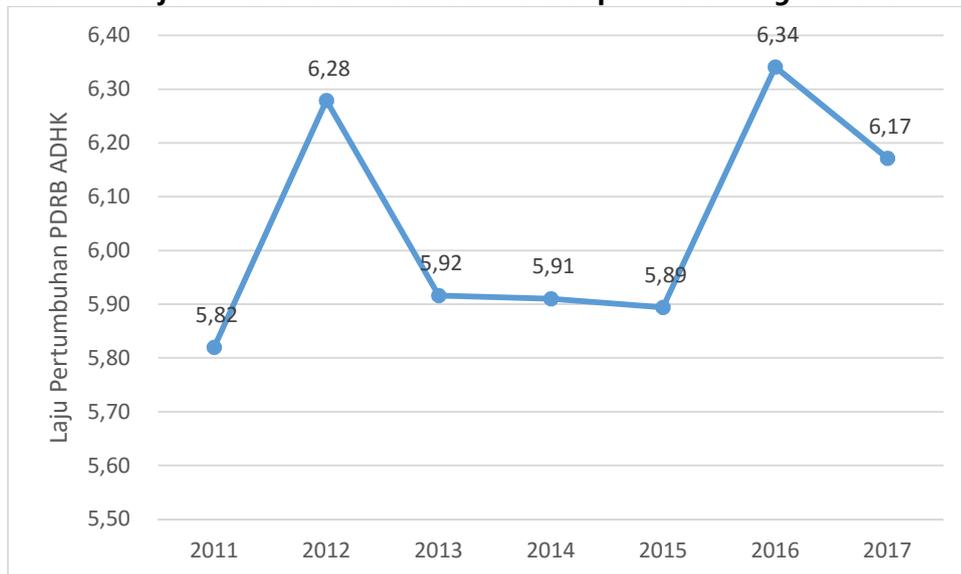
Gambar II.15 Grafik Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Kab. Bandung, 2017; LKPI Kab. Bandung, 2016

Meskipun nilai PDRB Kabupaten Bandung selalu meningkat setiap tahunnya sejak 2012 hingga 2016, namun laju pertumbuhannya justru menurun dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bandung adalah 5,92 sementara tahun 2015 lajunya menurun menjadi 5,89. Namun dari tahun 2015 menuju 2016 kembali mengalami peningkatan laju PDRB ADHK yaitu 6,34. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan PDRB kembali mengalami penurunan menjadi 6,17.

Gambar II.16 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bandung Tahun 2010-2017



Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2017

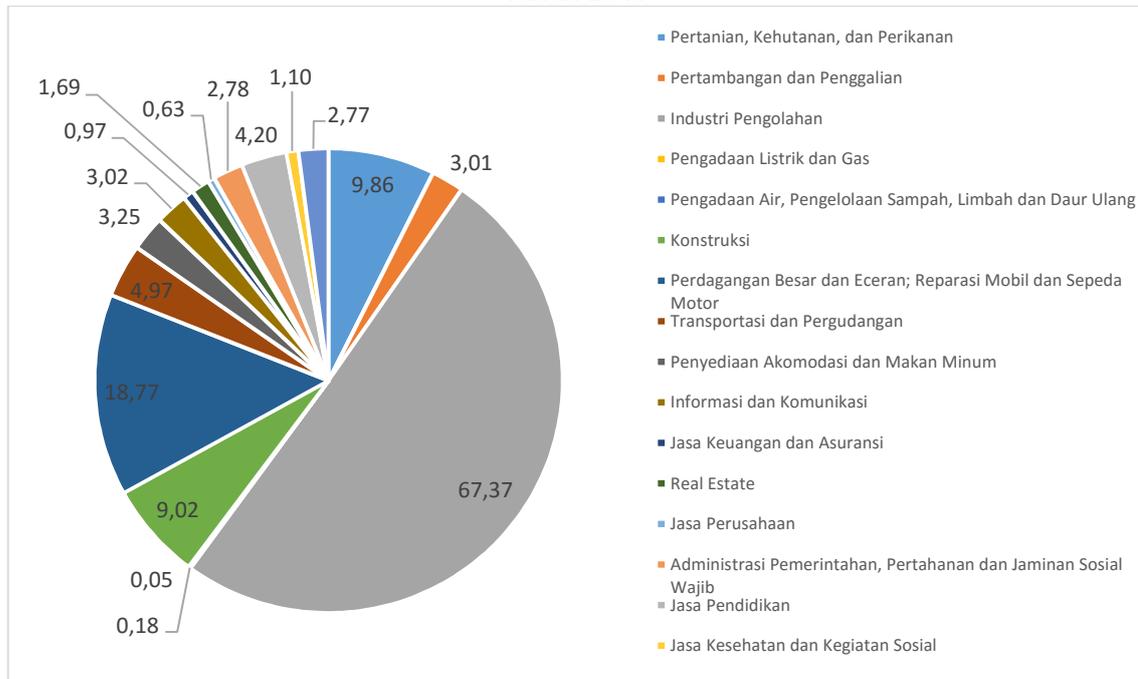
2) Struktur Ekonomi

Dalam rangka pembangunan daerah, diperlukan penentuan prioritas kebijakan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan tersebut adalah dengan melalui analisis struktur ekonomi secara menyeluruh. Kabupaten Bandung memiliki struktur ekonomi yang bervariasi dimana berbagai sektor telah menyumbangkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Pada tahun 2017, kontribusi PDRB Kabupaten Bandung didominasi oleh



sektor industri pengolahan yaitu sebesar 67,37%. Sektor industri pengolahan cukup mendominasi kontribusi di Kabupaten Bandung dengan nilai kontribusinya yang melebihi 50%. Selain industri pengolahan, terdapat tiga sektor lain yang memiliki kontribusi tertinggi untuk PDRB Kabupaten Bandung antara lain sektor perdagangan besar dan eceran; reparasai mobil dan sepeda motor (18,77%), pertanian, kehutanan, dan perikanan (9,86%), serta konstruksi (9,02%).

Gambar II.17 Kontribusi Setiap Sektor Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bandung Tahun 2017



Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2018



Tabel II.18 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

No.	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Juta Rp)	%								
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.844.584,20	8,40	4.728.392,10	7,74	4.863.228,20	7,52	5.071.860,90	7,37	5.368.354,00	7,35
B	Pertambangan dan Penggalian	1.478.454,60	2,56	1.452.188,90	2,38	1.513.034,90	2,34	1.649.759,73	2,40	1.638.146,70	2,24
C	Industri Pengolahan	29.232.561,20	50,67	31.194.154,40	51,06	32.992.837,80	51,00	34.952.833,52	50,81	36.693.246,60	50,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	87.300,60	0,15	85.137,40	0,14	85.404,20	0,13	93.493,38	0,14	95.645,00	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.026,60	0,04	21.624,90	0,04	22.439,60	0,03	23.461,10	0,03	25.167,70	0,03
F	Konstruksi	3.524.147,80	6,11	3.847.216,10	6,30	4.129.003,40	6,38	4.439.967,50	6,45	4.912.750,40	6,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.215.856,0	14,24	8.681.126,80	14,21	9.138.154,30	14,12	9.676.959,23	14,07	10.222.299,00	13,99
H	Transportasi dan Pergudangan	2.032.834,20	3,54	2.242.870,30	3,67	2.405.115,00	3,72	2.562.252,12	3,72	2.705.210,50	3,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.390.485,40	2,41	1.455.713,00	2,38	1.559.534,90	2,41	1.660.985,60	2,41	1.767.695,90	2,42
J	Informasi dan Komunikasi	930.771,60	1,61	1.093.885,10	1,79	1.273.177,50	1,97	1.455.410,18	2,12	1.644.417,30	2,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	412.047,60	0,71	428.163,60	0,70	460.141,00	0,71	510.853,57	0,74	530.816,90	0,73
L	Real Estate	673.295,30	1,17	712.040,00	1,17	767.129,00	1,19	833.582,01	1,21	918.273,90	1,26
M,N	Jasa Perusahaan	255.432,20	0,44	268.150,90	0,44	291.563,50	0,45	317.112,90	0,46	343.401,60	0,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.334.376,10	2,31	1.381.517,70	2,26	1.459.064,20	2,26	1.501.702,57	2,18	1.515.994,70	2,08
P	Jasa Pendidikan	1.679.230,00	2,91	1.829.830,50	2,99	1.980.966,90	3,06	2.121.550,61	3,08	2.289.577,40	3,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	402.260,10	0,70	432.847,20	0,71	478.769,90	0,74	537.487,72	0,78	599.943,80	0,82
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.175.923,60	2,04	1.243.655,10	2,04	1.277.402,00	1,97	1.390.622,14	2,02	1.510.219,80	2,07
	Total PDRB	57.690.587,20	100	61.098.514,00	100	64.702.966,30	100	68.804.850,80	100	73.051.179,30	100

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2018



Tabel II.19 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku

No.	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%						
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.861.571,50	8,64	6.096.791,80	7,98	6.809.055,30	7,94	7.552.522,50	7,97	8.298.736,10	8,03
B	Pertambangan dan Penggalian	1.788.536,20	2,64	1.760.364,00	2,30	1.867.979,00	2,18	2.064.735,96	2,19	2.190.035,00	2,12
C	Industri Pengolahan	34.466.754,60	50,79	39.626.723,00	51,89	44.659.612,90	52,06	49.712.160,60	52,23	53.832.050,20	52,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	74.936,80	0,11	75.699,90	0,10	85.047,80	0,10	112.330,50	0,12	132.918,80	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.276,60	0,03	22.955,10	0,03	24.870,80	0,03	28.257,43	0,03	33.430,60	0,03
F	Konstruksi	3.947.198,00	5,82	4.529.721,80	5,93	4.962.557,40	5,78	5.442.231,75	5,78	6.289.850,70	6,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.961.566,70	14,68	10.978.604,30	14,38	12.071.738,50	14,07	12.805.362,50	13,79	13.878.206,30	13,43
H	Transportasi dan Pergudangan	2.281.295,00	3,36	2.733.986,00	3,58	3.367.494,90	3,93	3.670.715,90	3,89	3.995.263,30	3,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.650.602,10	2,43	1.844.750,20	2,42	2.084.038,10	2,43	2.263.914,96	2,40	2.504.799,60	2,42
J	Informasi dan Komunikasi	927.398,80	1,37	1.043.808,00	1,37	1.214.306,80	1,42	1.383.095,00	1,48	1.579.868,00	1,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	452.639,20	0,67	492.467,20	0,64	566.854,50	0,66	649.279,15	0,69	706.113,70	0,68
L	Real Estate	764.145,30	1,13	827.348,90	1,08	920.298,00	1,07	1.013.291,49	1,08	1.135.598,00	1,10
M,N	Jasa Perusahaan	287.562,20	0,42	316.833,20	0,41	361.052,60	0,42	401.389,56	0,43	442.542,10	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.634.785,40	2,41	1.739.681,40	2,28	1.987.417,00	2,32	2.120.068,44	2,25	2.233.165,40	2,16
P	Jasa Pendidikan	1.919.573,80	2,83	2.224.296,90	2,91	2.508.549,90	2,92	2.741.260,19	2,91	3.125.707,00	3,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	480.828,00	0,71	550.479,70	0,72	651.253,00	0,76	726.419,28	0,77	837.260,70	0,81
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.335.232,60	1,97	1.507.031,20	1,97	1.650.963,00	1,92	1.880.047,18	2,00	2.147.281,30	2,08
	Total PDRB	67.856.902,70	100	76.371.542,80	100	85.793.090,40	100	94.165.926,55	100	103.362.818,60	100

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2018

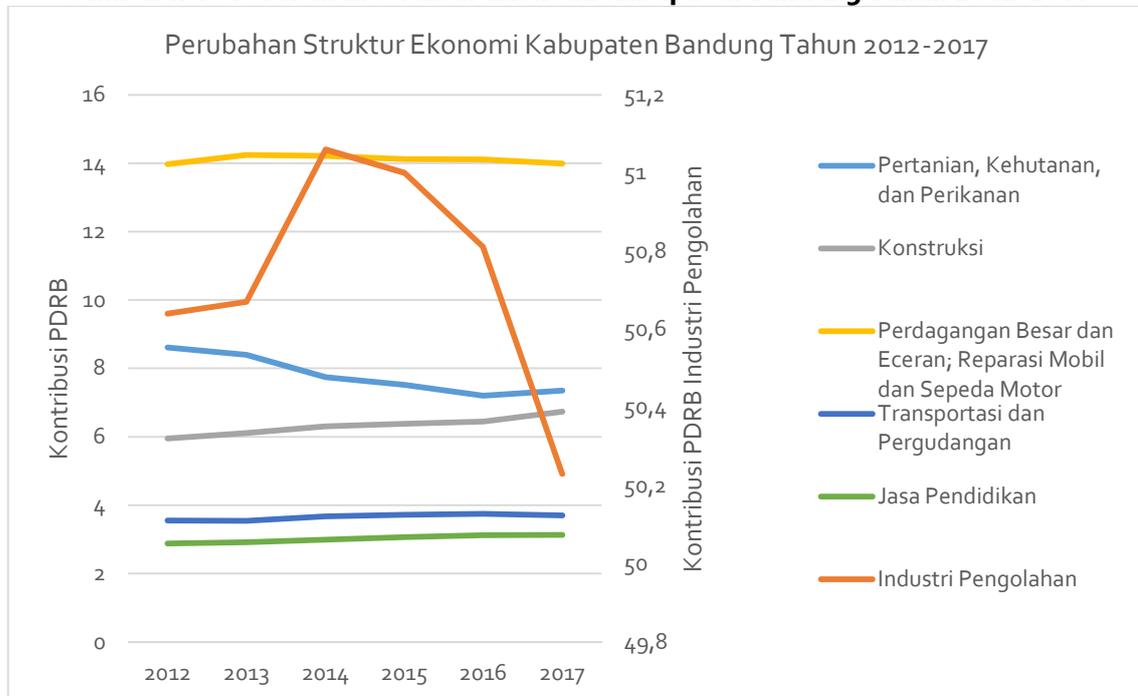


Tabel II.20 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017

No.	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		Hk (%)	Hb (%)								
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,40	8,64	7,74	7,98	7,52	7,94	7,37	7,97	7,35	8,03
B	Pertambangan dan Penggalian	2,56	2,64	2,38	2,30	2,34	2,18	2,40	2,19	2,24	2,12
C	Industri Pengolahan	50,67	50,79	51,06	51,89	51,00	52,06	50,81	52,23	50,23	52,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,11	0,14	0,10	0,13	0,10	0,14	0,12	0,13	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	6,11	5,82	6,30	5,93	6,38	5,78	6,45	5,78	6,73	6,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,24	14,68	14,21	14,38	14,12	14,07	14,07	13,79	13,99	13,43
H	Transportasi dan Pergudangan	3,54	3,36	3,67	3,58	3,72	3,93	3,72	3,89	3,70	3,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,41	2,43	2,38	2,42	2,41	2,43	2,41	2,40	2,42	2,42
J	Informasi dan Komunikasi	1,61	1,37	1,79	1,37	1,97	1,42	2,12	1,48	2,25	1,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,71	0,67	0,70	0,64	0,71	0,66	0,74	0,69	0,73	0,68
L	Real Estate	1,17	1,13	1,17	1,08	1,19	1,07	1,21	1,08	1,26	1,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,44	0,42	0,44	0,41	0,45	0,42	0,46	0,43	0,47	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,31	2,41	2,26	2,28	2,26	2,32	2,18	2,25	2,08	2,16
P	Jasa Pendidikan	2,91	2,83	2,99	2,91	3,06	2,92	3,08	2,91	3,13	3,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,70	0,71	0,71	0,72	0,74	0,76	0,78	0,77	0,82	0,81
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,04	1,97	2,04	1,97	1,97	1,92	2,02	2,00	2,07	2,08
	Total PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2017

Diantara sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, perlu juga dilihat perubahan struktur ekonomi tersebut dari tahun ke tahun. Hal ini untuk mengetahui apakah terdapat pergeseran sektor ekonomi di Kabupaten Bandung. Sektor industri pengolahan yang merupakan sektor yang berkontribusi paling besar bagi PDRB Kabupaten Bandung ternyata memiliki pertumbuhan yang negatif dimana kontribusinya terus menurun sejak tahun 2014. Begitu juga dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor justru mengalami penurunan dari tahun 2012-2017. Akan tetapi, sektor pertanian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 dimana lajunya sebesar 7,35. Sementara itu, sektor jasa pendidikan serta transportasi dan pergudangan yang saat ini kontribusinya belum begitu signifikan namun memiliki tren pertumbuhan yang terus meningkat. Di Kabupaten Bandung, belum terlihat adanya pergeseran ekonomi dimana industri pengolahan masih menjadi sektor utama. Namun, dalam beberapa tahun mendatang, apabila tren pertumbuhan sektor ini diasumsikan sama, maka akan terdapat pergeseran sektor konstruksi menggantikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah.

Gambar II.18 Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2018

Dari segi laju pertumbuhan PDRB, sektor – sektor di Kabupaten Bandung memiliki laju pertumbuhan yang beragam. Pada tahun 2017, sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 12,99% sementara sektor pertambangan dan pengalihan adalah sektor dengan laju pertumbuhan terendah yaitu sebesar -0,70%. Adapun sektor – sektor yang memiliki laju pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor konstruksi (10,65%), sektor real estate (10,16%), dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (11,62%). Sementara itu, sektor – sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung justru memiliki laju pertumbuhan yang rendah seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (5,85%), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (7,27%), industri pengolahan (5,74).



Tabel II.21 Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017

Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,26	-2,40	2,85	4,24	5,85
Pertambangan dan Penggalian	4,43	-1,78	4,19	9,04	-0,70
Industri Pengolahan	5,98	6,71	5,77	5,94	5,75
Pengadaan Listrik dan Gas	8,26	-0,50	2,81	4,70	2,30
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,48	2,85	3,77	4,55	7,27
Konstruksi	8,7	9,17	7,32	7,53	10,65
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,98	5,66	5,26	5,90	5,64
Transportasi dan Pergudangan	5,11	10,33	7,23	6,74	5,38
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,47	4,69	7,13	6,51	6,42
Informasi dan Komunikasi	12,65	17,52	16,39	14,31	12,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,65	3,91	7,47	10,86	3,91
Real Estate	2,33	5,75	7,74	8,66	10,16
Jasa Perusahaan	7,02	4,98	8,73	8,76	8,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,63	3,53	5,61	2,92	0,95
Jasa Pendidikan	7,19	8,97	8,26	7,10	7,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,75	7,60	10,61	12,26	11,62
Jasa Lainnya	3,8	5,76	2,71	8,86	8,60

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2018

Sektor – sektor ekonomi di Kabupaten Bandung juga dianalisis menggunakan tipologi klassen, analisis LQ dan analisis shift share.

Analisis Tipologi Klassen

Analisis tipologi klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah. Pada dasarnya, analisis tipologi klassen membagi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Hasil analisis tipologi klassen menunjukkan posisi pertumbuhan sektor pembentuk ekonomi regional daerah. Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen, dapat dikelompokkan sektor – sektor ke dalam 4 (empat kuadran). Kuadran 1 adalah sektor yang maju dan tumbuh pesat. Sektor dalam kuadran ini merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan provinsi. Kuadran 2 adalah sektor maju tapi tertekan. Sektor dalam kuadran ini dapat dikatakan juga sebagai sektor yang telah jenuh. Kuadran 3 adalah sektor potensial / masih dapat berkembang pesat. Sektor dalam kuadran ini dapat diartikan sebagai sektor yang sedang booming meskipun pangsa pasarnya di Kabupaten Bandung relatif rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Kuadran 4 merupakan sektor relatif tertinggal.

Hasil analisis Tipologi Klassen dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Identifikasi dilakukan terhadap seluruh sektor yang ada di Kabupaten Bandung namun akan dilihat secara lebih mendalam pada sektor – sektor unggulan di Kabupaten Bandung. Sektor industri pengolahan yang merupakan sektor dengan penyumbang kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Bandung masuk ke dalam kuadran I. Industri pengolahan ini potensial dikembangkan bagi perekonomian Kabupaten Bandung karena memiliki kinerja laju pertumbuhan dan pangsa pasar yang lebih baik dibandingkan provinsi. Selain industri pengolahan, terdapat juga sektor



pertambangan dan penggalian yang dapat berpotensi menjadi sektor unggulan di Kabupaten Bandung. Pada kuadran 3, terdapat sektor konstruksi dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Kedua sektor ini menjadi sektor yang berkontribusi banyak setelah industri pengolahan dan berdasarkan hasil analisis klasen didapatkan bahwa kedua sektor ini masih potensial dan dapat berkembang pesat. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Bandung termasuk ke dalam sektor yang relatif tertinggal. Meskipun saat ini sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih masuk ke dalam 4 (empat) sektor yang menyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Bandung, namun lajunya selalu mengalami penurunan dan cukup kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Apabila sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ingin tetap dijadikan sektor unggulan di Kabupaten Bandung, mengingat luasnya potensi lahan pertanian di Kabupaten Bandung, diperlukan sebuah usaha untuk dapat meningkatkan kembali pertumbuhan sektor ini.

Tabel II.22 Tipologi Klasen Sektor Ekonomi Kabupaten Bandung

	$gi >= g$	$gi < g$
$si >= s$	SEKTOR MAJU DAN TUMBUH PESAT <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pengolahan 2. Pertambangan dan penggalian 3. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 4. Jasa pendidikan 	SEKTOR MAJU TAPI TERTEKAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Real estate 2. Jasa perusahaan
$si < s$	SEKTOR POTENSIAL / MASIH DAPAT BERKEMBANG PESAT <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi 2. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 3. Informasi dan komunikasi 4. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 	SEKTOR RELATIF TERTINGGAL <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan 2. Pengadaan listrik dan gas 3. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang 4. Transportasi dan pergudangan 5. Penyediaan akomodasi dan makan minum 6. Jasa keuangan dan asuransi 7. Jasa lainnya

g: pertumbuhan sektor di Kabupaten Bandung

gi: pertumbuhan sektor di Jawa Barat

si: kontribusi sektor di Kabupaten Bandung

s: kontribusi sektor di Jawa Barat

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2018



Analisis LQ

Analisis LQ atau *Location Quotient* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi. Hasil analisis ini akan memberikan gambaran terkait sektor basis atau *leading sector* dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung. Definisi sektor basis adalah sektor yang dapat memenuhi kebutuhan lokal sehingga mampu melakukan kegiatan ekspor. Analisis ini dilakukan sebagai salah satu alat untuk dapat mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Bandung. Penentuan sektor basis dengan analisis LQ dilakukan dengan membagi nilai perbandingan antara jumlah PDRB per sektor di Kabupaten Bandung terhadap total PDRB Kabupaten Bandung dengan nilai perbandingan antara jumlah PDRB per sektor provinsi terhadap total PDRB provinsi. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil perhitungan indeks LQ per sektor ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2012-2016.

Tabel II.23 Rata-rata Indeks *Location Quotient* (LQ) Sektor di Kabupaten Bandung Terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016

No.	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.99	0.95	0.92	0.91	0.82	0.92
B	Pertambangan dan Penggalian	0.93	0.95	0.95	1.28	1.32	1.09
C	Industri Pengolahan	1.15	1.18	1.19	1.21	1.24	1.19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.19	0.16	0.12	0.13	0.13	0.15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.47	0.43	0.41	0.38	0.34	0.41
F	Konstruksi	0.77	0.74	0.73	0.70	0.72	0.73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.91	0.93	0.94	0.92	0.94	0.93
H	Transportasi dan Pergudangan	0.83	0.75	0.75	0.71	0.68	0.74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.07	1.02	0.99	0.97	0.92	0.99
J	Informasi dan Komunikasi	0.55	0.57	0.55	0.54	0.52	0.55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.27	0.26	0.25	0.25	0.22	0.25
L	Real Estate	1.09	1.03	1.04	1.05	1.03	1.05
M,N	Jasa Perusahaan	1.15	1.09	1.06	1.06	1.01	1.07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.00	1.00	0.98	0.96	1.00	0.99
P	Jasa Pendidikan	1.23	1.20	1.14	1.10	1.08	1.15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.17	1.24	1.15	1.09	1.02	1.13
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.16	1.11	1.08	1.04	0.96	1.07

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2017

Rata-rata perhitungan indeks LQ di Kabupaten Bandung menunjukkan terdapat 7 (tujuh) sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ apabila dibandingkan terhadap Provinsi Jawa Barat. Sektor yang memiliki $LQ > 1$ tersebut antara lain sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. Sektor – sektor tersebut merupakan sektor basis Kabupaten Bandung dan dalam lingkup perekonomian Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi ekspor yang besar bagi sektor – sektor di wilayah lain Jawa Barat tersebut dan sektor – sektor tersebut memiliki *multiplier effect* yang besar bagi perkembangan sektor lainnya yang merupakan sektor non basis di Kabupaten Bandung. Terdapat 5 sektor yang memiliki posisi konstan sebagai sektor basis Kabupaten Bandung dari tahun 2012 hingga 2016. Kelima sektor tersebut adalah industri pengolahan, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial.



Aanalisis Shift Share

Analisis *shift share* dilakukan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian regional maupun lokal. Gambaran perubahan struktur ekonomi ini memberikan kemudahan bagi praktisi ataupun pembuat keputusan untuk menetapkan sektor unggulan dan analisis dampak ekonominya bagi perekonomian daerah. Komponen yang dipertimbangkan dalam melakukan analisis *shift share* meliputi komponen Pertumbuhan Regional (PR), Pertumbuhan Proporsional (PP), dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW). Konsep ini telah memperhitungkan faktor waktu sehingga dapat menggambarkan pertumbuhan suatu wilayah.

Berdasarkan hasil analisis *shift share* Kabupaten Bandung terhadap Provinsi Jawa Barat, didapatkan bawah Pertumbuhan Regional (PR) menunjukkan angka yang positif untuk setiap sektor. Artinya, hampir seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Bandung bertumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Nilai PR ini juga memberikan gambaran mengenai sektor – sektor mana saja yang memiliki pertumbuhan lebih cepat dibandingkan sektor lainnya. Sektor dengan rata-rata pertumbuhan paling cepat bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor pertanian, kehutanan, dan pangan.

Pertumbuhan Proporsional (PP) menunjukkan sektor – sektor yang maju atau tumbuh lebih cepat serta sektor yang tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor ekonomi dalam lingkup Provinsi Jawa Barat. Nilai PP sektoral yang bernilai positif menunjukkan sektor tersebut di Kabupaten Bandung tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan sektor tersebut di Provinsi Jawa Barat, begitu pula sebaliknya apabila nilainya negatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 11 sektor di Kabupaten Bandung yang memiliki pertumbuhan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan tersebut di Jawa Barat. Adapun tiga sektor dengan pertumbuhan paling cepat adalah sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa pendidikan, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu, sektor – sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Bandung justru memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan Provinsi Jawa Barat yaitu sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Adanya kondisi yang kontradiktif antara kondisi PR dan PP pada industri pengolahan secara teoritik dapat dikarenakan perbedaan subsektor dalam permintaan produk akhir, ketersediaan bahan mentah, dan kebijakan industri.

Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) menunjukkan daya saing suatu sektor terhadap sektor yang sama di tingkat yang lebih tinggi. Beberapa sektor ekonomi Kabupaten Bandung memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Jawa Barat. Salah satu sektor dengan nilai PPW yang paling baik adalah sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Bandung tidak hanya berkembang cepat di tingkat kabupaten namun juga memiliki daya saing di tingkat Provinsi Jawa Barat.



Tabel II.24 Perhitungan Indikator – Indikator *Shift Share Analysis* Kabupaten Bandung Terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Sektor	Kabupaten Bandung (Dalam Juta Rp)		Provinsi Jawa Barat (Dalam Juta Rp)		PR	Rank	PP	Rank	PPW	Rank
	2012	2016	2012	2016						
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.326.175,00	6.877.987,20	100.784.620,90	147.070,000	2,475,349,901,520.28	3	-29.301.815.745,89	12	-894.235.885.774,39	17
Pertambangan dan Penggalian	1.829.360,70	1.911.176,90	36.863.496,50	25,350,000,000	850,198,844,121.73	6	-1.421.559.133.200,32	17	653.176.489.078,59	3
Industri Pengolahan	29.883.859,60	49.645.656,80	487.760.808,00	702,140,000,000	13,888,580,250,912.90	1	-754.114.402.460,69	16	6.627.331.351.547,81	1
Pengadaan Listrik dan Gas	80.366,00	91.354,60	7.775.965,20	11,920,000,000	37,350,250,449.07	16	5.479.095.126,81	10	-31.840.745.575,88	9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampaj, Limbah dan Daur Ulang	20.805,70	25.869,40	837.627,00	1,340,000,000	9,669,488,412.62	17	2.808.884.330,98	11	-7.414.672.743,60	7
Konstruksi	3.626.455,20	5.465.372,00	88.024.137,60	134,110,000,000	1,685,401,910,787.33	4	213.262.704.439,35	4	-59.747.815.226,68	11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.643.837,70	13.437.480,30	179.461.165,10	250,300,000,000	4,017,239,914,094.50	2	-605.251.635.786,51	15	1.381.654.321.692,01	2
Transportasi dan Pergudangan	2.089.280,90	3.681.165,40	47.419.993,50	94,610,000,000	970,997,248,506.33	5	1.108.150.637.739,71	1	-487.263.386.246,04	16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.501.853,60	2.257.335,50	26.494.966,90	43,000,000,000	697,989,300,174.68	9	237.590.029.775,50	3	-180.097.429.950,18	14
Informasi dan Komunikasi	810.020,70	1.351.711,20	27.876.566,30	45,460,000,000	376,458,651,841.97	11	134.470.316.984,36	7	30.761.531.173,68	5
Jasa Keuangan dan Asuransi	392.450,30	591.236,30	27.317.166,60	46,190,000,000	182,392,018,936.03	14	88.743.316.515,64	8	-72.349.335.451,67	12
Real Estate	720.740,80	990.739,00	12.456.779,00	16,810,000,000	334,965,649,514.27	12	-83.091.229.480,26	13	18.123.779.965,99	6
Jasa Perusahaan	265.727,20	383.854,80	4.350.495,40	6,650,000,000	123,497,218,613.97	15	16.955.962.590,43	9	-22.325.581.204,40	8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.536.849,80	2.192.449,70	28.794.165,80	38,650,000,000	714,253,850,292.46	8	-188.211.980.411,20	14	129.558.030.118,74	4
Jasa Pendidikan	1.675.628,30	2.750.505,70	25.557.787,60	44,680,000,000	778,751,420,557.83	7	474.945.525.262,75	2	-178.819.545.820,57	13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	413.776,80	700.269,30	6.628.823,90	12,110,000,000	192,303,550,133.33	13	149.836.102.557,47	6	-55.647.152.690,80	10
Jasa Lainnya	1.228.521,80	1.760.133,10	19.841.119,50	32,210,000,000	570,957,829,332.59	10	194.898.116.237,66	5	-234.244.645.570,25	15

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2017



3) Laju Inflasi

Inflasi Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cukup stabil yang didorong oleh membaiknya kondisi perekonomian. Pada tahun 2016, inflasi Kabupaten Bandung adalah sebesar 4,15% dan termasuk ke dalam klasifikasi inflasi ringan. Terdapat penurunan inflasi dari tahun 2015 ke tahun 2016 yang diperkirakan akibat adanya penurunan inflasi pada beberapa sektor utama. Pada 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata laju inflasi tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai inflasi rata-ratanya sebesar 7,58%. Tingginya laju inflasi ini dapat disebabkan oleh fluktuasi inflasi akibat adanya kenaikan harga BBM.

Tabel II.25 Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2013-2016

No	Sektor	2013	2014	2015	2016*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,58	6,57	8,59	0,09
B	Pertambangan dan Penggalian	2,30	0,21	1,85	0,93
C	Industri Pengolahan	8,83	7,74	6,56	4,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-13,87	3,59	12,00	6,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,51	0,19	4,41	1,63
F	Konstruksi	0,14	5,12	2,08	3,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,73	4,30	4,46	5,78
H	Transportasi dan Pergudangan	3,89	8,62	14,86	2,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,21	6,75	5,45	3,14
J	Informasi dan Komunikasi	1,63	-4,23	-0,05	1,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,18	4,70	7,11	1,96
L	Real Estate	3,61	2,38	3,25	3,10
M,N	Jasa Perusahaan	1,12	4,95	4,81	1,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,65	2,79	8,17	4,74
P	Jasa Pendidikan	6,87	6,34	4,18	2,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,06	6,40	6,96	3,97
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,70	6,72	6,66	3,17
	Total PDRB	6,70	6,27	6,08	4,15

*Berdasarkan PDRB Perkiraan Tim LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2016

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2017

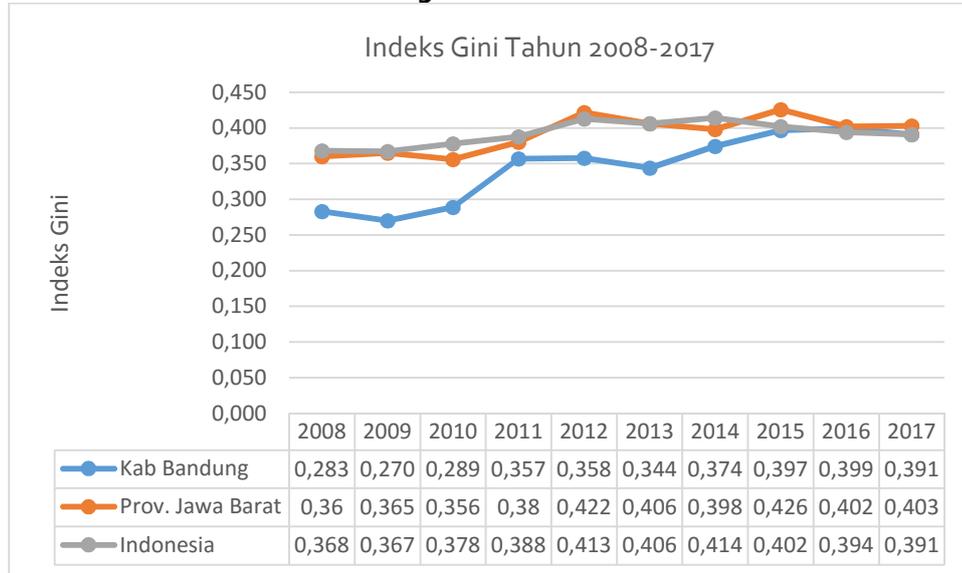
4) Indeks Gini

Indeks Gini adalah alat yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila indeks gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Dilihat berdasarkan trennya selama kurun waktu 2012-2017, indeks gini di Kabupaten Bandung terus meningkat. Pada tahun 2012 indeks gini di Kabupaten Bandung bernilai 0,36 sementara pada tahun 2017 indeks gininya berada pada angka 0,391. Peningkatan indeks gini selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan pendapatan di Kabupaten Bandung. Selama kurun waktu 2008 hingga 2015, indeks gini Kabupaten Bandung selalu lebih rendah dibandingkan dengan indeks gini di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Akan tetapi, semenjak tahun 2016 hingga 2017, indeks gini Kabupaten Bandung semakin mendekati indeks gini Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Bahkan pada tahun 2016, indeks gini Kabupaten Bandung lebih tinggi dibandingkan indeks gini Indonesia. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Bandung semakin cepat pertumbuhannya dibandingkan ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan di Indonesia. Peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bandung ternyata tidak sejalan dengan penurunan ketimpangan. Meskipun pembangunan ekonomi semakin baik, akan tetapi ketimpangan masih menjadi masalah yang perlu diatasi oleh Kabupaten Bandung. Semakin besarnya ketimpangan di



Kabupaten Bandung menunjukkan perubahan karakteristik Kabupaten Bandung menjadi kawasan perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari tingkatan indeks gini beberapa kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dimana Kabupaten Bandung memiliki indkes gini yang paling tinggi kedua untuk tingkat kabupaten dan hampir sejajar dengan kota – kota yang ada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki ketimpangan tertinggi.

Gambar II.19 Perbandingan Indeks Gini Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2017

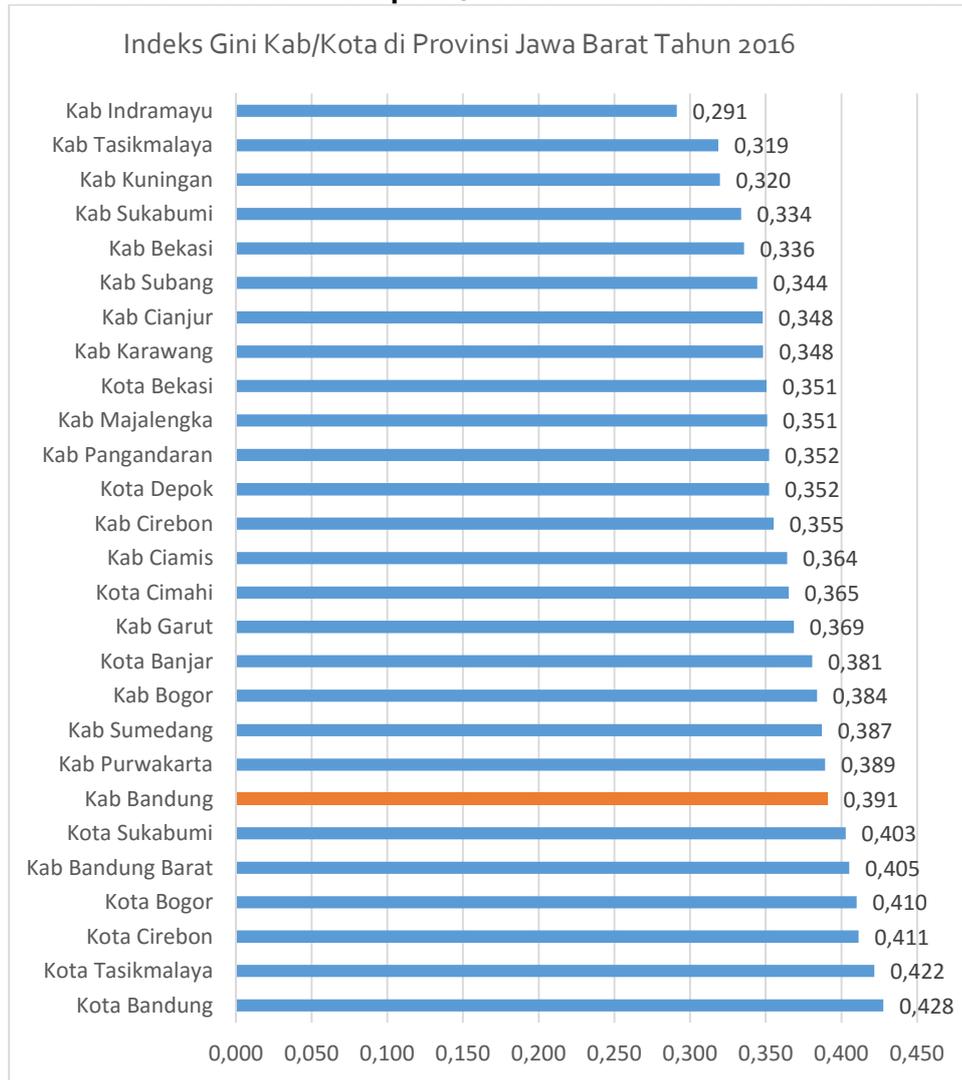


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung termasuk ke dalam kabupaten/kota dengan tingkat ketimpangan yang cukup besar. Kabupaten Bandung menduduki peringkat 21 dari 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.



Gambar II.20 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

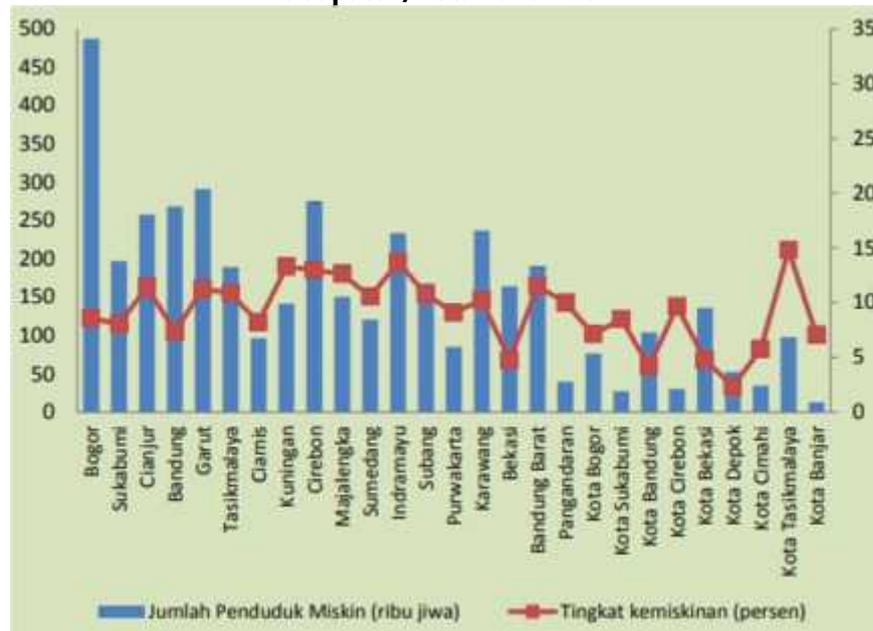


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2018

5) Kemiskinan

Pendekatan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan adalah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Pada pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Jadi yang termasuk penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2017 adalah 7,36% berada di bawah persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung menempati urutan ke 8 dari bawah yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Bandung memiliki penduduk miskin lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat mengindikasikan sudah baiknya tingkat kesejahteraan Kabupaten Bandung. Grafik di bawah ini menunjukkan perbandingan persentase penduduk miskin di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017.

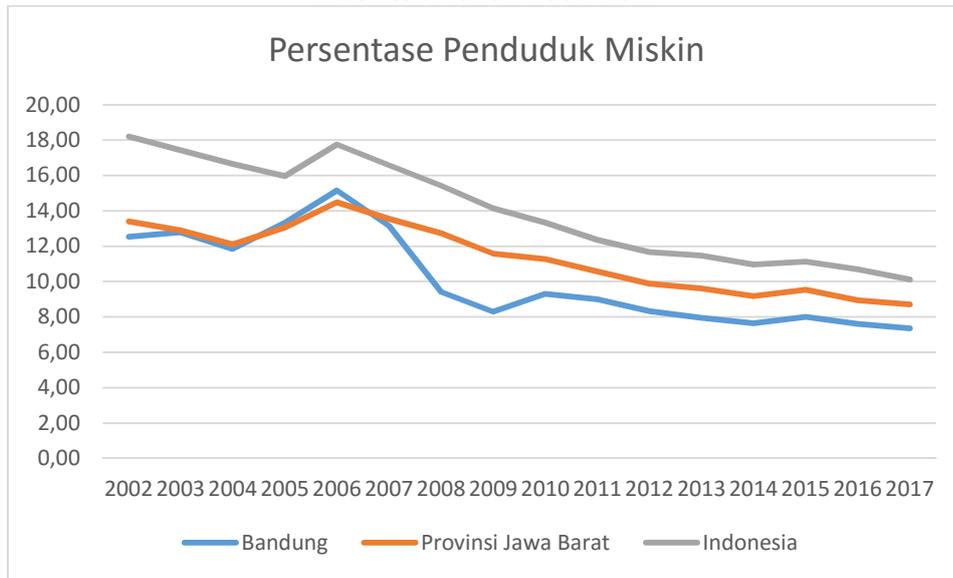
Gambar II.21 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Per Kabupaten/Kota Tahun 2017



Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2012-2017

Dilihat secara time series, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung sudah mulai mengalami penurunan dalam kurun waktu 2006-2017. Bahkan sejak tahun 2006, persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung selalu lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Jawa Barat. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung adalah sebesar 7,36% lebih rendah dibandingkan tahun 2011 sebesar 8,99%. Rata-rata laju penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung dari tahun 2002-2016 adalah 2,8% lebih cepat dibandingkan laju penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 2,6%. Grafik di bawah ini menunjukkan perubahan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung dari tahun 2002-2017.

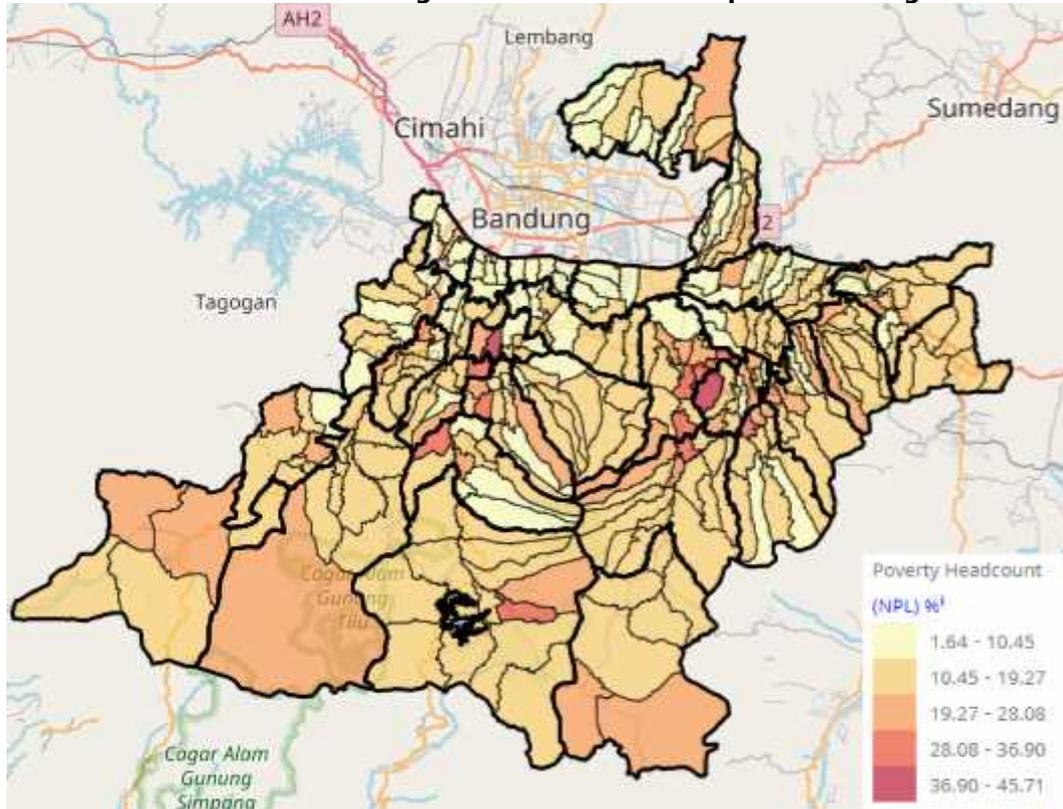
Gambar II.22 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2002-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Secara spasial, persebaran tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung per desa dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambar II.23 Peta Persebaran Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bandung Tahun 2015



Sumber: SMERU Research Institute, 2018

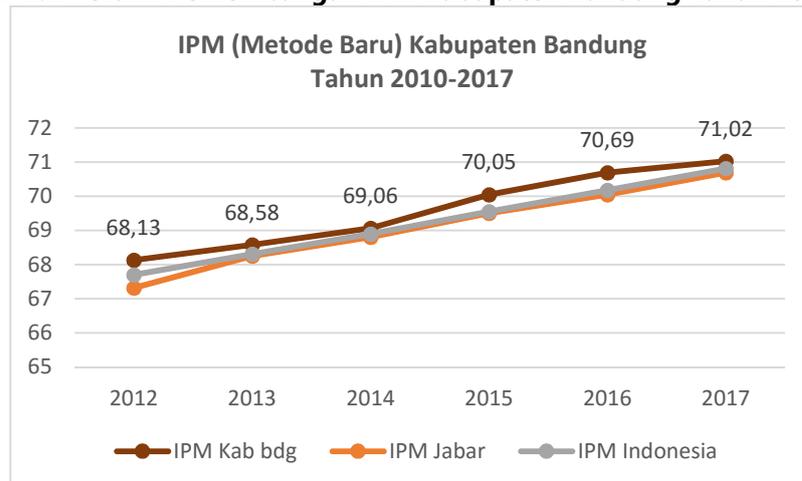
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan kunci bagi kemakmuran suatu bangsa. Pembangunan manusia merupakan pola yang diterapkan dalam rencana manusia untuk meningkatkan peluang untuk dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. IPM digunakan untuk mengukur nilai manusia pada suatu wilayah dalam sebuah proses pembangunan untuk memperoleh dan mengakses pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan harapan hidup.

Selama kurun waktu 2012-2017 berbagai program telah dilaksanakan untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Bandung. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka IPM Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2012-2017. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Bandung adalah sebesar 1,03% per tahun dengan menggunakan metode penghitungan baru. Pada tahun 2017, nilai IPM Kabupaten Bandung adalah sebesar 71,02 menggunakan metode penghitungan baru. Nilai IPM Kabupaten Bandung sudah lebih tinggi dibandingkan nilai IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 70,05. Di tingkat provinsi, IPM Kabupaten Bandung termasuk ke dalam *cluster* tinggi yaitu berada di urutan ke 9 (sembilan) bersama 8 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat yaitu Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bekasi.

Gambar II.24 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2018

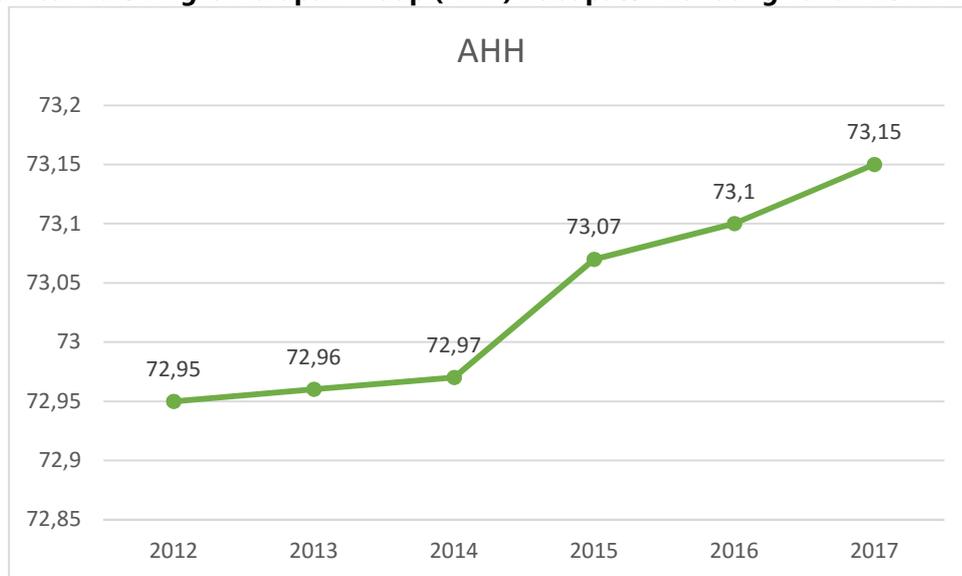
Perhitungan IPM menggunakan metode baru disusun berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), serta pengeluaran.

Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. AHH menunjukkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Semakin tinggi nilai AHHnya maka semakin baik pula tingkat kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, dalam kurun waktu 2012-2017, AHH Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, nilai AHH Kabupaten Bandung adalah 73,15. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung menempati urutan ke 6 di bawah Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Kabupaten Bandung sudah baik dan kualitasnya telah sejajar dengan kota-kota besar yang ada di Provinsi Jawa Barat.



Gambar II.25 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017



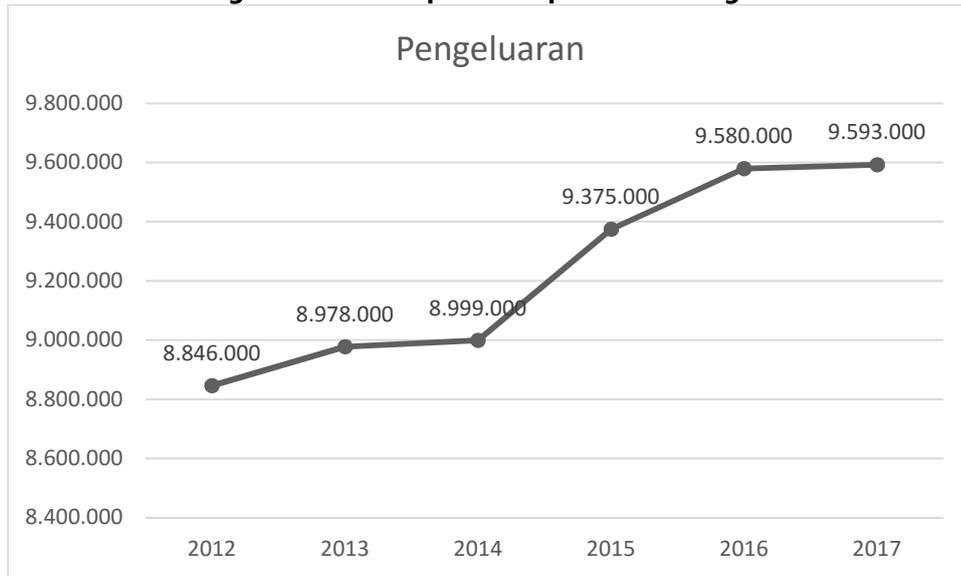
Sumber: BPS Kab. Bandung, 2018; LKPJ Kab. Bandung Tahun 2016

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Pada tahun 2017, RLS Kabupaten Bandung adalah 8,59 atau setara dengan kelas 2 SMP. Nilai RLS ini belum memenuhi arahan nasional untuk mewajibkan 9 tahun pendidikan. Padahal, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bandung adalah 12,42 yang setara dengan lulus SMA. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung memiliki RLS yang lebih tinggi dibandingkan RLS Provinsi Jawa Barat bersama dengan 12 kabupaten/kota lainnya. Akan tetapi, Kabupaten Bandung memiliki nilai HLS yang lebih rendah dibandingkan HLS Provinsi Jawa Barat. Dari segi pendidikan, Kabupaten Bandung masih memiliki tugas untuk meningkatkan pendidikan masyarakatnya untuk minimal mendapatkan pendidikan hingga 9 tahun.

Pengeluaran per Kapita

Penilaian tentang pengeluaran per kapita dapat digunakan untuk mewakili kualitas hidup manusia. Standar hidup layak dapat dipresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012). Tinggi rendahnya pengeluaran per kapita penduduk menggambarkan kesejahteraan sosial penduduk secara agregat wilayah. Pada tahun 2017, pengeluaran per kapita Kabupaten Bandung adalah 9.593.000. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pengeluaran per kapitan penduduk Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Gambar II.26 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017


Sumber: BPS Kab. Bandung, 2017; LKPJ Kab. Bandung Tahun 2016

2) Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja atau berada dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun. Rentang usia tersebut termasuk ke dalam rentang usia produktif. Sebanyak 66,7% penduduk Kabupaten Bandung berada pada rentang usia produktif. Penduduk usia produktif ini kemudian dibagi ke dalam kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja ialah penduduk usia kerja yaitu di atas 15 tahun yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja ialah penduduk usia kerja yaitu di atas 15 tahun yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Pada tahun 2015, sebanyak 1.498.733 penduduk Kabupaten Bandung merupakan penduduk yang termasuk angkatan kerja dan sebanyak 2.517.769 penduduk Kabupaten Bandung merupakan penduduk yang bukan angkatan kerja.

Tabel II.26 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2011-2017

KEGIATAN	TAHUN					
	2011	2012	2013	2014	2015	2017
ANGKATAN KERJA	1.393.432	1.496.741	1.565.997	1.628.076	1.498.733	1.649.064
BEKERJA	1.248.267	1.323.166	1.407.503	1.490.031	1.438.365	1.584.391
PENGANGGUR	145.165	173.575	158.494	138.045	60.368	64.673
BUKAN ANGKATAN KERJA	846.752	770.787	838.451	832.906	1.019.006	976.445
SEKOLAH	190.449	152.260	153.290	183.190	209.998	226.144
MENGURUS RUMAH TANGGA	536.378	502.973	565.481	531.523	659.518	653.331
LAINNYA	119.925	115.554	119.680	118.193	149.490	96.970
PENDUDUK USIA KERJA	2.240.184	2.267.528	2.404.448	2.460.982	2.517.739	2.625.509
TPAK (%)	62,20	66,01	65,13	66,16	59,53	62,81
TPT (%)	10,42	11,60	10,12	8,48	4,03	3,92
TKK (%)	89,58	88,40	89,88	91,52	95,97	96,08

Sumber: BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2017, diolah Pusdatinaker



Selain indikator-indikator kesejahteraan masyarakat yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga indikator lain yang mampu menggambarkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Berikut adalah rangkuman kondisi indikator makro sosial ekonomi pembangunan Kabupaten Bandung.

Tabel II.27 Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2015-2017

No	Indikator	Tahun		
		2015	2016	2017
A	Indikator Makro Sosial			
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.534.112	3.596.623	3.657.701
2	LPP (%)	1,8	1,77	1,70
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,00	7,61	7,36
4	IPM (Metode Baru)	70,05	70,69	71,02
5	RLS (th)	8,41	8,50	8,59
6	HLS (th)	12,13	12,42	12,60
7	AHH (th)	73,07	73,10	73,15
8	Indeks Pendidikan (Metode Baru)	61,73	63,83	63,63
9	Indeks Kesehatan (Metode Baru)	81,65	81,69	81,77
10	Angka Ketergantungan	51,13	51,16	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	59,53	60	62,81
12	Tingkat Kesempatan Kerja	95,97	95	96,08
13	Tingkat Pengangguran	4,03	4	3,92
B	Indikator Makro Ekonomi			
1	LPE (%)	5,89	6,33	6,18
2	Inflasi PDRB (%)	6,09	4,15*	
3	PDRB ADHB (juta rupiah)	85.793.090,40	94.114.297,20*	103.362.819
4	PDRB ADHK (juta rupiah)	63.211.075,00	68.144.362,00*	73.051.179
5	PDRB/KAP (ADHB)	24.275.714	26.167.407*	
6	PDRB/KAP (ADHK)	18.306.428	18.946.763*	
7	Pengeluaran (ribuan rupiah)	9.375	9.580	9.593
8	Indeks Pengeluaran	68,17	68,82	68,87

*Angka Perkiraan Tim LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2017; Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung 2016; LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2016

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung dilakukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai – nilai budaya daerah di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh global. Pentingnya jati diri dan nilai – nilai daerah ini juga merupakan sebuah amanat yang tercantum baik dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun provinsi. Namun kondisi yang terjadi saat ini justru terdapat pemudaran nilai – nilai dan jati diri budaya daerah khususnya budaya Sunda bagi Kabupaten Bandung. Nilai – nilai kesundaan ini tidak hanya meliputi pemahaman terhadap nilai budaya dan kesenian Sunda tetapi juga meliputi penggunaan Bahasa Sunda sebagai bahasa daerah.

Adapun beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk dapat melestarikan nilai dan budaya Sunda ini adalah dengan melakukan peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Bandung seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti bekerja keras, gotong royong,



dan penghargaan terhadap nilai kebudayaan dan bahasa. Para pemuda yang merupakan calon penerus pengembangan wilayah Kabupaten Bandung merupakan sasaran yang tepat bagi pelestarian nilai dan budaya sunda ini. Oleh karena itu, perlu juga mempersiapkan pemuda yang aktif, produktif, serta berprestasi salah satunya di bidang olahraga.

Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa olahraga belum menjadi prioritas di kalangan pemuda. Padahal kebiasaan olahraga akan menghasilkan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. Kegiatan olahraga juga merupakan sebuah bentuk kegiatan yang positif di kalangan pemuda. Kegiatan positif ini akan mengisi waktu luang pemuda di Kabupaten Bandung agar tidak terjerumus ke dalam vandalisme dan radikalisme yang trennya semakin meningkat di Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, diperlukan upaya dari pemerintah untuk memasyarakatkan kembali kebiasaan olahraga.

Secara tidak langsung, perkembangan seni, budaya, dan olahraga berkorelasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan tersebut. Adapun perkembangan sarana seni, budaya, dan olahraga di Kabupaten Bandung tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.28 Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga Kabupaten Bandung Tahun 2014-2015

No	Capaian Pembangunan	2014	2015
1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Terdata	684
		Terdaftar	139
2.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	3	2
3.	Jumlah sanggar seni	623	
4.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	74	74

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2017; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dibagi ke dalam 2 (dua) fokus yaitu fokus layanan urusan pemerintah wajib dan fokus layanan urusan pemerintah pilihan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah kabupaten dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren pemerintahan wajib di bagi ke dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintah wajib yang termasuk ke dalam pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman; ketertiban umum; dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sementara itu, urusan pemerintahan wajib yang tidak termasuk ke dalam pelayanan dasar terdiri dari tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi; usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kerajinan.

2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Sub bab ini akan membahas gambaran umum dan kondisi daerah untuk bidang urusan pemerintahan wajib daerah yang termasuk ke dalam pelayanan dasar yaitu bidang pendidikan,



kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman; ketertiban umum; dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

1) Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut menjadi modal bagi pembangunan daerah. Pemerintah sebagai pelayanan masyarakat diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai. Adapun gambaran umum kondisi daerah terkait urusan pendidikan dapat dilihat berdasarkan indikator – indikator kinerja sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APS dihitung terhadap perbandingan jumlah siswa baik pada jenjang SD, SMP, maupun SMA/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing tingkat jenjang pendidikan yakni rentang 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD/ sederajat, rentang 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP/ sederajat, dan rentang 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA/ sederajat. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Namun, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan karena penurunan dan peningkatan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah tanpa memperhatikan asal wilayah.

Berdasarkan hasil analisis, peluang paling besar untuk mengakses pendidikan ialah pada jenjang SD/ sederajat dimana angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun hampir mencapai 100% yaitu sebesar 99,98% pada tahun 2017. Pada kelompok umur 13-15 tahun, APS untuk tingkat pendidikan SMP/ sederajat masih tergolong tinggi yaitu sebesar 97,18%. Hal ini sejalan dengan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bandung adalah 8,5 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Pada tingkat pendidikan SMA/ sederajat, terdapat penurunan yang cukup signifikan untuk APS penduduk usia 16-18 tahun. APS pada tingkat pendidikan SMA/ sederajat hanya sebesar 50,03% yang artinya dari total jumlah penduduk usia 16-18 tahun, hanya kurang dari setengahnya yang berpartisipasi pada pendidikan formal tingkat SMA/ sederajat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan tahun 2017, lulusan SMP/ sederajat yang tidak melanjutkan ke tingkat SMA/ sederajat tergolong tinggi dengan persentase sebesar 14,22%. Peluang penduduk usia 16-18 tahun dalam mengakses pendidikan tingkat SMA/ sederajat sangat kecil dibandingkan dengan peluang pada tingkat pendidikan lainnya. Hal ini dapat dikarenakan minimnya sarana pendidikan di tingkat sekolah menengah atas. APS yang kecil dapat juga dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat untuk dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga banyak penduduk yang putus sekolah sebelum mengenyam pendidikan di jenjang SMA/ sederajat. Penyebab lain diantaranya adanya keterbatasan ekonomi sehingga penduduk usia 16-18 tahun lebih memilih untuk bekerja dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA/ sederajat.

Tabel II.29 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	SD/MI							
1.	Jumlah murid usia 7-12 tahun	Orang	395.113	394.941	389.681	394.209	387.863	391.038

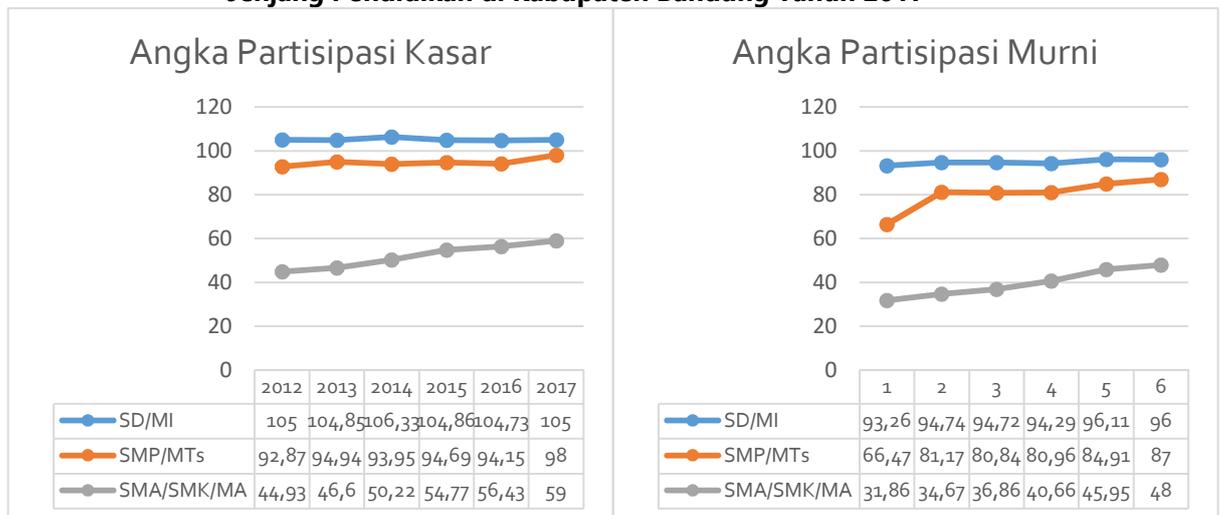


No	Jenjang Pendidikan	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Orang	397.093	396.162	389.893	394.338	387.951	391.130
3.	APS SD/MI	Indeks	99,50	99,69	99,95	99,97	99,98	99,98
II. SMP/MTs								
1.	Jumlah murid usia 13-15 tahun	Orang	160.133	167.954	177.374	180.998	187.430	190.212
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Orang	168.281	174.344	182.833	186.440	192.883	195.722
3.	APS SMP/MTs	Indeks	95,16	96,33	97,01	97,08	97,17	97,18
III. SMA/MA								
1.	Jumlah murid usia 16-18 tahun	Orang	63.798	70.768	73.839	82.219	95.489	101.474
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	Orang	186.171	190.634	189.766	193.300	201.289	202.821
3.	APS SMA/MA	Indeks	34,27	37,12	38,91	42,53	47,44	50,03

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2017

APS dikelompokkan ke dalam Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Pengukuran APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Pada tahun 2017, APM Kabupaten Bandung untuk jenjang sekolah dasar adalah 96 yang artinya 96% anak usia sekolah SD/MI dapat bersekolah tepat waktu. APM untuk jenjang SMP/MTs adalah 87 dan APM untuk SMA/SMK/MA adalah 48. APM pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA ini masih terhitung kecil apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat mengingat Kabupaten Bandung memiliki posisi yang cukup bagus pada komponen pembentuk IPM. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah di Kabupaten Bandung yang belum dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Gambar II.27 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2017



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2018



b. Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan kemampuan sarana pendidikan untuk dapat menampung semua penduduk dalam usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Selama kurun waktu tahun 2012-2017, rasio ketersediaan sekolah di jenjang SD/MI dan SMA/MA cenderung fluktuatif. Sementara itu, untuk jenjang SMP/MTs rasio ketersediaan sekolahnya selalu mengalami penurunan sejak 2012 hingga 2016. Penurunan rasio ketersediaan sekolah ini terjadi ketika jumlah penduduk pada usia jenjang pendidikan tertentu mengalami peningkatan namun tidak diiringi dengan peningkatan penyediaan sarana pendidikan. Sementara peningkatan rasio ketersediaan sekolah dapat dikarenakan oleh dua hal yaitu meningkatnya jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu atau tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Bandung tahun 2017 adalah 41,34 sekolah per 10.000 penduduk. Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Bandung tahun 2017 adalah 26,26 sekolah per 10.000 penduduk. Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA di Kabupaten Bandung tahun 2017 adalah 17,06 sekolah per 10.000 penduduk. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka rasio ketersediaan sekolahnya pun semakin rendah.

Tabel II.30 Rasio Ketersediaan Sekolah Berdasarkan Usia Sekolah di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. SD/MI							
1.	Jumlah Sekolah	1.578	1.596	1.604	1.604	1.606	1.617
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	397.093	396.162	328.653	394.338	387.951	391.130
3.	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Kelompok Usia 7-12	39,74	40,29	48,81	40,68	41,40	41,34
II. SMP/MTs							
1.	Jumlah Sekolah	456	476	478	489	493	514
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	168.281	174.344	176.209	186.440	192.883	195.722
3.	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Kelompok Usia 13-15	27,10	27,30	27,13	26,23	25,56	26,26
III. SMA/MA							
1.	Jumlah Sekolah	269	294	312	319	324	346
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	186.171	190.634	186.876	193.300	201.289	202.821
3.	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Kelompok Usia 16-18	14,45	15,42	16,70	16,50	16,10	17,06

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2017

c. Rasio guru/murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Angka rasio ini menunjukkan ketersediaan tenaga pengajar dan juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran yang berkualitas. Berdasarkan SPM pendidikan dasar, minimal tersedia 1 (satu) orang guru SD/MI untuk setiap 32 peserta didik. Selama kurun waktu 2012-2017, rasio guru/murid untuk jenjang SD/MI berfluktuatif namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2016. Pada tahun 2017, ketersediaan guru SD/MI di Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 395 guru per 10.000 siswa SD, paling rendah dibandingkan ketersediaan guru di jenjang pendidikan lainnya. Hal ini dikarenakan tenaga pengajar SD/MI sebagian besar mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus. Namun dilihat dari tahun 2012 hingga 2017, terdapat peningkatan jumlah guru dibandingkan



murid dimana rasionya pada tahun 2017 adalah 25 murid untuk satu orang guru. Rasio guru/murid untuk jenjang SD/MI tersebut masih memenuhi standar pelayanan minimal dimana maksimal satu guru untuk 32 peserta didik. Rasio guru/murid untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA di Kabupaten Bandung terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini dapat mengindikasikan dua hal yaitu adanya penurunan jumlah tenaga pengajar atau adanya peningkatan jumlah murid. Pada tahun 2017, ketersediaan guru di Kabupaten Bandung yaitu 509 guru per 10.000 siswa SMP/MTs atau 1 guru untuk 19 siswa dan 524 guru per 10.000 siswa SMA/MA atau 1 guru untuk 19 siswa. Adanya penurunan ketersediaan guru ini disebabkan rendahnya kesejahteraan guru khususnya upah tenaga pendidik non pns.

Tabel II.31 Jumlah Guru dan Murid Per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. SD/MI							
1.	Jumlah Guru	17.097	17.069	16.944	16.763	17.063	16.079
2.	Jumlah Murid	416.951	415.578	414.578	413.501	406.319	407.380
3.	Rasio Guru/Murid	410,05	410,92	408,70	405,39	419,94	394,69
4.	Rasio Guru/Murid	1:24,38	1:24,34	1:24,46	1:24,67	1:23,81	1:25,34
II. SMP/MTs							
1.	Jumlah Guru	10.988	11.205	11.266	11.416	11.140	9.314
2.	Jumlah Mrid	156.276	165.515	171.778	176.548	181.602	182.811
3.	Rasio Guru/Murid	703,12	676,98	655,85	646,62	613,43	509,49
4.	Rasio Guru/Murid	1:14,22	1:14,77	1:15,24	1:15,46	1:16,3	1:19,6
III. SMA/MA							
1.	Jumlah Guru	7.736	8.212	8.783	9.017	6.284	6.556
2.	Jumlah Murid	83.648	88.828	95.288	105.879	113.596	125.105
3.	Rasio Guru/Murid	924,83	924,48	921,73	851,63	553,19	524,04
4.	Rasio Guru/Murid	1:10,81	1:10,81	1:10,84	1:11,74	1:18,07	1:19,1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2017

d. Angka putus sekolah

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini digunakan untuk mengukur kualitas dalam pembangunan di bidang pendidikan. Di Kabupaten Bandung, angka putus sekolah terbilang cukup rendah di semua jenjang bahkan tidak mencapai 1%. Angka putus sekolah di seluruh jenjang selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, angka putus sekolah SD/MI hanya sebesar 0,002% sementara angka putus sekolah di tingkat SMP/MTs adalah sebesar 0,06% dan angka putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA adalah sebesar 0,25%. Adanya penurunan angka putus sekolah ini mengartikan bahwa tingkat pelayanan pendidikan di Kabupaten Bandung semakin baik hal ini seiring dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bandung.

Tabel II.32 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Angka Putus Sekolah	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI	0,07	0,04	0,04	0,03	0,03	0,002
SMP/MTs	0,44	0,3	0,34	0,17	0,14	0,06
SMA/SMK/MA	0,32	0,63	0,57	0,31	0,31	0,25

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2018



2) Kesehatan

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan kesehatan dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Jumlah dan persebaran rumah sakit akan meningkatkan pelayanan kesehatan Kabupaten Bandung karena memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Pada tahun 2017, Kabupaten Bandung memiliki 7 rumah sakit yang terdiri dari 3 rumah sakit daerah, 1 rumah sakit provinsi, 2 rumah sakit swasta, 1 rumah sakit AD/AU/AL/POLRI. Dilihat berdasarkan standar kebutuhan rumah sakit di suatu daerah sesuai dengan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan di Perkotaan, jumlah rumah sakit di Kabupaten Bandung belum memenuhi standar minimal kebutuhan rumah sakit untuk seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Bandung. Idealnya, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.596.623 jiwa, Kabupaten Bandung membutuhkan 14 unit rumah sakit. Akan tetapi, saat ini untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Bandung di tahun 2017 melayani 552.528 jiwa/unit yang mana seharusnya hanya melayani 240.000jiwa/unit.

Tabel II.33 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rumah Sakit Daerah	4	3	3	3	3	3
2.	Rumah Sakit Propinsi	0	1	1	1	1	1
3.	Rumah Sakit Swasta	2	2	2	2	2	2
4.	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1	2
	TOTAL	7	7	7	7	7	7
	Jumlah Penduduk	3.351.048	3.415.700	3.470.393	3.534.112	3.596.623	3.657.701
	Rasio	1:478.721	1:487.957	1:495.770	1: 441.764	1: 449.578	1:522.528

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2018; Data Pokok Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2013-2014; SIPD Kabupaten Bandung 2015

b. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar serta mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pada tahun 2017, Kabupaten Bandung memiliki 4.289 unit posyandu terdaftar yang melayani 286.873 jiwa balita. Rasio posyandu terhadap balita di Kabupaten Bandung adalah sekitar 1:67 yang berarti satu unit posyandu di Kabupaten Bandung melayani sekitar 67 balita usia 0-3 tahun. Rasio ini cenderung stabil selama kurun waktu 2012-2017. Dari segi kecukupan pelayanan minimal, jumlah posyandu di Kabupaten Bandung telah memenuhi standar minimal untuk kebutuhan posyandu.

Tabel II.34 Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Posyandu	4.081	4.155	4.148	4.150	4.198	4.289
2.	Jumlah Balita (0-3 tahun)	287.768	269.201	277.543	289.874	289.874	286.873



No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.	Rasio	1:71	1:65	1:67	1:70	1:69	1:67

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2017; Data Pokok Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

c. Rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu (Pustu) per satuan penduduk

Puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu (Pustu) merupakan sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Saat ini, puskesmas diharapkan mejadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya maka akan semakin memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Dalam kurun waktu 2012-2017, rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu per satuan penduduk terus mengalami penurunan. Artinya, setiap tahun puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu melayani semakin banyak penduduk. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penduduk setiap tahunnya yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah sarana puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu. Bahkan, sejak tahun 2013 jumlah sarana kesehatan tersebut terus mengalami penurunan. Akan tetapi apabila dihitung berdasarkan standar kebutuhan minimal, jumlah sarana kesehatan ini masih memenuhi standar dimana untuk 3.657.601 penduduk minimal dibutuhkan 30 puskesmas dan di Kabupaten Bandung telah memiliki 62 puskesmas. Secara persebarannya, puskesmas di Kabupaten Bandung hampir merata di seluruh kecamatan dengan rata-rata tiap kecamatan memiliki 2 puskesmas.

Tabel II.35 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Puskesmas	62	62	62	62	62	62
2	Poliklinik	24	148	148	131	131	133
3	Pustu	69	86	85	78	78	86
TOTAL		155	296	295	271	271	281
4	Jumlah Penduduk	3.351.048	3.415.700	3.470.393	3.534.112	3.596.623	3.657.601
	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	1:21.620	1:11.540	1:11.764	1: 13.041	1:13,272	1:13.016
5	Jumlah Kecamatan	31	31	31	31	31	31
	Rasio Puskesmas per Kecamatan	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2018; Data Pokok Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

d. Rasio tenaga medis/dokter per satuan penduduk

Gambaran mengenai ketercukupan tenaga medis dalam suatu wilayah dapat diukur dengan menggunakan jumlah dokter per 100.000 penduduk atau rasio tenaga medis/ dokter per satuan penduduk. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan tertentu. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025, target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2019 diantaranya rasio dokter umum 45 per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi 13 per 100.000 penduduk. Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki nilai rasio dokter terhadap 100.000 penduduk sebesar 10,90 dari target 45 dokter. Hal ini menempatkan Jawa Barat ke dalam provinsi dengan rasio dokter terhadap 100.000 penduduk kedua terendah di Indonesia. Dalam lingkup Kabupaten Bandung, jumlahnya sudah lebih baik di atas rata-rata rasio dokter di Provinsi Jawa Barat. Rasio tenaga dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Bandung adalah 11,86. Meskipun nilainya lebih besar dibandingkan Jawa



Barat, namun nilai ini menunjukkan bahwa masih besarnya kebutuhan tenaga medis di Kabupaten Bandung untuk melayani jumlah penduduk yang tersedia. Bahkan rasio tersebut masih sangat jauh untuk memenuhi target nasional untuk rasio dokter per 100.000 penduduk.

Tabel II.36 Rasio Tenaga Medis/ Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2017

No.	Uraian	dr. Umum	dr Gigi	Total Tenaga Medis
1.	Di Puskesmas	143	69	212
2.	Di RS	291	43	334
3.	Jumlah Tenaga	434	112	546
4.	Jumlah Penduduk	3.657.701		
5.	Rasio Tenaga Medis/Dokter	1: 11,86	1: 3,06	1: 14,93

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2018

e. Jumlah kematian ibu dan balita

Ibu dan anak merupakan komponen dalam keluarga yang termasuk ke dalam kelompok rentan apabila dikaitkan dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu, dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak serta menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia. Keberhasilan upaya kesehatan ibu dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab – sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Bandung cenderung fluktuatif dari tahun 2012 hingga 2017. Namun jumlahnya selalu berkisar pada 40an kasus. Pada tahun 2017 terdapat 44 kasus kematian ibu. Meskipun tidak memiliki perubahan yang cukup signifikan, tren jumlah kasus kematian ibu sudah mengalami penurunan.

Salah satu hal yang mempengaruhi jumlah kematian ibu adalah fase persalinan. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu upaya untuk menurunkan jumlah kasus kematian ibu. Pada tahun 2017, jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga medis sebanyak 64.537 dimana jumlah ini semakin meningkat setiap tahunnya. Selain ditolong oleh tenaga medis, terdapat juga persalinan yang ditolong oleh tenaga non medis. Hal ini banyak dilakukan untuk beberapa daerah dengan akses yang sulit maupun keterbatasan ketersediaan tenaga medis.

Selain kesehatan ibu, kesehatan anak juga perlu dipelihara untuk mempersiapkan generasi akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Salah satu upayanya melalui penurunan angka kematian anak. Indikator yang berhubungannya adalah angka kematian balita. Pada tahun 2017, jumlah kasus kematian balita di Kabupaten Bandung adalah 253. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan tahun – tahun sebelumnya meskipun trennya cenderung fluktuatif.

Tabel II.37 Jumlah Kematian Ibu, Jumlah Kematian Balita, Jumlah Persalinan Medis dan Non Medis Tahun 2012-2017

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kasus kematian ibu	49	47	48	38	46	44
2.	Jumlah kasus kematian balita	400	232	241	314	310	253
3.	Jumlah Persalinan Medis	57.114	57.696	60.196	62.162	61.764	64.537
4.	Jumlah Persalinan Non Medis			3.373	2.219	947	1.768

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2018

f. Jumlah balita gizi baik

Status gizi baik pada balita perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini dikarenakan gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Apabila status gizi balita buruk, maka akan menghambat pertumbuhan fisik, mental, maupun kemampuan berfikir yang tentu akan berpengaruh pada penurunan produktivitas kerja. Oleh karena itu, balita adalah aset yang perlu dipelihara mengingat usia balita adalah usia dimana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat.

Kabupaten Bandung telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan gizi balita. Berdasarkan data tahun 2012-2017, prevalensi balita gizi buruk cenderung mengalami peningkatan diikuti dengan menurunnya persentase balita gizi baik. Pada tahun 2017, persentase balita gizi buruk meningkat menjadi 0,04. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan kualitas kesehatan balita. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait imunisasi dan kebutuhan gizi anak.

Tabel II.38 Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Balita Gizi Baik	263.494	241.303	251.119	289.776	289.874	254.917
2.	Balita Gizi Buruk	99	145	97	98	98	111
3.	Balita Seluruhnya (Usia 0-3 tahun)	287.768	269.201	285.427	289.874	289.874	286.873
4.	Persentase :						
	a) Gizi Baik	91,56	89,64	87,98	99,97	99,97	94,62
	b) Gizi Buruk	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2017; Data Pokok Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Jalan mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan keamanan. Jaringan jalan merupakan sebuah prasarana yang dapat mendorong dan menggerakkan roda perekonomian suatu wilayah. Ketersediaan jalan dengan kualitas yang baik dan memadai mampu melancarkan kegiatan pergerakan manusia dan barang secara ideal. Sebagai salah satu prasarana transportasi, kondisi jalan harus selalu terpelihara dengan baik. Kinerja jaringan jalan dapat dikategorikan sebagai jalan kondisi baik, sedang rusak, rusak, dan rusak berat. Selama kurun waktu 2012-2017, terdapat peningkatan kualitas jaringan jalan di Kabupaten Bandung. Dari total 1.155,345 km jalan kabupaten, tercatat sebesar 68,42% jalan dalam kondisi baik, 18,76% jalan dalam kondisi sedang, dan 12,79% dalam kondisi rusak dan rusak berat. Sebagian besar jalan dengan kondisi rusak berat ialah jalan – jalan di wilayah timur kabupaten seperti Kecamatan Cicalengka, Rancaekek, Nagreg, Cikancung, Majalaya, Solokanjeruk, Paseh, Ibum, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Kertasari, dan Pacet. Hal ini dikarenakan muatan kendaraan yang berlebih (*overloaded*), kurang baiknya sistem drainase jalan, ketidaksesuaian standar pembangunan jalan. Setaip tahun, jalan dengan kondisi baik terus meningkat. Namun terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan kondisi jalan buruk terus meningkat seperti umur rencana jalan, cuaca, bencana alam seperti banjir dan longsor yang langsung menimpa jalan. Adapun wilayah – wilayah yang belum terjangkau jalan kabupaten ialah daerah terpencil atau dataran tinggi yang mempunyai jalan sempit sehingga sulit untuk dijangkau dan dilakukan perbaikan.

Gambar II.28 Grafik Perkembangan Panjang Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2014-2017


Sumber: Dinas PUPR Kab. Bandung Tahun 2013; Data Pokok Perencanaan Pembangunan Kab. Bandung Tahun 2013-2014

Tabel II.39 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No.	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kondisi Baik	500,78	587,416	627,11	661,16	734,222	789,43
2.	Kondisi Sedang	233,06	237,735	262,98	271,00	250,363	186,603
3.	Kondisi Rusak	213,46	158,724	120,75	121,58	100,490	100,490
4.	Kondisi Rusak Berat	208,05	171,472	144,52	101,66	70,270	70,27
5.	Jalan secara keseluruhan	1.155,34	1.155,35	1.155,35	1.155,4	1.155,345	1146,793
6.	Proporsi Kondisi Baik (%)	43,34	50,84	54,28	57,22	63,55	68,83
7.	Proporsi Kondisi Sedang Rusak (%)	20,17	20,58	22,76	23,46	21,67	16,27
8.	Proporsi Kondisi Rusak (%)	18,48	13,74	10,45	10,52	8,70	8,76
9.	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	18,01	14,84	12,51	8,80	6,02	6,12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2018, Data Pokok Perencanaan Pembangunan Tahun 2013-2015; SIPD 2016; SIPD 2017; LKPJ 2016

b. Proporsi jumlah jembatan

Jembatan berperan dalam menghubungkan daerah-daerah yang kemudian dapat meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah. Peningkatan aksesibilitas suatu wilayah mampu memperlancar distribusi atau pergerakan orang dan barang. Secara tidak langsung, jembatan memiliki peran dalam mendukung pergerakan dan pertumbuhan perekonomian wilayah. Peningkatan jumlah jembatan di Kabupaten Bandung juga didorong oleh banyaknya usulan dari desa untuk menunjang koneksi antar daerah yang terhalangi sungai, jurang, dan lain – lain. Berdasarkan hasil evaluasi, dalam kurun waktu 2014-2016 proporsi jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, proporsi jembatan baik di Kabupaten Bandung adalah sebesar 88,41%.

Tabel II.40 Proporsi Jembatan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No.	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Kondisi Baik (unit)	582	663	675	703	781	786
2.	Kondisi Rusak (unit)	222	178	180	164	102	103
3.	Jumlah Keseluruhan* (unit)	804	841	855	867	883	889
4.	Proporsi Kondisi Baik (%)	72,39	82,46	78,94	81,93	88,45	88,41
5.	Proporsi Kondisi Rusak (%)	27,61	17,54	21,05	18,07	11,55	11,58

*Berdasarkan hasil pendataan tahun berjalan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, 2018; Data SIPD 2017

c. Kondisi jaringan irigasi

Jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung sektor pertanian khususnya pertanian lahan basah. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaannya. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam jaringan irigasi teknis dan non teknis. Pada tahun 2017, panjang jaringan irigasi Kabupaten Bandung adalah 1.267,41 km dengan rincian panjang irigasi teknis 28,39 km dan panjang jaringan irigasi non teknis 1.239,41 km. Ditinjau dari persentasenya, hampir 96,90% jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Bandung merupakan jaringan irigasi non teknis. Apabila dilihat berdasarkan kondisinya, hanya 63,67% saja jaringan irigasi teknis dengan kondisi baik dan 54,32% jaringan irigasi non teknis dengan kondisi baik. Hampir setengah dari panjang jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Bandung baik itu teknis maupun non teknis kondisinya dalam kondisi rusak ringan maupun rusak berat. Hal ini akan berdampak pada kinerja jaringan irigasi dan produktivitas lahan pertanian.

Tabel II.41 Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Kewenangan	Kondisi	2012 (km)	2013 (km)	2014 (km)	2015 (km)	2016 (km)	2017 (km)
1.	Kabupaten Bandung (Teknis)	Baik	25,51	25,98	9,01	15,93	16,93	18,08
		Rusak Ringan	6,87	6,59	6,75	7,57	7,03	6,33
		Rusak Berat	3,80	3,61	15,46	4,88	4,43	3,99
		Total	36,18	36,18	34,68	28,38	28,39	28,39
2.	Kabupaten Bandung (Non Teknis)	Baik	791,60	797,43	378,81	607,51	610,13	673,02
		Rusak Ringan	211,45	207,96	378,81	359,16	358,77	322,89
		Rusak Berat	81,33	78,99	29,80	272,36	270,12	243,11
		Total	1.084,38	1.084,38	787,42	1.239,03	1.239,02	1239,02

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, 2017

Ditinjau berdasarkan luas areal irigasi, khusus irigasi teknis, irigasi dengan luas areal 0-25 ha pengelolannya menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah desa. Adapun irigasi dengan luas areal >25 ha pengelolannya menjadi kewenangan kabupaten. Dari total area irigasi seluas ±19.502,12 ha di tahun 2017, 85,41% diantaranya atau ±16.671 ha merupakan areal irigasi dengan kewenangan desa. Sisanya yaitu sebesar 14,59% atau ±2.848,31 ha merupakan areal irigasi dengan kewenangan kabupaten.

Sementara itu, untuk irigasi non teknis, irigasi dengan luas areal <1.000 ha menjadi kewenangan kabupaten, irigasi dengan luas areal 1.000-2.000 ha menjadi kewenangan provinsi. Irigasi lintas juga menjadi irigasi non teknis dengan kewenangan berapa di provinsi. Pada tahun



2017, total luas areal irigasi non teknis adalah seluas ±46.592,40 ha. Dari total tersebut, hanya sebesar 24,77% atau ±11.542,04 ha yang menjadi kewenangan kabupaten. Adapun untuk irigasi non teknis kewenangan provinsi dengan luasan areal irigasi 1.000-3.000 ha mencakup sekitar 16,67% atau sekitar ±7.765,12 ha yang tersebar di beberapa daerah irigasi, antara lain DI Leuwikuya, DI Cirasea, DI Wangisagara, DI Wanir, dan DI Ciyasana. Sedangkan untuk irigasi yang bersifat lintas irigasi, cakupan arealnya mencapai 58,56% dari total luasan irigas non teknis atau sebesar ±27.285,24 ha yang terbesar di beberapa daerah irigasi antara lain DI Leuwikuya, DI Malang, DI Lagadar, DI Sudiplak, DI Mengger, DI Depok, DI Ciranjeng, DI Ciare, DI Buang Batu, dan DI Ciateul.

Tabel II.42 Kondisi Areal Irigasi di Kabupaten Bandung Tahun 2017

No	Areal Irigasi	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
A.	Irigasi Non Teknis		
1.	Kewenangan Desa dengan Areal 0 – 25 Ha	2.848,31	14,59
2.	Kewenangan Kabupaten dengan Areal > 25 Ha	16.671,81	85,41
	TOTAL	19.520,12	100
B.	Irigasi Teknis		
1.	Kewenangan Kabupaten dengan Areal < 1.000 Ha	11.542,04	24,77
2.	Kewenangan Provinsi dengan Areal 1.000 – 3.000 Ha	7.765,12	16,67
3.	Kewenangan Provinsi (Irigasi Lintas)	27.285,24	58,56
	TOTAL	46.592,40	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, 2017

d. Jaringan drainase

Jaringan drainase di Kabupaten Bandung dikelompokkan ke dalam drainase primer, sekunder, dan tersier. Jaringan drainase terkait erat dengan keberadaan Sungai Citarum dari hulu ke hilir beserta anak-anak sungainya. Sungai Citarum merupakan sungai lintas kabupaten/kota yang mata airnya terletak di Gunung Wayang (Kabupaten Bandung) dan mengalir sepanjang 269 km hingga bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum memiliki peran yang penting yaitu sebagai penyedia air baku ibukota sehingga perannya memiliki dampak ekonomi serta secara regional menjadikan wilayah sungai ini menjadi strategis sehingga kewenangannya berada di pemerintah pusat dan provinsi. Sementara itu, Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dimana Sungai Citarum merupakan muara bagi anak-anak sungai yang ada di Cekungan Bandung.

Banjir atau genangan tahunan, 5 tahunan, dan 25 tahunan yang terjadi perlu mendapatkan penanganan yang menyeluruh dari hulu ke hilir, baik secara struktural maupun non struktural. Kabupaten Bandung dan sekitarnya memiliki beberapa catatan banjir besar akibat meluapnya Sungai Citarum yang terjadi pada tahun 1931, 1945, 1977, 1982, 1986, 1988, 2005, 2010, dan 2014. Pada saat ini, hampir setiap tahun terjadi luapan di Sungai Citarum. Banjir di Kabupaten Bandung merupakan sebuah persoalan kompleks yang perlu diatasi tidak hanya dari hulu ke hilir sungai melainkan juga terkait kewenangan dan regulasi dalam pengelolaan sungai. Salah satu faktor yang menyebabkan banjir di Kabupaten Bandung adalah belum optimalnya normalisasi sungai secara berkala dan berkesinambungan. Normalisasi sungai ini menjadi tanggung jawab dan kewenangan baik dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Normalisasi sungai diperlukan karena salah satu penyebab banjir adalah adanya pendangkalan sungai. Hal ini merupakan dampak dari adanya erosi yang terjadi akibat alih fungsi lahan serta tidak teraturnya pola tanam.

Pada lingkup Kabupaten Bandung, aliran Sungai Citarum menjadi muara bagi empat Sub DAS antara lain Sub DAS Citarik, Sub DAS Cirasea, Sub DAS Ciwidey, dan Sub DAS Cisangkuy. Kendati demikian, drainase Kabupaten Bandung dipengaruhi juga oleh drainase Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yaitu dari aliran Sub DAS Cikapundung dan Ciminyak. Beberapa kecamatan menjadi daerah yang rutin terkena banjir akibat meluapnya Sungai Citarum antara lain



Kecamatan Majalaya, Bojongsoang, Baleendah, Banjaran, dan Dayeuhkolot. Sementara itu, lokasi genangan juga terjadi di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Ciparay, Solokan Jeruk, Pameungpeuk, Cangkuang, Soreang, Katapang, Nargahayu, Margaasih, Rancaekek, dan Cileunyi.

Tabel II.43 Lokasi Titik Genangan, Tinggi Genangan, dan Waktu Genangan di Kabupaten Bandung Tahun 2017

No	Lokasi Titik Genangan	Tinggi Genangan (cm)	Waktu Genangan (jam)
Kecamatan Rancaekek			
1	Desa Tanjung Mekar, sekitar PT KAHATEK	50 - 150	10 - 24
2	Desa Tegal Sumedang, Kampung Sukarame	51 - 150	10 - 24
3	Desa Sukamanah, Kampung Tanggeng & Ranca Enteng	52 - 150	10 - 24
4	Desa Rancaekek Wetan, Jl. Bakung RW 1, 8, 10, 17, dan 18	53 - 150	10 - 24
5	Desa Linggar	54 - 150	10 - 24
6	Desa Sukamulya	55 - 150	10 - 24
7	Desa Bojong Loa, Jl Raya Majalaya-Walini	56 - 150	10 - 24
8	Desa Jelegong, Jl. Babakan Jawa	57 - 150	10 - 24
Kecamatan Baleendah			
9	Desa Baleendah sekitar taman kota, simpang siliwangi Baleendah, belakang kantor Kecamatan Baleendah	50 - 200	10 - 24
10	Desa Andir, Cigosol, Jl. Andir - Katapang	50 - 200	10 - 24
11	Desa Jelekong, Jl. Jelekong	50 - 200	10 - 24
12	Desa Rancamanyar, Kampung Tambakan	50 - 200	10 - 24
Kecamatan Solokan Jeruk			
13	Desa Solokan Jeruk, Kampung Bojong Mas, Kampung Ranca Kemit	30 - 100	5 - 15
14	Desa Panyadap, Jl. Bojong-Panyadap dan Jl. Baru	30 - 100	5 - 15
15	Desa Bojong Mas, Kampung Bojong Mas	30 - 100	5 - 15
Kecamatan Soreang			
16	Desa Soreang, Jl. Masjid Al- Fathu, depan puskesmas Soreang, sekitar pasar dan terminal soreang	20 - 40	3 - 10
17	Desa Cingcin, perempatan gading 1, sekitar kantor Bank BRI, depan SD Cingcin	20 - 40	3 - 10
18	Desa Kramat Mulya	20 - 40	3 - 10
19	Desa Parung Serab, Kampung Tengah	20 - 40	3 - 10
20	Desa Pamekaran, depan Bank BJB, sekitar kantor pemadam soreang	20 - 40	3 - 10
Kecamatan Dayeuhkolot Pameungpeuk			
21	Desa Bojong Mangu, sekitar PT FANG TAY, Palasari RW 07, 08, 09	40 - 150	5 - 12
22	Desa Sukasari, Kampung Waas	30 - 100	5 - 15
23	Desa Rama Tungku, Kampung Sayang RW 07 & 09	30 - 100	5 - 10
Kecamatan Dayeuhkolot			
24	Desa Pasawahan, Jl. Palasari - Sayati	50 - 200	10 - 24
25	Desa Dayeuhkolot, sekitar bantaran Sungai Citarum	50 - 200	10 - 24



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

No	Lokasi Titik Genangan	Tinggi Genangan (cm)	Waktu Genangan (jam)
26	Desa Citeureup, Kampung Babakan Leuwi Bandung, Jl. Sukabinus - Sukapura	50 - 200	10 - 24
27	Desa Cangkuang Wetan RW 09	50 - 200	10 - 24
Kecamatan Bojongsoang			
28	Desa Bojongsoang RW 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, & 17	50 - 200	10 - 24
29	Desa Bojongsari RW 01, 06, 07, 17, 18, & 20	50 - 200	10 - 24
30	Desa Tegal Luar RW 01 & 14	50 - 150	10 - 24
31	Desa Cipagalo, Komplek GBA	50 - 200	10 - 24
32	Desa Lengkong RW 09	50 - 200	10 - 24
Kecamatan Kutawaringin			
33	Desa Gajah Mekar, Kampung Cipedung RW 01, Kampung Bumi Sari RW 09	50 - 200	5 - 10
34	Desa Jati Sari, Jl. Jati Sari - Cantilan, Kampung Legok Kandang, Kampung Lamping	50 - 150	5 - 10
Kecamatan Margaasih			
35	Desa Cigondewah, Jl. Inpres	20 - 50	3 - 10
36	Desa Margaasih, Jl. Pinggir Tol RW 15, Jl. Ranca malang	40 - 80	4 - 8
37	Desa Nanjung, Jl. Cibisoro RW 08	30 - 50	5 - 12
38	Desa Mekar Rahayu, Kampung Cicukang	30 - 50	5 - 12
39	Desa Lagadar, Jl. Nanjung Leuwigajah	20 - 40	10 - 24
40	Desa Rahayu, Kampung Babakan RW 07, Kampung Kumambang RW 05, Kampung Cikees RW 06	50 - 100	5 - 15
Kecamatan Banjaran			
41	Desa Banjaran, Jl. Alun-alun Timur Banjaran, Jl. Sekitar Masjid Agung, Kampung Cidemang RW 02, Kampung GBO RW 06	20 - 80	3 - 10
42	Desa Tanjung Sari, depan kantor desa RW 06, depan TP. DMC RW 07, Komplek Sanggar Mas RW 11	30 - 50	2 - 8
43	Desa Kamasan, Gang Masjid RW 02 & 05, sekitar Pabrik ECO RW 07, Duta Kamasan RW 08	50 - 150	10 - 24
44	Desa Neglasari, Kampung Bugel	40 - 120	6 - 12
45	Desa Banjaran Wetan, Kampung Cileutik, dan Kampung Muara	30 - 100	10 - 24
Kecamatan Cangkuang			
46	Desa Tanjung Sari, Kampung Cirengit RW 01, 03, 09, & 10	30 - 100	7 - 12
47	Desa Pananjung, Kampung Sayang dan Citaliktik RW 01 & 02	30 - 100	1 - 5
48	Desa Ciluncat, Villa Merah RW 02	30 - 100	5 - 12
Kecamatan Katapang			
49	Desa Gandasari, Jl. Gandasari Warung Lobak - Ciluncat, Kampung Cipinang & Sukarajin RW 02 & 03	50 - 100	5 - 12
50	Desa Pangauban, Kampung Karamat & Bojong Buah RW 01, 02, & 03	50 - 200	5 - 24



No	Lokasi Titik Genangan	Tinggi Genangan (cm)	Waktu Genangan (jam)
51	Desa Cilampeni, Kampung Bojong Salak RW 21 & 22, Kampung Lebak Muncang	50 - 150	5 - 24
Kecamatan Margahayu			
52	Sekitar Desa Sukamenak, depan Kantor Desa RW 02, 03, Kopo Permai RW 11, 14, 16	50 - 100	1 - 5
53	Desa Margahayu Tengah, Jl. Kopo RW 01, Perumahan Bina Bakti dan Nata Endah RW 15	50 - 100	2 - 5
54	Desa Margahayu Selatan, Cilokotot RW 02, Jl. Dendek RW 06, 07, & 08, Jl. Sekeloa RW 09, Jl. Marke RW 14, 14	50 - 100	1 - 2
55	Desa Sayati, Permata Kopo Blok CA & EA, Sukamenak Indah RW 01,08	50 - 100	3 - 7
Kecamatan Cileunyi			
56	Sekitar Desa Cileunyi Kampung Jaway & Sukarame	50 - 100	5 - 24
57	Desa Cimekar Perumahan Orang, Permata Biru, dan Panyawangan	50 - 100	5 - 24
Kecamatan Ciparay			
58	Sekitar Desa Cikoneng, Kampung Babakan	50 - 100	5 - 10
59	Sekitar Desa Mekarsari, Kampung Palawija dan Leles	50 - 100	5 - 10
60	Sekitar Desa Sumber sari, Perumahan Sapan	50 - 100	5 - 10
61	Desa Serang Mekar, Jl. Provinsi	50 - 100	5 - 10
62	Desa Manggung Harja, Jl. Raya Ciparay - Majalaya	50 - 100	5 - 10
Kecamatan Majalaya			
63	Sekitar alun-alun Majalaya	50 - 100	5 - 10
64	Sekitar Desa Majakerta Kampung Ranca Bali	50 - 100	5 - 10
65	Desa Bojong Kampung Parompong	50 - 100	5 - 10
66	Desa Majasetra sekitar bantaran Sungai Citarum	50 - 100	5 - 10

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018

Tabel II.44 Kondisi DAS Citarum Kabupaten Bandung

DAS/SUB DAS	Panjang (km)	Daerah Tangkapan (ha)	Debit Rata-Rata (m ³ /tahun)	Debit (m ³ /detik)
Citarum	269	268.130	14 milyar	a. Debit di Majalaya: Q50= 3,505 m ³ /detik Q80=0,764 m ³ /detik Q90 = 0,69 m ³ /detik b. Debit di Dayeuhkolot: Q50 = 5,105 m ³ /detik Q80 = 1,24 m ³ /detik Q90 = 0,60 m ³ /detik c. Debit di Nanjung: Q50=33,975m ³ /detik Q80 = 10,32 m ³ /detik Q90 = 8,77 m ³ /detik

Sumber: Laporan Akhir Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk RTRW Kabupaten Bandung



Selain drainase primer, kondisi drainase di Kabupaten Bandung juga dipengaruhi oleh drainase sekunder dan drainase tersier yaitu berupa drainase permukiman. Saat ini, saluran drainase permukiman belum terintegrasi sehingga menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir tahunan di Kabupaten Bandung. Belum terintegrasinya saluran drainase permukiman ini dikarenakan pemanfaatan lahan permukiman belum disertai dengan penyediaan saluran drainase yang disediakan oleh pengembang permukiman. Secara umum, kualitas drainase di Kabupaten Bandung masih buruk, dapat dilihat dari total seluruh panjang drainase hanya 1,47% dalam kondisi baik. Sementara itu, 782,4 km panjang saluran drainase masih tersumbat atau sebesar 56,43% dari panjang jaluran drainase yang ada masih tersumbat. Dari total 1.386,42 panjang drainase, hanya sepanjang 17,29 km saja yang mampu menampung limpasan air. Belum memadainya kapasitas jaringan drainase dalam menampung limpasan air menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi Kabupaten Bandung.

Tabel II.45 Kondisi Drainase di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	353,32	368,03	400,43	446,49	521,60	782,40
2.	Panjang Drainase yang dipakai bangunan liar	264,96	275,99	300,29	334,83	391,20	586,73
3.	Panjang Total Drainase	626,09	652,16	709,57	791,19	924,28	1.386,42
4.	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	1,25	1,25	1,25	1,25	1,24	1,47

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017

e. Persentase bangunan ber-IMB per seluruh bangunan

Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Bandung yang akan mendirikan /membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, wajib memiliki izin membuat bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bandung. Persentase bangunan ber-IMB di Kabupaten Bandung dari tahun 2013 hingga 2015 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, 24,32% bangunan sudah ber-IMB. Adapun hambatan dalam meningkatkan persentase bangunan ber-IMB di Kabupaten Bandung adalah belum tersedianya database bangunan, menurunnya jumlah pemohon IMB yang berskala besar seperti perumahan, industr, perdagangan/ jasa, adanya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dalam hal IMB untuk perusahaan dan perumahan, serta panjangnya alur proses penerbitan IMB akibat regulasi baru.

Tabel II.46 Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	21.045	74.588	74.902	75.262	192.593	275.573
2.	Jumlah Bangunan	865.623	1.014.799	1.015.151	1.015.517	1.132.848	1.133.110
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1/2*100)	2,43%	7,35%	7,38%	7,41%	17%	24,32%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2018



f. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung. Berbagai fungsi RTH terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (objek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai dan identitas kota. Oleh karenanya, ketersediaan RTH dalam kota berdampak pada kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Pengembangan RTH paling sedikit adalah 30% dari luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Pada tahun 2017, RTH di Kabupaten Bandung mencapai 0,19% dari luas wilayah perkotaan yang seluas 24.150,49 ha. Capaian luas RTH publik ini masih jauh memenuhi standar kebutuhan RTH yang seharusnya seluas 4.830,09 ha untuk RTH publik dan 2.415,05 untuk RTH privat sehingga total seharusnya luasan RTH di Kabupaten Bandung adalah 7.245,14 ha. Adapun kesulitan yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung dalam meningkatkan RTH publik adalah adanya keterbatasan lahan milik pemerintah yang dapat dijadikan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau.

Tabel II.47 Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan Per Satuan Wilayah di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	24,150	28,980	41,055	46,290	38.283	46.564
2.	Luas wilayah (Perkotaan)	24.150,49	24.150,49	24.150,49	24.150,49	24.150,49	24.150,49
Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah		0,10	0,12	0,17	0,17	0,15	0,19

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2017

g. Ketersediaan dokumen perencanaan

Dokumen perencanaan diperlukan untuk menjamin program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Beberapa dokumen perencanaan daerah diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) PD, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel II.48 Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017

No	Indikator/Data	2013		2014		2015		2016		2017	
		Ada	Tidak								
1.	Ketersediaan Dokumen RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda	√		√		√		√		√	
2.	Ketersediaan Dokumen RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan Perda	√		√		√		√		√	



No	Indikator/Data	2013		2014		2015		2016		2017	
		Ada	Tidak								
3.	Ketersediaan Dokumen RKPD yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Bupati	√		√		√		√		√	
4.	Ketersediaan Dokumen Renja PD yang Telah Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	√		√		√		√		√	
5.	Ketersediaan Dokumen RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan Perda	√		√		√		√		√	

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Rasio permukiman layak huni dan rasio rumah layak huni

Salah satu kebutuhan dasar penduduk adalah tempat tinggal atau rumah. Kebutuhan penduduk akan rumah semakin meningkat sementara ketersediaan lahan semakin berkurang yang menyebabkan munculnya permukiman-permukiman dengan ketersediaan lahan terbatas bahkan dengan kelayakan yang tidak standar. Masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah cenderung tidak memperhatikan aspek kesehatan dari pentingnya permukiman dan rumah layak huni. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan kurang mampu. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat.

Pada tahun 2012-2013, luas permukiman layak huni di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009-2011 dimana luas permukiman layak huni di Kabupaten Bandung mencapai 13.008,50 ha. Total luas wilayah permukiman di Kabupaten Bandung adalah sebesar 14.297,30 ha yang berarti 88,22% luas wilayah permukiman di Kabupaten Bandung telah didominasi oleh perumahan layak huni. Jumlah unit rumah layak huni di Kabupaten Bandung pada tahun 2017 mencapai 655.298 unit rumah dari jumlah rumah tangga (RT) yang ada sebesar 886.356 rumah tangga (RT), yakni 73,93% rumah tangga di Kabupaten Bandung telah menempati rumah layak huni.

Sementara itu, pada tahun 2014 terjadi peningkatan luas permukiman layak huni menjadi seluas 13.058,50 ha dari total luas wilayah permukiman sebesar 14.297,30 ha. Persentase luas permukiman layak huni terhadap total luas wilayah permukiman telah mencapai 93,78%. Tahun 2015, luas areal permukiman kumuh yang perlu ditata yaitu sekitar 131,22 Ha. Adapun pada tahun



2017 luas permukiman layak huni di Kabupaten Bandung meningkat menjadi sebesar 13.534,10 Ha.

Tabel II.49 Persentase Permukiman Layak Huni dan Jumlah RT yang Menempati Rumah Layak Huni Tahun 2012-2017

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas permukiman layak huni (Ha)	12.508,50	13.008,50	13.058,50	13.178,50	13.408,50	13.534,10
2	Persentase permukiman layak huni	87,48	90,98	91,33	92,17	93,78	94,66
3	Jumlah RT yang menempati rumah layak huni	-	808.275	851.547	933.911	933.911	1.149.320

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2018

b. Rasio luas permukiman yang tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian atau tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Masalah yang terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman. Luas wilayah permukiman di Kabupaten Bandung adalah 16.395 ha pada tahun 2014. Kawasan permukiman tersebut belum semuanya tertata/terorganisir. Dari total luas wilayah permukiman tersebut, sebanyak 90,94% dari luas permukiman yang sudah tertata dan layak huni. Sisanya masih berupa kawasan kumuh yang perlu ditata. Pada tahun 2013, luas areal permukiman kumuh yang perlu ditata yaitu sekitar 1.394,451 ha (Database Perumahan dan Permukiman Kab. Bandung, Bidang Pengembangan Perumahan). Dari total 1.394,451 ha tersebut, sebanyak 0,75% kawasan kumuh pada tahun 2016 dan 0,65% kawasan kumuh pada tahun 2017 sudah diatasi. Meskipun luasan areal permukiman kumuh ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasi penataan kawasan kumuh pertumbuhannya sangat kecil. Rendahnya penataan kawasan kumuh tersebut dikarenakan belum adanya sinkronisasi dan integrasi program mengenai penataan dan pengendalian kawasan kumuh. Selain itu, saat ini juga belum terdapat basis data mengenai deliniasi kawasan kumuh. Rendahnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap ruang/ lahan/ rumah yang layak dan terjangkau merupakan penyebab dari masih terdapatnya kawasan kumuh di Kabupaten Bandung.

c. Persentase rumah tangga berakses air bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), serta swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan sementara Disperkimtan melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air, dan sumur dalam untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan. Sistem yang digunakan ialah melalui pemasangan pipa secara gravitasi.

Sistem penyediaan air bersih perdesaan tidak hanya dilakukan melalui pemasangan pipa secara gravitasi, tetapi juga dilakukan melalui pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal, serta pembangunan terminal air. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan diserahkan kepada masing – masing desa yang dikoordinasikan oleh LKMD atau KPPABD. Akan tetapi, belum seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Bandung terlayani air bersih oleh PDAM. Kabupaten Bandung yang mendapatkan pelayanan PDAM baru sekitar 12,77%. Daerah-daerah perkotaan dan dekat dengan sumber mata air baku cenderung menggunakan jasa PDAM dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Desa yang telah mendapatkan layanan PDAM sebanyak 1010 desa terletak di Kecamatan



Ciwidey, Pasirjambu, Cimaung, Pangalengan, Paseh, Cikancung, Cicalengka, Rancaekek, Majalaya, Solokanjeruk, Ciparay, Baleendah, Arjasari, Banjaran, Canguang, Pameungpeuk, Katapang, Soreang, Kutawaringin, Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan Cileunyi (RAD AMPL, 2015).

Berbicara mengenai kualitas pelayanan air bersih, sejak tahun 2010 hingga 2015 terjadi peningkatan cakupan pelayanan air bersih yang dilakukan oleh Disperkimtan Kabupaten Bandung. Pada tahun 2010, jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih hanya mencapai 320.269 jiwa dimana telah terjadi peningkatan di tahun 2013 yang mencapai 402.795 jiwa. Pada tahun 2017, sebanyak 77,12% penduduk sudah mendapatkan akses air bersih terdiri dari yang dibangun oleh masyarakat sebesar 49,83% dan yang dibangun oleh Disperkimtan sebesar 14,52% serta yang dibangun oleh PDAM sebesar 12,77%.

Tabel II.50 Cakupan Pelayanan Air Bersih Berdasarkan Sumber Pembangunannya Tahun 2017

NO	URAIAN	2017
	Penduduk yang sudah mendapatkan akses air bersih	77,12%
	Terdiri dari :	
1	Persentase Akses air bersih yang dibangun masyarakat	49,83%
2	Persentase Akses air bersih yang dibangun Disperkimtan	14,52%
3	Persentase akses air bersih yang dibangun PDAM	12,77%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2018

Sementara itu, cakupan akses aman terhadap air bersih pada tahun 2017 di kawasan perdesaan tercatat sebesar 12,77% dan di kawasan perkotaan sebesar 14,52%. Nilai ini tergolong rendah dalam selama kurun waktu lima tahun terakhir, namun persentasenya selalu mengalami peningkatan. Penyediaan kualitas air bersih di Kabupaten Bandung khususnya di kawasan perdesaan perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Berdasarkan Statistik Perumahan dan Permukiman (2016), kualitas air tanah di Provinsi Jawa Barat secara umum keruh, berasa, dan berbau dimana kondisi ini merupakan kondisi kedua terburuk se-Indonesia.

Tabel II.51 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah jiwa yang terlayani sarana air bersih perdesaan (jiwa)	353.536	402.795	437.890	459.250	483.386	531.084
2.	Jumlah jiwa yang terlayani sarana air bersih perkotaan (jiwa)	334.435	358.909	381.418	408.482	443.104	467.076
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.351.048	3.401.984	3.476.240	3.494.026	3.596.623	3.657.601
4.	Akses aman terhadap air bersih di kawasan perkotaan (%)	9,98	10,55	10,97	11,69	12,32	12,77
5.	Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan (%)	10,55	11,84	12,58	13,45	13,44	14,52

Sumber: PDAM Tirta Raharja, 2016; Disperkimtan Kabupaten Bandung, 2018



d. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi yaitu rumah tinggal yang mempunyai fasilitas tempat buang air besar/tinja. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya memiliki akses untuk memperoleh layanan sanitasi sebagai berikut: 1) fasilitas air bersih; 2) pembuangan air besar/tinja; 3) pembuangan air limbah (air bekas); dan 4) pembuangan sampah.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah membaik. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan akses aman terhadap sanitasi dalam kurun waktu 2012-2017. Pada tahun 2017, jumlah jiwa yang mengakses sarana sanitasi yang telah bersuspek aman yaitu sebesar 2.656.903 jiwa atau sekitar 75,55% dari total jumlah penduduk. Sejak tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Tahun 2012 persentase masyarakat yang mengakses sarana sanitasi yang telah bersuspek aman berada pada persentase 52,11% dan tahun 2016 persentasenya masih sebesar 57,32%. Lambatnya peningkatan rumah tinggal berakses sanitasi dasar dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas sanitasi terbangun dan lingkungan, semakin luasnya wilayah permukiman yang belum dilengkapi SPAL sesuai standar, serta sulitnya mencari lahan yang ideal untuk pembangunan sanitasi. Hampir setengah penduduk Kabupaten Bandung masih belum memiliki akses terhadap sarana sanitasi bersuspek aman yang diduga karena belum terintegrasinya sarana sanitasi penduduk dengan saluran pembuangan akhir yang terstandar, baik itu berupa septic tank individual dan IPLT bagi pengolahan limbah sistem on-site maupun IPAL bagi pengolahan limbah sistem off-site.

Tabel II.52 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah jiwa yang mengakses sarana sanitasi yang bersuspect aman (jiwa)	1.746.300	1.790.375	1.849.372	1.888.276	2.061.620*	2.656.903
2.	Jumlah penduduk (jiwa)	3.351.048	3.401.984	3.470.393	3.534.112	3.596.623	3.657.601
3.	Akses aman terhadap sanitasi (%)	52,11	52,63	53,29	53,43	57,32	75,55%

*Data SIPD 2016, 515.405 Rumah Tangga, asumsi 1 Rumah Tangga terdiri dari 4 jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2017; Profil Kesling Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2018

5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) di Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung direncanakan memiliki 9 (sembilan) wilayah manajemen kebakaran (WMK) dengan setiap WMK minimal mempunyai 1 Pos Damkar. Satu WMK dapat memiliki lebih dari 2, 3 atau 4 Pos Damkar sesuai jarak jangkauan atau luas wilayah kabupaten. Pada tahun 2016, Kabupaten Bandung baru memiliki 3 (tiga) Pos Damkar yang tersebar di Pos Soreang, Pos Ciparay, dan Pos Cicalengka. Total jumlah mobil kebakaran yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 adalah sebanyak 11 (sebelas) unit. Dari 11 unit mobil tersebut yang beroperasi dan masih



laik pakai ada 8 mobil operasional pemadam kebakaran sedangkan 3 unit tidak dapat beroperasi lagi karena sudah tidak laik fungsi.

Berdasarkan SPM yang tertuang dalam Permendagri No 62 Tahun 2008, pelayanan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2012-2016 baru mencapai 60%. Sementara itu, standar yang ditetapkan Permendagri No 62 Tahun 2008 adalah cakupan pelayanan minimal 75%. Tingkat cakupan pelayanan kebakaran didefinisikan sebagai persentase kondisi eksisting wilayah manajemen kebakaran (WMK) atau Pos Damkar dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bandung yang terlayani. Adapun beberapa kendala dalam pelayanan penanggulangan bencana kebakaran adalah terbatasnya jumlah Pos Damkar dan jumlah unit mobil pemadam kebakaran.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) penanggulangan kebakaran rata-rata di atas 22 menit. Padahal, menurut standar yang ditetapkan Permendagri No 62 Tahun 2008, *response time rate* standar adalah 15 menit. Kendala di lapangan dalam operasi pemadaman adalah terbatasnya sumber air untuk pemadaman, tidak adanya *hydrant* kota, terbatasnya sungai dan kolam yang dapat digunakan untuk cadangan air saat operasi pemadaman. Selain itu, Dinas Kebakaran Kabupaten Bandung tidak pernah dilibatkan dalam proses pendirian bangunan gedung sehingga seringkali keadaan lapangan menyulitkan proses pemadaman kebakaran. Terbatasnya jumlah pos dan unit mobil kebakaran juga mempengaruhi lamanya *response time rate* untuk penanggulangan kebakaran.

b. Jumlah kejadian bencana kebakaran

Kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Bandung sejak tahun 2012 hingga 2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah kejadian kebakaran adalah sebesar 254 kali kasus. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2016 sebesar 203 kali kasus. Meningkatnya jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Bandung menjadi ancaman yang perlu serius diperhatikan mengingat banyaknya kerugian yang mungkin terjadi akibat kejadian kebakaran. Meningkatnya jumlah kejadian kebakaran juga menunjukkan bahwa masyarakat belum teredukasi tentang cara mencegah kebakaran. Selain itu, partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk dapat melakukan penanggulangan dini pada kejadian bencana yang rendah meningkatkan frekuensi terjadinya bencana.

Tabel II.53 Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah Kejadian Kebakaran
2012	176 kali kasus
2013	192 kali kasus
2014	215 kali kasus
2015	220 kali kasus
2016	203 kali kasus
2017	254 kali kasus

Sumber: Dinas Kebakaran Kabupaten Bandung, 2018

6) Sosial

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan sosial dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Penanganan PMKS Fakir Miskin

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia bahwa fakir miskin menjadi tanggungjawab pemerintah, sejak tahun 2014 pemerintah semakin serius dalam menangani masalah kesejahteraan sosial fakir miskin. Di tahun 2017 terdapat 213.293 PMKS fakir miskin dan persentase yang telah ditangani oleh pemerintah adalah sebesar 0,7%. Jumlah PMKS FM yang tertangani oleh pemerintah pada tahun 2017 ini mengalami penurunan cukup banyak



setelah sebelumnya jumlah PMKS fakir miskin yang tertangani di tahun 2014 dan 2015 masing-masing hanya sebesar 18,66% dan 18,47%.

Tabel II.54 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah PMKS FM yang Tertangani	Jumlah PMKS FM yang Ada	Penanganan PMKS FM (%)
2012	830	238.224	0,35
2013	643	113.740	0,57
2014	39.792	213.293	18,66
2015	39.407	213.293	18,47
2016	-	-	-
2017	1.500	213.293	0,7

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2018

b. Penanganan PMKS Anak Terlantar

Selain bertanggungjawab untuk memelihara fakir miskin, pemerintah juga bertanggungjawab untuk memelihara anak terlantar. Sama halnya dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial fakir miskin, pemerintah juga semakin serius dalam menangani masalah kesejahteraan sosial anak terlantar. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah PMKS anak terlantar yang ditangani terhadap total PMKS anak terlantar yang ada di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2017, pemerintah telah menangani 3.133 anak terlantar atau 16,9% dari total keseluruhan anak terlantar. Meskipun persentase ini masih sedikit akan tetapi nilainya terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012 yang hanya mampu menangani 3,68% anak terlantar.

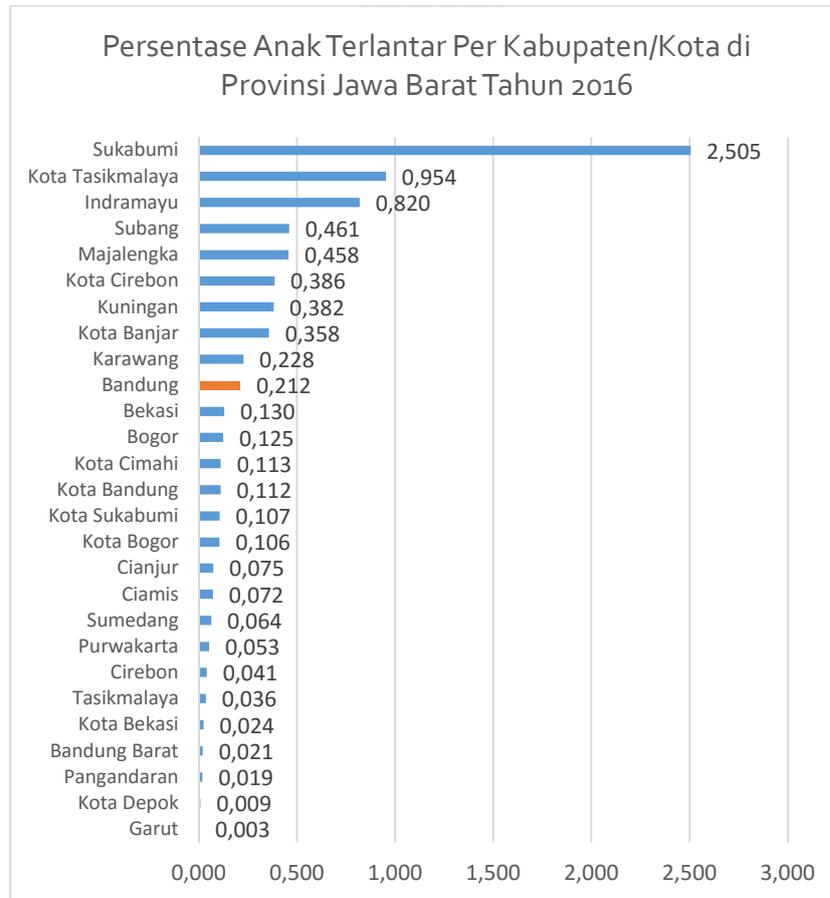
Tabel II.55 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah PMKS Anak Terlantar yang Tertangani	Jumlah PMKS Anak Terlantar yang Ada	Penanganan PMKS Anak Terlantar (%)
2012	610	16.577	3,68
2013	238	22.592	1,05
2014	985	13.260	7,43
2015	783	10.098	7,75
2016	2.872	18.528	15,5
2017	3.133	18.528	16,90

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2017 (LAKIP)

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung termasuk ke dalam 10 kabupaten dengan persentase anak terlantar terbanyak. Kabupaten Bandung peringkat ke 10 dari 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan persentase 0,212% anak terlantar. Nilai ini terhitung besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Bandung masih tertinggal dalam menangani masalah anak terlantar. Oleh karenanya, meskipun jumlah penanganan anak terlantar di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi diperlukan percepatan penanganan agar jumlah anak terlantar yang ditangani dapat lebih banyak lagi.

Gambar II.29 Persentase Anak Terlantar Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2017

c. Jumlah sarana sosial

Guna meningkatkan kesejahteraan sosial, diperlukan usaha secara material maupun spiritual untuk mengatasi masalah pokok dalam kesejahteraan sosial yaitu anak terlantar, anak nakal, korban penyalahgunaan narkoba, penyandang cacat, gelandangan, tuna susila, wanita rawan sosial, dan lainnya. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menyediakan sarana sosial. Sarana sosial di Kabupaten Bandung antara lain panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi. Tren sarana sosial di Kabupaten Bandung untuk panti asuhan dan panti jompo mengalami penurunan sementara untuk panti rehabilitasi terdapat peningkatan. Untuk unit panti asuhan, dari semula tahun 2012 terdapat 61 unit panti asuhan, lalu berkurang menjadi 45 unit pada tahun 2015. Untuk unit panti jompo, pada tahun 2014 sempat terdapat penambahan panti jompo menjadi 2 unit namun pada tahun 2015 ketersediaan panti jompo kembali menurun menjadi 1 unit. Sementara itu terdapat peningkatan sarana sosial untuk panti rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA. Peningkatan panti rehabilitasi ini mengindikasikan semakin banyaknya korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bandung.

Tabel II.56 Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Tahun	Panti Asuhan	Panti Jompo	Panti Rehabilitasi
2012	61	1	0
2013	61	1	0
2014	51	2	0
2015	45	1	2



Tahun	Panti Asuhan	Panti Jompo	Panti Rehabilitasi
2016	51	1	4
2017	43	1	3

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2017

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non - Pelayanan Dasar

Sub bab ini akan membahas gambaran umum dan kondisi daerah untuk bidang urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak termasuk ke dalam pelayanan dasar yaitu bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi; usaha kecil; dan menengah, serta penanaman modal.

1) Tenaga Kerja

a. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar daya serap PMA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat diserap oleh perusahaan tersebut. Pada tahun 2015, terdapat 696 PMA/PMDN yang berada di Kabupaten Bandung. Total tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN tersebut adalah 214.381 orang. Apabila dilihat rasionya, rata-rata untuk satu PMA/PMDN menyerap 308 tenaga kerja. Rasio ini terus mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal, jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Bandung justru semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa daya serap PMA/PMDN di Kabupaten Bandung semakin kecil bagi para tenaga kerja di Kabupaten Bandung. Beberapa faktor penyebabnya antara lain rendahnya kualitas tenaga kerja serta adanya *missmatch* tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.

Tabel II.57 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	211.316	216.112	218.677	214.381
2.	Jumlah seluruh PMA/PMDN	604	646	677	696
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	350	335	323	308

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2017

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja terhadap usia angkatan kerja (15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK menunjukkan besarnya penduduk yang masuk dalam pasar kerja. Artinya, semakin tinggi TPAK maka pemerintah daerah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak bagi penduduknya. TPAK Kabupaten Bandung tahun 2017 adalah sebesar 62,81. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 dimana TPAK Kabupaten Bandung adalah sebesar 66,01. Namun secara umum, TPAK di Kabupaten Bandung selalu fluktuatif.



Tabel II.58 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2017

DAERAH	TAHUN					
	2011	2012	2013	2014	2015	2017
Perkotaan	62,13	65,64	64,80	65,99	59,62	62,34
Perdesaan	62,58	67,96	66,86	67,01	58,57	69,67
JUMLAH	62,20	66,01	65,13	66,16	59,53	62,81
JENIS KELAMIN						
Laki-Laki	81,81	84,14	86,16	85,90	79,89	81,35
Perempuan	41,97	47,25	43,54	45,91	38,67	43,98
JUMLAH	62,20	66,01	65,13	66,16	59,53	62,81

Sumber: BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2017, diolah Pusdatinaker

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

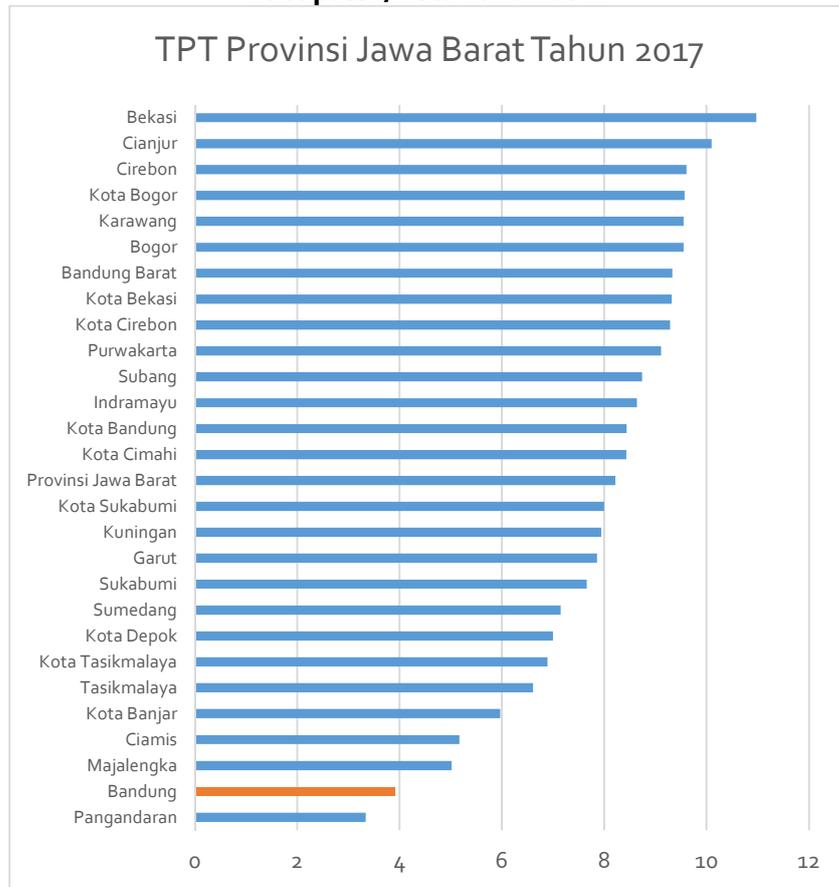
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah penduduk yang bekerja. TPT Kabupaten Bandung pada tahun 2017 adalah sebesar 3,92% dimana nilai tersebut sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan TPT pada tahun 2015 yaitu 4,03%. Apabila dilihat berdasarkan daerahnya, pada tahun 2017 TPT di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT di perdesaan. Artinya, angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran lebih besar di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Lapangan pekerjaan di perdesaan lebih banyak menyerap angkatan kerja dibandingkan lapangan pekerjaan di perkotaan. Akan tetapi, perlu diketahui juga bahwa angkatan kerja di perdesaan lebih sedikit dibandingkan dengan angkatan kerja di perkotaan yang berarti bahwa tingkat persaingan para pencari kerja lebih rendah dibandingkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di perkotaan.

Tabel II.59 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bandung Tahun 2011-2017

DAERAH	TAHUN					
	2011	2012	2013	2014	2015	2017
Perkotaan	10,41	11,00	9,31	8,48	4,15	4,00
Perdesaan	10,48	14,67	14,30	8,46	2,70	2,84
JUMLAH	10,42	11,60	10,12	8,48	4,03	3,92
JENIS KELAMIN						
Laki-Laki	10,21	12,44	9,65	7,65	3,94	3,49
Perempuan	10,83	10,05	11,07	10,07	4,21	4,74
JUMLAH	10,42	11,60	10,12	8,48	4,03	3,92

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2017

Apabila dilihat dapat konsultasi regional, TPT Kabupaten Bandung sangat kecil apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung menempati urutan ke 2 TPT paling rendah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung rendah.

Gambar II.30 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Per Kabupaten/Kota Tahun 2017


Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Barat, 2017

d. Kesempatan kerja

Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja dapat menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja) untuk para pencari kerja. Kesempatan kerja di Kabupaten Bandung pada tahun 2017 menurut lapangan usaha mencapai 1.584.391 orang. Angka ini semakin meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 1.438.365 orang.

Tabel II.60 Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017

LAPANGAN USAHA *)	TAHUN					
	2011	2012	2013	2014	2015	2017
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	249.790	205.258	243.504	253.471	190.626	221.661
Pertambangan dan penggalian	1.417	6.741	3.105	2.985	7.103	4.997
Industri pengolahan	472.353	483.917	484.843	531.989	485.944	440.692
Listrik, gas, dan air	1.169	1.313	3.224	3.883	219	9.035
Bangunan	101.853	126.004	117.500	153.641	118.302	111.502
Perdagangan besar eceran, rumah makan, dan hotel	214.801	267.825	280.166	266.794	349.595	425.215

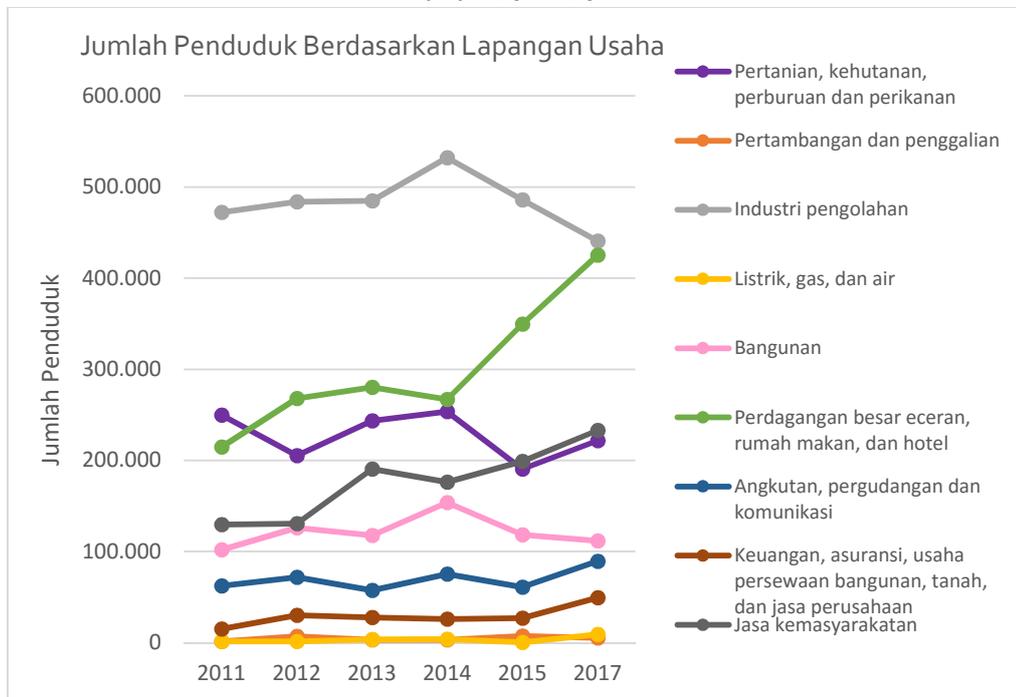


LAPANGAN USAHA *)	TAHUN					
	2011	2012	2013	2014	2015	2017
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	62.417	71.589	57.392	75.236	60.755	89.154
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan	15.056	30.050	27.438	25.920	26.908	49.148
Jasa masyarakat	129.411	130.469	190.331	176.112	198.913	232.987
JUMLAH	1.248.267	1.323.166	1.407.503	1.490.031	1.438.365	1.584.391

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2018

Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri pengolahan dengan total tenaga kerja pada tahun 2017 sebanyak 440.692 tenaga kerja diikuti oleh perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel yang menyerap 425.215 tenaga kerja. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian adalah lapangan usaha yang paling sedikit menyerap tenaga kerja dengan 4.997 tenaga kerja. Dilihat berdasarkan perkembangannya dari tahun 2011 hingga tahun 2017, lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel mengalami peningkatan tenaga kerja setiap tahunnya. Sementara itu untuk lapangan usaha industri pengolahan meskipun jumlah penyerapan tenaga kerjanya paling banyak dibanding lapangan usaha lainnya, namun sejak tahun 2014 jumlah tenaga kerja yang bekerja di lapangan usaha industri pengolahan terus mengalami penurunan. Bahkan di tahun 2017, jumlah tenaga kerjanya hampir sama dengan jumlah tenaga kerja di lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel.

Gambar II.31 Perkembangan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2011-2017



Sumber: Hasil pengolahan data Dinas Tenaga Kerja, 2018

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:



a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Kesetaraan gender perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing dan pembangunan. Peningkatan kesetaraan gender salah satunya dapat dilakukan melalui peningkatan hak, tanggungjawab, kapabilitas, dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki – laki. Peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur melalui partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta.

Tabel II.61 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah				392	390
2.	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	706.412	707.132			
3.	Jumlah pekerja perempuan	1.073.746	1.074.841			
4.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah					
5.	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	52	52			

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Bandung, 2017

3) Pangan

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan pangan dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Ketahanan pangan

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia Tahun 2015, Kabupaten Bandung menempati kabupaten dengan prioritas 5 (dari 6 prioritas) untuk ketahanan dan kerentanan pangan. Prioritas 1 menunjukkan kabupaten yang paling rentan terhadap pangan sementara prioritas 6 menunjukkan kabupaten yang paling tahan pangan. Posisi Kabupaten Bandung dengan prioritas 5 menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung termasuk ke dalam kabupaten dengan ketahanan pangan yang baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat sendiri. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat memiliki kabupaten dengan tingkat kerentanan yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Bahkan pada tahun 2017, defisit produksi padi di Provinsi Jawa Barat mencapai 2,2 juta ton. Sebagai 1 dari 11 kabupaten dengan tingkat ketahanan pangan yang baik di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung memiliki dampak yang cukup besar terhadap ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data Neraca Bahan Makanan (NBM), pada tahun 2016 Angka Ketersediaan Energi (AKE) dan Angka Ketersediaan Protein (AKP) sudah melebihi angka kecukupan gizi ketersediaan pangan. AKE Kabupaten Bandung tahun 2017 adalah sebesar 116,06% dan AKP sebesar 119,42%. Kuantitas konsumsi pangan Kabupaten Bandung tahun 2016 berada dalam kategori tahan pangan. Artinya jumlah pangan yang dikonsumsi mencukupi kecukupan energi. Nilai ini sudah menggambarkan ketersediaan pangan meskipun keberagamannya belum ideal apabila dilihat dari skor PPH yang belum mencapai 100.



Tabel II.62 Target Capaian Skor PPH Konsumsi Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Kelompok Pangan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Konsumsi Energi (%AKE)	81,82	95,15	95,84	109,15	116,06	-
2.	Konsumsi Protein (%AKP)	87,23	101,23	102,94	112,92	119,42	-
Total PPH		61,01	67,55	70,43	78,60	79,27	81,57

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, 2017

b. Penganekaragaman dan konsumsi pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan merupakan hal yang perlu diperhatikan agar pemenuhan gizi dan nutrisi penduduk dapat tercapai serta menghindari berbagai penyakit di kemudian hari. Oleh karena itu dibutuhkan penganekaragaman konsumsi pangan agar mencapai nilai komposisi dan pola pangan dan gizi seimbang. Indikator Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Skor PPH mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keanekaragaman pangan. PPH mengukur ketersediaan pangan penduduk untuk suatu wilayah dihitung melalui pemenuhan jumlah ketersediaan energi dan zat gizi per orang per hari. Berdasarkan SPM Ketahanan Pangan, kebutuhan energi harian rata-rata penduduk Indonesia adalah 2.400 kkal, kebutuhan protein sebesar 63 gram, dengan jumlah skor (PPH) sebesar 100. Dalam kurun waktu 2012-2017, skor PPH ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan dan semakin mendekati 100. Di tahun 2017, total skor PPH ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung adalah sebesar 81,57. Skor PPH Kabupaten Bandung masih berada di bawah rata-rata skor PPH Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan konsumsi pangan di Kabupaten Bandung mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Beberapa konsumsi kelompok pangan yang belum mencukupi kecukupan energi antara lain kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/ biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah. Adapun konsumsi energi kelompok pangan yang tergolong berlebih yaitu kelompok pangan padi-padian serta minyak dan lemak. Dalam jangka panjang, perbaikan konsumsi pangan dan nilai gizi ini akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan meningkatkan daya saing Kabupaten Bandung khususnya di tingkat provinsi.

Tabel II.63 Target Capaian Skor PPH Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	0,81	1,11	1,14	1,01	0,86	1,04
3.	Pangan hewani	11,69	15,42	16,83	21,28	21,39	21,68
4.	Minyak dan lemak	4,72	5,0	5,0	5,0	5,0	5
5.	Buah/Biji berminyak	0,15	0,23	0,24	0,32	0,36	0,43
6.	Kacang-kacangan	4,32	5,61	5,59	4,97	5,73	6,21
7.	Gula	1,16	1,31	1,28	1,84	2,0	2,05
8.	Sayur dan buah	13,16	13,87	15,35	19,18	18,93	20,16
9.	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total PPH		61,01	67,55	70,43	78,6	79,27	81,57

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, 2018

4) Pertanian

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan pertanian dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:



a. Persentase luas lahan bersertifikat

Persentase luas tanah bersertifikat menggambarkan tingkat administrasi kepemilikan tanah di suatu daerah. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menunjukkan bahwa tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah semakin baik. Sejak tahun 2014, hampir lebih dari 80% tanah di Kabupaten Bandung sudah bersertifikat. Luas lahan bersertifikat tahun 2017 adalah 152.377 ha atau 86,64%. Jumlah ini mengalami peningkatan hampir 4 kali lipat dibandingkan tahun 2013 dan 2012 yang masing-masing hanya 24,26% dan 23,13%.

Tabel II.64 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat	Luas Wilayah Kabupaten Bandung (Ha)	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)
2012	40.758	176.239	23,13
2013	42.751	176.239	24,26
2014	142.788	176.239	81,02
2015	151.213	176.239	85,80
2016	151.985	176.239	86,24
2017	152.377	176.239	86,64

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2017

5) Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan lingkungan hidup dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase penanganan sampah

Masalah persampahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisir bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Kabupaten Bandung memiliki 1 (satu) buah TPSA yaitu TPSA Babakan yang terletak di Desa Babakan, Kecamatan Ciparay. Namun, per 30 Juni 2016, masa kontrak penggunaan TPSA Babakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung telah berakhir dan direncanakan fungsinya akan diambil alih oleh Tempat Pemilahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka yang masih dalam tahap perencanaan. Oleh karena itu, sejak tahun 2016 sampah dari Kabupaten Bandung dialihkan ke TPA Sarimukti yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2017, Jumlah total timbunan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 1.444 ton per hari. Dari total timbunan sampah tersebut, sampah yang terangkut/tertangani hanya 26%nya atau sebanyak 370,34 ton/hari. Hal ini berarti masih terdapat 74% sampah yang belum tertangani melalui pengelolaan dari pengangkutan ke TPAS Sarimukti, Bank Sampah, TPST, pemulung, dan pengolahan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun sisa sampah yang tidak terangkut atau terolah diperkirakan ada yang ditimbun, dibuang ke sungai, dibakar, dll.

Tabel II.65 Persentase Volume Sampah yang Tertangani di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah volume sampah yang tertangani (m ³)	947	1.056	986,16	912,16	320 ton/hari	370,34 ton/hari
2.	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m ³)	6.936	6.936	5.918,05	4.296,3	4.861,38	1444 ton/hari
3.	Persentase	13,65	15,22	16,66	21,22	24	26

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2018



b. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) per satuan penduduk

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Kabupaten Bandung memiliki 122 unit TPSS pada tahun 2017 yang berlokasi di pasar dan pabrik. Daya tampung TPSS tersebut adalah 732 m³ sampah.

Tabel II.66 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah TPSS (unit)*	42	45	48	91	96	122
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	252	270	280	364	624	732
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.351.048	3.401.984	3.490.691	3.494.062	3.596.623	3.657.601
4.	Jumlah sampah yang dihasilkan total penduduk (m ³)	6.702	6.804	6.981	6.988	7.193	7.315
5.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah penduduk	1:27	1:25	1:25	1:19	1:12	1:10

*Lokasi TPSS ada di pasar dan pabrik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2018

c. Status penataan pengendalian pencemaran lingkungan pada kegiatan industri

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disebabkan karena pengelolaan lingkungan hidup tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai peraturan dan perundangan di bidang lingkungan hidup telah mensyaratkan ketentuan teknis dan administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk masing-masing industri sesuai baku mutu. Pengendalian pencemaran dilakukan pada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran limbah B3. Diantara ketiga pengendalian ini, industri yang menghasilkan limbah B3 adalah industri yang paling banyak berada di Kabupaten Bandung. Akan tetapi penataan pengendaliannya sangat kurang dibandingkan dengan pencemaran lainnya. Pada tahun 2016, terdapat 216 industri yang menimbulkan limbah B3 namun penataan pengelolaan limbah hanya sebesar 45%. Jumlah industri yang melakukan pengelolaan limbah B3 sudah sebesar 98% namun jumlah industri yang melapor pengelolaan limbah B3 hanya sebesar 55%. Penataan pengelolaan limbah udara adalah yang paling baik dengan 92% dari 186 industri yang menimbulkan emisi. Sementara itu, penataan pengendalian pencemaran air adalah sebesar 51% dari total 169 industri yang dipantau menghasilkan air limbah. Belum optimalnya penataan pengendalian pencemaran lingkungan ini dikarenakan oleh beberapa hal seperti adanya keterbatasan SDM di lapangan serta diperlukannya pengawasan 24 jam dalam memantau pencemaran lingkungan ini. Kurangnya kesadaran dari pelaku industri dalam mentaati ketentuan yang berlaku juga berkontribusi terhadap rendahnya penataan pengelolaan limbah.

Tabel II.67 Status Penataan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pengendalian Pencemaran Air						
	- Jumlah industri yang dipantau (menghasilkan air limbah)	175	162	177	173	169	174
	- Industri yang melakukan	60%	60% (pengujian)	62% (pengujian)	76% (pengujian)	87%	94%



No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	pengujian kualitas air limbah dan melaporkan secara rutin		58% (pelaporan)	62% (pelaporan)	62% (pelaporan)		
	- Petaatan Pengendalian Pencemaran Air	57%	55%	56%	54%	51%	
2.	Pengendalian Pencemaran Udara						
	- Jumlah industri yang dipantau (menimbulkan emisi)	189	189	191	191	186	
	- Industri yang melakukan pengujian kualitas udara emisi cerobong limbah dan melaporkan secara rutin	80%	85 %	86%	88%	92%	
	- Petaatan Pengendalian Pencemaran Udara	77%	85%	86%	87%	92%	
3.	Pengawasan Pengelolaan Limbah B3						
	- Jumlah industri yang dipantau (menimbulkan limbah B3)	174	195	201	207	216	
	- Jumlah industri yang melakukan pengelolaan dan pelaporan pengelolaan limbah B3	61%	54%	50%	35%	98% mengelola 55% melaporkan	
	- Petaatan Pengelolaan Limbah B3	50%	44%	45%	43%	45%	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2018

d. Kualitas air sungai dan kualitas udara

Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2001 telah melakukan pengujian terhadap kualitas air sungai dan udara ambien yang rutin dilakukan setiap tahun. Sejak tahun 2009, pengujian kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan oleh UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Evaluasi pengujian kualitas air sungai dan udara ambien ini dilakukan untuk menentukan arah kebijakan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan serta prioritas penanganannya. Pengujian dilakukan pada beberapa titik prioritas yang dievaluasi setiap tahun. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil perhitungan berdasarkan metode Storet dengan baku mutu air sungai kelas II, 96-99% berstatus mutu "cemar berat" dan hanya 1-4% berstatus "cemar sedang". Adapun parameter yang dominan melampaui baku mutu rata-rata antara lain fecall coliform, DO, COD, BOD, TSS, Nitrit, dan beberapa logam berat yaitu Cu, Zn, dan Cr6+. Status "cemar berat" ini tidak hanya terjadi pada sungai bagian hilir namun juga terjadi pada bagian hulu dengan parameter yang umumnya melampaui baku mutu yaitu decal coliform/ fecal coliform pada hulu Sungai Citarum umumnya ditemukan di wilayah dimana air limbah dominan



berasal dari penduduk dan/atau peternakan. Beberapa lokasi dengan status mutu yang buruk menampung air limbah yang berasal dari kabupaten/kota lain yang berbatasan seperti S.Cikijing (Kabupaten Sumedang) dan S.Cibaligo Hilir (Kota Cimahi).

Masalah terkait kualitas air sungai maupun udara ambien ini tidak hanya perlu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan saja melainkan juga memerlukan koordinasi dengan PD yang menangani sektor usaha/kegiatan terkait baik dalam level kabupaten maupun koordinasi lintas kabupaten/kota dan provinsi.



Tabel II.68 Pengujian Air dan Udara di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pengujian Kualitas Air Sungai						
Lokasi Pengujian	70 lokasi, 3x pengujian	75 lokasi, 3 x pengujian	75 lokasi, 3x pengujian	68 lokasi, 3x pengujian 7 lokasi 12x pengujian	68 lokasi, 3x pengujian 7 lokasi, 12x pengujian	70 lokasi, 3x pengujian 7 lokasi, 11x pengujian
Status Mutu Air	93% cemar berat	100% cemar berat	Storet 100% Cemar berat IP=41% Cemar berat	Storet 100% Cemar berat IP=53% Cemar berat	Storet 100% IKA=20 IP=53% Cemar berat	Storet 100% Cemar berat IKA=20 IP=
	7% cemar sedang	-	59% cemar sedang	47% cemar sedang	47% cemar sedang	40% cemar sedang
Skor Storet Terburuk	S. Cisuminta Hilir (-123), S. Cibaligo (-111), S. Cikacembang hilir (-110)	S. Cipadaulun (-131) S. Cibaligo Hilir (-126) S. Cisuminta hilir (-123) S. Cicurugdogdog (-117) S. Cipadaulun hilir (-115) S.Cikacembang hilir (-109)	S. Cisuminta (-140) S. Cipadaulun setelah Cikacembang (-134)	S. Cibaligo Hilir (-286) S. Cisuminta Hilir (-286)		
Parameter Kunci dengan Kualitas Terburuk						
- BOD		486 mg/L	1.245 mg/L	642 mg/L	1.021 mg/L	653 mg/L
- COD	508 mg/L	415 mg/L	1.920 mg/L	1.280 mg/L	9.880 mg/L	1.420 mg/L
	640 mg/L	575 mg/L				
Pengujian Kualitas Udara Ambien						
Lokasi Pengujian	4 lokasi; 10 titik	4 lokasi; 10 titik	4 lokasi; 10 titik	6 lokasi; 13 titik	5 lokasi, 20 titik	15 lokasi, 9 titik
Parameter Tidak Memenuhi Baku Mutu	Kebisingan 85,59 dB	Kebisingan 72,23 dB	Kebisingan 70,56 dB		Kebisingan 76 dB	Kebisingan 79,3 dB
	TSP (debu) 636 µg/m ³ , dan 318 µg/m ³	TSP (debu) 309 µg/m ³ , dan 282 µg/m ³	TSP (debu) 240 µg/m ³	TSP (debu) 11.162 µg/m ³ , dan 243 µg/m ³	TSP (debu) 6.311 µg/m ³	

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2017



e. Status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Kerusakan hutan dan lahan telah memberikan dampak yang luas tidak hanya terhadap lingkungan namun juga secara sosial dan ekonomi. Dampak terhadap lingkungan dari rusaknya hutan dan lahan adalah adanya kemerosotan keanekaragaman hayati. Sementara itu, bencana – bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, penurunan kualitas air dan tanah merupakan dampak dari kerusakan hutan dan lingkungan. Dampak dari bencana ini tidak hanya memberikan kerugian secara materil namun juga memberikan kerugian secara sosial masyarakat.

Tantangan yang perlu kita semua lakukan ialah mengendalikan kerusakan hutan dan lahan melalui berbagai upaya seperti pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Tanah sebagai salah satu sumber daya alam, wilayah hidup, media lingkungan, dan faktor produksi termasuk produksi biomassa yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. Di sisi lain, kegiatan produksi biomassa yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa sehingga dapat menurunkan mutu dan fungsinya. Pada akhirnya, penurunan ini dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sifat alami tanah dapat menjadi penyebab kerusakan tanah untuk biomassa. Namun dapat juga faktor lain yang menyebabkan kerusakan ini seperti kegiatan manusia yang menyebabkan tanah tersebut terganggu/rusak sehingga tidak mampu lagi berfungsi sebagai media produksi biomassa. Salah satu jenis pelayanan minimal bidang lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota adalah pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Tabel II.69 Persentase Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (% PI-SKT) di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pencapaian SPM	80	100	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2017

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil

Pendaftaran penduduk dalam catatan sipil menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Tertib administrasi kependudukan ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah Non Muslim. Rasio penduduk yang memiliki KTP, KK, dan Akte Kelahiran terus meningkat dari tahun 2012-2017. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri atau administrasi kependudukan semakin meningkat. Akan tetapi, persentase pasangan non – muslim berakta nikah tahun 2012 – 2017 relatif menurun. Hal ini dikarenakan penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasar pada permohonan dari pasangan yang bersangkutan. Kecenderungan sementara ini, pasangan non muslim mengajukan permohonan untuk mencatatkan perkawinannya apabila terdesak oleh kepentingan tertentu.

Tabel II.70 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Usia > 17 Tahun yang Ber-KTP	Jumlah Penduduk Usia > 17 Tahun Atau Telah Menikah	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Keterangan
2012	1.691.387	2.281.484	74,14	Perekaman e-KTP
2013	1.975.553	2.014.804	98,05	Perekaman e-KTP
2014	1.906.402	2.520.932	75,62	(e-KTP)
2015	1.995.516	2.301.817	86,69	(e-KTP)



Tahun	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun yang Ber-KTP	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun Atau Telah Menikah	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Keterangan
2016	2.198.931	2.465.179	89,20	(e-KTP)
2017	2.243.502	2.509.452	89,40	(e-KTP)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2017

Tabel II.71 Rasio Penduduk Ber-KK Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah Penduduk yang Memiliki KK	Jumlah Penduduk Wajib Memiliki KK	Rasio Penduduk Ber-KK Per Satuan Keluarga	Keterangan
2012	866.274	866.274	100	SIMDUK
2013	516.425	1.291.680	40,00	SIMDUK
2014	741.092	1.117.821	66,30	SIMDUK/SIAK
2015	840.454	1.223.470	68,69	SIAK
2016	956.805	1.137.816	84,09	SIAK
2017	1.012.354	1.174.978	86,16	SIAK

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2017

Tabel II.72 Rasio Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Tahun	Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Target Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Rasio Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
2012	1.835.801	3.064.366	59,91
2013	1.975.800	3.404.549	58,03
2014	2.081.674	3.462.971	60,11
2015	2.188.127	3.494.469	62,62
2016	2.276.697	3.512.189	64,82
2017	2.538.695	3.525.149	72,02

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2017

Tabel II.73 Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Tahun	Realisasi Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim	Target Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim
2012	150	100	150
2013	185	150	123,33
2014	343	150	228,66
2015	372	350	106,28
2016	358	380	94,21
2017	306	400	76,50

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2017

7) Pembedayaan Masyarakat dan Desa

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Kelompok binaan LPM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam



menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM selaku mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2017, jumlah LPM di Kabupaten Bandung adalah 280 buah.

b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, maju, dan mandiri. Semakin besar jumlah PKK menunjukkan semakin aktifnya masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Dari tahun 2012 hingga 2015, persentase PKK aktif adalah 100% namun di tahun 2016 persentase PKK yang aktif menurun menjadi 90,8%. Pada tahun 2017, jumlah PKK di Kabupaten Bandung adalah 87.054 dengan jumlah PKK yang aktif adalah 73.995 anggota. Jumlah kelompok binaan PKK adalah 44.736 kelompok. Kelompok binaan PKK terdiri dari Posyandu, PAUD, dll. Meskipun jumlah PKK yang aktif mengalami penurunan namun jumlah kelompok binaan PKK meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kelompok binaan oleh satu PKK semakin banyak.

Tabel II.74 Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah PKK	4.158	64.591	66.748	65.800	56.809	87.054
	Jumlah PKK Aktif	4.158	64.591	66.748	65.800	51.582	73.995
	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	90,80	84
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	1.014	58.631	1.161	1.120	5.227	44.736
3.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	0,24	0,60	0,02	0,18	0,10	0,60

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, 2018

c. Jumlah LSM yang aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya jumlah LSM menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan daerah, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2017, Kabupaten Bandung memiliki 274 LSM terdaftar dengan jumlah LSM aktif sebanyak 247 LSM.

Tabel II.75 Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah LSM terdaftar	271	271	n/a	286	265	274
2.	Jumlah LSM tidak aktif	8	42	n/a	22	32	27
3.	Jumlah LSM aktif (1-2)	263	229	38	264	233	247

Sumber: Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Bandung, 2017

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:



a. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Keluarga Berencana (KB) adalah program yang dirancang untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Manfaat lain dari program KB adalah untuk menghindari ledakan jumlah penduduk yang akan berdampak pada permasalahan – permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia atau sekitar 18,3% dari keseluruhan total penduduk Indonesia (BPS, 2017). Provinsi Jawa Barat saat ini tengah berupaya untuk menekan jumlah dan laju pertumbuhan penduduknya dengan melakukan pengendalian penduduk. Kabupaten Bandung sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk kedua terbesar di Jawa Barat memiliki peran penting dan berkontribusi dalam mengendalikan penduduk khususnya di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, keberhasilan program KB di Kabupaten Bandung diharapkan dapat membantu mengendalikan jumlah penduduk Kabupaten Bandung.

Keberhasilan program KB dapat dilihat dari terciptanya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Pemerintah telah menganjurkan jumlah anak ideal dalam sebuah keluarga yaitu 2 (dua) anak lebih baik. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan indeks kebahagiaan menurut banyaknya anggota rumah tangga. Berdasarkan data dari tingkat Kebahagiaan Provinsi Jawa Barat tahun 2017, keluarga dengan 4 anggota rumah tangga memiliki nilai indeks tertinggi yaitu sebesar 70,18.

b. Rasio akseptor KB

Keluarga Berencana (KB) dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KN (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Selama kurun waktu 2012–2017, rasio akseptor KB di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, rasio akseptor KB adalah sebesar 82,25 lebih besar dibandingkan tahun 2012 sebesar 81,02. Meningkatnya rasio akseptor KB menunjukkan upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Bandung terus membaik.

Tabel II.76 Rasio Akseptor KB di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah Akseptor KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
2012	517.007	638.141	81,02
2013	539.345	658.143	81,95
2014	550.087	669.469	82,17
2015	555.205	679.239	81,73
2016	580.334	703.383	82,51
2017	587.289	714.046	82,25

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Bandung, 2017

9) Perhubungan

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan perhubungan dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Rasio Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Angkutan penumpang umum merupakan salah satu pilihan masyarakat sebagai sarana transportasi. Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum (angkutan penumpang umum) terdiri dari dua kelompok moda layanan, yaitu Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek dan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Kewenangan penerbitan perizinannya, yaitu Izin Trayek atau Izin Operasi berdasarkan wilayah administratif dimana lintasan trayek atau wilayah operasi itu berada. Penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Bandung terdiri dari dua kelompok moda layanan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan titik keberangkatannya di terminal wilayah Kabupaten Bandung, maka penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan



Bermotor Umum dalam Trayek terdiri dari layanan Angkutan Antar Kota dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Perkotaan, dan Angkutan Perdesaan. Adapun berdasarkan domisili kendaraan, maka penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor umum Tidak dalam Trayek terdiri dari Angkutan Pariwisata, Angkutan Karyawan, Angkutan Sewa Khusus (taksi *online*), dan Angkutan Kawasan Tertentu.

Jumlah Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya pembangunan di sektor pariwisata dan keinginan masyarakat untuk memperoleh pelayanan angkutan yang lebih nyaman. Kondisi ini telah mendorong peningkatan permintaan terhadap angkutan pariwisata dan angkutan sewa khusus. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan angkutan penumpang umum maka rasio jumlah angkutan penumpang umum terhadap jumlah penduduk pun semakin baik setiap tahunnya.

Pada tahun 2017, Kabupaten Bandung mengeluarkan 6.385 izin trayek. Jumlah izin trayek ini mengalami peningkatan tiap tahunnya yang menandakan kedisiplinan kendaraan angkutan umum. Meningkatnya jumlah izin trayek ini telah mengurangi rasio izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dimana pada tahun 2017 rasionya adalah 1:573 semakin kecil dibandingkan tahun – tahun sebelumnya yang menandakan semakin meningkatnya jumlah kendaraan angkutan umum. Akan tetapi, kuantitas penggunaan kendaraan umum di Kabupaten Bandung masih terbilang rendah. Kondisi tersebut banyak disebabkan karena rute trayek angkutan umum ini belum menjangkau semua daerah sehingga mengurangi kualitas layanan angkutan umum.

Tabel II.77 Rasio Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Moda Layanan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek							
1.	Antar Kota Dalam Provinsi	-	-	-	3.612	3.612	3.622
2.	Angkutan Perkotaan	421	468	2.672	2.293	2.293	2.472
3.	Angkutan Perdesaan	-	-	-	108	108	106
B Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek							
1.	Angkutan Pariwisata	-	-	-	45	51	76
2.	Angkutan Karyawan	-	-	-	19	19	22
3.	Angkutan Sewa Khusus	-	-	-	-	-	-
4.	Angkutan Kawasan Tertentu	-	-	-	68	75	87
Jumlah Izin Trayek		421	468	2.672	6.145	6.158	6.385
Jumlah Penduduk		3.351.048	3.415.700	3.290.437	3.534.112	3.596.623	3.657.601
Rasio Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum		1: 7.960	1: 7.299	1: 1.231	1: 575	1: 584	1: 573

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, 2018

b. Jumlah uji KIR angkutan umum

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis tersebut meliputi susunan, ukuran, karoseri, dan lain – lain sementara persyaratan laik jalan meliputi emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi rem utama dan rem parkir, intensitas lampu, cahaya lampu utama, dan lain-lain. Dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan tersebut kendaraan bermotor harus dilakukan pengujian kendaraan bermotor (Uji KIR). Kendaraan yang menjadi objek pengujian antara lain



mobil penumpang, mobil barang, mobil bus, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus. Pada tahun 2017, jumlah kendaraan bermotor yang telah melakukan uji KIR sebanyak 7.285 kendaraan.



Tabel II.78 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Angkutan Umum	2012			2013			2014			2015			2016			2017		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1	Mobil penumpang umum	8.383	8.159	97,33%	8.567	7.920	92,45%	8.316	8.593	103,33%	9.023	7.694	85,27%	8.079	5.658	70,04%	5.941	4.813	81,01%
2	Mobil bus	583	666	114,24%	699	625	89,38%	656	623	94,93%	654	689	105,33%	723	637	88,05%	669	517	77,30%
3	Mobil barang	1.048	1.119	106,77%	1.175	1.683	143,24%	1.767	1.558	88,16%	1.636	1.496	91,45%	1.571	315	20,05%	331	1.953	590,48%
4	Kereta gandengan	1	-	0,00%	-	2	#DIV/0!	2	-	0,00%			#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	1		0,00%
5	Kereta tempelan	1		0,00%	-	2	#DIV/0!	2	2	100,00%	2	4	200,00%	4	1	25,00%	1	2	200,00%
Jumlah		10.016	9.944	99,28%	10.441	10.232	98,00%	10.744	10.776	100,30%	11.315	9.883	87,35%	10.377	6.611	63,71%	6.943	7.285	104,93%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, 2018



c. Persentase jumlah angkutan darat per penumpang

Berdasarkan data pokok perencanaan tahun 2017, jumlah angkutan darat yang tersedia di wilayah Kabupaten Bandung adalah 6.385 unit. Sementara itu, jumlah total penumpang angkutan darat di tahun yang sama yaitu sebanyak 249.648 jiwa. Dengan demikian, rasio angkutan umum per penumpang adalah 1:39 dengan satu unit angkutan melayani 2,56% penumpang angkutan darat. Rasio ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 dimana rasio angkutan umum per penumpang adalah 1:72 dengan satu unit angkutan umum melayani sekitar 1,38% penumpang angkutan darat. Semakin banyaknya penumpang yang terlayani angkutan umum dapat mengindikasikan dua hal. Pertama, adanya peningkatan pelayanan angkutan umum

d. Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor untuk meminimalisir jumlah kecelakaan. Pada tahun 2017, Kabupaten Bandung seharusnya menyediakan 1.402 unit rambu-rambu lalu lintas. Namun, hanya sebesar 25% atau sebanyak 352 unit yang telah dipasang. Sehingga menurutnya rasio kecelakaan sebesar 0,1% di tahun 2017.

10) Komunikasi dan Informatika

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Ketersediaan sarana/prasarana TIK

Sarana/prasarana teknologi informasi komunikasi (TIK) yang tersedia di Kabupaten Bandung terdiri dari akses internet, jaringan komunikasi data, sistem informasi, dan titik hotspot. Sejak tahun 2013, seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bandung telah dilengkapi dengan akses internet. Dalam rangka mendukung kelancaran transformasi data dan informasi pembangunan antar perangkat daerah, dikembangkan sistem informasi lokal dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Sejak 2015 sudah ada peningkatan sistem informasi setelah sebelumnya selama tahun 2012-2014 mengalami stagnansi jumlah sistem informasi yang ada. Pada tahun 2016, sistem informasi yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung adalah sebanyak 71 unit. Sementara itu, di tahun 2016 ada pengurangan titik hotspot dari 5 titik menjadi 4 titik.

Tabel II.79 Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet & terkoneksi ke pusat jaringan komunikasi data Pemkab	28	72	72	72	72
2.	Jumlah sistem informasi yang ada	38	38	38	61	71
3.	Jumlah titik hotspot yang difasilitasi Pemda	5	5	5	5	4

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kabupaten Bandung, 2017

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase koperasi aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan, dan memperluas lapangan pekerjaan. Dalam kurun waktu 2012-2016



jumlah koperasi di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, terdapat 1.722 koperasi di Kabupaten Bandung. Akan tetapi di tahun yang sama jumlah koperasi yang aktif justru mengalami penurunan. Persentase koperasi aktif di tahun 2017 adalah sebesar 50,34% lebih rendah dibandingkan persentase koperasi aktif di tahun 2015 yaitu sebesar 55,98%. Dari total koperasi yang telah terbangun, selama lima tahun terakhir rata-rata hanya sekitar 50% koperasi yang berstatus koperasi aktif. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas dan kinerja koperasi di Kabupaten Bandung cukup rendah. Rendahnya koperasi yang aktif juga menandakan bahwa ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bandung belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Saat ini, manajerial dan kelembagaan pengurus koperasi belum berfungsi optimal. Koperasi yang ada juga belum memiliki aktivitas yang beragam selain simpan pinjam. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan jumlah koperasi. Pada tahun 2017, Kabupaten Bandung memiliki 130 koperasi simpan pinjam dan jumlah ini berkurang dari tahun 2016 sebesar 137 koperasi simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam di koperasi kalah dengan kegiatan simpan pinjam di bank dimana masyarakat lebih memilih untuk menggunakan bank. Selain itu, bermunculan juga kompetitor yang menetasnamakan koperasi padahal adalah bank keliling. Melihat potensi terbangunnya koperasi, maka diperlukan sebuah upaya untuk dapat mendorong kinerja koperasi agar fungsi dan tujuan pembentukannya dapat tercapai. Selain itu, dibutuhkan juga upaya penghidupan kembali koperasi yang sudah tidak aktif dan inovasi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi. Salah satu yang menjadi potensi untuk dikembangkan kembali adalah koperasi produksi. Pada tahun 2017, terdapat 175 koperasi produksi atau sebesar 20,1% dari total keseluruhan koperasi. Koperasi produksi berpotensi untuk menghasilkan kegiatan koperasi yang beragam dan juga berpotensi untuk mengembangkan inovasi dari kegiatan yang ada.

Tabel II.80 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah koperasi aktif	820	870	888	964	861	807
2.	Jumlah koperasi tidak aktif	722	722	722	722	861	733
3.	Jumlah koperasi	1.560	1.593	1.610	1.686	1.722	1.540
4.	Persentase koperasi aktif (%)	52,56	54,61	55,16	55,98	50	50,34
5.	Jumlah koperasi produksi	n/a	n/a	n/a	n/a	201	175
6.	Jumlah koperasi simpan pinjam	n/a	n/a	n/a	n/a	137	130

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2018

b. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Keberadaan UKM non BPR/LKM menambah kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah melalui UKM. Dalam kurun waktu 2012-2017 terdapat peningkatan jumlah UKM dan jumlah koperasi. Pada tahun 2017, jumlah UKM di Kabupaten Bandung adalah 12.343 buah. Banyaknya jumlah UKM ini menunjukkan tren yang bagus bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Bandung. Namun, permasalahan yang perlu diperhatikan adalah bukan dari kuantitas pelaku UKM melainkan dari kualitas dan keberjalanan usaha para pelaku UKM tersebut. UKM yang berkembang adalah usaha mikro dengan aset yang kurang dari 50 juta. Hampir 76% dari total UKM yang ada di Kabupaten Bandung memiliki skala usaha mikro. Jadi meskipun jumlahnya banyak, tetapi tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kabupaten Bandung. UKM yang saat ini berkembang masih belum stabil dimana beberapa pelaku UKM tidak bertahan lama dalam menjalankan usahanya. Jenis usaha yang berkembang kebanyakan adalah olahan makanan dan minuman/kuliner yang sifatnya tidak tahan lama. Adapun beberapa kendalanya yang dihadapi pelaku UKM antara lain adalah keterbatasan modal, akses terhadap pasar, serta lemahnya kemampuan pelaku usaha dalam memproduksi dan mencari bahan baku. Hal – hal tersebut

mempengaruhi lamanya keberlangsungan suatu UKM. Selain itu, produk-produk UKM juga masih minim yang terstandarisasi.

Tabel II.81 Jumlah Pelaku UKM dan Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pelaku UKM	7.894	8.432	9.003	9.615	10.765	12.343
2.	Koperasi	1.593	1.593	1.610	1.686	1.722	1.540

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2018

Gambar II.32 Persentase UKM Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2017



Sumber: Hasil Pengolahan Data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2018

c. Jumlah BPR/LKM

BPR adalah salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sementara itu, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposit), kredit (*loan*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment service*), serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Fungsi BPR dan LKM adalah memberikan jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM berarti semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan guna meningkatkan usaha dan perekonomiannya. Pada tahun 2016, terdapat 44 BPR yang terdiri dari 40 BPR konvensional dan 4 BPR syariah.

d. Jumlah omzet

Omzet menunjukkan tingkat keberhasilan suatu badan usaha. Omzet koperasi dan UKM Kabupaten Bandung telah mengalami peningkatan dari 2012 hingga 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kegiatan perekonomian kemasyarakatan untuk masyarakat kecil dan menengah.

Tabel II.82 Jumlah Volume Koperasi dan Omzet Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017

No	Kegiatan	Omzet				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Koperasi	673.546.764.141	684.323.516.386	684.323.516.386	684.323.516.386	716.314.145.613
2.	UKM	3.089.449.828.528	3.094.869.600.625	3.099.772.278.625	3.106.363.027.825	3.189.622.862.025

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2018

12) Penanaman Modal

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan penanaman modal dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:



a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/ kegiatan pembangunan. Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Kehadiran investor baik investor dalam negeri maupun investor asing akan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum, dan lain-lain. Adanya penanaman modal dalam pembangunan memberikan keuntungan tidak hanya bagi pihak investor saja namun juga bagi daerah yang menerima investasi maupun bagi daerah asal para investor. Beberapa kebijakan dibuat untuk mengundang investor terutama investor asing untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung.

Upaya pemerintah Kabupaten Bandung dalam mencari modal dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung pada tahun 2017 mencapai 98 investor yang terdiri dari 71 investor dalam negeri dan 27 investor asing. Jumlah ini terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012 dimana hanya terdapat 48 investor PMA/PMDN di Kabupaten Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kondisi di Kabupaten Bandung sehingga mampu menarik berbagai investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung.

Tabel II.83 Jumlah Investor PMA/ PMDN Tahun 2012-2017

Investor	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PMDN	42	23	20	62	58	71
PMA	6	6	12	20	22	27
Total	48	29	32	82	80	98

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, 2018

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Realisasi investasi di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 2012-2017 cenderung fluktuatif dengan adanya penurunan realisasi investasi dari tahun 2015 ke 2016 namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2017. Ditinjau dari jumlah proyek, pada tahun 2017 proyek PMDN di Kabupaten Bandung sebanyak 2.669 proyek. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 3.190 proyek. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah proyek PMA yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang hanya 38 proyek menjadi 67 proyek pada tahun 2016.

Fluktuasi jumlah proyek PMDN dan PMA di Kabupaten Bandung berpengaruh terhadap nilai realisasi investasi. Pada tahun 2017, total realisasi investasi Kabupaten Bandung adalah sebesar Rp 10.973.152.165.142,-. Apabila dilihat dari jumlah tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya sementara penyerapan tenaga kerja asing cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, terdapat penurunan penyerapan tenaga kerja Indonesia maupun asing yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa perusahaan PMA dan PMDN yang mengalami gulung tikar sehingga terjadi pemutusan kerja terhadap tenaga kerja.

Tabel II.84 Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah Proyek			Realisasi Investasi			Penyerapan Tenaga Kerja	
	PMDN	PMA	Total	PMDN	PMA	Total	Indonesia	Asing
2012	3.190	38	3.228	4.470.565.958.912	1.816.712.696.913	6.287.278.655.825	57.180	114
2013	2.462	6	2.468	7.304.235.269.502	944.138.205.500	8.248.373.475.002	52.806	62
2014	2.502	32	2.534	5.472.067.707.548	803.058.396.105	6.275.126.103.653	51.828	65
2015	2.631	67	2.698	5.964.221.569.580	3.454.165.551.237	9.418.387.120.817	66.869	144
2016	2.240	67	2.307	5.297.733.143.668	2.877.269.319.178	8.175.002.462.846	67.027	100
2017	2.669	60	2.729	8.649.022.464.692	2.324.129.700.450	10.973.152.165.142	35.832	45

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, 2017



Saat ini, realisasi investasi Jawa Barat masih terpusat di Karawang, Bekasi, Bogor, Kota Bogor, Purwakarta. Hal ini dikarenakan daerah-daerah tersebut telah memiliki kawasan industri dengan infrastruktur yang terintegrasi. Ketersediaan infrastruktur dan akses yang memadai menjadi daya tarik investor untuk merealisasikan industrinya. Meskipun industri pengolahan di Kabupaten Bandung merupakan sektor yang paling berkembang dan kontribusi sektor industri pengolahan Kabupaten Bandung ke Provinsi Jawa Barat besar, namun daya saingnya masih kalah dengan daerah-daerah lain. Daerah – daerah di Karawang, Bekasi, Bogor, Kota Bogor, dan Purwakarta telah memiliki infrastruktur yang memadai didukung oleh konektivitas kawasan dengan jalan tol yang menghubungkan daerah tersebut dengan Jakarta sebagai pintu gerbang keluar masuknya barang. Kabupaten Bandung masih terhambat oleh ketersediaan infrastruktur dalam menarik investor dalam merealisasikan investasinya. Baru pada tahun 2017 Kabupaten Bandung memiliki Tol Soroja yang meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Jakarta. Permasalahan lain yang menjadi penghambat daya tarik investasi di Kabupaten Bandung adalah belum optimalnya penggalan potensi investasi. Saat ini belum terpetakan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif. Selain itu, Kabupaten Bandung juga belum memiliki rencana induk pengembangan industri daerah.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah organisasi pemuda

Organisasi kepemudaan merupakan salah satu elemen di masyarakat yang berpotensi menjadi wadah untuk mengembangkan generasi muda yang berkualitas dan mandiri. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda maka semakin banyak juga sarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memberdayakan pemuda dalam pembangunan. Pada tahun 2016, Kabupaten Bandung memiliki 59 organisasi pemuda dengan total kegiatan kepemudaan sebanyak 29 kegiatan. Mayoritas kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi pemuda antara lain memperingati hari-hari besar, pelatihanm serta pemberdayaan pemuda.

b. Jumlah organisasi olahraga

Ketersediaan jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Pembangunan kegiatan olahraga di Kabupaten Bandung tidak hanya dimotori oleh Dinas Pemuda dan Olahraga tetapi juga dimotori oleh masyarakat umum yang terwadahi dalam klub dan organisasi olahraga. Pada tahun 2015, Kabupaten Bandung memiliki 100 klub olahraga dan 90 organisasi olahraga. Pada tahun 2017, klub olahraga di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan menjadi 276 klub olahraga.

c. Jumlah atlit dan prestasi

Jabar juara umum PON XIX 2016, dari 1.027 kontingen atlit yang berprestasi mewakili Provinsi Jawa Barat 107 kontingen atlit yang berprestasi berasal dari Kabupaten Bandung. Kontribusi Kabupaten Bandung dalam menjadikan Jawa Barat menjadi juara umum PON XIX 2018 sebesar 10,14% dari total kontingean atlit Jawa Barat.

d. Jumlah prasarana olahraga

Ketersediaan sarana olahraga menjadi sarana untuk dapat meningkatkan keahlian dan kemampuan pemuda di bidang olahraga. Pada tahun 2017, prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Bandung meliputi 275 unit lapangan bola voli, 10 unit lapangan bola basket, 22 unit



lapangan tenis, 61 unit lapangan futsal, 1 unit stadion sepak bola tipe B, 1 unit stadion atletik tipe C, 239 unit lapangan bulu tangkis, 1 unit gedung olahraga tipe A, 7 unit kolam renang, 7 unit sasaran tinju/beladiri, 2 unit rumah billiard, dan 145 unit lapangan olahraga terbuka. Totalnya terdapat 771 sarana olahraga yang terdapat di Kabupaten Bandung. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 747 unit sarana olahraga. Akan tetapi, untuk sarana dan prasarana kepemudaan di Kabupaten Bandung masih sangat minim. Kabupaten Bandung hanya memiliki 1 unit gedung KNPI untuk menunjang kegiatan kepemudaan yang ada di Kabupaten Bandung.

e. Jumlah pengguna narkoba

Kabupaten Bandung menempati urutan ke 2 di Provinsi Jabar pengguna narkoba terbanyak dan Jabar menempati urutan ke 6 nasional. Kondisi seperti sangat berpotensi untuk menghancurkan generasi muda Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, peran organisasi pemuda di Kabupaten Bandung perlu ditingkatkan agar pemuda dapat beraktivitas dan disibukkan dengan kegiatan – kegiatan yang bermanfaat.

14) Statistik

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan statistik dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Ketersediaan dokumen statistik

Dokumen statistik menjadi salah satu instrumen yang digunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan analisis bagi setiap perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah. Analisis berbasis dokumen statistik tersebut menjadi bahan dalam menentukan atau merumuskan kebijakan terkait pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan dokumen statistik mempermudah pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/ pelaksanaan pembangunan daerah juga sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 2012-2017.

Tabel II.85 Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		Ada	Tidak Ada										
1.	PDRB	√		√			√	√		√		√	
2.	IPM	√		√			√	√		√		√	
3.	Suseda		√		√		√		√		√		√
4.	KBDA	√			√		√	√		√		√	
5.	Indeks Gini Ratio		√		√		√		√		√		√
6.	Input Output		√		√		√		√		√		√
7.	IKM	√		√	√		√		√		√		√
8.	IHK		√		√		√		√		√		√
9.	Data Pokok	√		√		√		√		√		√	

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung, 2018

15) Kebudayaan

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan kebudayaan dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:



a. Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Kebudayaan mencerminkan jati diri masyarakat pada suatu daerah. Salah satu upaya untuk melestarikan jati diri daerah adalah melalui pemeliharaan benda – benda, situs, dan kawasan vagar budaya. Pada tahun 2016, Kabupaten Bandung memiliki 100 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari total 100 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Bandung.

Tabel II.86 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Total Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dimiliki Daerah	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)
2012	11	50	22
2013	108	108	100
2014	100	100	100
2015	100	100	100
2016	100	100	100

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2017

b. Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya

Penyelenggaraan seni dan budaya yang telah diselenggarakan di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 adalah sebanyak 10 kali. Jumlah ini berkurang apabila dibandingkan dengan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya pada tahun 2010 yang mencapai 16 kali dalam setahun. Apabila dibandingkan dengan jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 yaitu sebesar 624 buah, jumlah penyelenggaraan ini terbilang sedikit. Padahal dari sisi sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya, Kabupaten Bandung memiliki jumlah yang cukup banyak yaitu sebesar 74 unit.

Tabel II.87 Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya Tahun 2015 - 2016

No	Seni dan Kebudayaan	2015	2016
1.	Jumlah grup kesenian	624	624
2.	Jumlah gedung kesenian	2	2
3.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	10
4.	Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	74	74

Sumber: SIPD Kabupaten Bandung Tahun 2015,2016

16) Perpustakaan

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan perpustakaan dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana pendukung utama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Perpustakaan menjadi wadah dimana di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk mencerdaskan siswa sekolah juga mencerdaskan masyarakat secara umum. Ketersediaan perpustakaan di suatu daerah menggambarkan kapasitas yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Melihat pentingnya peran perpustakaan dalam pembangunan pendidikan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya untuk meningkatkan jumlah perpustakaan baik perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, maupun perpustakaan masyarakat. Peningkatan jumlah perpustakaan yang cukup signifikan mulai terjadi dari tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016 dan 2017 jumlah perpustakaan sebanyak 561 buah dan 1.272 buah. Jumlah ini



mengalami peningkatan cukup tinggi setelah 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 hingga 2014 tidak adanya peningkatan jumlah perpustakaan yaitu stagnan pada jumlah 401 buah. Peningkatan jumlah perpustakaan dalam kurun waktu 2015-2016 terjadi dikarenakan adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bandung dengan masyarakat dan LSM untuk membangun 100 unit perpustakaan baru di Kabupaten Bandung. Peningkatan perpustakaan paling banyak terdapat pada perpustakaan SD dimana pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 934 buah.

Tabel II.88 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Jenis Perpustakaan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perpustakaan Desa/Kelurahan	276	276	276	276	276	69
2.	Perpustakaan SD	33	33	33	43	66	934
3.	Perpustakaan SMP	37	37	37	47	64	236
4.	Perpustakaan SMA/SMK	15	15	15	25	40	0
5.	Perpustakaan SKPD	8	8	8	18	28	0
6.	Perpustakaan PONTREN	17	17	17	27	37	0
7.	Perpustakaan Masyarakat (TBM, RUPIN, dsb)	15	15	15	25	50	33
Total		401	401	401	461	561	1.272

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2018

b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat dikorelasikan dengan tingkat minat baca masyarakat di Kabupaten Bandung. Semakin meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dapat juga diartikan bahwa semakin meningkatnya minat masyarakat Kabupaten Bandung untuk datang ke perpustakaan atau untuk membaca. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2012 hingga 2017, jumlah pengunjung perpustakaan terus mengalami peningkatan. Begitu pula dengan persentase kunjungan perpustakaan yaitu perbandingan antara jumlah populasi yang harus dilayani dengan jumlah pengunjung. Pada tahun 2012, persentase kunjungan ke perpustakaan hanya sekitar 27,96% dari cakupan jumlah populasi yang harus dilayani. Akan tetapi, pada tahun 2016 persentase kunjungan ke perpustakaan telah meningkat jauh menjadi 92,73% dari total populasi yang harus dilayani. Hal ini juga menandakan bahwa pelayanan perpustakaan di Kabupaten Bandung semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel II.89 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kunjungan ke perpustakaan	10.951	24.684	25.345	34.672	55.072	198.913
2.	Populasi yang Harus Dilayani	39.157	40.000	40.000	40.000	59.388	3.090.916

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2018

c. Jumlah kendaraan perpustakaan

Menyediakan perpustakaan keliling merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan dan memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fungsi perpustakaan. Adanya perpustakaan keliling diharapkan dapat memudahkan masyarakat khususnya yang berada di wilayah pelosok Kabupaten Bandung untuk mengakses bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Pemerintah Kabupaten Bandung menyediakan kendaraan yang berfungsi sebagai perpustakaan keliling (mobil pintar). Pada tahun 2016, jumlahnya sebanyak 4 unit. Belum terdapat peningkatan jumlah kendaraan untuk perpustakaan keliling di Kabupaten Bandung dikarenakan keterbatasan anggaran. Padahal permintaan untuk perpustakaan keliling di Kabupaten Bandung sangat banyak. Selain itu, terdapat pula kendaraan layanan internet dan motor pintar yang jumlahnya masing – masing 1 (satu) unit.



d. Jumlah ketersediaan buku

Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya bagi seluruh masyarakat, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di perdesaan. berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai kurang lebih 3 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70%nya tinggal di wilayah perdesaan, maka dalam hal ini pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemerataan baik dalam memperoleh pendidikan maupun dalam memperoleh informasi. Menurut standar nasional, jumlah minimal buku yang tersedia harusnya 50.000 judul buku sedangkan sampai saat ini ketersediaan judul buku hanya berkisar kurang lebih 25.000 judul buku. Jadi Kabupaten Bandung masih terdapat kekurangan dalam memenuhi target standar nasional.

17) Kearsipan

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan kearsipan dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Pengelolaan arsip secara baku

Pengelolaan kearsipan merupakan sebuah hal yang penting dilakukan mengingat pentingnya arsip merupakan aset pemerintah berupa dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Arsip dapat mengingatkan peristiwa / kejadian / kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan arsip yang baik dibutuhkan untuk memudahkan pengambilan keputusan pemerintah. Guna memiliki sistem kearsipan yang baik, dibutuhkan pengelolaan arsip secara baku. Pada tahun 2016, seluruh perangkat daerah (PD) di Kabupaten Bandung telah menerapkan kearsipan secara baku. Dari total 140 PD yang ada di Kabupaten Bandung, seluruhnya telah menerapkan arsip secara baku dari tahun 2012 hingga 2016. Data detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.90 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No.	Perangkat Daerah	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Badan	9	9	9	9	9	2
2.	Dinas	14	14	14	14	14	6
3.	Bagian	10	10	10	10	10	-
4.	RSUD	3	3	3	3	3	-
5.	Lembaga Teknis Daerah	4	4	4	4	4	-
6.	Kecamatan	31	31	31	31	31	6
7.	Kelurahan	9	9	9	9	9	-
8.	Desa	60	60	60	60	60	3
Total		140	140	140	140	140	17

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2018

b. Kompetensi SDM Arsiparis

Meskipun seluruh PD telah menerapkan kearsipan secara baku, namun jumlah arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung masih terbatas. Pada tahun 2012 hingga 2015 jumlah arsiparis di Kabupaten Bandung adalah 18 orang sementara pada tahun 2017 jumlah arsiparis mengalami penurunan menjadi 12 orang. Padahal, secara standar diperlukan 125 arsiparis untuk dapat melaksanakan kearsipan secara baku yang efektif dan efisien untuk 140 PD yang ada di Kabupaten Bandung.



Tabel II.91 Jumlah Arsiparis di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No.	Indikator/Data	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Arsiparis Penyelia	3	3	3	7	7	4
2.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	2	2	2	7	6	6
3.	Arsiparis Pelaksana	13	13	13	4	3	1
4.	Arsiparis Pertama	-	-	-	-	1	1
Total		18	18	18	18	17	12

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2018

18) Penunjang pemerintahan umum

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan penunjang pemerintahan umum dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian penegakan PERDA

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3 menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Berkaitan dengan tugasnya untuk menegakan peraturan daerah, Satpol PP telah menyelesaikan seluruh permasalahan terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Tidak ada permasalahan pada tindak penyelesaian pelanggaran Perda maupun K3, namun yang perlu menjadi perhatian adalah meningkatnya jumlah pelanggaran perda dan pelanggaran K3 setiap tahunnya. Tingginya pelanggaran perda dan K3 dikarenakan belum optimalnya sistem pengawasan perijinan. Hal ini terjadi karena belum memadainya sarana prasarana untuk patroli, belum optimalnya integrasi perijinan antar lembaga serta kurangnya jumlah linmas untuk pengawasan.

Tabel II.92 Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Penegakan Perda							
1.	Jumlah Pelanggaran Perda	40	64	110	122	160	468
2.	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	40	64	110	122	160	468
3.	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	100	100	100	100	100	100
II. Penegakan K3							
1.	Jumlah Pelanggaran K3	125	141	173	215	1.215	1.673
2.	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	125	141	173	215	1.215	1.673

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung, 2018

b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolak ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Data IKM dapat dijadikan bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada tahun 2016, nilai IKM Kabupaten Bandung adalah sebesar 73,101 dan mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi sebesar 73,202.

Tabel II.93 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2013

Bidang Pelayanan	Nilai IKM Konversi 2013	Mutu Pelayanan	Kinerja Bidang Pelayanan	Nilai IKM Konversi 2012
Kesehatan	74,48	B	Baik	73,53
Ekonomi	72,81	B	Baik	74,33



Bidang Pelayanan	Nilai IKM Konversi 2013	Mutu Pelayanan	Kinerja Bidang Pelayanan	Nilai IKM Konversi 2012
Administrasi Penduduk	73,79	B	Baik	70,85
Ketenagakerjaan	75,56	B	Baik	71,93
	75,21	B	Baik	73,64
Kebersihan	74,08	B	Baik	75,22
Pendidikan	72,47	B	Baik	70,56
Rata-rata IKM Kabupaten Bandung	74,06	B	Baik	72,87

Sumber: Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bandung, 2017

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang termasuk ke dalam urusan pilihan pemerintah di lingkup kabupaten antara lain kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

1) Kelautan dan Perikanan

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai indikator perikanan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2012-2017.

Tabel II.94 Indikator Perikanan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Meningkatnya kapasitas kelompok/UPR pembenihan dan pembudidayaan ikan/pokdakan (kelompok)	126	186	294	726	732	767
2.	Meningkatnya pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat CBIB (orang)	34	54	94	136	167	167
3.	Meningkatnya masyarakat yang aktif mengawasi lingkungan kawasan budidaya (pokmaswas)	3	3	9	9	9	9
4.	Terjaganya kelestarian ikan diperairan umum (lokasi)	18	27	40	144	148	169
5.	Peningkatan pelaku usaha pengolahan ikan bersertifikat (unit usaha)	35	50	84	84	90	92
6.	Jumlah SDM pengembang sistem penyuluhan perikanan (orang)	197	10	n/a	47	5	10

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, 2017

2) Pariwisata

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan pertanian dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Kunjungan wisata

Kabupaten Bandung memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dibagi ke dalam wisata budaya/sejarah, wisata alam, dan wisata buatan. Sebagian besar pariwisata tersebut didominasi oleh wisata alam dan agro yang banyak menarik minat wisatawan. Kunjungan wisata ke Kabupaten Bandung selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, terdapat 2.152.222 wisatawan. Kabupaten Bandung merupakan kabupaten dengan jumlah kunjungan wisata terbanyak kelima dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan besarnya potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bandung dan daya saing yang dimiliki oleh sektor pariwisata. Dari total 45.216.254 wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Jawa Barat, sebanyak 8,76%nya mengunjungi objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung.

Gambar II.33 Perbandingan Kunjungan Wisatawan Provinsi Jawa Barat Per Kabupaten/Kota Tahun 2016



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2017

Beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung antara lain Situ Cileunca, Situ Patengan, Kolam Air Panas Alami Walini, Kolam Air Panas Alami Cimanggu, Kolam Air Panas Alami Cibolang, Perkemahan Ranca Upas, Tebing Keraton, Curug Cinulang. Setiap tahun, daya tarik wisata di Kabupaten Bandung terus meningkat. Pada tahun 2016, terdapat 45 objek wisata di Kabupaten Bandung yang terdiri dari 40 objek wisata alam dan 5 objek wisata buatan. Bahkan, Kabupaten Bandung akan mengembangkan 19 (sembilan belas) kawasan strategis pariwisata, 5 (lima) kawasan andalan pariwisata, dan 19 (sembilan belas) kawasan potensial pariwisata untuk menjadi daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Bandung.

Tabel II.95 Indikator Capaian Pariwisata di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	5.645.569	6.234.555	1.650.000	1.723.001	2.000.000	2.152.222
2.	Jumlah daya tarik wisata (lokasi)	45	50	55	80	65	66
3.	Jumlah mitra kerja pariwisata (orang)	1.224	1.312	1.442	1.865	1.955	2.217

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2016; Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2017

Pariwisata yang ada di Kabupaten Bandung mayoritas dimiliki oleh swasta dan tanah/lahan milik BUMN (PERHUTANI) sehingga mayoritas pendapatan dari destinasi wisata masuk ke pemerintah pusat. Saat ini, PAD dari sektor pariwisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu objek wisata Situ Cileunca dan Kawasan Gedong Budaya Sabilulungan. Kawasan Gedong Budaya Sabilulungan berpotensi menjadi penyumbang PAD terbesar di sektor pariwisata. Meskipun begitu, Kabupaten Bandung termasuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Kreatif Bandung dan Sekitarnya. Berdasarkan Rencana Besar Pengembangan Destinasi Wisata Kelas Dunia Provinsi Jawa Barat, kawasan strategis pariwisata kreatif Bandung dan sekitarnya merupakan kawasan dengan prioritas pertama dalam pengembangan pariwisata Jawa Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki peluang/prospek untuk dikembangkan berdasarkan kondisi saat ini maupun berdasarkan ekspektasi kondisi masa yang akan datang. Prioritas pengembangan aspek terkait



pariwisata kreatif Bandung secara umum ditekankan pada aspek: (1) peningkatan pertumbuhan pasar/ kunjungan wisata, (2) peningkatan aksesibilitas, (3) kesiapan teknologi informasi dan telekomunikasi, (4) ketersediaan sumber daya manusia, (5) sinergi pemerintah lokal dalam pembangunan kawasan, (6) ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, dan (7) penciptaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Adanya fokus pengembangan pariwisata Jawa Barat pada kawasan wisata di Kabupaten Bandung memberikan peluang bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Bandung.

Namun terdapat beberapa permasalahan dalam mengembangkan potensi destinasi wisata di Kabupaten Bandung. Permasalahan – permasalahan tersebut antara lain minimnya aksesibilitas dan akomodasi penunjang pariwisata, belum optimalnya pemasaran pariwisata dan budaya, serta lama tinggal wisatawan yang masih rendah. Aksesibilitas menuju beberapa objek wisata seringkali mengalami kemacetan di beberapa ruas jalan utama khususnya pada waktu – waktu libur panjang. Angkutan umum yang melalui destinasi wisata pun masih minim, begitu pula dengan jumlah hotel dan penginapan. Dikarenakan jumlahnya yang masih sedikit, harga akomodasi di Kabupaten Bandung terbilang cukup mahal dibandingkan dengan akomodasi yang ada di Kota Bandung sehingga daya tariknya kalah dibandingkan beberapa akomodasi di Kota Bandung. Selain itu, terkait lama tinggal wisatawan yang masih rendah, hal ini dikarenakan masih terbatasnya atraksi wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan di Kabupaten Bandung.

3) Pertanian dan Peternakan

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan pertanian dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Indikator Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura

Profuktivitas komoditas khususnya padi di Kabupaten Bandung sejak tahun 2015 terus mengalami penurunan. Di tahun 2017 produktivitas komoditas padi adalah 63,33 kw/ha lebih rendah dibandingkan produktivitas komoditas pado pada tahun 2015 sebesar 64,73 kw/ha. Dilihat dari kualitas kelompok, terdapat peningkatan yang dinilai dari semakin banyaknya jumlah kelompok yang terbina melalui penyuluh. Di tahun 2017 terdapat 2.445 kelompok yang terbina melalui penyuluh. Indikator pertanian, perkebunan, dan hortikultura Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2012-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.96 Indikator Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Jumlah pencapaian produktivitas komoditas (kw/ha)						
1.	Padi	63,66	64,34	62,87	64,73	63,84	63,33
II.	Luas areal pengembangan hortikultura unggulan (ha)						
1.	Alpukat	18	27	36	45	64	172,4
2.	Strawberry	3	6	8	12	87	123,49
3.	Jeruk	3	4	5	6	225	525
4.	Jambu biji	3	4	5	6	12	47,79
5.	Krisan	4.000	7.000	9.500	12.000	14.600	17.100
6.	Sedap malam	2.000	3.000	4.000	5.000	11.205	11.625
7.	Mawar	0	500	1.000	1.000	308	250
III.	Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP)	2,01	2,27	2,28	2,43	2,65	2,67
IV.	Jumlah rata-rata pencapaian produktivitas hortikultura						
1.	Sayuran (kw/ha)	198,13	204,07	210,19	216,50	253,92	254,03
2.	Buah-buahan (kw/ha)	98,00	100,00	102,00	104,00	124,23	125,68
3.	Tanaman hias (tangcai/ha)	13,53	16,81	17,14	17,48	28,87	35,89
4.	Tanaman obat (kw/ha)	3,07	3,13	3,19	3,25	3,30	3,92



No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5.	Jumlah kelompok yang terbina melalui penyuluh (kelompok)		2.286	2.320	2.360	2.398	2.445
6.	Jumlah penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan yang mendapatkan pelatihan (orang)		96	91	84	78	75

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2018

b. Indikator Peternakan

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat peningkatan dalam persentase penanggulangan ternak prioritas. Pada tahun 2016 tercatat persentase jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi sebesar 32%. Hal ini diikuti dengan peningkatan pencapaian status kesehatan hewan menjadi sebesar 74,30% di tahun 2016 dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,5% per tahun. Akan tetapi, belum ada peningkatan pada pemanfaatan teknologi peternakan serta peningkatan pelaku usaha pengolahan hasil ternak yang bersertifikat. Kedua indikator ini masih memiliki nilai yang sama sejak tahun 2015. Secara umum, dapat dikatakan bahwa terdapat peningkatan persentase capaian indikator peternakan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas peternakan di Kabupaten Bandung.

Tabel II.97 Indikator Peternakan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Meningkatnya jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi (%)	20,00	24,00	28,00	32,00	32,00	32,00
2	Meningkatnya status kesehatan hewan (%)	62,50	63,75	67,40	67,40	74,30	71,5
3	Peningkatan pelaku usaha pengolahan hasil ternak yang bersertifikat (unit usaha)	40	48	66	200	200	144
4	Meningkatnya pemanfaatan teknologi peternakan (orang)	167	147	88	587	587	130
5	Meningkatnya sarana dan prasarana pemotongan ternak di RPH (%)	63,54	63,95	69,5	79	83,5	100

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2018

4) Kehutanan

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan kehutanan dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja kehutanan. Praktek *illegal logging* dan *illegal trading*, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan, pengelolaan hutan yang belum menerapkan azas kelestarian merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan. Gerakan rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Sabilulungan merupakan salah satu upaya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang diarahkan untuk penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor, dan kekeringan secara terpadu dengan peran dari semua pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha, dan lain-lain melalui mobilisasi sumber daya. Sejak tahun 2012 hingga 2016, penanaman lahan kritis semakin meningkat luasnya. Pada tahun 2016, sebanyak 67,08% dari luas lahan kritis sudah tertanami.

Tabel II.98 Indikator Kehutanan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah luas lahan kritis yang tertanami (Ha)	13.538,66	4.415,00	32.057,80	24.542,50	
2.	Persentase luas lahan kritis yang tertanami (%)	32,86	63,72	66,37	66,37	67,08



No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
3.	Jumlah kelompok agroforestry	35	40	45	50	50
4.	Jumlah kelompok tani berbasis Aneka Usaha Kehutanan	35	40	45	50	50

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2017

5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan energi dan sumber daya mineral dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Energi

Potensi energi di Kabupaten Bandung terdiri dari panas bumi (*geothermal*), mikrohidro, biogas (limbah ternak), bahan bakar nabati (limbah organik), dan tenaga surya (PLTS).

➤ Panas Bumi

Terdapat 5 (lima wilayah pengembangan panas bumi yang ada di Kabupaten Bandung yaitu wilayah Kamojang, Wayang Windu, Patuha, Cibuni, dan Darajat. dibandingkan dengan perolehan DBH tahun 2013 yaitu sebesar Rp 51.718.860.646,00. Dapat dilihat bahwa tren peroleh DBH panas bumi di Kabupaten Bandung terus mengalami penurunan dari tahun 2012 yang sebesar Rp 105.298.055.081,55 dan tahun 2011 sebesar Rp 53.860.127,00. Padahal, potensi panas bumi di Kabupaten Bandung cukup tinggi.

➤ Ketenagalistrikan

Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga di Kabupaten Bandung yang menggunakan listrik PLN sebanyak 731.428 KK atau sekitar 82,86% dari total jumlah KK. Selain menggunakan listrik PLN, pemenuhan listrik penduduk Kabupaten Bandung juga dipenuhi oleh tenaga mikrohidro dan energi surya. Terdapat 34 KK di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu yang menggunakan energi mikrohidro. Adapun penggunaan energi surya sebanyak 150 KK masing-masing sebanyak 50 KK yang terletak di Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg, Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan, dan Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu.

Meskipun penggunaan listrik di Kabupaten Bandung yang terlayani PLN sudah baik, rasio elektrifikasi untuk rumah tangga miskin masih sangat minim. Pada tahun 2015, rasio elektrifikasi untuk rumah tangga miskin baru sebesar 40,48%. Meskipun nilainya kecil, persentase ini sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar 14,15%. Kelistrikan pada rumah tangga miskin menggunakan aliran dari PLN dengan subsidi 450 watt.

➤ Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi di Kabupaten Bandung umumnya bergerak di kegiatan hilir yaitu SPBU sebanyak 50 unit usaha dan agen LPG sebanyak 52 agen.

b. Sumber Daya Mineral

Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bandung dapat dikelompokkan menjadi sumber daya pertambangan dan sumber daya air tanah.

➤ Pertambangan

Keberadaan sumber daya mineral di Kabupaten Bandung berupa andesit, tanah urug, dan emas yang tersebar di Kecamatan Margaasih, Baleendah, Nagreg, Kutawaringin, Pameungpeuk, dan Banjaran. Potensi emas sebagian besar berada di Kecamatan Kutawaringin. Sayangnya potensi penggalan emas ini masih dilakukan dengan pertambangan rakyat. Sementara itu, pengelolaan pertambangan oleh perusahaan bahan galian di Kabupaten Bandung dilakukan dengan mengedepankan konservasi dan penggalan potensi untuk peningkatan PAD. Jumlah perusahaan yang melaksanakan



produksi sebanyak 22 perusahaan dengan luas lahan 119,17 ha. Dari total jumlah perusahaan tersebut, hanya 15 perusahaan yang aktif. Pengendalian dan pembinaan terhadap perusahaan dilakukan dengan perijinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Pada tahun 2015 jumlah luasan pertambangan berijin sebesar 92,47%.

➤ **Sumber Daya Air Tanah**

Kabupaten Bandung sebagai bagian dari cekungan air tanah Bandung-Soreang mengikuti prinsip pengelolaan *'one basin one management'*. Hasil penelitian dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral menyebutkan bahwa potensi jumlah air tanah yang terkandung dalam cekungan air tanah Bandung-Soreang adalah 368,5 juta m³/tahun. Dari jumlah total tersebut diperkirakan kebutuhan air di wilayah cekungan Bandung-Soreang yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut adalah sebesar 312,75 juta m³.

Tabel II.99 Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio elektrifikasi Rumah Tangga Miskin	14,15	20,34	38,55	40,48
2.	Prosentase luasan pertambangan berijin (%)	89,77	90,65	91,56	92,48
3.	Rata-rata pemakaian air tanah per sumur setiap bulan (m ³ /sumur)	16.954,97	16.885,17	17.845,21	17.206
4.	Prosentasi ketersediaan peta zonasi kerentanan gerakan tanah	62,50	75,00	100	71

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Bandung, 2016

6) Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung. Sektor ini merupakan 3 sektor penyumbang PDRB terbesar bersama sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Bandung dapat dilihat dari indikator kinerja di bawah ini.

Tabel II.100 Indikator Capaian Perdagangan di Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penyelesaian kasus dalam fasilitasi advokasi perlindungan konsumen	35	20	17	20	24
2.	Jumlah nilai ekspor barang dan jasa (US \$)	821.019.618,92	777.105.000.000	508.950.000	824.819.145	897.710.575
3.	Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata	7	2	3	3	3

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, 2017

7) Perindustrian

a. Pertumbuhan industri

Sektor industri di Kabupaten Bandung mempunyai kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung khususnya industri pengolahan. Mayoritas industri yang berkembang di Kabupaten Bandung adalah industri kecil non formal dimana jumlahnya mencapai 7.236 pada tahun 2017. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perindustrian dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel II.101 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

Tahun	Industri Kecil		Industri Menengah	Industri Besar	Total
	Non Formal	Formal			
2012	4.070	7	3	14	4.094
2013	3.927	140	270	302	4.639
2014	4.085	424	37	44	4.590
2015	6.516	1.214	392	356	8.478
2016	6.816	1.237	395	366	8.818
2017	7.236	1.283	397	368	9.284

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, 2017

8) Transmigrasi

Transmigrasi yang terjadi di Kabupaten Bandung terbatas hanya pada transmigrasi umum yaitu transmigrasi yang disponsori dan dibiayai oleh pemerintah. Dilihat berdasarkan perkembangannya selama lima tahun terakhir, jumlah transmigrasi umum di Kabupaten Bandung terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah transmigran ini sejalan dengan telah meningkatnya taraf kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung. Informasi mengenai perkembangan jumlah transmigrasi di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.102 Jumlah Transmigrasi Menurut Jenis di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016

Jenis Transmigrasi		2012	2013	2014	2014	2016
Transmigrasi Swakarsa	Jumlah KK	0	0	0	0	0
	Jumlah Jiwa	0	0	0	0	0
Transmigrasi Umum	Jumlah KK	40	25	25	17	8
	Jumlah Jiwa	136	90	111	53	31
Transmigrasi Bedol Desa	Jumlah KK	0	0	0	0	0
	Jumlah Jiwa	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2017

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

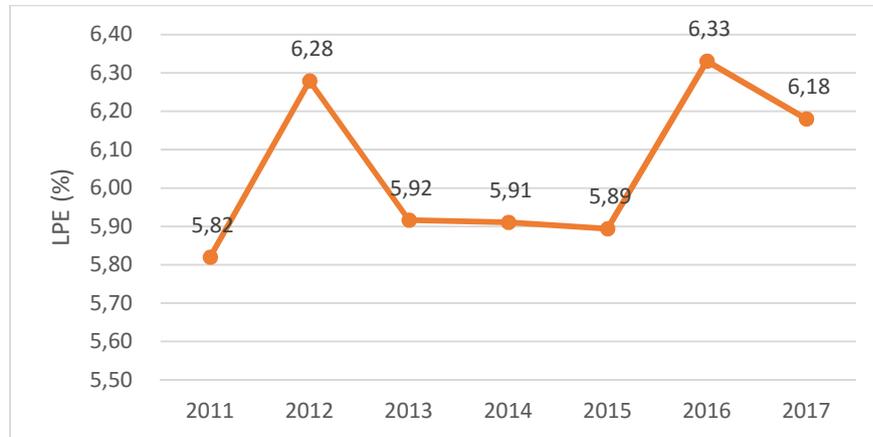
Daya saing daerah didefinisikan oleh *Centre for Regional and Urban Studies (CURDS)*, Inggris sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya. Daya saing daerah menjadi salah satu tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah itu sendiri. Daya saing (*competitiveness*) merupakan sebuah kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tingkat daya saing daerah dapat diukur antara lain melalui indikator makro ekonomi seperti LPE dan PDRB per kapita. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung, capaian LPE Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Menurunnya LPE Kabupaten Bandung ini dipengaruhi oleh melemahnya perkembangan beberapa sektor kontributor PDRB. Dilihat dari PDRB ADHK, hampir seluruh sektor PDRB memiliki *trend* pertumbuhan yang negatif kecuali sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa pendidikan. Apabila dilihat dari PDRB ADHB, dari 17 sektor PDRB, 11 diantaranya memiliki pertumbuhan yang negatif pada tahun 2016. Sektor – sektor yang memiliki pertumbuhan positif hanyalah sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan



sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan soail wajib, serta sektor jasa pendidikan.

Tabel II.103 Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017



Sumber: Analisis Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung, 2017

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan/Angka Konsumsi Rata-rata Per Kapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan)

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga terhadap peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pada tahun 2013 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan di Kabupaten Bandung mencapai Rp 1.291.800 yang terdiri dari bahan pangan sebesar Rp 442.500 dan non pangan sebesar Rp 849.300. Angka ini pada tiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Tabel II.104 Angka Konsumsi Pangan Rata-Rata Rumah Tangga Per Kapita di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2013

No	Uraian	2012	2013
1.	Total Pengeluaran Rumah Tangga	398.000	442.500
2.	Jumlah Rumah Tangga	825.800	849.300
3.	Rasio	1.223.800	1.291.800

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Bandung, 2017

2) Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. NTP dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani. Apabila NTP lebih besar dari 100, berarti petani mengalami surplus artinya harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya, jika NTP lebih kecil dari 100, berarti petani mengalami defisit artinya kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya, pendapatan petani turun lebih kecil dari pengeluarannya.



Kabupaten Bandung belum memiliki data untuk NTP sehingga parameter yang digunakan adalah NTP di Provinsi Jawa Barat dengan asumsi bahwa nilai NTP di Kabupaten Bandung akan memiliki tren yang mirip dengan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Nilai NTP Provinsi Jawa Barat tahun 2017 adalah sebesar 104,92 yang artinya petani mengalami surplus dimana produksi naik lebih besar dibandingkan kenaikan harga konsumsinya. NTP di atas 100 menunjukkan hal yang baik dimana pendapatan petani lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dihitung berdasarkan rasio indeks harha komoditas pertanian dibandingkan perubahan indeks harga biaya produksi dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun dasar. Nilai NTUP tahun 2017 sebesar 114,75 lebih tinggi dari nilai NTP yang bernilai 104,92 artinya pendapatan petani banyak tergerus oleh inflasi barang/jasa kebutuhan rumah tangga petani dibandingkan oleh kenaikan biaya produksi.

Tabel II.105 Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks Diterima Petani	109,55	117,74	126,97	132,25	137,27
2.	Indeks Dibayar Petani	105,53	112,74	120,83	126,13	130,82
3.	Nilai Tukar Petani	103,81	104,43	105,07	104,86	104,92
4.	Nilai Tukar Usaha Pertanian	105,58	108,52	111,55	113,44	114,75

Sumber: Statistik Nilai Tukar Petani Jawa Barat, 2017

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur diperlukan untuk dapat menunjang daya saing suatu daerah. Ketersediaan fasilitas wilayah dan infrastruktur merupakan sarana penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan (*availability*) fasilitas wilayah/ infrastruktur, maka semakin kuat pula suatu daerah dalam menghadapi daya saing.

1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan diukur untuk melihat aksesibilitas daerah di Kabupaten Bandung. Rasio ini merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/ akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

Tabel II.106 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Panjang Jalan	n/a	1.155,35	1.155,34	1.155,54	
2	Jumlah Kendaraan					
	- Roda 4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	- Roda 2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Jumlah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Rasio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, 2017

2) Luas wilayah kebanjiran

Banjir merupakan bencana tahunan yang terjadi di Kabupaten Bandung. Penyebab banjir di Kabupaten Bandung cukup kompleks dan memerlukan penyelesaian secara holistik dan terintegrasi. Beberapa kecamatan yang menjadi daerah yang rutin terkena banjir akibat



meluapnya Sungai Citarum antara lain Kecamatan Majalaya, Bojongsoang, Baleendah, Banjaran, dan Dayeuhkolot. Sementara itu, lokasi genangan juga terjadi di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Ciparay, Solokan Jeruk, Pameungpeuk, Cangkuang, Soreang, Katapang, Margahayu, Margaasih, Rancaekek, dan Cileunyi. Pada tahun 2013, luas wilayah banjir atau terkena genangan di Kabupaten Bandung mencapai 7.975,41 Ha. Berdasarkan data rekapitulasi titik genangan banjir di Kabupaten Bandung tahun 2017 rata-rata lama banjir/genangan adalah 10 - 24 jam dengan tinggi genangan paling sering terjadi adalah 50 – 100 cm.

3) Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Ketersediaan air bersih dilihat menggunakan indikator persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam. Pada tahun 2014, sudah seluruh RT menggunakan air bersih. RT paling banyak menggunakan air bersih yang bersumber dari sumur lindung dan mata air terlindung.

Tabel II.107 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No.	Sumber Air Bersih	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ledeng (Perpipaan)	151.049	n/a	78.168	363.485		
2.	Sumur Lindung	165.751	n/a	582.167	941.950		
3.	Sumur Tidak Terlindung	18.344	n/a	n/a			
4.	Mata Air Terlindung	143.129	n/a	245.729	129.487		
5.	Mata Air Tidak Terlindung	19.077	n/a	n/a			
6.	Sungai	-	n/a	7.728			
7.	Air Hujan	-	n/a	n/a			
8.	Air Kemasan	50.102	n/a	n/a			
9.	Pompa	110.348	n/a	n/a	135.103		
10.	Air lainnya	245.244	n/a	26.723			
11.	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	620.379	n/a	940.515			
12.	Jumlah Rumah Tangga	865.623	n/a	940.551			
13.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	71,67	n/a	100	73,99	74,91	78,73

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, 2017

4) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Sejak tahun 2012 hingga 2015, rasio elektrifikasi di Kabupaten Bandung semakin meningkat. Tahun 2015, rasio elektrifikasi mencapai 85,97 lebih besar dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar 65,23. Terdapat 775.924 rumah tangga yang menggunakan listrik baik yang bersumber dari PLN maupun non PLN.

Tabel II.108 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Rumah Tangga	850.768	874.664	882.739	902.552
2.	Jumlah RT Berlistrik (PLN dan Non PLN)	554.946	601.564	731.428	775.924



No	Indikator	2012	2013	2014	2015
3.	Rasio Elektrifikasi	65,23	68,78	82,86	85,97

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Bandung, 2016

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1) Jumlah demonstrasi

Demonstrasi adalah gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang di depan umum untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Banyaknya jumlah demonstrasi pada suatu daerah menunjukkan tingkat ketentraman dan kondusifitas daerah tersebut. Rendahnya angka demonstrasi menunjukkan stabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Daerah yang kondusif merupakan nilai tambah bagi suatu daerah untuk dapat meningkatkan daya tarik investasi. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Bandung sejak tahun 2014 hingga 2017 selalu fluktuatif. Pada tahun 2017, hanya terdapat 2 demonstrasi yang terkait ekonomi. Diantara kedua jenis demonstrasi, demonstrasi yang lebih banyak terjadi di Kabupaten Bandung ialah demonstrasi terkait ekonomi sementara demonstrasi dengan jenis demonstrasi terkait tenaga kerja (SPN) terbilang cukup rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Bandung sudah cukup terpenuhi hak-hak maupun pendapatnya sehingga sedikit terdapat pertentangan dari tenaga kerja terkait kebijakan yang dilaksanakan.

Tabel II.109 Jumlah Demonstrasi di Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2014-2017

No	Jenis Demonstrasi	2014	2015	2016	2017
1.	Ekonomi	7	5	6	2
2.	Tenaga Kerja (SPN)	2	1	2	0
Jumlah		9	6	8	2

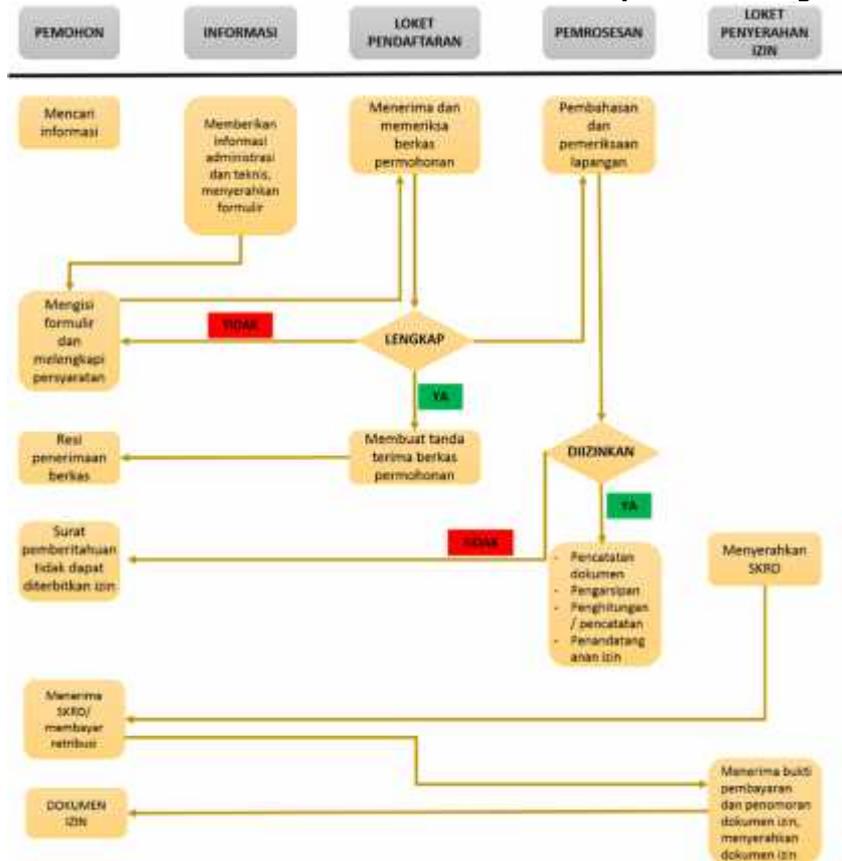
Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung, 2018

2) Lama proses perijinan

Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Di Kabupaten Bandung, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyediakan prosedur perizinan yang terintegrasi dalam satu pintu pelayanan sehingga mempermudah calon investor untuk mengurus proses perizinan. Kemudahan proses perizinan diharapkan menjadi stimulus dan insentif bagi calon investor untuk menjalankan kegiatannya di Kabupaten Bandung. Lingkup perizinan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin usaha perdagangan, izin usaha industri, dan izin penyelenggaraan reklame. Dari tahun ke tahun, lama mengurus perizinan di Kabupaten Bandung semakin cepat dan pada beberapa izin terdapat pengurangan jumlah persyaratan dokumen. Berikut adalah alur perizinan investasi dan usaha di Kabupaten Bandung.



Gambar II.34 Alur Mekanisme Perizinan Kabupaten Bandung



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Bandung, 2018

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan penghargaan terhadap penyelenggaraan PTSP terbaik bagi provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia untuk mendorong peningkatan layanan perizinan investasi guna melancarkan realisasi investasi yang pada ujungnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kriteria yang dilakukan terhadap pemilihan PTSP terbaik adalah adanya kelembagaan dengan melalui keputusan pemda, kemudian menerapkan layanan *online*. Memiliki SOP yang diverifikasi dan telah dipenuhi yang berikutnya transparansi menyangkut besaran biaya yang ditetapkan secara terbuka, inovasi layanan, adanya insiatif dari pemda untuk memberikan insentif ke perusahaan yang mematuhi aturan. Kabupaten yang menerima penghargaan tersebut adalah Kabupaten Siak, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Boyolali. Kabupaten Bandung masih kalah bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang menerima penghargaan tersebut. Dari keenam kriteria yang menjadi penilaian tersebut, Kabupaten Bandung sudah memenuhi seluruh kriterianya. Adapun yang perlu ditingkatkan dari proses perizinan investasi dan usaha di Kabupaten Bandung adalah penyederhanaan regulasi perizinan. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing investasi Kabupaten Bandung.



Tabel II.110 Lama Proses Perizinan di Kabupaten Bandung Tahun 2014-2017

No	Uraian	Lama Mengurus (Hari Kerja)				Jumlah Persyaratan (Dokumen)				Biaya Resmi (Rata-Rata Max rupiah)			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.	Izin Lokasi	14	12	12	14	6	6	6	14				
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14	14	14	14	15	15	15	17	7.500 – 12.500/m ²	7.500 – 12.500/m ²	7.500 – 12.500/m ²	7.500 – 12.500/m ²
3.	Izin Gangguan (HO)												
a.	Kawasan Peruntukan Industri, Jasa, dan Perdagangan	14	5	5	x	8	8	8	x	175/m ²	175/m ²	175/m ²	X
b.	Kawasan Wisata	14	5	5	x	8	8	8	x	350/m ²	350/m ²	350/m ²	X
c.	Kawasan Pertanian	14	5	5	x	8	8	8	x	525/m ²	525/m ²	525/m ²	X
d.	Kawasan Permukiman	14	5	5	x	8	8	8	x	700/m ²	700/m ²	700/m ²	X
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	14	2	2	1	8	7	7	5	Gratis	Gratis	Gratis	NR
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	14	2	2	1	8	7	7	5	Gratis	Gratis	Gratis	NR
6.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	14	2	2	2	8	7	7	5	Gratis	Gratis	Gratis	NR
7.	Izin Usaha Industri (IUI)	14	5	5	5	14	14	14	13	Gratis	Gratis	Gratis	NR
8.	Tanda Daftar Industri (TDI)	14	5	5	x	8	8	8	x	Gratis	Gratis	Gratis	X
9.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	10	2	2	2	8	7	7	7	Gratis	Gratis	Gratis	NR
10.	Izin Penyelenggaraan Reklame	14	6	6	6	8	7	7	7	Gratis	Gratis	Gratis	
11.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (IPLC)	14	3	3	5	13	86	8	7	Gratis	Gratis	Gratis	NR

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, 2018



3) Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2012-2017 selalu menunjukkan tren yang positif. Selama lima tahun terakhir, pajak daerah Kabupaten Bandung tumbuh dengan rata-rata persentase sebesar 18,79% per tahun. Adapun untuk pendapatan retribusi daerah, dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Pada selang tahun 2013 hingga 2015 terjadi penurunan jumlah retribusi daerah. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh penurunan pada beberapa komponen penyumbang retribusi jasa umum.



Tabel II.111 Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pajak Daerah	186.141.858.448	287.766.327.300	298.560.799.112,40	340.007.248.935	384.495.956.018	464.050.311.056
a	Pajak Hotel	2.311.227.053	2.400.777.599	3.152.714.621	3.166.803.625	4.204.098.463	5.028.778.143
b	Pajak Restoran	6.894.597.594	7.823.365.492	9.243.209.080	10.509.296.081	12.774.005.471	18.273.358.346
c	Pajak Hiburan	706.313.905	1.142.433.048	1.301.036.970	1.368.506.270	1.773.066.735	3.899.227.827
d	Pajak Reklame	2.712.275.886	2.770.273.862	2.931.017.940	2.995.714.596	3.239.576.910	3.657.132.755
e	Pajak Penerangan Jalan/ GENSET	83.975.194.771	96.023.473.031	113.787.984.323	131.892.127.013	131.591.826.182	150.946.030.168
f	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	192.014.591	222.557.970	238.350.677	189.169.660	151.490.752	205.094.745
g	Pajak Parkir	453.376.485	381.466.950	439.472.038	495.865.495	520.316.508	1.124.726.494
h	Pajak Air Bawah Tanah	3.751.205.768	3.982.794.379	9.146.429.830	10.700.994.842	11.248.115.353	10.920.624.860
i	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	67.052.728.657	71.167.501.228	79.322.352.852	93.198.190.759	101.686.820.619
j	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	85.145.652.395	105.966.456.312	87.153.082.405	99.366.418.501	125.795.268.885	168.308.517.098
2	Retribusi	41.045.068.255	49.547.220.662	30.590.439.477	22.945.707.326	26.937.588.476	1.595.891
a	Jumlah Retribusi Jasa Umum	28.870.860.124	35.746.478.813	15.417.984.700	4.395.000.000	9.138.798.200	
b	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	2.714.816.500	4.077.403.500	4.616.290.500	17.181	3.856.910.500	
c	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	9.459.391.631	9.723.338.349	10.556.164.277	2.341.764.941	13.941.879.776	17.468.223.583

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017



4) Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Berdasarkan statusnya, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pada tahun 2017, Kabupaten Bandung memiliki 170 desa/kelurahan swadaya, 37 desa/kelurahan swakarya, dan 10 desa/kelurahan swasembada. Desa/kelurahan berstatus swasembada di Kabupaten Bandung sebesar 3,7%. Jumlah ini sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 2 desa/kelurahan swasembada.

Tabel II.112 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	176	186	186	193	217	170
2.	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	6	4	12	18	4	37
3.	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	0	0	3	4	2	10
4.	Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3)	182	182	198	211	270	270
5.	Persentase Desa berstatus swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)	0%	0%	0,17%	0,15%	1,11%	3,7%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, 2018

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1) Kualitas tenaga kerja

Kualitas sumber daya manusia berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang berkualitas dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja yang sedang mencari kerja. Hal ini dikarenakan tenaga kerja yang berkualitas berarti memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan oleh para pemberi kerja. Salah satu indikator untuk melihat kualitas tenaga kerja adalah melalui tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja maka akan semakin berkualitas pula. Pada tahun 2015, rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bandung adalah 1:37 penduduk. Secara persentase, dapat dikatakan bahwa jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bandung adalah sebesar 2,65% dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Bandung atau sebesar 3,95% dari total seluruh penduduk usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari tingkat pendidikannya, kualitas tenaga kerja di Kabupaten Bandung masih rendah dikarenakan masih rendahnya penduduk dengan tingkat pendidikan lanjut.

Tabel II.113 Rasio Lulusan S1, S2, dan S3 di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah lulusan S1	n/a	n/a	n/a	87.227
2	Jumlah lulusan S2	n/a	n/a	n/a	5.880
3	Jumlah lulusan S3	n/a	n/a	n/a	859
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	72.899	n/a	1.471	93.966
5	Jumlah penduduk	3.351.048	n/a	3.470.393	3.534.112
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	217,54	n/a	4,24	37,61

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2017



2) Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah daerah tersebut dapat maju atau berkembang karena dilihat dari beban tanggungan penduduk usia produktifnya. Tahun 2017, *dependency ratio* penduduk Kabupaten Bandung adalah sebesar 49,86% artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 49 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Angka ketergantungan ini lebih besar dibandingkan rata-rata *dependency ratio* Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 48,22. Akan tetapi, jumlah angka beban ketergantungan ini masih dianggap normal apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Jawa Barat.

Tabel II.114 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	998.622	1.000.072	959.649	1.046.392	1.064.826	1.043.148
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	149.650	160.524	175.159	149.290	152.386	173.736
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	1.148.272	1.160.596	1.134.808	1.195.682	1.217.209	1.216.884
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	2.202.776	2.255.104	2.335.585	2.338.430	2.379.411	2.440.717
5	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	52,13	51,47	48,59	51,13	51,16	49,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2017; *Data SIPD 2017

2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 merupakan agenda internasional yang melanjutkan agenda pembangunan berkelanjutan sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs). TPB terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang dijadikan tuntunan bagi berbagai pemangku kepentingan. Konsep TPB memiliki 4 (empat) pilar utama yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. TPB ini diharapkan mampu mendorong pembangunan yang didasarkan pada hak asasi manusia ataupun kesetaraan pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup. Adapun motto yang melekat dalam TPB adalah “No one left behind” yang memiliki arti tidak ada satu pun yang tertinggal.

2.5.1 Kondisi Umum Capaian TPB

Pemerintah daerah memiliki peran dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan ini. Seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki target – target yang berhubungan dengan pekerjaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana dari agenda pembangunan akan tetapi juga sebagai pembuat kebijakan, katalis perubahan dan tingkat pemerintahan yang paling ideal untuk menghubungkan tujuan global dengan komitmen pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah perlu mengetahui sejauh mana capaian tujuan pembangunan yang ada di daerahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap target – target pembangunan berkelanjutan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan pembagiannya, jumlah indikator yang merupakan kewenangan pemerintah daerah adalah sebanyak 220 indikator. Akan tetapi, keseluruhan indikator TPB tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi masing – masing kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 202 indikator TPB yang disesuaikan dengan kondisi dan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Jumlah indikator tersebut merupakan

hasil reduksi terhadap indikator – indikator yang dianggap tidak relevan dengan Kabupaten Bandung seperti indikator – indikator yang memiliki kekhususan untuk kabupaten 3T, khusus untuk daerah yang terdapat danau dan wilayah sungai prioritas, khusus untuk kabupaten yang menjadi kota pusaka, dan lain sebagainya. Selain itu, beberapa indikator juga tidak dimasukkan ke dalam evaluasi TPB dikarenakan dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan yang ada di kabupaten seperti indikator untuk angka melek huruf dan tingkat setengah pengangguran. Indikator seperti ini kami anggap sudah tidak relevan karena indikator tersebut sudah tidak relevan sebagai salah satu bentuk pengukuran.

Evaluasi terhadap capaian indikator TPB dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target yang telah ditetapkan pada setiap indikatornya. Indikator dengan selisih/gap yang signifikan antara capaian dan targetnya dikelompokkan sebagai isu prioritas dalam pengkajian pengaruh arah kebijakan KLHS. Setiap indikator dalam tujuan dan target TPB memiliki capaian yang berbeda – beda berdasarkan data maupun proyeksi target hingga tahun 2030. Sebesar 68% indikator TPB sudah mencapai target yang ditetapkan nasional sementara 14% indikator belum mencapai target. Terdapat 11% indikator yang saat ini tidak ada datanya sehingga diperlukan pendataan di kemudian hari. Sisanya, terdapat 7% indikator yang datanya tidak bisa didapatkan atau data *not available* dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan maupun kewenangan pemerintah daerah dalam menyediakan data tersebut. Rekapitulasi capaian TPB Kabupaten Bandung dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar II.35 Persentase Capaian TPB Kabupaten Bandung



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2019

Terdapat 139 indikator yang telah mencapai target, 28 indikator yang belum mencapai target, 21 indikator perlu pendataan, dan 14 indikator yang datanya tidak tersedia. Secara lebih rinci, evaluasi terhadap capaian TPB di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.115 Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Bandung

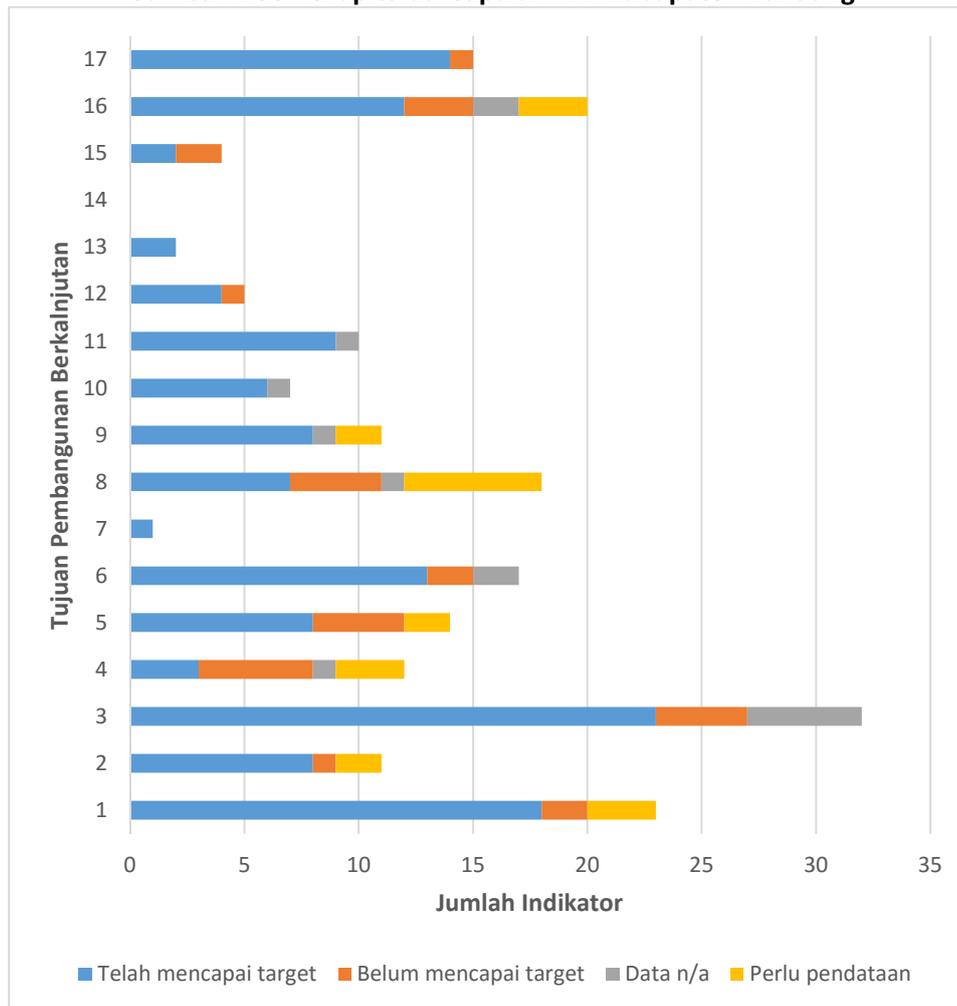
No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Telah mencapai target	Belum mencapai target	Data n/a	Perlu pendataan
1	Tanpa Kemiskinan	23	18	2		3
2	Tanpa Kelaparan	11	8	1		2
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	32	23	4	5	
4	Pendidikan Berkualitas	12	3	5	1	3
5	Kesetaraan Gender	14	8	4		2
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	17	13	2	2	
7	Menjamin Akses Energi	1	1			



No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Telah mencapai target	Belum mencapai target	Data n/a	Perlu pendataan
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	18	7	4	1	6
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	11	8		1	2
10	Mengurangi Kesenjangan	7	6		1	
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	10	9		1	
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	5	4	1		
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	2			
14	Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera, dan Maritim	0				
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	4	2	2		
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	20	12	3	2	3
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	15	14	1		
Total		202	138	29	14	21

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2019

Gambar II.36 Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Bandung



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2019

Diantara 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) , hanya terdapat 16 TPB yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Satu TPB yang tidak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah tujuan nomor 14 yaitu terkait konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera, dan maritim.

Seluruh TPB memiliki indikator yang telah mencapai target dengan rata – rata 72,28% indikator yang telah memenuhi. Diantara 16 tujuan lainnya, TPB 04 (Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua) merupakan tujuan dengan indikator terbesar yang belum mencapai target yaitu sebanyak 5 indikator dari total 12 indikator. Secara lebih rinci, indikator TPB yang telah mencapai target maupun yang belum mencapai target dapat dilihat di dalam lampiran.

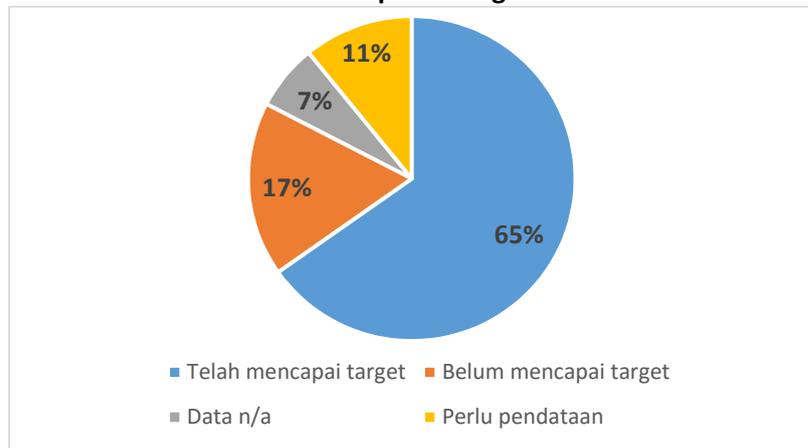
Indikator TPB yang masih perlu dilakukan pendataan lebih lanjut dikarenakan tidak memiliki data target terdapat pada tujuan TPB 01, TPB 02, TPB 03, TPB 04, TPB 05, TPB 08, TPB 09, dan TPB 16. Indikator TPB yang belum memiliki data eksisting terbanyak terdapat pada TPB 08 (Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua) yaitu sebanyak 6 indikator dari total 18 indikator.

2.5.2 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial

Pilar sosial dalam tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup 5 tujuan yaitu TPB 01, TPB 02, TPB 03, TPB 04, dan TPB 05. Total indikator yang termasuk ke dalam pilar sosial ini adalah

sebanyak 92 indikator. Indikator yang telah mencapai target sebanyak 60 indikator. Terdapat 16 indikator yang belum mencapai target, 10 indikator perlu pendataan, serta 6 indikator yang datanya tidak tersedia. Persentase capaian target indikator pilar sosial dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar II.37 Persentase Capaian Target Indikator Pilar Sosial

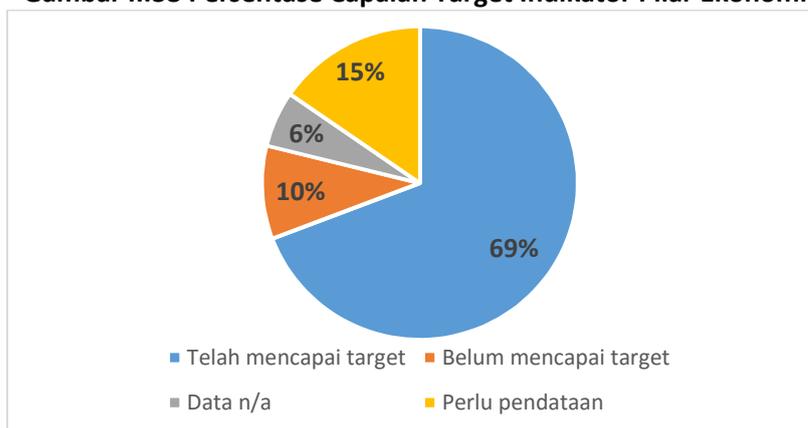


Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2019

2.5.3 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup 5 tujuan yaitu TPB 07, TPB 08, TPB 09, TPB 10, dan TPB 17. Total indikator yang termasuk ke dalam pilar ekonomi adalah sebanyak 52 indikator. Indikator yang telah mencapai target sebanyak 36 indikator. Terdapat 5 indikator yang belum mencapai target, 8 indikator perlu pendataan, serta 3 indikator yang datanya tidak tersedia. Persentase capaian target indikator pilar ekonomi dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar II.38 Persentase Capaian Target Indikator Pilar Ekonomi

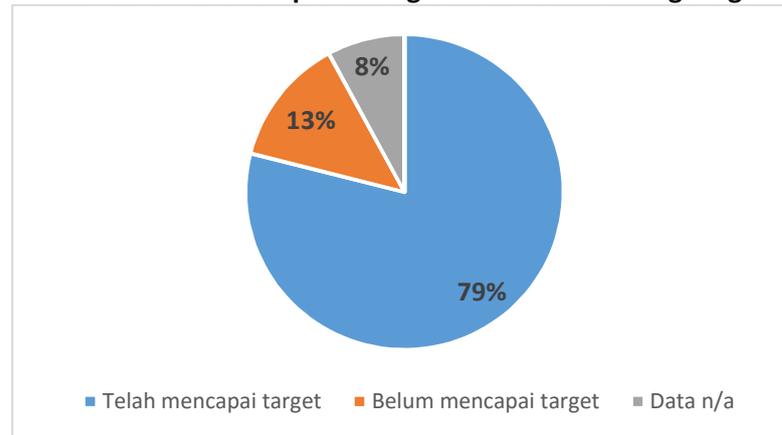


Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2019

2.5.4 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup

Pilar lingkungan hidup dalam tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup 5 tujuan yaitu TPB 06, TPB 11, TPB 12, TPB 13, dan TPB 15. Total indikator untuk pilar lingkungan hidup adalah sebanyak 38 indikator. Indikator yang telah mencapai target sebanyak 30 indikator. Sementara itu, hanya terdapat 5 indikator yang belum mencapai target dan 3 indikator yang datanya tidak tersedia. Persentase capaian target indikator pilar lingkungan hidup dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar II.39 Persentase Capaian Target Indikator Pilar Lingkungan Hidup

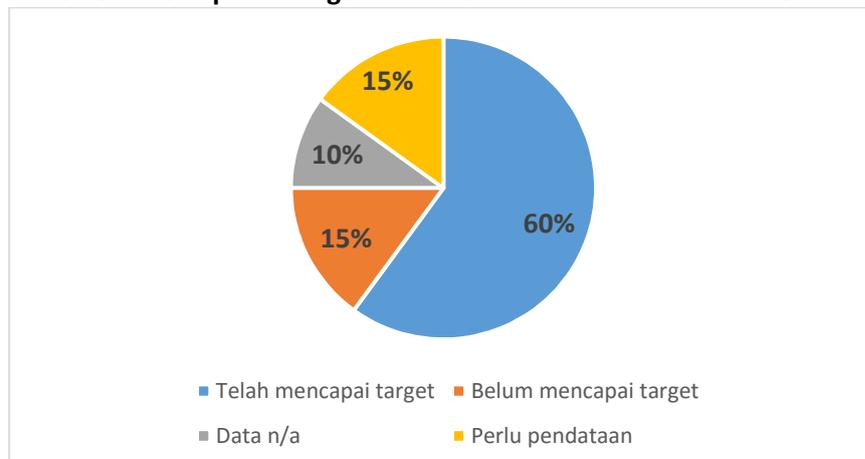


Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2019

2.5.5 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan hanya mencakup satu tujuan yaitu TPB 16. Total indikator yang termasuk ke dalam tujuan ini adalah sebanyak 20 indikator dengan 12 indikator telah mencapai target. Terdapat 3 indikator yang belum mencapai target, 3 indikator yang perlu pendataan, serta 2 indikator yang datanya tidak tersedia. Persentase capaian target indikator pilar hukum dan tata kelola kelembagaan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar II.40 Persentase Capaian Target Indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2019



Tabel Error! No text of specified style in document..1 Kondisi Baseline Pilar Sosial Kabupaten Bandung Berdasarkan Indikator TPB

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	6,65%	Telah mencapai target	
		1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Total Cakupan Jaminan Kesehatan = 2.322.689 62,48 %	Telah mencapai target	
				1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	77,93%	Telah mencapai target	jumlah pekerja 326.426; yang masuk peserta 254.383
				1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.		Perlu pendataan	
				1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	92.140 KPM/ 610.449 orang	Telah mencapai target	
		1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	92,23% 70.089 orang	Telah mencapai target	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
			rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	86,64%	Telah mencapai target	
				1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	82,72%	Telah mencapai target	
				1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	78,57%	Telah mencapai target	
				1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	73,42%	Telah mencapai target	
				1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	95,61%	Telah mencapai target	
				1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	84,89%	Telah mencapai target	
				1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	88,97%	Telah mencapai target	Persentase penduduk usia 0-18 tahun
				1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	82,86%	Telah mencapai target	
		1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun 2018: 1.774 2017: 50.317	Telah mencapai target	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
			mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	2 lokasi	Telah mencapai target	Baru ada data 2018, diupayakan meningkat di tahun2 selanjutnya
				1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.		Perlu pendataan	
				1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.		Perlu pendataan	
				1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun 174	Telah mencapai target	
				1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun 2017 13.797.950.075 2018 10.457.756.000	Telah mencapai target	
				1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	Telah mencapai target	
		1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Menurun Persentase belanja sosial 2020 (0,61%) 2019 (0,76%) 2018 (1,41%)	Belum mencapai target	Isu kemiskinan masih menjadi isu utama di Kabupaten Bandung tetapi proporsi alokasi anggarannya semakin menurun



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
			negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	2020 Persentase belanja pendidikan (34,26%) Persentase belanja kesehatan (13,60%)	Telah mencapai target	
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).		Perlu pendataan	
				2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	1,74%	Telah mencapai target	
				2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun (Prioritasnya masih menurun tapi masih dalam kategori rawan pangan) <i>baru data 2018</i>	Telah mencapai target	Rasio desa rawan pangan yang menurun prioritasnya (jadi ada 4 prioritas, paling baik prioritas 4)
				2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.		Perlu pendataan	
		2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	7,91%	Telah mencapai target	
				2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	5,88%	Telah mencapai target	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
			pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	0,06 (meningkat dari tahun 2014)	Belum mencapai target	
				2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	11,10%	Telah mencapai target	
				2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	6.232 orang 50,39%	Telah mencapai target	
				2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Skor PPH Konsumsi 84,6 tahun 2018 (target 2025 100)	Telah mencapai target	
		2,3	Pada tahun 2030, mengandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	Telah mencapai target	membagi nilai PDRB pertanian dengan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan	3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	440	Belum mencapai target	



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
	Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia		dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					
3,1		Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	92,23% 70.089 orang	Telah mencapai target		
			3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	92,23% 70.089 orang	Telah mencapai target		
3,2		Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	2018: 19 2017: 205 Menurun	Telah mencapai target		
			3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	2018: 189 2017: 190 Menurun	Telah mencapai target		
			3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	2018: 15 2017: 199 Menurun	Telah mencapai target		
			3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	84,64% 237 Desa	Telah mencapai target		
3,3		Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis,	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun 2017: 122 orang 2018: 31 orang	Telah mencapai target	Jumlah penderita HIV dan IMS Sumber: Profil Kesehatan	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
			penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	184,19	Telah mencapai target	
				3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,002% 9 kasus	Telah mencapai target	
				3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Sudah	Telah mencapai target	
				3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun 2017 = 13 kasus kusta 2018 = 5 kasus kusta	Telah mencapai target	
				3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Ada	Telah mencapai target	Sudah menerima sertifikasi eliminasi tahun 2018
		3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.		Data n/a	
				3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	34,38%	Telah mencapai target	
				3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	2017: 266 orang 2016: 1.136 orang (0,21%)	Telah mencapai target	Sumber: Profil Kesehatan Provinsi 2016
				3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.		Data n/a	
				3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang	100% 62 puskesmas	Telah mencapai target	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
					menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.			
		3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	163 orang atau 0,000006%	Telah mencapai target	Data dari SIPD, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun
				3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.		Data n/a	
		3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	82,72%	Telah mencapai target	
				3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	82,72%	Telah mencapai target	
				3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	28,60%	Telah mencapai target	
				3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	40,21	Telah mencapai target	
				3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,44%	Belum mencapai target	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
		3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.		Data n/a	
				3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Total Cakupan Jaminan Kesehatan = 2.322.689 62,48 %	Telah mencapai target	
				3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	62,48%	Belum mencapai target	
		3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	0,001% 41 orang	Telah mencapai target	
		3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.		Data n/a	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
		3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	98,38%	Telah mencapai target	
		3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat 38,68% 1.438 nakes	Telah mencapai target	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.		Perlu pendataan	
				4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	24,27%	Belum mencapai target	
				4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	40,29%	Belum mencapai target	
				4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	107,10%	Telah mencapai target	
				4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	95,40%	Belum mencapai target	
		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	8,59	Telah mencapai target			
		4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	50,29%	Belum mencapai target	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
		4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Menurun	Belum mencapai target	
		4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		Data n/a	
		4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.		Perlu pendataan	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
		4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		Perlu pendataan	
		4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	61,01% (tahun 2017 berapa?)	Telah mencapai target	
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	6 PD	Belum mencapai target	
		5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	53	Telah mencapai target	
				5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	82%	Belum mencapai target	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
				5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	188	Telah mencapai target	
				5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	71%	Telah mencapai target	
		5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.		Perlu pendataan	
				5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	19 tahun	Belum mencapai target	
				5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	40,21	Belum mencapai target	
		5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	14 orang atau 28%	Telah mencapai target	
				5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1.228 orang	Telah mencapai target	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
		5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		Perlu pendataan	
				5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	8,17%	Telah mencapai target	
				5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	83%	Telah mencapai target	
		5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat 2017 61,96% 2018 65,53%	Telah mencapai target	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler (HP) dalam 3 bulan terakhir

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2019



Tabel Error! No text of specified style in document..2 Kondisi Baseline Pilar Ekonomi Kabupaten Bandung Berdasarkan Indikator TPB

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	7,2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Panas bumi pada WKP: Kamojang, Wayang Windu, Patuha, Darajat	Telah mencapai target	Persentase pemanfaatan energi panas bumi
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	Telah mencapai target	
				8.1.1.(a)	PDB per kapita.	PDRB ADHK per kapita 20.872.532	Belum mencapai target	
		8,2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.		Data n/a	
				8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.		Perlu pendataan					
				8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.		Perlu pendataan	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
				8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.		Perlu pendataan	
		8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	Telah mencapai target	
				8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	Telah mencapai target	
		8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	Telah mencapai target	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan
		8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat 2014: 2,38 2015: 2,41 2016: 2,41 2017: 2,42 2018: 2,44	Telah mencapai target	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
				8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	2015 62.101 2016 867.000 2017 578.321	Belum mencapai target	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke objek wisata



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
				8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	2015 5.583.468 2016 5.583.468 2017 3.385.860	Belum mencapai target	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke objek wisata
				8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat 2017 situ cileunca = Rp 55.700.000 2018 situ cileunca + gedong budaya sabilulungan = 721.894.550	Telah mencapai target	PAD sektor pariwisata
				8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	Telah mencapai target	Dipakai data sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel
		8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	2015 = 360 2017 = 35	Belum mencapai target	Jumlah jaringan bank umum
				8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).		Perlu pendataan	
				8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.		Perlu pendataan	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	18 KM (tol soroja dan cileunyi)	Telah mencapai target	
				9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	(blm dihitung panjangnya)	Telah mencapai target	Panjang rencana pembangunan jalur kereta api
		9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	5,95 (meningkat dari tahun sebelumnya)	Telah mencapai target	
				9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	2018 Laju PDB: 0,59 LPE: 0,004 Laju PDB > LPE	Telah mencapai target	
				9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	Telah mencapai target	
		9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Data n/a	
				9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		Perlu pendataan	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
		9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.		Perlu pendataan	Proporsi anggaran pemerintah baru dibagi pada pendidikan, kesehatan, sosial, dan kewilayahan
		9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat 2017 36,68% 2018 49,69%	Telah mencapai target	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk facebook, twiter, BBM, Whatsapp) dalam 3 bulan terakhir
				9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat 2017 61,96% 2018 65,53%	Telah mencapai target	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler (HP) dalam 3 bulan terakhir



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
				9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat 2017 36,68% 2018 49,69%	Telah mencapai target	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk facebook, twiter, BBM, Whatsapp) dalam 3 bulan terakhir
10	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarneegara	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,39 (Target 2025 0,36)	Telah mencapai target	
				10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	6,65%	Telah mencapai target	
				10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang	Telah mencapai target	
				10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat (2018: 9; 2017:1)	Telah mencapai target	
				10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	6,65%	Telah mencapai target	



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
		10,2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.		Data n/a	
		10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	77,93%	Telah mencapai target	
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat Data Realisasi APBD 2015 = 80,36% 2016 = 82,33% 2017 = 84,50% RKPD 2017 = 21,42% 2018 = 21,87% 2019 = 22,37% 2020 = 22,53% 2021 = 22,92%	Telah mencapai target	Persentase PAD terhadap pendapatan
				17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Realisasi APBD 2015 = 66,60% 2016 = 68,58% 2017 = 70,69% LKPD 2017 = 9,13% RKPD 2020 = 10,80%	Telah mencapai target	Rasio penerimaan pajak terhadap total pendapatan



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
				17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	2017 = 97,18% 2016 = 108,32% 2015 = 104,47%	Belum mencapai target	Realisasi pajak daerah
		17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	280 desa/kelurahan	Telah mencapai target	Jumlah desa/kelurahan terlayani internet
				17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	280 desa/kelurahan	Telah mencapai target	Jumlah desa/kelurahan terlayani internet
		17,8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat 2017 36,68% 2018 49,69%	Telah mencapai target	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk facebook, twiter, BBM, Whatsapp) dalam 3 bulan terakhir
		17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Ada	Telah mencapai target	



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
				17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Ada	Telah mencapai target	
		17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	2018: 98,31% atau 59 orang	Telah mencapai target	
		17.18.1.(b)		Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	2018 Jml konsumen: 310rg Rujukan utama: 74,19% Bukan rujukan utama: 25,81%	Telah mencapai target		
		17.18.1.(c)		Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	2018:10:00	Telah mencapai target	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	
		17.18.1.(d)		Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	Telah mencapai target		
		17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan	Ada	Telah mencapai target	Registrasi kelahiran dan kematian di Disdukcapil



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
			berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.		kematian (Vital Statistics Register)			
				17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	2018 26.633 realisasi thd renstra 2019 sebesar 123,81%	Telah mencapai target	
				17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	2018 88,17%	Telah mencapai target	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2019

Tabel Error! No text of specified style in document..3 Kondisi Baseline Pilar Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Berdasarkan Indikator TPB

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	78,57%	Telah mencapai target	
				6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	1,009 m3/detik	Belum mencapai target	
				6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	78,57%	Telah mencapai target	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
		6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	Telah mencapai target	
				6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	73,42%	Telah mencapai target	
				6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	79,29% 222 desa / kelurahan	Telah mencapai target	
				6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	13,93% atau 39 desa/kelurahan (Meningkat)	Telah mencapai target	
				6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Ada	Telah mencapai target	
				6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	2017: 771.464 2018: 1.055.755 Meningkat	Telah mencapai target	
		6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Ada	Telah mencapai target	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
			meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		Data n/a	
				6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat 2016: 19,9 2017: 20 2018: 25	Telah mencapai target	
		6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Belum Ada	Belum mencapai target	
		6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada	Telah mencapai target	
				6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.		Data n/a	
				6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Ada	Telah mencapai target	Terdapat LSM di Situ Cimeuhmal



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
				6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada (352 pengelola)	Telah mencapai target	
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	1.023.120 RT atau 96% luas wilayah permukiman	Telah mencapai target	
		11,3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.		Data n/a	
		11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Telah mencapai target	
				11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun 174	Telah mencapai target	
				11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Ada 3 unit	Telah mencapai target	
				11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun 2017 13.797.950.075 2018 10.457.756.000	Telah mencapai target	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
		11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	41,5% tahun 2018 (target 100% tahun 2025)	Telah mencapai target	
				11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Ada	Telah mencapai target	Jakstrada dan masterplan persampahan (<i>green waste</i>), tapi blm ada data capaiannya
		11,7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Ada	Telah mencapai target	
		11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Ada	Telah mencapai target	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12,4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	216 pengumpul/pemrakarsa limbah B3	Telah mencapai target	Jumlah limbah B3 yang dikumpulkan untuk diolah dan dikelola ke pihak ketiga
		12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkat	Telah mencapai target	Jumlah sampah yang dikumpulkan di bank sampah
		12,6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	Telah mencapai target	
		12,7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Tekstil dan kertas (2016-2017)	Belum mencapai target	



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
		12,8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Sudah berdasarkan penilaian KLHK untuk Adipura	Telah mencapai target	Contoh: Sekolah udh ada berapa tempat sampah, brp kamar mandi, bank sampah (indikator penilaian adipura)
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	Telah mencapai target	
		13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Telah mencapai target	
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keaneekaragaman Hayati	15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Menurun 2011 hutan lindung: 21,16% 2013 sumber daya hutan/luas lahan kab = 29,45% 2036 hutan lindung: 19,41%	Belum mencapai target	Sumber RTRW Kabupaten Bandung



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
		15,3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	14,33 Ha lahan kritis (Meningkat)	Telah mencapai target	Data lahan kritis: 24.542,5 Ha Data progress Satapok Meningkatnya proporsi rehabilitasi terhadap lahan kritis
		15,6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Belum Ada	Belum mencapai target	Baru inventarisasi mata air, belum perhitungan jasleng, baru akan mulai
		15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Ada	Telah mencapai target	Taman kahati merupakan implementasi masterplan kahati

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2019



Tabel Error! No text of specified style in document..4 Kondisi Baseline Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan Kabupaten Bandung Berdasarkan Indikator TPB

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Cenderung menurun 2017: 20 kasus 2016: 8 kasus 2015: 35 kasus 2013: 29 kasus	Telah mencapai target	
				16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	Telah mencapai target	
				16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		Data n/a	
				16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat 2018: 18,21 2017: 15,79	Telah mencapai target	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk
		16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	19%	Telah mencapai target	
				16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	33 (menurun dari tahun sebelumnya)	Telah mencapai target	
				16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	70%	Telah mencapai target	

**REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025**

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
		16,5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	2018: 95,43	Telah mencapai target	
		16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Menurun 2017 = 85,55% 2016 = 88,10% 2015 = 82,34%	Belum mencapai target	Realisasi belanja daerah
				16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat	Telah mencapai target	
				16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	70,15	Telah mencapai target	
				16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.		Perlu pendataan	
				16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	61,35%	Telah mencapai target	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bandung



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Evaluasi	Keterangan	*Catatan
		16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	14 orang atau 28%	Telah mencapai target	
				16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	8 orang atau 0,08%	Telah mencapai target	
		16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		Perlu pendataan	
				16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		Data n/a	Terkendala data mengenai penduduk berpendapatan bawah
				16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		Perlu pendataan	
		16,10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Belum Ada	Belum mencapai target	Baru dalam bentuk SK
16.b	Mengalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Belum Ada	Belum mencapai target			

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2019



2.6 Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 memperhatikan perencanaan – perencanaan lainnya. Berikut adalah hasil penelaahan dokumen – dokumen perencanaan lainnya.

2.6.1 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari agenda pembangunan global sebelumnya yaitu *Millennium Development Goals* (MDGs). Program SDGs mulai aktif dari tahun 2016 hingga tahun 2030. Perbedaan mendasar antara SDGs dengan MDGs terdapat pada substansi hingga proses penyusunannya. Berbeda dengan MDGs yang bertujuan mengurangi hanya separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan, SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan yang lebih komprehensif dengan menargetkan penyelesaian tuntas untuk setiap tujuan dan sasarnya. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 sasaran yang diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah termasuk menghapus kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim, serta melindungi samudera dan hutan. Selain itu, SDGs juga bersifat universal dimana memberikan peran yang seimbang bagi seluruh negara untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan.

Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bersama 192 negara lain ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 sudah mulai berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs. Berdasarkan *scoreboard* pencapaian SDGs di Jawa Barat, skor kemajuan pencapaian SDGs di Jawa Barat sebesar 2,05 yang artinya mendapatkan nilai C. Angka ini terbilang cukup rendah namun lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata nasional sebesar 1,89.

Beberapa indikator yang masih mendapatkan skor kurang memuaskan di Provinsi Jawa Barat antara lain terkait isu tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri; inovasi; dan infrastruktur, serta berkurangnya kesenjangan. Beberapa indikator pada isu tersebut masih memiliki nilai yang rendah yaitu C, D, dan E. Ketujuh isu ini dapat menjadi acuan bagi pembangunan Kabupaten Bandung yang berkontribusi pada pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk dapat berperan dalam mengimplementasikan SDGs.

Sementara itu, berdasarkan hasil capaian analisis TPB, Kabupaten Bandung masih memiliki 8 (depalan) TPB yang menjadi prioritas yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kedelapan TPB tersebut memiliki nilai yang paling besar kesenjangan di antara yang lain. TPB yang masih memiliki kesenjangan di Kabupaten Bandung yang antara lain:

1. TPB 4 (Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua)
2. TPB 5 (Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan)
3. TPB 8 (Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua)
4. TPB 12 (Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan)
5. TPB 16 (Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan)
6. TPB 3 (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia)



7. TPB 6 (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan)
8. TPB 15 (Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati)



Tabel II.120 Tujuan dan Target Sustainable Development Goals (SDGs)

No	Tujuan	No	Target
1	Menanggulangi kemiskinan dalam berbagai bentuk dan dimanapun	1.1	Pada tahun 2030, memberantas kemiskinan ekstrim untuk semua orang dimanapun dengan biaya hidup kurang dari \$ 1,25 per hari
		1.2	Pada tahun 2030, berkurang setidaknya seengah proporsi laki- laki, perempuan dan anak- anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensinya sesuai dengan definisi nasional
		1.3	Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat yang mengukur semua aspek dan mencakup sebagian besar kaum miskin dan rentan pada tahun 2030
		1.4	Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses ke layanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk- bentuk lain properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak, dan jasa keuangan termasuk keuangan mikro
		1.5	Pada tahun 2030, terbangunnya resiliensi penduduk miskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan, serta berkurangnya paparan dan tingkat kerentanan terhadap kejadian- kejadian ekstrem yang beraitan dengan cuaca dan bencana ekonomi, sosial dan gejala lingkungan lainnya
2	Mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta meningkatkan nutrisiserta mendorong keberlanjutan pertanian	2.1	Mengentaskan kelaparan dan menjamin akses bagi seluruh penduduk, khususnya penduduk miskin dan berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, menuju kecukupan pangan yang aman dan bernutrisi sepanjang tahun
		2.2	Mengakhiri segala bentuk malnutrisi, serta menargetkan kebuuhan nutrisi dari remaja perempuan, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia pada tahun 2030
		2.3	Meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan pelaku IKM di sektor pertanian, khususnya perempuan, penduduk lokal, petani, nelayan, melalui penyediaan akses yang aman dan adil terhadap lahan, input- input dan faktor produksi lain, pengetahuan, layanan finansial, pasar dan peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan sektor non pertanian pada tahun 2030
		2.4	Menjamin keberlangsungan sistem produksi pertanian dan mengimplementasikan praktik resiliensi pertanian yang meningkatkan produktivitas dan produksi, menjaga mempertahankan ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana- bencana lain serta secara progresif meningkatkan kualitas lahan pada tahun 2030
		2.5	Menjaga keberagaman genetika bibit, tanaman budidaya dan peranian serta hewan ternak beserta spesies liar yang berkaitan, termasuk manajemen dan diversifikasi bibit di tatanan nasional, regional dan internasional, serta menjamin akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan sama rata dari penggunaan sumber daya- sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana disetujui secara internasional
3	Menjamin hidup sehat dan mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia	3.1	Mengurangi rasio kematian ibu melahirkan hingga kurang dari 70 per 1.000 jiwa pada tahun 2030
		3.2	Menghapuskan kematian bayi dan anak- anak di bawah usia 5 tahun (kematian yang sifatnya preventable/ dapat dihindarkan) pada tahun 2030
		3.3	Menghilangkan epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit daerah tropis lainnya serta memberantas hepatitis, penyakit lain yang ditularkan melalui komunikasi pada tahun 2030
		3.4	Mengurangi hingga sepertiga kematian bayi prematur akibat penyakit yang bersifat non-communicable melalui pencegahan dan perawatan serta mendorong peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan pada tahun 2030
		3.5	Memperkuat pencegahan dan perawatan korban kekerasan, termasuk korban penyalahgunaan narkoba dan alkohol
		3.6	Mengurangi hingga setengahnya jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2030
		3.7	Menjamin akses terhadap layanan kesehatan reproduksi bagi semua penduduk, termasuk didalamnya perencanaan keluarga, informasi dan pendidikan serta mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional
		3.8	Mencapai cakupan kesehatan, termasuk perlindungan resiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar, serta akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif dan terjangkau.
		3.9	Mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat udara dan senyawa kimia berbahaya, serta kontaminasi dan polusi air dan tanah
4	Menjamin pendidikan yang berkualitas serta	4.1	Menjamin seluruh anak laki – laki dan perempuan untuk bersaing secara bebas, menjamin pendidikan dasar dan menengah yang adil dan rata untuk mencapai outcome yang efektif dan relevant pada tahun 2030



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

No	Tujuan	No	Target
	mendorong kesempatan belajar sepanjang usia kepada semua penduduk	4.2	Menjamin seluruh anak perempuan dan laki- laki memiliki akses pada pengembangan anak usia dini, dan pendidikan pra sekolah dasar, sehingga mereka siap untuk memulai pendidikan dasar pada tahun 2030
		4.3	Menjamin akses yang sama bagi perempuan dan laki- laki terhadap pendidikan menengah dan kejuruan berkualitas, termasuk pendidikan tinggi pada tahun 2030
		4.4	Meningkatkan persentase generasi muda dan dewasa yang memiliki skill, termasuk skill teknik dan kejuruan pada tahun 2030
		4.5	Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan serta menjamin akses yang sama bagi seluruh level pendidikan dan anak- anak yang berada dalam situasi rentan pada tahun 2030
		4.6	Menjamin seluruh penduduk muda serta sekurang- kurangnya (x) persen dari penduduk usia dewasa, baik laki- laki maupun perempuan terbebas dari buta huruf pada tahun 2030
		4.7	Menjamin seluruh pelajar mendapatkan pengetahuan dan skill yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, melalui pendidikan untuk gaya hidup keberlanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, kedamaian budaya dan anti kekerasan, masyarakat global, serta apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan
		5	Terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua wanita dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia dan seksual serta jenis- jenis eksploitasi lainnya		
5.3	Menghapuskan semua praktek- praktek berbahaya pada anak, pernikahan dini dan pernikahan paksa, serta mutilasi pada perempuan		
5.4	Mengakui dan menghargai perawatan tak dibayar dan pekerjaan domestik melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, serta peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga secara nasional.		
5.5	Menjamin partisipasi perempuan secara penuh dan efektif serta kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di setiap tingkat pengambilan keputusan dalam bidang politik, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat		
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi yang telah diepakati sesuai dengan Program Aksi ICPD dan Platform Beijing Aksi dan dokumen hasil peninjauan konferensi mereka.		
6	Menjamin ketersediaan dan keberlanjutan manajemen terhadap air dan sanitasi bagi seluruh penduduk	6.1	Pada tahun 2030, tercapainya kemudahan dan keadilan bagi seluruh penduduk untuk mendapat air minum yang aman
		6.2	Pada tahun 2030, tercapainya akses sanitasi dan kesehatan yang mudah dan merata bagi seluruh penduduk, dan tempat pembuangan akhir tinja yang terbuka, serta memberikan perhatian khusus kepada wanita, anak perempuan, dan penduduk rentan
		6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan bahan kimia dan material yang berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak dapat didaur ulang, dan meningkatkan daur ulang yang aman dan penggunaan kembali dengan x % secara global
		6.4	Pada tahun 2030, meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor secara substansial dan memastikan penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air
		6.5	Pada tahun 2030, melaksanakan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan termasuk melalui kerjasama lintas batas yang sesuai
		6.6	Pada tahun 2020, melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, akuifer dan danau.
7	Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi seluruh penduduk	7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal dan modern
		7.2	Meningkatnya proporsi energi terbarukan terhadap energi global secara substansial pada tahun 2030
		7.3	Meningkatkan dua kali lipat tingkat perbaikan dalam efisiensi energi pada tahun 2030



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

No	Tujuan	No	Target
8	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenagakerjaan yang produktif dan ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, dan khususnya setidaknya 7 persen per tahun pertumbuhan PDB di negara-negara kurang berkembang
		8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada nilai tambah yang tinggi dan sektor padat karya
		8.3	Mempromosikan kebijakan pembangunan yang berorientasi yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk akses ke layanan keuangan
		8.4	Pada tahun 2030, meningkatkan efisiensi konsumsi dan produksi terhadap sumber daya global secara progresif, dan berusaha untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan sesuai dengan program dalam kerangka kerja 10 tahunan pada bidang konsumsi berkelanjutan dan produksi dengan negara-negara maju yang memimpin.
		8.5	Tahun 2030, mencapai pekerjaan yang penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang cacat, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
		8.6	Pada tahun 2020, mengurangi proporsi pemuda yang tidak sedang bekerja, dalam pendidikan atau pelatihan secara substansial.
		8.7	Mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, memberantas kerja paksa, dan pada tahun 2025, menghilangkan pekerja anak dalam segala bentuk termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak
		8.8	Melindungi hak-hak buruh dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan orang-orang dalam pekerjaan berbahaya
		8.9	Pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata secara berkelanjutan yang menciptakan pekerjaan, mempromosikan budaya dan produk lokal
		8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses ke perbankan, asuransi, dan jasa keuangan untuk semua
9	Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan trans perbatasan, untuk mendukung ekonomi pengembangan dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua
		9.2	Meningkatkan industrialisasi secara inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030 meningkatkan secara signifikan pembagian saham industri dan PDB sejalan dengan keadaan nasional, dan menggandakan sahamnya di LDC
		9.3	Meningkatkan akses perusahaan industri berskala kecil dan perusahaan industri lain, terutama di negara berkembang, untuk jasa keuangan termasuk kredit terjangkau dan integrasinya ke dalam rantai nilai dan pasar.
		9.4	Pada tahun 2030 meningkatkan industri infrastruktur dan retrofit untuk membuat mereka berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih besar dari teknologi dan proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan, semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing,
		9.5	Meningkatkan penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi dari sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030 mendorong inovasi dan meningkatkan jumlah pekerja R & D per satu juta orang sebesar x% dan pengeluaran publik dan swasta R & D
10		10.1	Pada tahun 2030, semakin mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk berpenghasilan rendah 40 % dari populasi pada tingkat lebih tinggi dari rata-rata nasional



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

No	Tujuan	No	Target
	Mengurangi kesenjangan antar negara	10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi dan politik dari semua terlepas dari usia, jenis kelamin, cacat, ras, etnis, asal, agama atau status ekonomi atau lainnya
		10.3	Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan dari hasil, termasuk melalui menghilangkan hukum kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan undang-undang, kebijakan dan tindakan yang tepat dalam hal ini
		10.4	Mengadopsi kebijakan terutama kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial dan mencapai kesetaraan yang lebih besar secara progresif
		10.5	Meningkatkan regulasi dan pengawasan pasar keuangan global dan lembaga-lembaga dan memperkuat pelaksanaan peraturan tersebut
		10.6	memastikan ditingkatkannya representasi dan suara negara- negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global dalam rangka untuk memberikan lembaga yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan sah
		10.7	memfasilitasi migrasi dan mobilitas orang dengan tertib, aman, dan bertanggung jawab , termasuk melalui pelaksanaan kebijakan migrasi yang direncanakan dan dikelola dengan baik
		11	Membuat kota- kota dan permukiman penduduk inklusif, aman, resilient dan berkelanjutan
11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses sistem transportasi yang aman, terjangkau, dapat diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas transportasi umum, dengan perhatian khusus kepada kebutuhan mereka pada saat situasi rentan, wanita, anak-anak, penyandang cacat dan orang tua.		
11.3	Tahun 2030 meningkatkan urbanisasi dan kapasitas untuk partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan, perencanaan dan manajemen permukiman manusia yang terpadu dan berkelanjutan di semua negara		
11.4	Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia		
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan penurunan sebesar y % kerugian ekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus pada melindungi orang miskin dan orang- orang yang berada di situasi rawan.		
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan yang merugikan perkapita dari kota, termasuk dengan membayar perhatian khusus untuk kualitas udara, kota dan dan pengelolaan limbah lainnya		
11.7	Tahun 2030, menyediakan akses universal ke ruang terbuka hijau dan tempat umum yang aman, inklusif dan dapat diakses, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, orang tua dan penyandang cacat		
12	Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	12.1	Melaksanakan Kerangka 10-Tahun Program konsumsi berkelanjutan dan produksi (10YFP), semua negara mengambil tindakan, dengan negara-negara maju memimpin, dengan mempertimbangkan perkembangan dan kemampuan negara-negara berkembang
		12.2	Pada tahun 2030 mencapai pengelolaan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efisien
		12.3	Pada tahun 2030 membagi limbah pangan global perkapita di tingkat ritel dan konsumen, dan mengurangi kerugian makanan bersama rantai produksi dan pasokan termasuk kerugian pascapanen
		12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan yang ramah lingkungan dari bahan kimia dan semua limbah sepanjang siklus hidup mereka sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pembebasan mereka ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
		12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

No	Tujuan	No	Target
		12.6	mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan trans-nasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan untuk mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka
		12.7	Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
13	Melaksanakan aksi- aksi penting untuk menghadapi perubahan iklim beserta dampaknya	13.1	Memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap bahaya iklim terkait dan bencana alam di semua negara.
		13.2	Mengintegrasikan langkah- langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan nasional, strategi dan perencanaan
		13.3	Meningkatkan pendidikan, peningkatan kesadaran dan manusia dan kapasitas kelembagaan pada mitigasi perubahan iklim, adaptasi pengurangan dampak, dan peringatan dini
14	Menjaga keberlanjutan penggunaan sumber daya laut, pantai dan pesisir bagi pembangunan berkelanjutan	14.1	Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi pencemaran laut dari semua jenis terutama dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi (Nitrogen dan Phosfor)
		14.2	Pada tahun 2020, mengelola secara berkelanjutan, dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak merugikan yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanan mereka dan mengambil tindakan untuk memulihkan kondisinya, untuk mencapai lautan yang sehat dan produktif
		14.3	Meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah ditingkatkan di semua tingkatan.
		14.4	Pada tahun 2020, secara efektif mengatur panen, dan mengakhiri penangkapan ikan yang berlebihan, ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) fishing dan praktek penangkapan ikan yang merusak dan melaksanakan rencana manajemen berbasis ilmu pengetahuan, untuk mengembalikan stok ikan dalam waktu singkat layak setidaknya ke tingkat yang dapat menghasilkan maksimum yang berkelanjutan menghasilkan sebagaimana ditentukan oleh karakteristik biologis mereka,
		14.5	Pada tahun 2020, menghemat setidaknya 10 persen dari pesisir dan laut daerah, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia
		14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan overfishing, dan menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap IUU fishing, dan menahan diri dari memperkenalkan subsidi seperti baru, mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara maju setidaknya harus merupakan bagian integral dari WTO subsidi perikanan negosiasi
		14.7	Pada tahun 2030 meningkatkan manfaat ekonomi untuk SIDS dan LDCs dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan berkelanjutan perikanan, budidaya dan pariwisata.
15	Melindungi, memperbaiki dan mendorong penggunaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan, management hutan secara berkelanjutan, menghilangkan proses penggurunan, serta menghentikan degradasi lahan dan kepunahan biodiversity	15.1	Pada tahun 2020 memastikan konservasi, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem air tawar dan darat pedalaman dan layanan mereka, khususnya hutan, lahan basah, gunung dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
		15.2	Pada tahun 2020, memajukan implementasi pengelolaan segala tipe hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, memulihkan hutan yang terdegradasi, dan meningkatkan penghijauan dan reboisasi sebesar x persen secara global.
		15.3	Pada tahun 2020, memerangi desertifikasi, dan mengembalikan lahan dan lapisan tanah yang terdegradasi, termasuk tanah yang terkena dampak desertifikasi, kekeringan dan banjir, dan berusaha untuk mencapai degradasi tanah dunia yang netral.
		15.4	Pada tahun 2030 memastikan konservasi ekosistem hutan, termasuk keanekaragaman hayati, untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyediakan manfaat yang penting bagi perkembangan berkelanjutan
		15.5	Mengambil tindakan segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020 melindungi serta mencegah kepunahan spesies langka
		15.6	memastikan pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang layak terhadap sumber daya genetik.
		15.7	Mengambil tindakan segera untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan satwa dilindungi flora dan fauna, dan mengatasi baik permintaan maupun penawaran produk satwa liar



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

No	Tujuan	No	Target
		15.8	Pada tahun 2020 memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah pendahuluan dan secara signifikan mengurangi dampak serbuan spesies asing pada ekosistem tanah dan air, dan mengendalikan atau membasmi spesies prioritas.
		15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan ekosistem dan nilai keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan lokal, proses pembangunan dan strategi pengurangan kemiskinan, dan laporan
16	Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif bagi pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi seluruh penduduk serta membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level	16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kemiskinan yang terkait di mana-mana
		16.2	Mengakhiri kekerasan, eksploitasi, perdagangan serta segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak-anak
		16.3	Mempromosikan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional, serta menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua
		16.4	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi arus keuangan terlarang, memperkuat pemulihan dan pengembalian aset curian, dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisir
		16.5	Substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuknya
		16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat.
		16.7	Memastikan responsif, inklusif, partisipatif dan perwakilan pengambilan keputusan di semua tingkat
		16.8	Memperluas dan memperkuat partisipasi negara berkembang di lembaga-lembaga pemerintahan global
		16.9	Pada tahun 2030 memberikan identitas hukum bagi semua termasuk pendataan kelahiran gratis
		16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan undang-undang nasional dan perjanjian internasional.
17	Memperkuat pemanfaatan implementasi dan revitalisasi kerjasama global bagi pembangunan berkelanjutan	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya negeri, termasuk melalui dukungan internasional untuk negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas dalam negeri untuk pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya.
		17.2	Negara-negara maju untuk melaksanakan sepenuhnya komitmen ODA mereka, termasuk untuk menyediakan 0,7 % dari GNI di ODA ke negara-negara berkembang yang setidaknya sebesar 0,15 % - 0,20 % untuk negara maju
		17.3	Memobilisasi sumber daya finansial tambahan untuk negara-negara berkembang dari berbagai sumber
		17.4	Membantu negara-negara dalam mencapai keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan terkoordinasi yang bertujuan membina pembiayaan utang, penghapusan utang dan restrukturisasi utang luar negara-negara miskin yang terjerat utang (HIPC) untuk mengurangi tekanan utang
		17.5	Mengadopsi dan menerapkan pemerintahan promosi investasi untuk LDCs
		17.6	Meningkatkan Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama segitiga secara regional maupun internasional dan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta meningkatkan berbagai pengetahuan atas dasar persetujuan bersama, termasuk melalui pengembangan koordinasi antarmekanisme yang ada, khususnya di tingkat PBB, dan melalui mekanisme pemberian kemudahan untuk teknologi global saat disepakati
		17.7	Mempromosikan pembangunan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan yang menguntungkan untuk negara-negara berkembang, termasuk persyaratan konsesi dan khusus, seperti yang telah disepakati bersama
		17.8	Sepenuhnya mengoperasionalkan mekanisme pembangunan kapasitas Teknologi Bank dan IMS (Sains, Teknologi dan Inovasi) untuk LDCs tahun 2017, dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya di ICT, dan
		17.9	Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan yang efektif dan peningkatan kapasitas yang ditargetkan di negara-negara berkembang dalam rangka mendukung rencana nasional untuk menerapkan semua tujuan Utara-Selatan, Selatan-Selatan berkembang, dan kerjasama segitiga
		17.10	Mempromosikan sistem perdagangan multilateral di bawah WTO yang bersifat universal, berdasarkan aturan-aturan, terbuka, non-diskriminatif dan adil termasuk melalui kesimpulan dari negosiasi dalam Doha Development Agenda,
		17.11	Secara signifikan meningkatkan ekspor negara-negara berkembang, khususnya yang bertujuan untuk menggandakan pangsa LDC terhadap ekspor global pada tahun 2020



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

No	Tujuan	No	Target
		17.12	Menyadari pelaksanaan kebebasan pajak yang tepat waktu, akses pasar kuota bebas yang awet bagi semua negara-negara maju yang se daknya konsisten dengan keputusan WTO, termasuk dengan memas kan bahwa aturan-aturan is mewa dari pemberlakuan asal untuk diimpor dari LDCs yang transparan dan sederhana, dan berkontribusi untuk memfasilitasi akses pasa
		17.13	Meningkatkan stabilitas makroekonomi global termasuk melalui koordinasi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan
		17.14	Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan
		17.15	Menghorma ruang kebijakan dan kepemimpinan masing-masing negara untuk membangun dan menerapkan kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
		17.16	Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan dilengkapi dengan kemitraan mul –stakeholder yang dapat memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, khususnya bagi negara-negara berkembang
		17.17	Mendorong kerjasama publik, publik- swasta, dan masyarakat, serta membangun pengalaman dan strategi-strategi sumber daya bagi kerjasama.
		17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pembangunan kapasitas untuk negara-negara berkembang, termasuk untuk LDCs dan SIDS, meningkat secara signifikan ketersediaan berkualitas tinggi, tepat waktu dan data yang dapat dipercaya dipilah berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, suku, status migrasi, kecacatan, lokasi geografis dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks nasional.
		17.19	Pada tahun 2030 membangun inisiatif yang ada untuk mengembangkan pengukuran kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi GDP, dan mendukung pembangunan kapasitas negara-negara berkembang.

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2015



2.6.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 disusun berdasarkan kondisi bangsa Indonesia pada awal tahun penyusunan dan tantangan yang akan dihadapi selama kurun waktu 20 tahun dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum pada Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah "*Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur*". Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu:

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulai, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah pancasila** adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. **Mewujudkan bangsa yang berdaya saing** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontraintelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan social secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.



7. **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Sebagai ukuran keberhasilan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur maka pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian sasaran – sasaran pokok sebagai berikut:

Tabel II.121 Sasaran Pokok RPJP Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025

SSASARAN POKOK	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab	Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek
	Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa
Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang
	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing
	Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air
	Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional
Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan	Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya



SSASARAN POKOK	INDIKATOR CAPAIAN
	<p>penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia</p> <p>Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi</p> <p>Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik</p> <p>Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan</p> <p>Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional</p>
<p>Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri</p>	<p>Terwujudnya keamanan nasional yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan warga negara, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri</p> <p>TNI yang profesional, komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat terutama bela negara masyarakat dengan dukungan industri pertahanan yang andal</p> <p>Polri yang profesional, partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif, serta mantapnya koordinasi antara institusi pertahanan dan keamanan</p>
<p>Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan</p>	<p>Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga</p> <p>Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh</p> <p>Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat</p>
<p>Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari</p>	<p>Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari</p> <p>Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional</p> <p>Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan</p>
<p>Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional</p>	<p>Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia.</p> <p>Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara</p> <p>Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan</p> <p>Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut</p>



SSASARAN POKOK	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional	Memperkuat dan mempromosikan identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional
	Memulihkan posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang ditandai oleh keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional
	Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai
	Terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global
	Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri

Sumber: RPJPN Tahun 2005-2025

Sasaran pokok pembangunan nasional dicapai melalui pentahapan dan penentuan skala prioritas yang menjadi agenda dan rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas rencana pembangunan jangka panjang nasional yang berkaitan dengan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 ialah sebagai berikut:

-) RPJM 1 (2005-2009) → RPJM ke-1 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
-) RPJM 2 (2010-2014) → RPJM ke-2 ditujukan untuk memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
-) RPJM 3 (2015-2019) → RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
-) RPJM 4 (2020-2025) → RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

2.6.3 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 adalah *"Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia"*. Guna mencapai visi tersebut maka misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif, dan berdaya saing
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Pada akhir periode RPJPD Provinsi Jawa Barat atau dalam kerangka RPJMD pada tahapan keempat, diharapkan bahwa batas bawah pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat terkategori tinggi (IPM = 80). Mengacu pada target yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat memiliki tanggungjawab dan memerlukan komitmen agar pembangunan



daerahnya mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, target dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung perlu menyelaraskan dengan tahapan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahap pertama diprioritaskan pada akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna tercapainya visi Jawa Barat. Pada tahap kedua, prioritas pembangunan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan daerah untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Pada tahap ketiga, prioritas pembangunan ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan maksud sebagai persiapan dalam mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Tahap keempat dari RPJPD Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional. Pada tahap keempat ini, status pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat terkategori tinggi diproyeksikan terwujud pada tahun 2021 atau 2022 dengan nilai IPM 80 dan di akhir tahapan atau 2023 akan terwujud IPM sebesar 81,35-81,85.

2.6.4 Penelaahan RPJPD Daerah Lain

Penelaahan RPJPD daerah lainnya dilakukan dalam menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Bandung. Penelaahan RPJPD daerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang dengan daerah-daerah lain yang terkait. Beberapa daerah yang terkait dengan Kabupaten Bandung antara lain Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut. Alasan penelaahan RPJPD daerah-daerah tersebut antara lain:

1. Adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
2. Adanya permasalahan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
4. Adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/ kawasan pembangunan.

Tabel II.122 Identifikasi RPJP Daerah Lain

NO	DAERAH LAIN	KEBIJAKAN TERKAIT
1	Kota Bandung	<p>Visi: "Kota Bandung Bermartabat" (Bandung <i>Dignified City</i>)</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius; 2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing; 3. Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani; 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota; 5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan; 6. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat). <p>Kebijakan pembangunan Kota Bandung periode 2005-2025 yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan 2. Mengembangkan Pendidikan Wajib Belajar Menengah 12 Tahun yang Bermutu 3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan



NO	DAERAH LAIN	KEBIJAKAN TERKAIT
		<ol style="list-style-type: none">4. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang pendidikan5. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan non formal6. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, mudah, merata, dan terjangkau7. Meningkatkan pengawasan komoditas produk-produk pertanian8. Meningkatkan oemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing9. Meningkatkan kerukunan umat beragama10. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender11. Meningkatkan pertumbuhan riil dan kontribusi riil sektor perekonomian kota terutama dari <i>core sectors</i> (jasa wisata dan perdagangan berbasis industri kreatif dan IT) dengan mempertahankan industri pengolahan yang ada12. Memperbaiki stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok13. Perluasan kesempatan lapangan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi <i>core competency</i> kota14. Memberikan kemudahan pelayanan perijinan dan kepastian hukum15. Membentuk sinergitas kegiatan ekonomi antar wilayah16. Membuka akses seluas-luasnya bagi semua warga kota terhadap informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota17. Meningkatkan kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik18. Mengembangkan pusat-pusat kebudayaan19. Meningkatkan sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara pemerintah, pelaku budayam dan masyarakat20. Mengendalikan pencemaran udara21. Mengendalikan pencemaran air22. Mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih23. Meningkatkan dan mengendalikan kawasan berfungsi lindung (berfungsi hidrologi)24. Mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat (sampah)25. Mengembangkan (sistem) prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota26. Mengembangkan SAUM (sarana Angkutan Umum Masal) dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi27. Mengendalikan aspek-aspek penyebab kemacetan28. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih29. Menyediakan Tempat Pemroses Akhir (TPA) sampah yang berkelanjutan30. Menyediakan sistem drainase kota yang tertata31. Menyediakan sistem penanganan air limbah dan IPAL kota32. Menumbuhkan dan meningkatkan pengelolaan bencana (gempa, longsor, banjir, gunung meletus, angin topan, kebakaran, dll)33. Meningkatkan kualitas aparatur perencana dan pengelola data34. Peningkatan kualitas produk hukum yang produktif dan implementatif35. Peningkatan kualitas penegakan hukum dan HAM secara objektif dan merata36. Mewujudkan pengawasan sebagai prinsip dasar dan kebutuhan dasar dalam mencapai tujuan program pembangunan37. Melakukan pendidikan politik bagi semua lapisan masyarakat38. Menjadikan ketertiban dan keamanan kebutuhan bersama yang harus ditangani bersama antara pemerintah dan masyarakat39. Meningkatkan pendapatan daerah40. Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan non konvensional



NO	DAERAH LAIN	KEBIJAKAN TERKAIT
		41. Mengembangkan sistem insentif yang menarik dan fasilitasi untuk sektor swasta dalam pembiayaan penyediaan barang dan jasa publik 42. Mengembangkan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta 43. Menyediakan insentif dan fasilitasi untuk keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan serta pemanfaatan dan pemeliharaan barang dan jasa publik
2	Kota Cimahi	<p>Visi: "Cimahi Kota Cerdas"</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial, produktif dan unggul; 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 3. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing serta berbasis inovasi daerah; 4. Mewujudkan keserasian pembangunan yang berkeadilan; 5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan <p>Kebijakan pembangunan Kota Cimahi periode 2005-2025 yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui pemenuhan infrastruktur dan suprastruktur 2. Mewujudkan pendidikan menengah kejuruan berbasis IT, agro industri, kepariwisataan, industri manufaktur, dan industri jasa 3. Peningkatan minat baca masyarakat 4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang promotif, preventif, dan kuratif untuk berbagai kelompok umur dan lapisan masyarakat 5. Mengurangi disparitas pelayanan kesehatan dari aspek kewilayahan 6. Peningkatan kualitas sarana prasarana dan SDM di bidang kesehatan 7. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medik 8. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan persebarannya untuk menjaga daya tampung suatu wilayah dalam suatu kesatuan ruang 9. Peningkatan kompetensi dan daya saing pencari kerja untuk pasar tenaga kerja 10. Peningkatan keterampilan tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan, dan jasa 11. Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat 12. Peningkatan penggalan potensi sumber kehidupn Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 13. Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antar umat beragama 14. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan 15. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai luhur budaya daerah serta memperkaya khasanah budaya daerah 16. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan 17. Peningkatan <i>human investment</i> 18. Terwujudnya supremasi hukum dan tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan keadilan, kebenaran, akomodatif, dan aspiratif 19. Berfungsinya sistem administrasi pemerintahan dan manajemen pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional yang dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasikan kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat 20. Meningkatkan penerimaan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendapatan daerah



NO	DAERAH LAIN	KEBIJAKAN TERKAIT
		<ol style="list-style-type: none"> 21. Meningkatkan pertumbuhan industri serta sarana dan prasarana perdagangan untuk mendorong kluster industri 22. Pengembangan agribisnis perkotaan untuk peningkatan ketahanan dan keamanan pangan 23. Mengembangkan daya tarik wisata dan sumber daya kepariwisataan 24. Peningkatan pengembangan dan pemberdayaan KUKM 25. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana, kelembagaan pelayanan investasi untuk mendorong pengembangan promosi dan kerjasama investasi 26. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi, sumber daya air, telekomunikasi, dan sarana prasarana permukiman 27. Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan 28. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 29. Pemeliharaan daya dukung lingkungan 30. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
3	Kabupaten Bandung Barat	<p>Visi: "Cerdas, Maju, Makmur, dan Agamis"</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, dan kreatif; 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>); 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan industri yang berdaya saing serta berkeadilan; 4. Memelihara kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 5. Mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan. <p>Kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat periode 2005-2025 yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung wilayah 2. Terwujudnya pemerataan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh masyarakat 3. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat di jalur formal, informal, dan non formal dengan memperhatikan kondisi wilayah 4. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan melalui pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan 5. Terwujudnya wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar menengah 12 tahun yang berkualitas 6. Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan pemuda yang kreatif dan inovatif 7. Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang dihasilkan oleh postur kelembagaan (organisasi) birokrasi yang efektif dan efisien dengan kualitas sumber daya manusia aparat birokrasi yang kompeten 8. Meningkatnya kinerja kecamatan dan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas 9. Meningkatnya kapasitas manajemen pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel serta bermuara pada peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi 10. Meningkatnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengawasan pemerintahan 11. Terwujudnya jejaring kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang sinergis dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat



NO	DAERAH LAIN	KEBIJAKAN TERKAIT
		<ol style="list-style-type: none"> 12. Berkembangnya industri pertanian berupa tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan 13. Berkembangnya wisata yang ramah lingkungan 14. Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi investasi di bidang industri pengolahan 15. Tercapainya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan 16. Meningkatnya daya beli masyarakat 17. Meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah 18. Terkendalinya harga serta ketersediaan bahan pokok 19. Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air baku 20. Meningkatnya upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana 21. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan 22. Terpeliharanya kawasan lindung 23. Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang 24. Terwujudnya masyarakat agamis yang menjunjung tinggi kerukunan inter dan antar umat beragama serta berakhlak mulia 25. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya daerah dan kearifan lokal masyarakat 26. Terwujudnya perluasan jalinan komunikasi antar kelompok masyarakat perdesaan dan perkotaan 27. Terwujudnya kerjasama antara pemerintah, pelaku budaya, dan masyarakat 28. Terwujudnya penguatan identitas dan jati diri masyarakat melalui penumbuhan budaya inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
4	Kabupaten Garut	<p>Visi: "Terwujudnya Garut Pangirutan yang Tata Tengtrem Kerta Raharja Menuju Ridho Allah"</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi; 2. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang; 4. Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, bersih, dan berkelanjutan. <p>Kebijakan pembangunan Kabupaten Garut periode 2005-2025 yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan <i>human investment</i> 2. Pembangunan kesehatan masyarakat dan peningkatan gaya hidup sehat serta kualitas kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama 4. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas 5. Peningkatan keahlian dan perlindungan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang cacat dan lanjut usia 6. Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah 7. Peningkatan kualitas tenaga kerja khususnya pada aspek profesionalisme dan kredibilitas sesuai dengan keahlian



NO	DAERAH LAIN	KEBIJAKAN TERKAIT
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja dengan memperhatikan upah kerja yang memadai, keselamatan kerja dan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja 9. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan 10. Penguatan kelembagaan jaringan penagrusutamaan gender dan jaminan perlindungan anak baik bersifat preventif, kuratif, dan remediatif yang berbasis masyarakat 11. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek, dan politik 12. Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik IPTEK 13. Memperkuat perekonomian domestik yang berorientasi dan berdaya saing pada skala regional dan nasional 14. Mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkualitas 15. Pengembangan agroindustri dan agribisnis dengan tetap mempertahankan fungsi lahan pertanian sebagai salah satu ruang terbuka kota serta peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah pertanian 16. Peningkatan hasil peternakan, pemasaran, dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung usaha peternakan 17. Pengembangan UKM untuk menjadi pelaku ekonomi kerakyatan yang berbasis IPTEK dan berdaya saing tinggi 18. Pemberdayaan koperasi didorong untuk berkembang secara luas 19. Kepariwisata dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan kerja 20. Pembangunan kehutanan serta perlindungan dan konservasi sumber daya alam 21. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan wilayah 22. Pembangunan infrastruktur transportasi dan perhubungan untuk meningkatkan pelayanan dan pengurangan kesenjangan wilayah 23. Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana dasarnya dengan didukung oleh pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan terbebas dari permukiman kumuh 24. Pembangunan energi dan sumber daya mineral guna terpenuhinya pasokan energi yang handal, efisien, dan berkelanjutan serta terwujudnya kemampuan masyarakat dalam pembangunan energi menuju desa mandiri energi yang berkelanjutan 25. Mewujudkan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi antar sektor secara sinergis, serasi dan berkelanjutan 26. Meningkatkan daya dukung lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan 27. Membangun aparatur pemerintah yang memahami etika birokrasi dan budaya kerja, pemahaman terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta penerapan komitmen percepatan pemberantasan KKN
5	Kabupaten Sumedang	<p>Visi: "Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis, dan Demokratis Pada Tahun 2025"</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat; 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri;



NO	DAERAH LAIN	KEBIJAKAN TERKAIT
		<p>3. Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila;</p> <p>4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;</p> <p>5. Mewujudkan masyarakat demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia.</p> <hr/> <p>Kebijakan pembangunan Kabupaten Sumedang periode 2005-2025 yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan pendidikan mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan 2. Meningkatkan kualitas potensi kepemudaan daerah berlandaskan kesetaraan gender, pembangunan karakter kebangsaan (<i>nation building</i>) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan 3. Mensinergikan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengembangan potensi sosio ekonomi daerah 4. Mendukung ketahanan pangan dan energi terbarukan yang tersedia di daerah 5. Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud 6. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan pembangunan kesehatan dalam rangka meniadakan ketimpangan antar daerah dan antar kelompok penduduk 7. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan 8. Memantapkan fungsi dan peran budaya sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan masyarakat di lingkungannya 9. Mengembangkan budaya daerah yang inovatif sesuai kebutuhan masyarakat yang tengah berada dalam dinamika kemajuan pembangunan nasional 10. Mengakomodasi budaya baru sebagai hasil proses akulturasi secara selektif dengan tidak mengabaikan budaya daerah 11. Mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi harus berkelanjutan dan berkualitas guna mendorong mantapnya iklim usaha daerah yang berdaya saing nasional dan global serta senantiasa berorientasi bagi peningkatan kemakmuran bagi seluruh masyarakat secara adil dan proporsional 12. Mengembangkan industri daerah melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk, pengembangan industri kecil dan menengah dan penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan 13. Mengembangkan kapasitas struktur perekonomian daerah yang berfokus pada industri kecil dan menengah yang bersinergi dengan industri besar 14. Peningkatan sistem informasi pasar dan oenguasaan akses pasar lokal dan regional 15. Meningkatkan sistem distribusi yang efektif dan efisien guna terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat 16. Meningkatkan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama bidang pertanian 17. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan agribisnis yang dinamis dan efisien yang melibatkan partisipasi aktif para petani 18. Mengembangkan objek dan daya tarik wisata daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat pariwisata 19. Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan ketersediaan stok kebutuhan pokok lainnya



NO	DAERAH LAIN	KEBIJAKAN TERKAIT
		20. Meningkatkan diversifikasi pangan daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal
		21. Memberikan jaminan insentif dan disinsentif investasi bagi para pelaku usaha di daerah
		22. Mengembangkan jasa keuangan di daerah
		23. Pemerataan distribusi pendapatan
		24. Menanggulangi kemiskinan
		25. Meningkatkan komitmen antar <i>stakeholders</i> dalam aktivitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah yang berkelanjutan
		26. Mewujudkan penataan ruang yang serasi, seimbang dan berkelanjutan
		27. Mendorong dan mengendalikan pertumbuhan dan pengembangan wilayah
		28. Mengurangi resiko bencana
		29. Optimalisasi rehabilitasi lahan dan konservasi tanah
		30. Pemulihan kondisi dan peningkatan fungsi kawasan lindung
		31. Mendorong berkembangnya penciptaan lapangan kerja formal dan informal
		32. Meningkatkan pemahaman dan oengamalan nilai-nilai agama sebagai landasan pembinaan akhlak mulia dalam kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan
		33. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan kapasitas keuangan daerah serta kapasitas lembaga legislatif daerah
		34. Meningkatkan pelayanan publik
		35. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif untuk menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik
		36. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan otonomi desa yang makin efektif
		37. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan
		38. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
		39. Meningkatkan akses informasi publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah dan penyaluran aspirasi masyarakat

Sumber:

Perda Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

Perda Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Janga Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025

Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2025

Perda Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut 2005-2025

Perda Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Smedang Tahun 2005-2025

2.6.5 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Arahan penataan ruang dari Penataan Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan rencana pengembangan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bandung termasuk ke dalam WP KK Cekungan Bandung dengan tema pembangunan mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Kabupaten Bandung diarahkan sebagai bagian



- dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, wisata alam, pertanian, dan perkebunan.
2. Kebijakan pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP, meliputi:
 - a. Kawasan yang terletak di bagian utara provinsi, mencakup WP Bodebekpunjur dan sebagian WP Purwasuka, WP KK Cekungan Bandung dan WP Ciayumajakuning, menjadi kawasan yang dikendalikan perkembangannya;
 - b. Kawasan yang terletak di bagian timur provinsi, mencakup sebagian WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung dan WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan sebagai kawasan yang didorong perkembangannya;
 - c. Kawasan yang terletak di bagian selatan provinsi, meliputi sebagian WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya serta WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya;
 - d. Kawasan yang terletak di bagian barat provinsi, meliputi sebagian WP Bodebekpunjur, WP KK Cekungan Bandung dan WP Sukabumi dan sekitarnya, ditetapkan menjadi kawasan yang ditingkatkan perkembangannya
 3. Arahan pengembangan WP KK Cekungan Bandung meliputi:
 - a. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW, dan PKL
 - b. Mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan
 - c. Mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan
 - d. Mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal
 4. Pengembangan infrastruktur jalan
 -) Pembangunan jalan lingkar Majalaya dan Banjaran di Kabupaten Bandung
 -) Pembangunan jalan alternatif Bandung – Lembang
 -) Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
 -) Pembangunan jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (CISUMDAWU)
 -) Pembangunan jalan Tol Cileunyi – Nagrek – Ciamis – Banjar
 -) Pembangunan jalan Tol Soreang – Pasirkoja, jalan tol dalam kota Bandung (terusan Pasteur – Ujungberung – Cileunyi) dan Ujungberung – Gedebage - Majalaya
 5. Pengembangan infrastruktur perhubungan
 -) Pembangunan jalur ganda KA Perkotaan Kiaracondong – Rancaekek – Cicalengka
 -) Elektrifikasi jalur KA Perkotaan Padalarang – Kiaracondong – Cicalengka
 -) Reaktivasi jalur KA Perkotaan Rancaekek – Jatinangor – Cikudapetuh
 -) Reaktivasi jalur KA Perkotaan Cikudapetuh – Soreang – Ciwidey
 -) Pembangunan DT Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang – Cicalengka Line
 -) Pengembangan terminal Tipe A di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung
 -) Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan
 -) Peningkatan fasilitas dan prasarana lalu lintas angkutan jalan
 6. Pengembangan infrastruktur energi
 -) Pengembangan pemanfaatan sumber energi panas bumi Kawah Drajat, Kawah Kamojang, Papandayan, Cilayu, Ciarinem, Cikuray dan Guntur Masigit di Kabupaten Garut dan sebagian Kabupaten Bandung
 -) Peningkatan energi panas bumi di Cibuni, Patuha, Wayang Windu, Kamojang, Papandayan, Tampomas, Gunung Malabar di Kabupaten Bandung dan Tangkubanparahu di Kabupaten Bandung Barat
 -) Pengembangan energi sampah di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung
 -) Pengembangan energi skala kecil di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang
 -) Pengembangan gas perkotaan (*city gas*) di KK Metropolitan Bandung Raya
 -) Pengembangan stasiun pengisian gas (SPPBE) di KK Metropolitan Bandung Raya
 -) Pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri dan pembangkit listrik



- 7. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air
 -) Pengembangan desa-desa mandiri energi
 -) Pembangunan Waduk Sukawana, Santosa, Ciwidey, Cimeta, Cikapundung, Citarik, dan Tegalluar di Kabupaten Bandung
 -) Revitalisasi dan optimalisasi waduk dan danau/situ
 -) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di hulu DAS
 -) Pengembangan infrastruktur pengendali banjir
 -) Peningkatan kondisi jaringan irigasi di daerah bagian utara
- 8. Pengembangan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan
 -) Pengembangan permukiman perkotaan meliputi pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan perkotaan, industri dan pendidikan, khususnya di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Jatinangor di Kabupaten Sumedang
 -) Peningkatan pengelolaan persampahan, revitalisasi TPA Leuwigajah, optimalisasi TPK Sarimukti, dan operasionalisasi Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka
- 9. Pengembangan Kawasan Industri Rancaekek, terletak di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung

2.6.6 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

Penelaahan RTRW Kabupaten Bandung dilakukan untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok jangka panjang pembangunan daerah tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung meliputi:

- i. Kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan pembagian 8 (delapan) WP sesuai fokus pengembangan Daerah untuk mewujudkan kemandirian dan pengelolaan pembangunan yang efektif dan merata
- ii. Kebijakan pemantapan dan pengembangan struktur ruang yang sinergi sesuai fungsi pusat kegiatan dan sistem sarana prasarana yang terpadu
- iii. Kebijakan pelestarian kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya dengan prinsip berkelanjutan
- iv. Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan
- v. Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang

1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung disusun sebagai perwujudan kebijakan dan strategi penataan ruang. Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung terikat pada keharusan untuk mengikuti struktur ruang wilayah yang berada pada hirarki di atasnya. Rencana struktur ruang juga harus sesuai dengan kebutuhan pusat-pusat pelayanan yang diperlukan untuk mendukung fungsi kawasan-kawasan yang ada di dalam kota untuk mendukung fungsi wilayah secara keseluruhan.

1. Rencana sistem pusat kegiatan

Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Bandung dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan. Konsep yang digunakan ialah membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten dan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kabupaten. Pengembangan sistem perkotaan/permukiman di wilayah Kabupaten Bandung mempertimbangkan pemerataan pembangunan di setiap wilayah dengan mengembangkan peran dan fungsi masing-masing pusat kegiatan, mengembangkan sistem jaringan prasarana skala kabupaten yang mendukung struktur yang direncanakan dan meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain untuk mengurangi



ketergantungan kepada wilayah lain, mengintegrasikan fungsi perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah kabupaten, dan mengantisipasi perkembangan kegiatan di masa mendatang.

Rencana penetapan pusat kegiatan meliputi:

- a. PKN, mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya;
- b. PKL Soreang-Kutawaringin-Katapang yang berfungsi sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten atau Ibukota Kabupaten, perdagangan dan jasa regional, perumahan, permukiman, industri, pariwisata dan pertanian;
- c. PKLp Banjaran, Majalaya, Baleendah, Cileunyi-Rancaekek dan Cicalengka yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, perumahan, permukiman, industri, pertanian, perkebunan, dan konservasi
- d. PPK Ciwidey, Pasirjambu, Pangalengan, Cangkuang, Ciparay, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Margahayu, Margaasih, Cilengkrang, dan Cimencyan yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, wisata alam, industri, agroindustri, perumahan, permukiman, pertanian, perkebunan dan kehutanan; dan
- e. PPL Rancabali, Cimaung, Arjasari, Pameungpeuk, Kertasari, Pacet, Ibum, Solokanjeruk, Paseh, Nagreg, dan Cikuncung yang berfungsi sebagai perumahan, permukiman, pertanian, perkebunan, transport alam, agroindustri, kehutanan, dan konservasi.

2. Rencana jaringan transportasi

Rencana sistem jaringan transportasi untuk Kabupaten Bandung akan diarahkan untuk menunjang struktur ruang yang akan dibentuk. Arah jangka panjang rencana pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Bandung ialah menyediakan sarana transportasi massal antar wilayah khususnya yang menunjang pergerakan yang mengarah ke Kota Bandung dan Kota Cimahi. Arah transportasi Kabupaten Bandung adalah transportasi kereta api atau *light rail transportation* (monorel). Guna meningkatkan kapasitas dan tingkat pelayanan jalan dan memperbaiki sistem manajemen lalu lintas, rencana jangka pendek transportasi untuk Kabupaten Bandung ialah penataan angkutan umum untuk Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan. Sementara konsep pengembangan jaringan transportasi jangka menengah adalah melakukan pembangunan jalan baru, pengembangan terminal, serta pengembangan sistem angkutan massal. Beberapa ruas jalan yang diusulkan untuk dibangun adalah jalan tol Soreang-Pasirkoja, jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan jalan tol dalam Kota Bandung. Pengembangan terminal yang diusulkan adalah pembangunan terminal terpadu di Gedebage, pembangunan terminal tipe B di Soreang, Cicalengka, Padalarang, Tanjungsaru dan Lembang, pembangunan terminal tipe C di Banjaran, Ciparay, Rancaekek. Sistem angkutan massal yang diusulkan untuk Metropolitan Bandung berupa monorel, *double decker*, *busline*, LRT, kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan peningkatan jalur kereta api. Sementara itu, rencana sistem transportasi udara di Kabupaten Bandung meliputi Bandara khusus pertahanan dan keamanan di Kecamatan Margahayu dan ruang udara untuk penerbangan.

3. Rencana jaringan sumber daya air

Rencana jaringan sumber daya air di Kabupaten Bandung meliputi sistem pengelolaan wilayah sungai (WS), cekungan air tanah (CAT), jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air bersih, dan sistem pengendalian daya rusak air. Rencana jaringan sumber daya air bertujuan untuk mempertahankan dan melindungi sumber daya air sebagai air baku kebutuhan penduduk di Kabupaten Bandung. Rencana pengembangan dan pengelolaan wilayah sungai (WS) di Kabupaten dilakukan dalam upaya pemeliharaan dan pelestarian potensi Wilayah Sungai sekaligus Daerah Sungai yang ada di Kabupaten Bandung. Upayanya antara lain konservasi sungai, pemanfaatan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai. Pengembangan jaringan irigasi ditujukan untuk mengairi areal pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bandung untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan. Rencana sistem jaringan dan pengelolaan air baku di Kabupaten Bandung melalui jaringan PDAM Tirta Raharja dengan pelayanan kawasan perkotaan PKL, PKLp, dan PPK sementara kawasan perdesaan dengan fungsi PPL



dikembangkan penyediaan air baku perdesaan. Rencana pengendalian banjir regional di kawasan rawan banjir seperti di sepanjang tepi Sungai Citarum bagian hulu/ Sub DAS Hulu Citarum dikendalikan melalui rencana pembangunan tanggul di sekitar sungai, pengerukan tanah dan sampah, pembangunan kolam retensi/polder, penataan drainase primer dan sekunder, rehabilitasi sungai, pembangunan *flood way*, serta rehabilitasi sarana bangunan air.

4. Rencana pengembangan jaringan listrik dan energi

Pengembangan prasarana energi di Kabupaten Bandung adalah melalui pengembangan jaringan listrik perdesaan, elektrifikasi jaringan listrik untuk perumahan baru dengan mengikuti jaringan listrik yang sudah ada, pengembangan sumber energi listrik terbarukan diantaranya menggunakan *solar cell*, biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik, pengembangan jaringan listrik dengan sistem bawah tanah, pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran listrik, serta pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif.

5. Rencana jaringan telekomunikasi

Kebutuhan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bandung hingga tahun 2036 adalah sekitar 1.770.071 SST. Pelayanan telekomunikasi dilayani oleh PT. Telkom Kabupaten Bandung dan PT Telkom Divisi Regional (Divre) III Jabar. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bandung adalah pengembangan sistem jaringan telepon tetap (kabel) dan pengembangan sistem jaringan telepon bergerak (nirkabel) yang diimplementasikan dengan pembangunan Tower BTS Terpadu, pengembangan jaringan internet dan pengembangan jaringan *cyber province* yang mencakup keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung terutama pada wilayah pusat kegiatan (PKL, PKLp, dan PPK).

6. Rencana fasilitas pengelolaan sampah

Rencana sistem persampahan di Kabupaten Bandung meliputi peningkatan pelayanan persampahan di wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Bandung sementara wilayah Selatan didominasi dengan penanganan individual melalui upaya penangana 3R dan Bank Sampah, oprimalisasi operasional dan teknologi pengolahan TPPAS Legok Nangka, pengembangan TPPAS Babakan Ciparay dengan sistem *sanitary landfill / controlled landfill*, pengembangan bangunan daur ulang dengan penyediaan TPST3R di tiap kecamatan, penyediaan Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST) dan komposer di seluruh kecamatan, pembangunan SPA (Stasiun Peralihan Antara), serta pemanfaatan sampah menjadi biogas, pembangkit listrik, bahan bakar, dan pupuk.

7. Rencana sistem pengolahan air limbah dan bahan berbahaya dan beracun (B3)

Rencana sistem pengolahan air limbah yang diterapkan di Kabupaten Bandung adalah sistem pembuangan air limbah setempat (*on site sanitation*) yang dilaksanakan oleh masing-masing keluarga sementara sistem *off site* direncanakan di daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan komersil dan pusat pemerintahan.

8. Rencana sistem jaringan drainase

Rencana pengembangan sistem jaringan drainase di Kabupaten Bandung meliputi penyediaan dan pemanfaatan saluran drainase terpisah dari saluran buangan air limbah domestik maupun non domestik, penataan saluran drainase, pengembangan sistem drainase kombinasi, penataan saluran drainase pada kawasan perkotaan, peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-pusat kegiatan, pengembangan sistem drainase makro dan perkotaan, pembuatan embung, serta pembangunan sarana drainase perkotaan pada kawasan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh Pemerintah Pusat.



9. Rencana sistem pelayanan air minum

Rencana sistem pelayanan air minum di Kabupaten Bandung yaitu rencana sistem penyediaan air bersih dengan melakukan pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM), peningkatan kapasitas produksi PDAM dan menurunkan kehilangan air, perbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusi, pengembangan sistem penyediaan air bersih regional, pemanfaatan sumber air baru dan peningkatan jaringan distribusi, perbaikan manajemen penelolan, peningkatan kemitraan, pengembangan sistem penyediaan air bersih lintas wilayah, dan pengembangan pemanfaatan air untuk industri air minum dan kemasan.

10. Rencana sistem kebencanaan

Pemanfaatan ruang dalam mendukung sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung diantaranya melalui sistem peringatan dini, bangunan penyelamatan, dan jalur penyelamatan.

2. Rencana Pola Ruang

Pola ruang wilayah Kabupaten Bandung sepenuhnya dikembangkan dengan memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Bandung serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten yang berbatasan. Pola ruang di Kabupaten Bandung diwujudkan dalam arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya agar tercipta keseimbangan dan keserasian dalam peruntukan ruang.

1. Rencana kawasan lindung

Jenis kawasan lindung yang ada di Kabupaten Bandung terdiri dari hutan lindung, kawasan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan hutan konservasi, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.

Tabel II.123 Alokasi Luas Kawasan Lindung dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bandung

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Cagar Alam	15.157,42	8,6
2	Taman Buru	1.043,45	0,59
3	Taman Hutan Raya	230,21	0,13
4	Taman Wisata Alam	549,18	0,31
5	Sempadan	1.198,26	0,68
6	Hutan Lindung	34.204,02	19,41
7	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	339,79	0,19
8	Perairan	483,92	0,27
9	Kolam Retensi	26,75	0,02
Total		53.232,99	30,21

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

2. Rencana kawasan budidaya

Rencana pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Bandung dimaksudkan untuk menciptakan pola pemanfaatan ruang yang mampu menjadi wadah bagi berlangsungnya berbagai kegiatan penduduk serta keterkaitan fungsional antar kegiatan, sehingga tercipta keserasian antara satu kegiatan dengan kegiatan lain serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kawasan budidaya di Kabupaten Bandung mencakup kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan tanaman tahunan/perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, serta kawasan peruntukan lainnya.



Tabel II.124 Alokasi Luas Kawasan Budidaya dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bandung

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Hutan Produksi	4.323,19	2,45
2	Hutan Produksi Terbatas	57,01	0,03
3	Tanaman Tahunan / Perkebunan	35.449,37	20,11
4	Hutan Rakyat	913,91	0,52
5	Pertanian Lahan Basah	31.046,74	17,62
6	Pertanian Lahan Kering	8.376,22	4,75
7	Perikanan	573,52	0,33
8	Peternakan	80,07	0,05
9	Kawasan Peruntukan Industri	4.386,00	2,49
10	Pemerintahan / Fasum	488,99	0,28
11	Kawasan Permukiman	33.458,53	18,98
12	Perdagangan / Jasa	3.253,72	1,85
13	Kawasan Hankam	598,41	0,34
Total		123.005,68	69,79

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

3. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis di Kabupaten Bandung tidak terlepas dari kebijakan dan arahan pembangunan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi yang mengarahkan arah pengembangan dalam memacu pertumbuhan bagi Kabupaten Bandung.

i) Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kabupaten Bandung meninjau pada PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028, Kabupaten Bandung merupakan bagian dari KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dengan pengembangan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan. KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Metropolitan Bandung Raya dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

ii) Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kabupaten Bandung meninjau pada Perda Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Kabupaten Bandung merupakan bagian dari KSP dengan sudut kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Pada sudut kepentingan lingkungan hidup, Kabupaten Bandung termasuk ke dalam KSP Bandung Utara dan KSP Hulu Sungai Citarum. Pada sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, Kabupaten Bandung termasuk ke dalam KSP Panas Bumi Kamojang-Darajat-Papandayan dan KSP Panas Bumi Wayang Windu.

iii) Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Bandung yang akan dikembangkan ialah kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi yaitu Kawasan Agropolitan Pasirjambu-Ciwidey-Rancabali dan Kawasan Agropolitan Pangalengan.

Selain kawasan strategis, Kabupaten Bandung memiliki 3 (tiga) kawasan terpadu. Kawasan terpadu merupakan kawasan terpilih berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Tiga kawasan terpadu di Kabupaten Bandung tersebut antara lain Kawasan Terpadu Tegalluar, Kawasan Terpadu Permukiman dan Industri Margaasih, serta Kawasan Terpadu Sekitar Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat.



Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Identifikasi permasalahan pembangunan juga dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini dilakukan untuk dapat memetakan permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil evaluasi terhadap permasalahan pembangunan pada RPJPD sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan mendasar yakni permasalahan pembangunan tidak ditelaah dalam tiga kolom yang terdiri dari masalah pokok, masalah, dan akar masalah sehingga tidak terlihat sumber paling mendasar dari masalah – masalah yang ada. Pada dokumen revisi RPJPD ini perumusan permasalahan sudah disesuaikan dengan format Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya, dilakukan identifikasi isu strategis untuk mengidentifikasi kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang daerah Kabupaten Bandung di masa yang akan datang.

3.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Bandung

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Ketidaksiharian pembangunan dengan kondisi riil yang dibuat saat perencanaan timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan kondisi daerah yang telah dijabarkan pada Bab II dokumen ini, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung antara lain:

3.1.1 Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Bidang Pendidikan

Permasalahan pokok bidang pendidikan yaitu: (1) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi; (2) Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan; dan (3) belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS = 8,5)
- 2) Angka partisipasi sekolah tingkat SMA rendah
- 3) Lulusan SMP/ sederajat yang tidak melanjutkan ke tingkat SMA/ sederajat cukup tinggi (19,15%)
- 4) Angka putus sekolah tingkat SMA/ sederajat tinggi
- 5) Sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi standar



- 6) Kualitas sarana pendidikan belum merata
- 7) Rasio ketersediaan sekolah tingkat SMP/ sederajat mengalami penurunan
- 8) Tenaga kependidikan PAUD belum terstandarisasi
- 9) Adanya penurunan ketersediaan guru SD/ sederajat

Tabel 0.1 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pendidikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Rendahnya rata-rata lama sekolah	<ul style="list-style-type: none">) Keterbatasan ekonomi) Penduduk usia 16-18 tahun lebih memilih untuk bekerja dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA/ sederajat
		Angka partisipasi sekolah tingkat SMA rendah	
		Lulusan SMP/ sederajat yang tidak melanjutkan ke tingkat SMA/ sederajat cukup tinggi	
		Angka putus sekolah tingkat SMA tinggi	
2	Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi standar	<ul style="list-style-type: none">) Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi) Masih banyak sekolah yang terakreditasi C
		Kualitas sarana pendidikan belum merata	<ul style="list-style-type: none">) Belum meratanya kelembagaan pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta) Masih banyak masyarakat yang lebih memilih sekolah negeri
		Rasio ketersediaan sekolah tingkat SMP/ sederajat mengalami penurunan) Peningkatan jumlah penduduk usia sekolah tidak diiringi dengan peningkatan penyediaan sarana pendidikan
3	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	Tenaga kependidikan PAUD belum terstandarisasi	<ul style="list-style-type: none">) Rendahnya kesejahteraan guru honorer) Jumlah pensiunan tidak seimbang dengan jumlah pengangkatan guru
		Adanya penurunan ketersediaan guru SD/ sederajat	

Sumber: Hasil Analisis, 2018

2. Bidang Kesehatan

Permasalahan pokok bidang kesehatan yaitu: (1) Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan belum merata dan (2) Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Jumlah rumah sakit dan kapasitas sarpras penunjangnya belum mencukupi
- 2) Jumlah dan sebaran tenaga medis belum optimal
- 3) Penurunan AKI dan AKB belum signifikan
- 4) Masih maraknya kasus *stunting*

Tabel 0.2 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kesehatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan belum merata	Jumlah rumah sakit dan kapasitas sarpras penunjangnya belum mencukupi	<ul style="list-style-type: none">) Banyaknya masyarakat yang sakit) Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk berolahraga



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Jumlah dan sebaran tenaga medis belum optimal) Rendahnya kesejahteraan tenaga medis khususnya di daerah terpencil
2	Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat	Penurunan AKI dan AKB belum signifikan) Masih adanya persalinan oleh tenaga non medis) Jauhnya jangkauan pelayanan medis
		Masih maraknya kasus <i>stunting</i>) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait imunisasi dan kebutuhan gizi anak

Sumber: Hasil Analisis, 2018

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pokok bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain: (1) Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar belum memadai; (2) Adanya peningkatan alih fungsi lahan. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut yaitu:

- 1) Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 68,83% di tahun 2017
- 2) Kondisi jaringan irigasi teknis dan non teknis dalam kondisi baik baru mencapai 63,67% dan 54,32% di tahun 2017
- 3) Kondisi jaringan drainase dalam kondisi baik baru sebesar 1,47% di tahun 2017
- 4) Belum terintegrasinya sistem drainase perkotaan yang berdaya fungsi optimal
- 5) Belum tertanganinya banjir
- 6) Cakupan pelayanan air bersih belum optimal. Penduduk yang sudah mendapatkan akses air bersih sebesar 77,12% di tahun 2017
- 7) Cakupan pelayanan air minum belum optimal dan masih perlu ditingkatkan. Kondisi saat ini proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak baru sebesar 87%
- 8) Cakupan pelayanan persampahan perkotaan belum optimal. Volume sampah yang tertangani pada tahun 2017 baru sebesar 26% dimana masih jauh dari standar minimum pelayanan yaitu sebesar 60%-80% yang tertangani
- 9) Rendahnya peningkatan persentase bangunan ber-IMB
- 10) Rendahnya rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Rasio RTH Kabupaten Bandung baru mencapai 0,22% pada tahun 2016
- 11) Adanya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukkan

Tabel 0.3 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar belum memadai	Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 68,83%) Muatan kendaraan yang berlebih (<i>overloaded</i>)) Kurang baiknya sistem drainase jalan) Ketidaksesuaian standar pembangunan jalan) Masih rendahnya penerapan teknologi baru dalam kegiatan pemeliharaan jalan
		Kondisi jaringan irigasi teknis dan non teknis dalam kondisi baik baru mencapai 63,67% dan 54,32%) Belum memadainya SDM dan sarana pendukung untuk pemeliharaan irigasi) Adanya alih fungsi irigasi menjadi drainase perkotaan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kondisi jaringan drainase dalam kondisi baik baru sebesar 1,47%) Rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan, pengelolaan, dan pembangunan drainase
		Belum terintegrasinya sistem drainase perkotaan yang berdaya fungsi optimal) Pemanfaatan lahan perumahan belum disertai dengan penediaan saluran drainase yang terintegrasi
		Belum tertanganinya banjir) Belum terbebaskannya sempadan sungai dari bangunan liar) Belum optimalnya normalisasi sungai secara berkala dan berkesinambungan) Belum mencukupinya kapasitas jaringan drainase) Adanya pendangkalan sungai) Sumur resapan tidak efektif
		Cakupan pelayanan air bersih belum optimal) Sebaran sumber air baku tidak merata
		Cakupan pelayanan air minum belum optimal) Lokasi air baku tidak berada pada lahan masyarakat melainkan lahan milik PERHUTANI) Kuantitas air baku rendah) Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan air baku
		Cakupan pelayanan persampahan perkotaan belum optimal) Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu) Belum efektifnya pengelolaan persampahan dengan skema 3R) Masih tingginya perilaku masyarakat untuk membuang sampah sembarangan) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah
		Rendahnya peningkatan persentase bangunan ber-IMB) Belum tersedianya database bangunan yang sudah ber-IMB) Menurunnya jumlah pemohon IMB yang berskala besar (perumahan, industri, perdagangan/ jasa)) Adanya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dalam hal IMB untuk perusahaan dan perumahan) Adanya persyaratan izin lokasi yang dibebankan di akhir rangkaian proses izin pada penerbitan IMB



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
) Panjangnya alur proses penerbitan IMB akibat regulasi baru
2	Adanya peningkatan alih fungsi lahan	Rendahnya rasio RTH per satuan luas wilayah) Belum adanya basis data tentang aset tanah untuk dijadikan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau
		Pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukkan) Belum tersedianya Perda RDTR kawasan perkotaan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang) Belum tersusunnya masterplan untuk kawasan strategis sebagai acuan untuk pengendalian pemanfaatan ruang) Terbatasnya SDM, peralatan, dan teknologi penunjang untuk pengawasan dan pengendalian ruang

Sumber: Hasil Analisis, 2018

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pokok bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu: (1) Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan sesuai standar; (2) Belum tertatanya kawasan kumuh. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut yaitu:

- 1) Rumah tangga (RT) yang menempati rumah tidak layak huni sebesar 26,06% di tahun 2017
- 2) Hanya 75,55% penduduk dengan rumah tinggal yang mengakses sarana sanitasi bersuspek aman di tahun 2017
- 3) Masih besarnya *backlog* perumahan
- 4) Realisasi penataan kawasan kumuh baru sebesar 0,65% di tahun 2017
- 5) Masih besarnya luasan kawasan kumuh

Tabel 0.4 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan sesuai standar	Rumah tangga (RT) yang menempati rumah tidak layak huni sebesar 26,07%) Harga rumah tidak terjangkau bagi kelompok MBR dan di bawah MBR) Pelayanan PSU belum optimal) Proses serah terima PSU belum optimal
		Hanya 75,55% penduduk dengan rumah tinggal yang mengakses sarana sanitasi bersuspek aman) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas sanitasi terbangun dan lingkungan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none">) Semakin luasnya wilayah permukiman yang belum dilengkapi SPAL sesuai standar) Sulitnya mencari lahan yang ideal untuk pembangunan sanitasi
		Masih besarnya <i>backlog</i> perumahan	<ul style="list-style-type: none">) Keterbatasan dan mahalnnya harga lahan) Belum optimalnya intervensi untuk penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan
2	Belum tertatanya kawasan kumuh	Realisasi penataan kawasan kumuh baru sebesar 0,65%	<ul style="list-style-type: none">) Belum adanya sinkronisasi dan integrasi program mengenai penataan dan pengendalian kawasan kumuh) Belum adanya basis data mengenai deliniasi kawasan kumuh) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya
		Masih besarnya luasan kawasan kumuh	

Sumber: Hasil Analisis, 2018

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pokok bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu: (1) Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana; (2) Masih tingginya pelanggaran Perda; dan (3) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masih rendah. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut yaitu:

- 1) Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran baru mencapai 60%
- 2) Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) penanggulangan kebakaran rata-rata masih di atas 22 menit
- 3) Belum optimalnya upaya mitigasi bencana
- 4) Sistem pengawasan perijinan belum berjalan optimal
- 5) Kurang beraninya masyarakat dalam menegakkan hukum (menegur)

Tabel 0.5 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana	Pelayanan penangulangan bencana kebakaran baru mencapai 60%	<ul style="list-style-type: none">) Minimnya ketersediaan pos damkar (hanya 3 pos dari minimal 9 pos untuk melayani 9 WMK)
		Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) penanggulangan kebakaran rata-rata masih di atas 22 menit	<ul style="list-style-type: none">) Sedikitnya jumlah mobil damkar yang dapat beroperasi (3/11 mobil)) Terbatasnya sumber air untuk pemadaman) Tidak adanya hydrant kota) Terbatasnya sungai dan kolam yang dapat digunakan untuk cadangan air



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya upaya mitigasi bencana	<ul style="list-style-type: none">) Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya daerah rawan bencana) Belum optimalnya regulasi mitigasi bencana) Belum efektifnya penyebaran informasi kebencanaan
2	Masih tingginya pelanggaran perda	Sistem pengawasan perijinan belum berjalan optimal	<ul style="list-style-type: none">) Belum memadainya sarana prasarana untuk patroli) Belum optimalnya integrasi perijinan antar lembaga) Kurangnya jumlah linmas untuk pengawasan
3	Peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masih rendah	Kurang beraninya masyarakat dalam menegakkan hukum (menegur)	<ul style="list-style-type: none">) Masih rendahnya tingkat kesadaran dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

Sumber: Hasil Analisis, 2018

6. Bidang Sosial

Permasalahan pokok bidang sosial yaitu: (1) Rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; (2) Belum memadainya sarana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; (3) Meningkatnya permasalahan sosial. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Penanganan PMKS anak terlantar baru sebesar 7,75%
- 2) Persentase anak terlantar di Kabupaten Bandung cukup banyak (peringkat 10 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat)
- 3) Aksesibilitas penandang disabilitas terhadap sarana dan prasarana masih rendah/ sulit
- 4) Tingginya kasus tuna sosial

Tabel 0.6 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Sosial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penanganan PMKS anak terlantar baru sebesar 7,75%	<ul style="list-style-type: none">) Meningkatnya jumlah anak terlantar
		Persentase anak terlantar di Kabupaten Bandung cukup banyak	<ul style="list-style-type: none">) Tingginya tingkat kemiskinan
2	Belum memadainya sarana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap sarana dan prasarana masih rendah/ sulit	<ul style="list-style-type: none">) Belum adanya regulasi yang mendukung ketersediaan sarpras untuk penyandang disabilitas) Rendahnya pengetahuan atau kesadaran untuk menyediakan akses terhadap penyandang disabilitas) Kurangnya ketersediaan pendamping / pekerja sosial
3	Meningkatnya permasalahan sosial	Tingginya kasus tuna sosial	<ul style="list-style-type: none">) Kemiskinan) Masih rendahnya pemberdayaan pemuda

Sumber: Hasil Analisis, 2018



7. Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan pokok bidang tenaga kerja yaitu: (1) Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Menurunnya daya serap tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN
- 2) Adanya *missmatch* tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia
- 3) Rendahnya *entrepreneurship*

Tabel 0.7 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Tenaga Kerja

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja	Menurunnya daya serap tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN) Rendahnya kualitas tenaga kerja) Belum efektifnya sertifikasi tenaga kerja) Kurangnya kemampuan masyarakat untuk berwirausaha
		Adanya <i>missmatch</i> tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia	
		Rendahnya <i>entrepreneurship</i>	

Sumber: Hasil Analisis, 2018

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pokok bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu: (1) Tingginya kasus KDRT dan *human trafficking*. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Belum optimalnya pelaporan kekerasan
- 2) Banyak penyalur tenaga kerja tidak resmi
- 3) Adanya keterbatasan ekonomi

Tabel 0.8 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya kasus KDRT dan <i>human trafficking</i>	Belum optimalnya pelaporan kekerasan) Belum optimalnya sosialisasi mengenai pentingnya melaporkan kekerasan) Karakteristik masyarakat yang cenderung malu untuk melaporkan kekerasan
		Banyak penyalur tenaga kerja tidak resmi	
		Adanya keterbatasan ekonomi	

Sumber: Hasil Analisis, 2018

9. Bidang Pangan

Permasalahan pokok bidang pangan yaitu: (1) Belum memasyarakatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang; (2) Belum terjaganya keamanan dan ketahanan pangan. Adapun beberapa masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Masih rendahnya pengembangan dan konsumsi sumber protein hewani
- 2) Skor PPH belum memenuhi nilai ideal
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sesuai potensi daerah
- 4) Penggunaan pestisida, formalin, dan boraks pada kelompok pangan segar masih tinggi
- 5) Masih terdapat daerah rawan pangan atau rawan daya beli



Tabel 0.9 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum memasyarakatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang	Masih rendahnya pengembangan dan konsumsi sumber protein hewani) Kurangnya ketertarikan anak-anak terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang
		Skor PPH belum memenuhi nilai ideal	
		Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sesuai potensi daerah) Rendahnya permintaan terhadap makanan lokal
2	Belum terjaganya keamanan dan ketahanan pangan	Penggunaan pestisida, formalin, dan boraks pada kelompok pangan segar masih tinggi	
		Masih terdapat daerah rawan pangan atau rawan daya beli	

Sumber: Hasil Analisis, 2018

10. Bidang Pertanian

Permasalahan pokok bidang pertanian yaitu: (1) Belum optimalnya pengelolaan pertanian. Adapun beberapa masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Terdapat kendala dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
- 2) Belum semua kegiatan memiliki dokumen perencanaan pengadaan tanah yang memadai

Tabel 0.10 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengelolaan pertanian	Terdapat kendala dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan) Belum adanya database pertanian yang lengkap dan akurat) Adanya ketidakjelasan kepemilikan tanah
		Belum semua kegiatan memiliki dokumen perencanaan pengadaan tanah yang memadai) Proses legalitas dan administrasi rumit) Lemahnya intervensi kebijakan

Sumber: Hasil Analisis, 2018

11. Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan pokok bidang lingkungan hidup yaitu: (1) Adanya degradasi lingkungan / penurunan kualitas lingkungan; (2) Lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan (3) Belum termanfaatkannya limbah sebagai EBT secara maksimal. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Belum optimalnya pelestarian keanekaragaman hayati
- 2) Adanya penurunan kuantitas dan kualitas air bersih
- 3) Pengolahan limbah belum optimal
- 4) Pengelolaan lingkungan pada industri belum optimal
- 5) Instalasi pengolahan limbah di rumah tangga dan industri masih rendah
- 6) Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan energi baru terbarukan
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan limbah menjadi EBT

Tabel 0.11 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Lingkungan Hidup

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1		Belum optimalnya pelestarian keanekaragaman hayati) Adanya alih fungsi lahan) Adanya perubahan pola tanam



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Adanya degradasi lingkungan/ penurunan kualitas lingkungan	Adanya penurunan kuantitas dan kualitas air bersih	<ul style="list-style-type: none"> J Adanya kerusakan hutan dan lahan J Berkurangnya tutupan lahan
2	Lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pengolahan limbah belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> J Kurangnya sarana prasarana pengolahan limbah J Masih rendahnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat J Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengolah limbah
		Pengelolaan lingkungan pada industri belum optimalnya	<ul style="list-style-type: none"> J Belum memadainya pengaturan industri dalam penanganan limbah J Lemahnya penegakan hukum untuk pengendalian pencemaran
		Instalasi pengolahan limbah di rumah tangga dan industri masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> J Adanya keterbatasan lahan untuk menyediakan IPAL J Belum efektifnya regulasi yang mewajibkan penyediaan IPAL domestik
3	Belum termanfaatkannya limbah sebagai EBT secara maksimal	Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan energi baru terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> J Belum optimalnya sosialisasi pemanfaatan limbah sebagai EBT J Kurangnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi pengolah limbah
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan limbah menjadi EBT	<ul style="list-style-type: none"> J Terbatasnya ketersediaan teknologi pengolahan limbah

Sumber: Hasil Analisis, 2018

12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pokok bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu: (1) Rendahnya kesadaran untuk tertib administrasi; dan (2) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat tertib administrasi
- 2) Masih sulitnya akses bagi masyarakat di wilayah terpencil

Tabel 0.12 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kesadaran untuk tertib administrasi	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat tertib administrasi	<ul style="list-style-type: none"> J Belum optimalnya sosialisasi mengenai manfaat tertib administrasi
2	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Masih sulitnya akses bagi masyarakat di wilayah terpencil	<ul style="list-style-type: none"> J Belum adanya UPT yang menjangkau seluruh wilayah J Belum optimalnya penggunaan admindukcapil digital / online J Kurangnya SDM admin

Sumber: Hasil Analisis, 2018



13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pokok bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu: (1) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan; (2) Belum optimalnya kemandirian desa. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Rendahnya keterterarikan masyarakat terhadap konsep pengembangan desa, lebih tertarik pada teknis
- 2) Rendahnya kualitas perencanaan pada tingkat desa

Tabel 0.13 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan	Lebih tertarik pada teknis dibanding konsep) Kurangnya informasi
2	Belum optimalnya kemandirian desa	Rendahnya kualitas perencanaan pada tingkat desa) Rendahnya komitmen pemerintah desa dalam peningkatan sumber daya aparatur desa

Sumber: Hasil Analisis, 2018

14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pokok bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu: (1) Pengendalian penduduk belum optimal. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Masih tingginya angka [eserta KB yang DO (8,05%)
- 2) Tingginya pernikahan anak (>20 tahun)

Tabel 0.14 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengendalian penduduk belum optimal (<i>LPP Kab. Bandung > LPP Prov Jawa Barat dan Indonesia</i>)	Masih tingginya angka peserta KB yang DO (8,05%) – seharusnya di bawah 5%) Keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi belum terus menerus) Adanya preferensi masyarakat untuk menggunakan jenis KB tertentu) Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan kontrasepsi
		Tingginya sebaran pernikahan anak (<20 tahun)) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang usia nikah ideal) Adanya dorongan kebutuhan ekonomi

Sumber: Hasil Analisis, 2018

15. Bidang Perhubungan

Permasalahan pokok bidang perhubungan yaitu: (1) Tingkat pelayanan jalan cukup rendah (LoS); (2) Rendahnya penggunaan kendaraan umum; dan (3) Belum optimalnya sarpras lalu lintas dan kendaraan bermotor. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Luas jalan dari tahun 2013 tidak bertambah dengan *road density* 5,4%
- 2) Adanya peningkatan jumlah perjalanan dengan *trip rate* >3
- 3) Terdapat beberapa ruas jalan yang memiliki VCR > 0,6
- 4) Indeks aksesibilitas rendah
- 5) Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor



- 6) Rendahnya kualitas layanan angkutan umum
- 7) Kurangnya ketersediaan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- 8) Belum memadainya ketersediaan ruang operasional terminal (kapasitasnya baru 53%)

Tabel 0.15 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perhubungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingkat pelayanan jalan cukup rendah (LoS)	Luas jalan dari tahun 2013 tidak bertambah dengan <i>road density</i> 5,4%	<ul style="list-style-type: none">) Adanya perubahan guna lahan yang berdampak pada bangkitan dan tarikan lalu lintas) Pembangunan jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan yang ada di jalan) Adanya kemudahan dalam mendapatkan kendaraan pribadi) Luas jalan kecil, volume lalu lintas tinggi
		Adanya peningkatan jumlah perjalanan dengan trip rate >3	
		Terdapat beberapa ruas jalan yang memiliki VCR > 0,6	
		Indeks aksesibilitas rendah	
2	Rendahnya penggunaan kendaraan umum	Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none">) Adanya kemudahan dalam mendapatkan kendaraan pribadi) Jumlah kendaraan umum terbatas yang berdampak pada peningkatan waktu tunggu) Rute kendaraan umum tidak menjangkau semua daerah
		Rendahnya kualitas layanan angkutan umum	
3	Belum optimalnya sarpras lalu lintas dan kendaraan bermotor	Kurangnya ketersediaan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none">) Adanya keterbatasan lahan dan kendala dalam pembebasan lahan
		Belum memadainya ketersediaan ruang operasional terminal (kapasitasnya baru 53%)	

Sumber: Hasil Analisis, 2018

16. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pokok bidang komunikasi dan informatika yaitu: (1) Belum optimalnya peran TIK dalam mendukung pelayanan publik; (2) Belum memadainya infrastruktur telekomunikasi. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Belum memadainya integrasi aplikasi penunjang pelayanan pemerintah
- 2) Terdapat beberapa kecamatan yang belum terakses jaringan internet

Tabel 0.16 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya peran TIK dalam mendukung pelayanan publik	Belum memadainya integrasi aplikasi penunjang pelayanan pemerintah	<ul style="list-style-type: none">) Belum optimalnya regulasi terkait pedoman dan kriteria untuk kesamaan format data) Rendahnya kesadaran perangkat daerah terkait fungsi



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kominfo sebagai integrator data
2	Belum memadainya infrastruktur telekomunikasi	Terdapat beberapa kecamatan yang belum terakses jaringan internet) Adanya kendala geografis dalam pemasangan infrastruktur

Sumber: Hasil Analisis, 2018

17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pokok bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yaitu: (1) Belum optimalnya peran koperasi sebagai lembaga ekonomi produktif; (2) Rendahnya kapasitas UKM sebagai penggerak ekonomi kemasyarakatan. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan
- 2) Masih banyak koperasi yang kualitas/ kinerjanya rendah
- 3) Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk yang dihasilkan
- 4) Masih minimnya produk – produk yang terstandarisasi
- 5) Kecilnya cakupan pemasaran produk

Tabel 0.17 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya peran koperasi sebagai lembaga ekonomi produktif	Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan) Rendahnya preferensi masyarakat untuk menggunakan koperasi (lebih memilih bank)) Banyak bermunculan kompetitor yang mengatasnamakan koperasi (bank keliling)) Kurangnya pemahaman anggota mengenai koperasi
		Masih banyak koperasi yang kualitas/ kinerjanya rendah) Belum optimalnya manajerial dan kelembagaan pengurus koperasi) Masih kurangnya jumlah penyuluh koperasi) Belum beragamnya aktivitas koperasi (biasanya hanya memiliki satu aktivitas yaitu simpan pinjam)) Rendahnya inovasi yang dilakukan oleh koperasi
2	Rendahnya kapasitas UKM sebagai penggerak ekonomi kemasyarakatan	Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk yang dihasilkan) Kurangnya keterampilan dan keahlian) Rendahnya pendidikan dan kreativitas
		Masih minimnya produk-produk yang terstandarisasi) Adanya <i>overlapping</i> kewenangan untuk standarisasi
		Kecilnya cakupan pemasaran produk) Lemahnya kemampuan pelaku usaha untuk mengakses pasar) Masih minimnya produksi sehingga tidak mampu menangkap <i>demand</i> pasar

Sumber: Hasil Analisis, 2018



18. Bidang Penanaman Modal

Permasalahan pokok bidang penanaman modal yaitu: (1) Belum optimalnya daya tarik investasi. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Belum optimalnya penggalian potensi investasi

Tabel 0.18 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Penanaman Modal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya daya tarik investasi	Belum optimalnya penggalian potensi investasi	<ul style="list-style-type: none">) Belum terpetakannya produk unggulan yang spesifik dan kompetitif) Belum adanya tindak lanjut dan implementasi hasil kajian potensi investasi) Belum ada rencana induk pengembangan industri daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2018

19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pokok bidang kepemudaan dan olahraga yaitu: (1) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk berolahraga; dan (2) Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Belum meratanya fasilitas olahraga
- 2) Belum optimalnya peran organisasi olahraga
- 3) Belum optimalnya peran organisasi dan wadah kepemudaan

Tabel 0.19 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti olahraga berprestasi	<ul style="list-style-type: none">) Belum meratanya fasilitas olahraga) Belum optimalnya peran organisasi olahraga 	
2	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya peran organisasi dan wadah kepemudaan) Belum adanya manajerial untuk mengurus peran dan fungsi organisasi

Sumber: Hasil Analisis, 2018

20. Bidang Statistik

Permasalahan pokok bidang statistik yaitu: (1) Belum optimalnya penyediaan data statistik yang akurat dan bersinergis. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan integrasi data statistik dalam rangka satu data

Tabel 0.20 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Statistik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyediaan data statistik yang akurat dan bersinergis	Belum optimalnya pengelolaan integrasi data statistik dalam rangka satu data	<ul style="list-style-type: none">) Kurang siapnya data yang akan disampaikan) Adanya kendala/ hambatan dalam melakukan pembagian data (<i>sharing data</i>)

Sumber: Hasil Analisis, 2018

21. Bidang Perpustakaan



Permasalahan pokok bidang perpustakaan yaitu: (1) Rendahnya minat baca. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Belum terbangunnya budaya baca di keluarga
- 2) Masih minimnya sarana prasarana untuk membaca

Tabel 0.21 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perpustakaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya minat baca	Belum terbangunnya budaya baca di keluarga) Globalisasi dan modernisasi) Tidak semua keluarga memiliki akses terhadap buku) Masih minimnya titik-titik untuk mengakses perpustakaan <i>online</i>) Belum meratanya sebaran perpustakaan
		Masih minimnya sarana prasarana untuk membaca	

Sumber: Hasil Analisis, 2018

22. Bidang Kearsipan

Permasalahan pokok bidang kearsipan yaitu: (1) Belum tertatanya pengelolaan arsip di masyarakat. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan arsip

Tabel 0.22 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kearsipan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum tertatanya pengelolaan arsip di masyarakat	Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan arsip) Belum optimalnya sosialisasi terkait pentingnya pengamanan arsip

Sumber: Hasil Analisis, 2018

23. Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pokok bidang kelautan dan perikanan yaitu: (1) Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan belum optimal; dan (2) Nilai tambah produksi perikanan belum maksimal. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Belum terampilnya SDM di bidang perikanan
- 2) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang budidaya dan pengolahan perikanan
- 3) Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk hasil perikanan

Tabel 0.23 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan belum optimal	Belum terampilnya SDM di bidang perikanan) Adanya keterbatasan sarana pelatihan) Kurangnya jumlah penyuluh perikanan) Degradasi lingkungan mempengaruhi ketersediaan air untuk budidaya) Belum optimalnya penggunaan teknologi untuk rekayasa produksi
		Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang budidaya dan pengolahan perikanan	
2	Nilai tambah produksi perikanan belum maksimal	Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk hasil perikanan) Rendahnya keahlian dan keterampilan tenaga kerja perikanan



Sumber: Hasil Analisis, 2018

24. Bidang Pariwisata

Permasalahan pokok bidang pariwisata yaitu: (1) Destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal; dan (2) Kualitas tenaga kerja di sektor pariwisata masih rendah. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Masih minimnya aksesibilitas dan akomodasi penunjang pariwisata
- 2) Belum optimalnya pemasaran pariwisata dan budaya secara terpadu
- 3) Lama tinggal wisatawan masih cukup rendah
- 4) Kurangnya koordinasi dan integrasi pengelola pariwisata oleh berbagai *stakeholder*
- 5) Kurangnya SDM lokal dengan keahlian di bidang pariwisata

Tabel 0.24 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pariwisata

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal	Masih minimnya aksesibilitas dan akomodasi penunjang pariwisata	<ul style="list-style-type: none">)] Adanya kemacetan di ruas-ruas jalan utama)] Terbatasnya ketersediaan angkutan umum yang melalui DTW)] Kurang bersaingnya harga akomodasi
		Belum optimalnya pemasaran pariwisata dan budaya secara terpadu)] Belum berkembangnya biro perjalanan wisata
		Lama tinggal wisatawan masih cukup rendah)] Belum beragamnya atraksi wisata
		Kurangnya koordinasi dan integrasi pengelolaan pariwisata oleh berbagai <i>stakeholder</i>	<ul style="list-style-type: none">)] Banyak pihak yang bersifat <i>segmental</i> dan <i>partial</i> dalam merencanakan dan mengembangkan DTW)] Kurangnya sosialisasi dan komitmen <i>stakeholder</i> dalam merealisasikan program pengembangan DTW
2	Kualitas tenaga kerja di sektor pariwisata masih rendah	Kurangnya SDM lokal dengan keahlian di bidang pariwisata)] Belum adanya lembaga pelatihan keprofesian pariwisata

Sumber: Hasil Analisis, 2018

25. Bidang Pertanian

Permasalahan pokok bidang pertanian yaitu: (1) Produktivitas pertanian masih rendah; (2) Masih rendahnya kualitas produksi pertanian; dan (3) Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Penurunan guna lahan pertanian
- 2) Berkurangnya jumlah petani
- 3) Belum memadainya infrastruktur penunjang pertanian
- 4) Rendahnya kapasitas budidaya pertanian
- 5) Pemenuhan bibit/benih pertanian unggul belum merata
- 6) Tingginya ancaman hama dan penyakit
- 7) Rantai pemasaran produk hasil pertanian masih panjang

Tabel 0.25 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pertanian



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Produktivitas pertanian masih rendah	Penurunan guna lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none">) Rendahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang) Tingginya laju pertumbuhan penduduk) Dijualnya lahan pertanian oleh para petani
		Berkurangnya jumlah petani	<ul style="list-style-type: none">) Rendahnya taraf hidup petani) Berkurangnya daya serap tenaga kerja sektor pertanian) Tidak adanya regenerasi petani
		Belum memadainya infrastruktur penunjang pertanian	<ul style="list-style-type: none">) Belum optimalnya fungsi jalan produksi yang menunjang distribusi) Terbatasnya sumber air untuk dimanfaatkan pertanian
2	Masih rendahnya kualitas produksi pertanian	Rendahnya kapasitas budidaya pertanian	<ul style="list-style-type: none">) Rendahnya pendidikan dan keahlian SDM di bidang pertanian
		Pemenuhan bibit/ benih pertanian unggul belum merata	<ul style="list-style-type: none">) Kurangnya informasi mengenai benih) Preferensi petani untuk memilih benih biasa bukan benih unggul
		Tingginya ancaman hama dan penyakit	<ul style="list-style-type: none">) Sistem budidaya masih tradisional dan belum menerapkan GAP) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang serangan hama dan penyakit) Adanya ketidaksesuaian guna lahan) Adanya perubahan iklim
3	Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian	Rantai pemasaran produk hasil pertanian masih panjang	<ul style="list-style-type: none">) Adanya ketergantungan petani pada pengumpul) Komoditas yang ditanam rentan terhadap fluktuasi harga) Lemahnya regulasi yang mengatur harga

Sumber: Hasil Analisis, 2018

26. Bidang Perdagangan

Permasalahan pokok bidang perdagangan yaitu: (1) Adanya penurunan jumlah nilai ekspor barang dan jasa. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Minimnya pengetahuan tentang prosedur ekspor bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
- 2) Belum adanya perluasan negara tujuan pemasaran produk ekspor
- 3) Adanya keterbatasan dalam memenuhi permintaan pasar global

Tabel 0.26 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perdagangan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Adanya penurunan jumlah nilai ekspor barang dan jasa	Minimnya pengetahuan tentang prosedur ekspor bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah	<ul style="list-style-type: none">) Tidak berjalannya pendampingan dari pelaku usaha) Belum adanya wadah kelembagaan badan usaha untuk ekspor
		Belum adanya perluasan negara tujuan pemasaran produk ekspor	<ul style="list-style-type: none">) Belum optimalnya regulasi untuk membuka peluang pasar dan ekspor baru) Adanya kesulitan dalam memenuhi spesifikasi dari negara-negara tujuan ekspor
		Adanya keterbatasan eksportir dalam memenuhi permintaan pasar global	<ul style="list-style-type: none">) Belum adanya aglomerasi dari pelaku usaha (lembaga atau komunitas) untuk memenuhi kebutuhan ekspor) Rendahnya kontinuitas dan kualitas produk yang akan diekspor) Kurangnya pemodal yang dimiliki eksportir

Sumber: Hasil Analisis, 2018

27. Bidang Perindustrian

Permasalahan pokok bidang perindustrian yaitu: (1) Rendahnya daya saing produk industri kecil dan mikro. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Akses pemasaran produk UKM masih terpaku pada pemasaran domestik
- 2) Kurangnya pasokan bahan baku
- 3) Belum menerapkan standarisasi produk, pendaftaran HKI, dan sistem mutu
- 4) Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja di bidang industri

Tabel 0.27 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perindustrian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya daya saing produk industri kecil dan mikro	Akses pemasaran produk IKM masih terpaku pada pemasaran domestik	<ul style="list-style-type: none">) Kurangnya promosi dan jejaring produk UKM) Belum ada lembaga yang mewadahi pengembangan IKM dan produk turunannya) Belum adanya regulasi pemasaran produk melalui e-commerce) Adanya keterbatasan IKM untuk memenuhi permintaan pasar global
		Kurangnya pasokan bahan baku	<ul style="list-style-type: none">) Tingginya harga bahan baku
		Belum menerapkan standarisasi produk, pendaftaran HKI, dan sistem mutu	<ul style="list-style-type: none">) Masih adanya tumpang tindih kewenangan untuk sertifikasi) Kurangnya dukungan dari pelaku IKM untuk melakukan sertifikasi
		Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja di bidang industri	<ul style="list-style-type: none">) Terbatasnya kemampuan dan keterampilan pelaku industri) Belum optimalnya peran lembaga pendidikan dalam



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			mempersiapkan tenaga kerja yang mendukung sektor industri

Sumber: Hasil Analisis, 2018

3.2 Isu Strategis

3.2.1 Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dapat juga dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Penetapan isu strategis pembangunan jangka panjang di Kabupaten Bandung dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Penetapan isu strategis jangka panjang Kabupaten Bandung diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya:

1. Permasalahan pembangunan Kabupaten Bandung
2. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Bandung
3. Isu strategis kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Bandung
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri atas:
 - a. Kebijakan pembangunan di Kabupaten Bandung yang antara lain bersumber dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Bandung
 - b. Isu strategis yang diangkat dari hasil fakta dan analisis terhadap gambaran umum dan kondisi daerah Kabupaten Bandung untuk kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah
 - c. Hasil evaluasi kinerja pembangunan yang belum dipenuhi oleh RPJPD sebelumnya

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal – hal sebelumnya serta mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Pemberdayaan masyarakat dan organisasi kepemudaan
3. Peningkatan kemanan publik dan kesejahteraan sosial
4. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
5. Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup
6. Pengendalian penataan ruang dan pertanahan
7. Pengendalian pertumbuhan penduduk
8. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
9. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
10. Peningkatan kualitas tenaga kerja berdaya saing global
11. Konsumsi dan produksi pangan berkelanjutan dan berkualitas
12. Pemerataan, pemenuhan, dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana
13. Ekonomi masyarakatan / ekonomi lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan
14. Peningkatan daya saing sektor ekonomi unggulan

Tabel 0.28 Keterkaitan Permasalahan Kabupaten Bandung dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung



MASALAH POKOK	ISU	
Masih tingginya pelanggaran Perda	Peningkatan keamanan publik dan kesejahteraan sosial	
Peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masih rendah		
Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana		Pemberdayaan masyarakat dan organisasi kepemudaan
Masih tingginya permasalahan sosial		
Rendahnya kesadaran untuk tertib administrasi		Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		
Belum optimalnya peran TIK dalam mendukung pelayanan publik		
Belum tertatanya pengelolaan arsip di masyarakat		
Adanya peningkatan alih fungsi lahan	Pengendalian penataan ruang dan pertanahan	
Belum optimalnya pengelolaan pertanahan		
Adanya degradasi lingkungan/ penurunan kualitas lingkungan	Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup	
Lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan		
Belum termanfaatkannya limbah sebagai EBT secara maksimal		
Pengendalian penduduk belum optimal	Pengendalian pertumbuhan penduduk	
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Peningkatan kualitas hidup masyarakat & penanggulangan kemiskinan	
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik		
Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat		
Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan		
Rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial		
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan		
Rendahnya minat baca		
Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk berolahraga	Konsumsi dan produksi pangan berkelanjutan dan berkualitas	
Belum memasyarakatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang		
Belum terjaganya keamanan dan ketahanan pangan		
Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja berdaya saing global	
Kualitas tenaga kerja di sektor pariwisata masih rendah	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	
Tingginya kasus KDRT dan <i>human trafficking</i>		
Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Pemerataan, pemenuhan, dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana	
Kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan belum merata		
Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar belum memadai		
Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan sesuai standar		
Belum tertatanya kawasan kumuh		
Belum memadainya sarana penanganana penyandang masalah kesejahteraan sosial		
Tingkat pelayanan jalan cukup rendah (LoS)		
Rendahnya penggunaan kendaraan umum		
Belum optimalnya sarpras lalu lintas dan kendaraan bermotor		
Belum memadainya infrastruktur telekomunikasi		
Belum optimalnya peran koperasi sebagai lembaga ekonomi produktif		Ekonomi kemasyarakatan yang berdaya saing dan berkelanjutan
Rendahnya kapasitas UKM sebagai penggerak ekonomi kemasyarakatan		



MASALAH POKOK	ISU
Belum optimalnya daya tarik investasi	Peningkatan daya saing sektor ekonomi unggulan
Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan belum optimal	
Nilai tambah produksi perikanan belum maksimal	
Destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal	
Produktivitas pertanian masih rendah	
Masih rendahnya kualitas produksi pertanian	
Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian	
Adanya penurunan jumlah nilai ekspor barang dan jasa	
Rendahnya daya saing produk industri kecil dan mikro	

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Setelah isu strategis teridentifikasi, selanjutnya dilakukan pembobotan kepada masing – masing isu untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan jangka panjang daerah. Pembobotan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria antara lain:

1. Dampak terhadap daerah dan masyarakat (20 poin)
2. Daya ungkit signifikan terhadap pembangunan daerah (20 poin)
3. Pengaruh terhadap sasaran pembangunan nasional (15 poin)
4. Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani (10 poin)
5. Tugas dan tanggung jawab Pemda (10 poin)

Berdasarkan kriteria tersebut, didapatkan 5 isu strategis yang paling prioritas yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan; pemenuhan; dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana, ekonomi kemasyarakatan/ ekonomi lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta peningkatan daya saing sektor ekonomi unggulan.

Tabel 0.29 Skoring Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah

No	Isu Strategis	Total Skor
1	Penanggulangan kemiskinan	75
2	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik	45
3	Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup	65
4	Pengendalian penataan ruang dan pertanahan	65
5	Peningkatan kualitas hidup masyarakat	75
6	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	55
7	Peningkatan kualitas tenaga kerja berdaya saing global	65
8	Pemerataan, pemenuhan, dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana	75
9	Ekonomi kemasyarakatan / ekonomi lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan	75
10	Peningkatan daya saing sektor ekonomi unggulan	75
11	Konsumsi dan produksi pangan berkelanjutan dan berkualitas	55
12	Pemberdayaan masyarakat dan organisasi kepemudaan	30
13	Peningkatan keamanan publik dan kesejahteraan sosial	40
14	Pengendalian pertumbuhan penduduk	50

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Selain hasil dari analisis kondisi dan gambaran umum terhadap permasalahan pembangunan Kabupaten Bandung, isu strategis dari dinamika internasional, nasional, maupun regional juga akan mempengaruhi pembangunan Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil telaahan terhadap beberapa kebijakan sebelumnya, didapatkan bahwa terdapat isu – isu strategis di tingkat internasional, nasional, maupun provinsi. Oleh karena itu, bagan di bawah ini



menunjukkan sinkronisasi isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung dengan isu strategis pembangunan jangka panjang yang juga sedang berkembang di dunia internasional, nasional, serta regional. Keterkaitan dan sinkronisasi isu strategis ini akan mempengaruhi pembangunan Kabupaten Bandung karena adanya keterkaitan dengan pembangunan pada tingkatan lainnya. Secara garis besar, isu – isu strategis pembangunan jangka panjang di tingkat internasional, nasional, provinsi, maupun kabupaten dapat dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) topik utama yang menjadi fokus pembangunan. Kesembilan topik tersebut antara lain terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana, lingkungan, ekonomi, kemiskinan, pangan, institusi dan pelayanan publik, komunitas dan pembangunan berkelanjutan, serta pengendalian penduduk. Adapun topik terkait pengendalian penduduk merupakan isu strategis di tingkat provinsi maupun Kabupaten Bandung mengingat banyaknya jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung.



Tabel 0.30 Sinkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Bandung

Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten
Kesehatan yang baik dan kesejahteraan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Peningkatan kualitas hidup masyarakat	Peningkatan kualitas hidup masyarakat
Pendidikan berkualitas	Mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (<i>knowledge-based society</i>)		Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Kesetaraan gender			Peningkatan kualitas tenaga kerja berdaya saing global
Air bersih dan sanitasi	Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi	Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur	Pemerataan, pemenuhan, dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana
Energi bersih dan terjangkau	Memenuhi pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan		
Mengurangi kesenjangan	Memeratakan pembangunan ke seluruh wilayah		
Industri, inovasi, dan infrastruktur	Memenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung		
Aksi terhadap iklim	Mewujudkan konservasi sumber daya air	Penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup	Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup
Kehidupan bawah laut	Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup		Pengendalian penataan ruang dan pertanahan
Kehidupan di darat	Memelihara kekayaan keanekaragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam		
Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak	Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	Pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam berimbang	Ekonomi kemasyarakatan / ekonomi lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan
	Membangun ekonomi kelautan secara terpadu		Peningkatan daya saing sektor ekonomi unggulan
Tanpa kemiskinan		Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Penanggulangan kemiskinan



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten
Tanpa kelaparan	Mempertahankan kemandirian pangan dan menyediakan instrumen jaminan pangan		Konsumsi dan produksi pangan berkelanjutan dan berkualitas
Konsumsi dan produksi bertanggung jawab			
Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian	Meningkatkan profesionalisme aparatur negara	Reformasi birokrasi dan modal sosial	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Keberlanjutan kota dan komunitas	Mewujudkan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang baik dan berkelanjutan		Pemberdayaan masyarakat dan organisasi kepemudaan
Kemitraan untuk mencapai tujuan			Peningkatan keamanan publik dan kesejahteraan sosial
		Pengendalian pertumbuhan penduduk dan persebarannya	Pengendalian pertumbuhan penduduk

Sumber: Hasil Analisis, 2018



4.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, namun suatu komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan. Visi Kabupaten Bandung dirumuskan, dibahas, dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu – isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan perwujudan visi. Hasil perumusan visi Kabupaten Bandung 2005-2025 adalah:

Tabel 0.1 Perumusan Visi

No	Perwujudan Visi	Pokok – pokok Visi
1	Repeh	Aman, damai, rukun, setia kawan, gotong royong
2	Rapih	Tertib, teratur, serasi, disiplin, taat hukum, keterbukaan, lingkungan terlaksana dan terpelihara
3	Kerta Raharja	Makmur, sejahtera, maju, mandiri, dan berdaya saing

Sumber: Lampiran Perda Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan mempedomani RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, maka visi Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 adalah:

“Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja Tahun 2025”

Pernyataan visi pembangunan Kabupaten Bandung di atas memiliki makna:

Tabel 0.2 Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan Visi
Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja Tahun 2025	Repeh, Aman, damai, rukun, setia kawan, gotong royong	Keadaan satu kondisi dimana tidak terjadi gangguan terhadap hak seseorang oleh individu, kelompok dan institusi, yaitu diantaranya kejahatan, kerusakan, dan regulasi
	Rapih, Tertib, teratur, serasi, disiplin, taat hukum,	Suatu keadaan dimana pemimpin, aparaturnya serta masyarakatnya mempunyai sifat soleh, jujur, dan amanah. Selain itu juga supremasi hukum dan disiplin ditegakkan, serta adanya



Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan Visi
	keterbukaan, lingkungan terlaksana dan terpelihara	keterbukaan informasi. Kondisi lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah, limbah dan polusi, berkurangnya dampak bencana alam, kondisi sumberdaya alam yang asri dan terjaga
	Kerta Raharja, Makmur, sejahtera, maju, mandiri, dan berdaya saing	Kondisi dimana masyarakat mudah mendapatkan bahan pokok dan terjangkau harganya. Semua kegiatan usaha berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan gratis untuk keluarga miskin sehingga masyarakat Kabupaten Bandung sehat jasmani dan rohani. Fasilitas perumahan yang tersedia dapat dijangkau dan mudah didapat, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi keluarga miskin menjadi program prioritas. Dalam bidang kebudayaan diharapkan Kabupaten Bandung menjadi pusat pengembangan kebudayaan religius dan kebudayaan Sunda

Sumber: Lampiran Perda Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025

4.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya atau pilihan jalan (*the chosen track*) yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu menyediakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan bagi seluruh stakeholder. Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan untuk membantu menggambarkan visi secara lebih jelas yang ingin dicapai dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam 4 tahap selama 20 tahun ke depan.

Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematis berupa pola perjalanan pemerintahan daerah dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif efisien dan terukur. Dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang daerah, harus mengacu pada permasalahan pokok. Proses perumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Bandung melalui proses seperti di bawah ini.

Tabel 0.3 Perumusan Misi RPJPD

MASALAH POKOK	MISI
Masih tingginya pelanggaran perda	Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib
Peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masih rendah	
Meningkatnya permasalahan sosial	
Belum optimalnya pengelolaan pertanahan	
Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	
Rendahnya kesadaran untuk tertib administrasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	



MASALAH POKOK	MISI	
Belum optimalnya peran TIK dalam mendukung pelayanan publik	Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan	
Belum tertatanya pengelolaan arsip di masyarakat		
Adanya peningkatan alih fungsi lahan		
Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana		
Adanya degradasi lingkungan/ penurunan kualitas lingkungan		
Lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan		
Belum termanfaatkannya limbah sebagai EBT secara maksimal		
Pengendalian penduduk belum optimal (<i>LPP Kab. Bandung > LPP Prov Jawa Barat dan Indonesia</i>)		
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik		
Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat		
Rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial		
Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja		
Tingginya kasus KDRT dan <i>human trafficking</i>		
Belum memasyarakatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang		
Belum terjaganya keamanan dan ketahanan pangan		
Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk berolahraga		
Rendahnya minat baca		
Kualitas tenaga kerja di sektor pariwisata masih rendah		
Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan	
Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan belum merata		
Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar belum memadai		
Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan sesuai standar		
Belum tertatanya kawasan kumuh		
Belum memadainya sarana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial		
Tingkat pelayanan jalan cukup rendah (LoS)		
Rendahnya penggunaan kendaraan umum		
Belum optimalnya sarpras lalu lintas dan kendaraan bermotor		
Belum memadainya infrastruktur telekomunikasi		
Belum optimalnya peran koperasi sebagai lembaga ekonomi produktif		Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing



MASALAH POKOK	MISI
Rendahnya kapasitas UKM sebagai penggerak ekonomi kemasyarakatan	
Belum optimalnya daya tarik investasi	
Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan belum optimal	
Nilai tambah produksi perikanan belum maksimal	
Destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal	
Produktivitas pertanian rendah	
Menurunnya kualitas produksi pertanian	
Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian	
Adanya penurunan jumlah nilai ekspor barang dan jasa	
Rendahnya daya saing produk industri kecil dan mikro	

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung melalui 6 (enam) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib

Untuk pelaksanaan pembangunan yang terarah dan dapat mencapai tujuan diperlukan suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan serta dapat dirasakan hasil pembangunan. Kondisi keamanan yang kondusif dan ketentraman masyarakat yang terjaga (tidak terjadi kerusuhan) adalah situasi dan kondisi yang diperlukan untuk dilaksanakannya pembangunan tersebut. Kondisi yang aman, tertib dan tenteram akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen dari seluruh stakeholders pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Dengan demikian, pembangunan diarahkan untuk memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat antara lain dengan mencegah tindak kejahatan, kerusuhan, mengurangi tindak kriminalitas, serta menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat.

Budaya silih asah, silih asih dan silih asuh, yang merupakan nilai budaya lokal, serta masih adanya budaya paguyuban, dan lembaga-lembaga yang menangani masalah-masalah sosial dan keamanan swakarsa, serta adanya budaya siskamling diharapkan mampu terjaganya kondisi keamanan dan ketentraman di masyarakat Kabupaten Bandung.

Salah satu ciri masyarakat Indonesia adalah mempunyai rasa kegotong-royongan dan toleransi yang tinggi, sifat yang telah tertanam di masyarakat Indonesia sejak dahulu kala dan masih tertanam sampai sekarang. Sifat ini telah banyak memberikan nilai positif bagi pelaksanaan pembangunan. Tetapi akibat dari tingginya arus globalisasi yang membawa dampak negatif antara lain sifat individualistik sehingga mengakibatkan menurunnya sifat kesetiakawanan dan kegotongroyongan yang telah ada serta tertanam di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Bandung. Untuk itu salah satu tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung diarahkan pada upaya untuk memelihara dan mengembangkan kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan masyarakat. Selain itu, penguatan peran BAZ serta adanya regulasi zakat diharapkan dapat memelihara dan mengembangkan kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan masyarakat.

Budaya tertib dan disiplin merupakan persyaratan yang penting untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Masih banyaknya pelanggaran hukum dan peraturan kemasyarakatan adalah indikasi bahwa masih rendahnya rasa disiplin dan ketertiban di masyarakat. Keteladanan dari aparaturnya dan tokoh masyarakat adalah sesuatu



yang perlu dikembangkan dalam penegakkan hukum dan aturan yang berlaku. Untuk waktu jangka panjang diharapkan rasa tertib dan budaya disiplin dapat melekat dan selalu dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang aman, tertib, tentram dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh stakeholders pembangunan.

Hukum merupakan aturan yang mengatur segala aspek kemasyarakatan agar kehidupan manusia berjalan dengan baik dan tidak saling mengganggu hak individu, kelompok tertentu dan institusi. Misi ini diarahkan melalui penguatan instansi dan badan penegak hukum. Seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Selain itu inspektorat daerah sebagai instansi pengawasan pemerintah harus lebih difungsikan.

Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang bersifat konstruktif antara tiga domain utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang memiliki karakteristik efisien, efektif, partisipatif berlandaskan hukum, adil demokratis, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, akuntabel dan memiliki visi strategik.

Misi kedua didasarkan atas kondisi objektif bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah kepada masyarakat belum optimal sehingga menyebabkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Misi 3: Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat di mana kegiatan pembangunan dilaksanakan sehingga lingkungan memerlukan perhatian terutama untuk pembangunan jangka panjang dimana dampak dan akibat pembangunan terakumulasi. Konsekuensi logis dari dilaksanakannya pembangunan adalah penggunaan segala sumber daya termasuk sumber daya alam dan adanya dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan. Tetapi pelaksanaan pembangunan tidak harus mengesampingkan dan mengorbankan kondisi lingkungan. Sehingga diharapkan dalam jangka panjang akan tetap terjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan dan masih dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjaga dan memulihkan kondisi lingkungan yang bersih, bebas dari segala polusi, sampah dan limbah yang menurunkan kondisi, kualitas dan daya dukung lingkungan, melakukan mitigasi bencana alam yang mungkin terjadi, menjaga kondisi dan keasrian sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat luas.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan religius diindikasikan dari aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli, yang merupakan tiga indikator dalam IPM. Namun dalam kaitan dengan misi Kabupaten Bandung bukan sekedar peningkatan IPM saja, tetapi juga menciptakan SDM handal yang religius dicerminkan dari ketaatan terhadap ajaran agama, bermoral, beretika, dan berperilaku baik yang harus menjadi karakter dan identitas mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung. Hal ini, diharapkan menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

Dengan adanya tambahan religius, maka SDM yang handal tersebut akan memberikan manfaat bagi dirinya, orang lain, (keluarga dan masyarakat) serta kehidupan



sosial melalui berbagai kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap upaya pembangunan wilayah.

Misi 5: Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan

Pembangunan wilayah merupakan pembangunan yang bersifat holistik (menyeluruh). Ada tiga aspek utama terkait pembangunan wilayah yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah secara menyeluruh tetapi bukan merupakan satu-satunya keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pembangunan kesejahteraan sosial akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semu, artinya ada kesenjangan di tengah masyarakat.

Misi kelima merupakan penjabaran dari visi Kerta Raharja yang memfokuskan pada pertumbuhan wilayah di mana masyarakat mempunyai kesamaan terhadap semua aksesibilitas yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan tidak hanya diprioritaskan pada wilayah yang secara geografis diuntungkan oleh kedekatannya dengan pusat pertumbuhan nasional (Kota Bandung) tetapi juga pada wilayah-wilayah tertinggal, kawasan-kawasan pembangunan yang strategis, pengembangan wilayah pesisir.

Misi 6: Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing

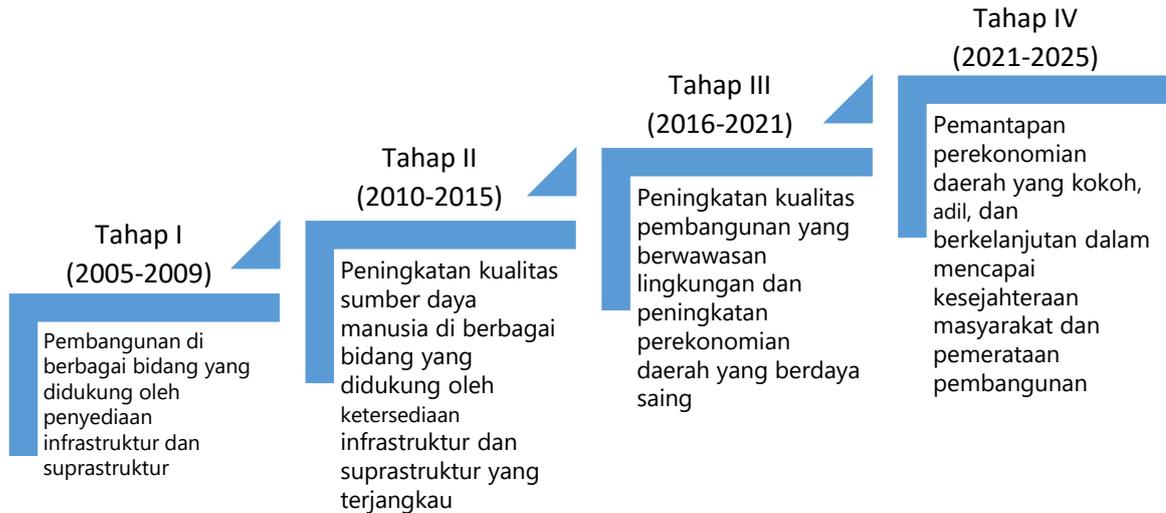
Kabupaten Bandung memiliki potensi di bidang pertanian, pariwisata, maupun industri dan bila seluruh potensi sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya lokal melalui lembaga ekonomi produktif (Koperasi, Bank Desa, BMT dan BUMDES dengan pola syariah maupun konvensional), pemanfaatan potensi lokal wilayah perdesaan (OVOP), dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Misi keenam ini merupakan penjabaran dari visi Kerta Raharja yang memfokuskan pada pengembangan agribisnis, industri manufaktur, pariwisata, jasa, perdagangan, investasi daerah, pengurangan pengangguran penduduk, pengurangan kemiskinan dan penyediaan infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Dari fokus tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada potensi lokal.



5.1 Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan secara bertahap. Arah kebijakan juga memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah membagi tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke dalam empat tahapan lima tahunan. Tahapan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan pada tiap tahapan pembangunan berbeda, namun tetap memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu tahapan ke tahapan lainnya. Pada lima tahun pertama, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung ditekankan pada penyediaan infrastruktur dan suprastruktur untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang. Pada tahap kedua, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan suprastruktur yang terjangkau. Pada tahap ketiga, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung ditekankan pada peningkatan pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan yang didukung oleh SDM berkualitas di berbagai bidang. Pada lima tahun terakhir, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung ditekankan pada pemantapan perekonomian yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Gambar 0.1 Tema Pembangunan Dua Puluh Tahunan

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan daerah selama 20 (dua puluh) tahun. Arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Bandung dibagi ke dalam empat periode RPJMD yaitu periode I (2005-2009), periode II (2010-2015), periode III (2016-2021), periode IV (2021-2025).

5.1.1 Periode I (2005-2009)

Periode I diarahkan untuk pembangunan di berbagai bidang yang didukung oleh penyediaan infrastruktur dan suprastruktur.

Kondisi Kabupaten Bandung yang aman dan tertib diawali dengan meningkatnya rasio linmas dengan jumlah penduduk untuk melindungi penduduk dari segala macam gangguan dan ancaman. Peningkatan keamanan juga ditandai dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menanggulangi serta mengantisipasi berbagai bencana yang terjadi di Kabupaten Bandung. Organisasi – organisasi dan lembaga kepemudaan mulai diinisiasi pembentukannya dalam rangka memberdayakan masyarakat serta organisasi kepemudaan untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi, diarahkan pada optimalisasi penyediaan pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas kualitas kinerja aparatur yang handal dalam menggunakan TIK. Sementara arahan untuk pelayanan publik berupa semakin baiknya sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian waktu dan biaya.

Struktur perekonomian mulai tumbuh yang dipacu oleh tersedianya infrastruktur – infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Kegiatan pertanian didukung oleh tersedianya infrastruktur penunjang dan fasilitas pendukung yang mampu meningkatkan produksi maupun distribusi pertanian. Pengembangan pariwisata ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata yang meliputi akses dan akomodasi. Ketersediaan infrastruktur penunjang dan fasilitas pendukung juga diarahkan pada pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa. Tersedianya fasilitas penunjang tersebut juga diarahkan agar dapat mendukung terciptanya IKM dan UKM di Kabupaten Bandung sebagai salah satu bentuk kegiatan perekonomian lokal.



Pengendalian dan pelestarian lingkungan mulai diarahkan dengan ditetapkannya regulasi untuk mengurangi dampak lingkungan. Resiko bencana sudah mulai berkurang dengan optimalnya sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang sudah terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan. Pembentukan sistem untuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi arahan dalam mengendalikan penataan ruang. Penyediaan ruang terbuka hijau diarahkan pada peningkatan alokasi lahan untuk ruang terbuka hijau. Pengendalian pertumbuhan penduduk ditandai dengan tersedianya dan tersosialisasikannya alat pengendali kelahiran bagi masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan melalui terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan formal dan non formal. Selain itu, terwujud juga pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan khususnya terhadap masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kesehatan berfokus pada meningkatnya penyuluhan tentang gizi dan imunisasi. Pembangunan manusia diarahkan juga pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin baik. Peningkatan kualitas tenaga kerja ditandai dengan meningkatnya tenaga kerja berkualitas dengan minimal lulusan pendidikan menengah pertama. Kebutuhan pangan pokok mulai terpenuhi. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rata – rata pendapatan masyarakat merupakan capaian untuk menghasilkan masyarakat Kabupaten Bandung yang sejahtera.

Pembangunan diarahkan pada pemerataan dan berkeadilan. Adanya peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan menengah. Pelayanan kesehatan sudah semakin meningkat ditandai dengan meningkatnya akses pelayanan kesehatan khusus bagi penduduk miskin. Dari sarana transportasi dan perhubungan, terpenuhinya pembangunan jalan, jembatan, serta simpul – simpul transportasi. Adanya pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta pengelolaan air limbah. Terwujudnya kebersihan lingkungan ditandai dengan terpenuhinya sarana dan prasarana penunjangnya. Pembangunan perdesaan difokuskan pada tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat desa.

5.1.2 Periode II (2010-2015)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan dari Periode I, Periode II ditujukan untuk lebih memantapkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan suprastruktur yang terjangkau.

Kondisi aman dan tertib semakin meningkat ditandai dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan aparat keamanan untuk melindungi penduduk dari segala macam gangguan dan ancaman. Peran BPBD pun semakin optimal dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Organisasi – organisasi dan lembaga kepemudaan sudah terbentuk dengan adanya kegiatan yang aktif. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, diarahkan pada optimalisasi penyediaan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas kinerja aparaturnya yang handal dalam menggunakan TIK. Sistem pelayanan publik semakin sederhana, transparan, dan memiliki kepastian waktu dan biaya yang ditandai dengan berkembangnya outlet pelayanan publik.

Struktur perekonomian mulai tumbuh yang dipacu oleh tersedianya infrastruktur – infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat, diarahkan juga pada adanya kemudahan pembentukan lembaga perekonomian masyarakat sebagai wadah dalam pengembangan ekonomi lokal. Kegiatan pertanian ditunjang dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan pertanian. Peningkatan juga terjadi pada pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam mengakses pasar lokal maupun global. Seiring dengan hal tersebut, sudah mulai munculnya IKM dan UKM yang didorong dengan



pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha. Pada sektor pariwisata meningkatnya infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata telah disertai dengan optimalnya pengelolaan daerah wisata.

Daya dukung dan kualitas lingkungan diarahkan pada penanganan terhadap dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan ekonomi. Resiko bencana sudah mulai berkurang dengan optimalnya sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang sudah terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan. Pengendalian penataan ruang sudah meningkat ditandai dengan tersosialisasikannya sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyediaan ruang terbuka hijau diarahkan pada peningkatan alokasi lahan untuk ruang terbuka hijau. Pengendalian pertumbuhan penduduk ditandai dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pengendalian kelahiran dan penggunaan alat kontrasepsi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus dalam pembangunan tahap ini ditandai dengan terciptanya pendidikan formal dan non formal yang mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja. Kualitas kesehatan semakin meningkat ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya hidup sehat. Selain itu, peningkatan derajat kesehatan juga diarahkan pada penyelesaian masalah gizi buruk dan penggalakan imunisasi. Pembangunan manusia diarahkan juga pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin baik. Peningkatan kualitas tenaga kerja ditandai dengan meningkatnya tenaga kerja berkualitas dengan minimal lulusan pendidikan menengah atas. Adanya pemenuhan penyediaan kebutuhan pangan pokok khususnya bagi penduduk miskin dan pemenuhan panganekaragaman pangan. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rata – rata pendapatan masyarakat merupakan capaian untuk menghasilkan masyarakat Kabupaten Bandung yang sejahtera.

Pemerataan pembangunan yang berkeadilan ditandai dengan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan menengah. Selain itu terdapat juga peningkatan akses pelayanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan juga dilakukan melalui pembangunan jalan baru, pengembangan terminal, serta pengembangan sistem angkutan massal. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan sampah diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar pelayanan minimal. Hal ini juga sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih. Terbangunnya fasilitas pengelolaan air limbah terpadu yang diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara fasilitas. Sementara itu, pengembangan kawasan perdesaan difokuskan pada pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perdesaan dengan adanya kemudahan akses untuk menjangkau berbagai sarana dan prasarana dasar dan penunjang di perdesaan.

5.1.3 Periode III (2016-2021)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan dari Periode II, Periode III ditujukan untuk lebih memantapkan pada peningkatan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing.

Kondisi aman dan tertib sudah tercipta ditandai dengan kokohnya peran lembaga politik dan hukum yang mampu melindungi masyarakat dari segala macam ancaman ditandai dengan adanya kerjasama dengan unsur vertikal. Hal itu sejalan dengan tersedianya infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung upaya mitigasi bencana serta dikembangkannya sistem informasi kebencanaan dalam rangka menciptakan masyarakat yang tanggap bencana. Organisasi – organisasi dan lembaga kepemudaan untuk meningkatkan keamanan publik dan mengawal pembangunan sudah mulai berkembang dan kegiatannya berdampak positif terhadap pembangunan. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik,



diarahkan pada optimalisasi penyediaan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas kinerja aparaturnya yang handal dalam menggunakan dan menfaatkan TIK. Waktu pelayanan administrasi semakin singkat dengan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi.

Struktur perekonomian mulai tumbuh dan berdaya saing yang ditandai dengan munculnya berbagai spesialisasi atau klaster – klaster pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah. Klaster – klaster perekonomian yang tumbuh berbasiskan pada sumber daya lokal yang dikembangkan secara partisipatif oleh masyarakat yang bekerjasama dengan aktor – aktor lain baik pemerintah maupun swasta. Masyarakat sebagai pelaku utama penggerak perekonomian sudah memiliki keahlian yang terspesialisasi dalam mengembangkan sektor – sektor ekonomi. Sektor pertanian diarahkan untuk peningkatan hasil produksi dari segi kualitas dan mengedepankan ciri khas produk. IKM dan UKM yang menunjang kegiatan produksi mulai berkembang yang didukung oleh akses pemodal dan inkubasi dalam rangka menciptakan IKM dan UKM yang mandiri dan berdaya saing. Sektor pariwisata diarahkan untuk eksplorasi dan pengembangan potensi – potensi wisata baru. Sejalan dengan berkembangnya sektor – sektor ekonomi tersebut, dalam rangka meningkatkan daya saing, kebijakan pemasaran diarahkan pada perluasan pasar untuk produk – produk unggulan yang ditandai dengan tersedianya regulasi yang mendorong peluang pasar dan ekspor. Dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat, diarahkan juga pada pengembangan dan penguatan lembaga perekonomian masyarakat agar kinerjanya lebih efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pengembangan ekonomi.

Daya dukung dan kualitas lingkungan diarahkan pada penetralisir dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan – kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas lingkungan ditandai dengan adanya peningkatan penanganan untuk menetralkan dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi. Resiko bencana sudah mulai berkurang dengan optimalnya sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang sudah terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan. Penyimpangan pemanfaatan ruang semakin diminimalisir melalui penguatan sistem dan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pembangunan berwawasan lingkungan juga ditandai dengan meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau dengan mengalokasikan lahan untuk peningkatan akses terhadap RTH. Pengendalian pertumbuhan penduduk alami maupun migrasi mulai menurun.

Kualitas sumber daya manusia semakin ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal yang mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja. Akses dan pelayanan kesehatan masyarakat semakin ditingkatkan untuk mendukung penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas kesehatan berfokus pada penyelesaian masalah gizi buruk dan pengurangan kasus *stunting*. Pembangunan manusia diarahkan juga pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin baik. Peningkatan kualitas tenaga kerja ditandai dengan meningkatnya tenaga kerja berkualitas dengan minimal lulusan sekolah menengah dan memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Keahlian dan keterampilan tenaga kerja sudah terspesialisasi dengan kualitas spesifik untuk suatu pasar tertentu. Kebutuhan pangan lokal yang beragam, bergizi, dan seimbang mulai terpenuhi. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rata – rata pendapatan masyarakat merupakan capaian untuk menghasilkan masyarakat Kabupaten Bandung yang sejahtera.

Pembangunan diarahkan pada pemerataan dan berkeadilan. Ketersediaan rumah layak huni yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang semakin meningkat didukung dengan adanya kemudahan pembiayaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar menurunkan lautan permukiman kumuh. Adanya inisiasi pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi baru terbarukan. Adanya peningkatan akses pelayanan kesehatan yang ditandai dengan tercukupinya sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Akses masyarakat



terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi semakin meningkat. Konektivitas dan akses antar wilayah diperbaiki melalui pembangunan jalan baru, pengembangan terminal, serta pengembangan sistem angkutan massal. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara terpadu sudah terpenuhi. Terbangunnya fasilitas pengelolaan limbah domestik dan limbah industri yang terpadu dan ramah lingkungan. Dilakukan juga pengembangan drainase berwawasan lingkungan (ecodrain) di kawasan strategis perkotaan serta kawasan perumahan dan permukiman. Pengelolaan irigasi sudah terpadu dalam rangka meningkatkan cakupan ketersediaan air untuk kawasan pertanian. Sementara itu, pengembangan perdesaan diarahkan pada desa mandiri yang ditandai dengan peningkatan keberdayaan masyarakat desa. Sejalan dengan pemerataan pembangunan, mulai diinisiasi juga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dan manula.

5.1.4 Periode IV (2021-2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan dari Periode III, Periode IV ditekankan pada pementapan perekonomian yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Keamanan publik telah tercipta dengan semakin kokohnya peran lembaga politik dan hukum yang mampu melindungi masyarakat dari segala macam ancaman. Gangguan dan ancaman tersebut sudah dapat dideteksi secara dini. Organisasi – organisasi atau lembaga kepemudaan sudah aktif terlibat dalam pembangunan dan ikut mengawal pengendalian pembangunan. Sudah tercipta juga masyarakat yang tanggap bencana. Terdapat peningkatan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Banjir dan kekeringan sudah tertangani. Resiko bencana sudah berkurang dan terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, diarahkan pada optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur yang handal dalam menggunakan TIK. Waktu pelayanan administrasi semakin singkat dengan efektifnya sistem pelayanan berbasis teknologi yang sudah terintegrasi.

Struktur perekonomian semakin kokoh yang ditandai dengan terdiversifikasinya sektor dan kegiatan ekonomi yang berkembang yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang pembangunan. Diversifikasi ekonomi tidak hanya pada pengembangan berbagai produk unggulan dalam satu sektor namun juga tercipta keterpaduan antara sektor pertanian, industri, dan jasa. Diversifikasi ekonomi didasarkan pada capaian kondisi ekonomi yang telah berdaya saing pada tahapan sebelumnya sehingga meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak serta meningkatkan taraf hidup. Keahlian dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan sektor ekonomi sudah terspesialisasi dan semakin fleksibel dalam menciptakan inovasi. Produksi dan kualitas sektor pertanian sudah meningkat ditandai dengan adanya pengolahan limbah secara terpadu. Perkembangan pertanian diarahkan pada pengembangan agroindustri yang berbasiskan sumberdaya lokal dan dikelola oleh masyarakat lokal melalui korporasi pertanian untuk memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian. IKM dan UKM yang berkembang sudah mandiri dan berdaya saing serta mampu menstimulus pengembangan dan penciptaan IKM serta UKM baru sehingga tercipta ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Pangsa pasar produk – produk unggulan semakin berkembang yang ditandai dengan terciptanya regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi digital dan *e-commerce*. Sementara pengembangan sektor pariwisata semakin diperkuat dengan pengelolaan berbasis masyarakat dan berkembangnya wirausaha – wirausaha pendukung kepariwisataan berbasis masyarakat (*community based tourism enterprises*). Perwujudan struktur perekonomian yang kokoh juga ditandai dengan telah berkembangnya lembaga perekonomian masyarakat yang berkelanjutan dan memberikan manfaat serta nilai tambah bagi pertumbuhan perekonomian. Investasi semakin meningkat dan sesuai dengan karakteristik perekonomian daerah yang dikembangkan. Ekonomi kreatif yang



fokus pada seni pertunjukan dan aplikasi dan game telah dikembangkan ditandai dengan optimalnya kerjasama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta komunitas.

Daya dukung dan kualitas lingkungan semakin baik dengan optimalnya pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup, optimalnya pengendalian penataan ruang, serta optimalnya pengendalian pertumbuhan penduduk. Pengendalian dan kontrol terhadap pencemaran lingkungan sudah optimal ditandai dengan meningkatnya kualitas air, udara, dan tanah. Semakin rendahnya penyimpangan pemanfaatan ruang yang ditandai dengan semakin baiknya sistem dan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adanya peningkatan akses dan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman sudah mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi wilayah sekitar RTH. Pertumbuhan jumlah penduduk alami maupun migrasi sudah terkendali.

Kualitas sumber daya manusia semakin meningkat ditandai dengan adanya perbaikan pendidikan dan fokus pada pengembangan pelatihan vokasi yang mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja. Akses dan pelayanan kesehatan masyarakat sudah merata ditandai dengan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat serta berkurangnya angka kematian ibu dan anak dan berkurangnya gizi buruk. Pengembangan kesehatan fokus pada pengembangan balita melalui investasi pada nutrisi anak dan pengembangan pendidikan pra sekolah dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang siap berkompetisi pada era ekonomi digital. Adanya peningkatan kualitas tenaga kerja berdaya saing global ditandai dengan tenaga kerja terkuualifikasi tidak hanya dari lulusan menengah atas tetapi juga tersertifikasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditekuni. Keahlian dan keterampilan tenaga kerja sudah fleksibel dan mampu mengikuti pergeseran permintaan pasar. Memiliki tenaga kerja terampil dengan keahlian spesifik, tersertifikasi, dan inovatif. Adanya peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja melalui pelatihan yang difasilitasi tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga penyedia lapangan kerja. Pada akhirnya, tercipta kesejahteraan pekerja di berbagai lapangan usaha yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Kebutuhan pangan lokal sudah terpenuhi secara mandiri dan berkelanjutan ditandai dengan termanfaatkannya bahan baku lokal untuk produksi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang. Terdapat peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Tercipta lingkungan yang aman bagi perempuan, anak, dan lansia. Pada akhirnya, tercipta masyarakat yang sejahtera ditandai dengan menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rata – rata pendapatan masyarakat.

Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, telah dilakukan pemerataan, pemenuhan, dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana. Kebutuhan perumahan layak huni sudah terpenuhi yang dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dengan kemudahan pembiayaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar terwujudnya kabupaten tanpa permukiman kumuh. Termanfaatkannya penggunaan energi baru dan terbarukan (panas bumi) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Adanya peningkatan akses pelayanan pendidikan ditandai dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi. Adanya peningkatan akses pelayanan kesehatan ditandai dengan meratanya layanan kesehatan yang ditunjang oleh tenaga kesehatan handal hingga ke wilayah terpencil. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital, tersedia infrastruktur non fisik berupa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Infrastruktur pendukung teknologi informasi dan komunikasi sudah mampu menciptakan ekosistem yang baik antara *network*, *device*, dan *application*. Keterhubungan dan koneksi antar wilayah semakin baik ditandai dengan pengembangan transportasi massal sudah terintegrasi dan terpadu. Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu secara merata di berbagai wilayah. Pengelolaan sampah sudah efektif dan mampu dimanfaatkan sebagai sumber energi baru terbarukan. Terpeliharanya fasilitas pengelolaan limbah domestik dan limbah industri yang terpadu dan ramah lingkungan. Pemantapan pengelolaan drainase berwawasan lingkungan (*ecodrain*) yang terpadu di kawasan strategis perkotaan serta kawasan perumahan dan permukiman sudah



semakin mantap. Pemantapan pengelolaan irigasi terpadu dalam rangka meningkatkan cakupan ketersediaan air untuk kawasan pertanian. Pengembangan perdesaan diarahkan pada transformasi perdesaan yang ditandai dengan perubahan dan struktur ekonomi dan pekerjaan serta meningkatnya elemen kota tanpa mengubah fungsi kawasan perdesaan. Sebagai penyempurna pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan, pada tahap terakhir sudah ada peningkatan untuk ketersediaan sarana dan prasarana untuk perempuan & anak, penyandang disabilitas dan manula sebagai salah satu upaya pemerataan bagi seluruh masyarakat.



Tabel 0.1 Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025

MISI	ISU	RPJMD Tahap I (Tahun 2005-2009)	RPJMD Tahap II (Tahun 2010-2015)	RPJMD Tahap III (Tahun 2016-2021)	RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2025)
Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib	Peningkatan keamanan publik dan kesejahteraan sosial	Melindungi penduduk dari segala macam gangguan dan ancaman ditandai dengan meningkatnya rasio linmas dengan jumlah penduduk	Melindungi penduduk dari segala macam gangguan dan ancaman ditandai dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan aparat keamanan	Melindungi penduduk dari segala macam gangguan dan ancaman ditandai dengan adanya kerjasama dengan unsur vertikal	Melindungi penduduk dari segala macam gangguan dan ancaman yang sudah dapat dideteksi secara dini
		Membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Optimalisasi peran BPBD dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana	Tersedianya infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung upaya mitigasi bencana serta dikembangkannya sistem informasi kebencanaan	Meningkatnya ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur yang handal dalam menggunakan TIK	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur yang handal dalam menggunakan TIK	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur yang handal dalam menggunakan TIK	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur yang handal dalam menggunakan TIK
		Memperbaiki sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian waktu dan biaya	Sistem pelayanan lebih sederhana, transparan, dan memiliki kepastian waktu dan biaya ditandai dengan berkembangnya outlet pelayanan publik	Semakin singkatnya waktu pelayanan administrasi dengan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi	Waktu pelayanan administrasi semakin singkat dengan efektifnya sistem pelayanan berbasis teknologi yang sudah terintegrasi
Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan	Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup	Menetapkan regulasi untuk mengurangi dampak lingkungan	Melaksanakan penanganan terhadap dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan ekonomi	Peningkatan penanganan untuk menetralkan dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan - kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi	Pengendalian dan kontrol terhadap pencemaran lingkungan sudah optimal ditandai dengan meningkatnya daya dukung lingkungan, kualitas air, udara, dan tanah



MISI	ISU	RPJMD Tahap I (Tahun 2005-2009)	RPJMD Tahap II (Tahun 2010-2015)	RPJMD Tahap III (Tahun 2016-2021)	RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2025)
		Pengurangan resiko bencana yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan	Pengurangan resiko bencana yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan	Pengurangan resiko bencana yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan	Pengurangan resiko bencana yang sinergi, terintegrasi, dan efektif dalam setiap dimensi pembangunan
					Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya air berbasis <i>sustainable river environment TOD</i>
	Pengendalian penataan ruang	Terbentuknya sistem untuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Tersosialisasikannya sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Penguatan sistem dan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk meminimalisir adanya penyimpangan pemanfaatan ruang	Semakin rendahnya penyimpangan pemanfaatan ruang yang ditandai dengan semakin baiknya sistem dan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
				Teridentifikasinya potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Terlindunginya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dari konversi lahan pertanian ke non pertanian
		Peningkatan alokasi lahan untuk ruang terbuka hijau	Peningkatan alokasi lahan untuk ruang terbuka hijau	Peningkatan akses dan ketersediaan RTH publik dan taman	Peningkatan akses dan ketersediaan RTH publik dan taman sudah dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi
	Pengendalian pertumbuhan penduduk	Tersedianya dan tersosialisasikannya alat pengendali kelahiran bagi masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pengendalian kelahiran dan penggunaan alat kontrasepsi	Menurunnya pertumbuhan penduduk alami maupun migrasi	Pertumbuhan jumlah penduduk alami maupun migrasi sudah terkendali
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan formal dan non formal	Terciptanya pendidikan formal dan non formal yang mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja	Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal yang mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja	Meningkatkan standarisasi kualitas pendidikan formal dan non formal yang bersertifikasi dalam mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja



MISI	ISU	RPJMD Tahap I (Tahun 2005-2009)	RPJMD Tahap II (Tahun 2010-2015)	RPJMD Tahap III (Tahun 2016-2021)	RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2025)
		Terwujudnya pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan khususnya terhadap masyarakat miskin	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya hidup sehat	Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pemerataan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat
		Meningkatnya penyuluhan tentang gizi dan imunisasi	Fokus pada penyelesaian masalah gizi buruk dan penggalakkan imunisasi	Fokus pada penyelesaian masalah gizi buruk dan stunting	Fokus pada pengembangan balita melalui intervensi pada nutrisi anak dan pengembangan pendidikan pra sekolah Peningkatan kualitas gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak
	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Peningkatan ketahanan keluarga dan kualitas hidup serta peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan ketahanan keluarga dan kualitas hidup serta peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan ketahanan keluarga dan kualitas hidup serta peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan ketahanan keluarga dan kualitas hidup serta peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
				Peningkatan pencegahan dan penanganan perlindungan bagi perempuan, anak, dan lansia	Menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan, anak, dan lansia
	Peningkatan kualitas tenaga kerja berdaya saing global	Tenaga kerja berkualitas dengan minimal lulusan pendidikan menengah pertama	Tenaga kerja berkualitas dengan minimal lulusan pendidikan menengah atas	Tenaga kerja berkualitas dengan minimal lulusan pendidikan menengah atas dan memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia	Terciptanya kesejahteraan pekerja di berbagai lapangan usaha yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja
				Memiliki tenaga kerja terampil dengan keahlian spesifik yang tersertifikasi	Memiliki tenaga kerja terampil dengan keahlian spesifik, tersertifikasi, dan inovatif
	Pemberdayaan pemuda dan organisasi pemuda dalam masyarakat	Inisiasi pengembangan organisasi - organisasi dan lembaga kepemudaan dan adanya peningkatan prestasi pemuda	Terbentuknya organisasi - organisasi dan lembaga kepemudaan dengan adanya kegiatan yang aktif dan	Meningkatnya peran serta pemuda pelopor dan berkembangnya organisasi/ lembaga kepemudaan dalam pembangunan yang kegiatan berdampak positif	Pemuda dan organisasi/ lembaga kepemudaan terlibat aktif dalam berbagai bidang pembangunan dan ikut mengawal pengendalian pembangunan



MISI	ISU	RPJMD Tahap I (Tahun 2005-2009)	RPJMD Tahap II (Tahun 2010-2015)	RPJMD Tahap III (Tahun 2016-2021)	RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2025)
			pemuda pelopor yang berprestasi		
	Konsumsi dan produksi pangan berkelanjutan dan berkualitas	Pemenuhan penyediaan kebutuhan pangan pokok	Pemenuhan penyediaan kebutuhan pangan pokok khususnya bagi penduduk miskin dan pemenuhan penganekaragaman pangan	Pemenuhan kebutuhan pangan lokal yang beragam, bergizi, dan seimbang	Kebutuhan pangan lokal sudah terpenuhi secara mandiri dan berkelanjutan ditandai dengan termanfaatkannya bahan baku lokal untuk konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang
	Pananggulangan kemiskinan	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat
Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan	Pemerataan, pemenuhan, dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana			Meningkatnya ketersediaan perumahan layak huni yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang dengan kemudahan pembiayaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar menurunkan luasan permukiman kumuh	Terpenuhinya kebutuhan perumahan layak huni yang dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dengan kemudahan pembiayaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar terwujudnya kabupaten tanpa permukiman kumuh
				Inisiasi pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi baru terbarukan	Termanfaatkannya penggunaan energi baru dan terbarukan (panas bumi) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
		Penyediaan akses pelayanan kesehatan	Peningkatan akses pelayanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin	Meningkatnya layanan kesehatan ditandai dengan tercukupinya sarana kesehatan dan tenaga kesehatan	Meratanya layanan kesehatan yang ditunjang oleh tenaga kesehatan handal hingga ke wilayah terpencil



MISI	ISU	RPJMD Tahap I (Tahun 2005-2009)	RPJMD Tahap II (Tahun 2010-2015)	RPJMD Tahap III (Tahun 2016-2021)	RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2025)
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan menengah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan menengah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi
		Terpenuhinya pembangunan jalan, jembatan, serta simpul – simpul transportasi	Pembangunan jalan baru, pengembangan terminal, serta pengembangan sistem angkutan massal	Pembangunan jalan baru, pengembangan terminal, serta pengembangan sistem angkutan massal	Pengembangan transportasi massal yang terintegrasi dan terpadu
		Terbangunnya sarana dan prasara pengelolaan sampah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar pelayanan minimal	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu secara merata di berbagai wilayah
					Pengelolaan sampah sudah efektif dan mampu dimanfaatkan sebagai sumber energi baru terbarukan
					Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang merata di seluruh lapisan masyarakat
		Terbangunnya fasilitas pengelolaan limbah terpadu	Terbangunnya fasilitas pengelolaan limbah terpadu yang diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara fasilitas	Penerapan fasilitas pengelolaan limbah domestik dan limbah industri yang terpadu yang ramah lingkungan	Terpeliharanya fasilitas pengelolaan limbah domestik dan limbah industri yang terpadu dan ramah lingkungan
		Pembangunan drainase perkotaan dan kawasan perumahan serta permukiman	Pemenuhan kebutuhan drainase perkotaan dan kawasan perumahan serta permukiman	Pengembangan drainase berwawasan lingkungan (<i>ecodrain</i>) di kawasan strategis perkotaan serta kawasan perumahan dan permukiman	Pemantapan pengelolaan drainase berwawasan lingkungan (<i>ecodrain</i>) yang terpadu di kawasan strategis perkotaan serta kawasan perumahan dan permukiman
		Pengembangan irigasi terpadu dalam rangka	Pengembangan irigasi terpadu dalam rangka meningkatkan	Pengelolaan irigasi terpadu dalam rangka meningkatkan cakupan	Pemantapan pengelolaan irigasi terpadu dalam rangka



MISI	ISU	RPJMD Tahap I (Tahun 2005-2009)	RPJMD Tahap II (Tahun 2010-2015)	RPJMD Tahap III (Tahun 2016-2021)	RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2025)
		meningkatkan cakupan ketersediaan air untuk kawasan pertanian	cakupan ketersediaan air untuk kawasan pertanian	ketersediaan air untuk kawasan pertanian	meningkatkan cakupan ketersediaan air untuk kawasan pertanian
					Meningkatnya akses aman terhadap air bersih bagi masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan
				Terinisiasinya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang ramah perempuan & anak, disabilitas, dan manula	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah perempuan & anak, disabilitas, dan manula sebagai salah satu upaya pemerataan pelayanan bagi seluruh masyarakat
		Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana dasar di perdesaan	Adanya pengembangan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan ditandai dengan lengkapnya sarana dan prasarana penunjang	Pengembangan perdesaan mandiri yang ditandai dengan peningkatan keberdayaan masyarakat desa	Adanya transformasi perdesaan yang ditandai dengan perubahan pada struktur ekonomi dan pekerjaan serta meningkatnya elemen kota tanpa mengubah fungsi kawasan perdesaan
Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing	Ekonomi kemasyarakatan yang berdaya saing dan berkelanjutan			Munculnya berbagai spesialisasi atau kluster – kluster pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah yang berbasiskan pada sumber daya lokal	Terdiversifikanya sektor dan kegiatan ekonomi yang berkembang sehingga tercipta inovasi dari keterpaduan antara sektor pertanian, industri, serta perdagangan dan jasa
		Inisiasi pembentukan lembaga perekonomian masyarakat	Adanya kemudahan pembentukan lembaga perekonomian masyarakat	Pengembangan dan penguatan lembaga perekonomian masyarakat	Berkembangnya lembaga perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkelanjutan
					Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor pembangunan perekonomian



MISI	ISU	RPJMD Tahap I (Tahun 2005-2009)	RPJMD Tahap II (Tahun 2010-2015)	RPJMD Tahap III (Tahun 2016-2021)	RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2025)
	Peningkatan daya saing sektor ekonomi unggulan	Tersedianya infrastruktur penunjang dan fasilitas pendukung kegiatan pertanian	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan pertanian	Sektor pertanian diarahkan untuk peningkatan hasil produksi dari segi kualitas dan mengedepankan ciri khas produk	Produksi dan kualitas sektor pertanian sudah meningkat ditandai dengan adanya pengolahan limbah secara terpadu
					Berkembangnya agroindustri yang berbasis sumberdaya lokal dan dikelola oleh masyarakat lokal melalui korporasi pertanian untuk memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian
		Tersedianya fasilitas penunjang yang mendukung terciptanya IKM dan UKM	Munculnya IKM dan UKM yang didorong dengan pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha	Mulai berkembangnya IKM dan UKM yang menunjang kegiatan produksi yang didukung oleh akses pemodal dan inkubasi dalam rangka menciptakan IKM dan UKM yang mandiri dan berdaya saing	IKM (industri kecil menengah) dan UKM (usaha mikro dan koperasi) yang berkembang sudah mandiri dan berdaya saing serta mampu menstimulus pengembangan dan penciptaan IKM dan UKM baru sehingga tercipta ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan
					Berkembangnya ekonomi kreatif yang difokuskan pada pengembangan seni pertunjukan dan aplikasi dan game yang ditandai dengan optimalnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta komunitas dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif
		Tersedianya infrastruktur penunjang dan fasilitas	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam	Adanya perluasan pasar untuk produk - produk unggulan yang ditandai dengan tersedianya regulasi	Berkembangnya pangsa pasar produk - produk unggulan yang ditandai dengan terciptanya



MISI	ISU	RPJMD Tahap I (Tahun 2005-2009)	RPJMD Tahap II (Tahun 2010-2015)	RPJMD Tahap III (Tahun 2016-2021)	RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2025)
		pendukung kegiatan perdagangan dan jasa	mengakses pasar lokal maupun global	yang mendorong peluang pasar dan ekspor (rpjm)	regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi digital dan <i>e-commerce</i>
		Pengembangan pariwisata yang ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata	Meningkatnya infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata disertai optimalnya pengelolaan daerah wisata	Sektor pariwisata diarahkan untuk eksplorasi dan pengembangan potensi-potensi wisata baru	Penguatan sektor pariwisata dengan pengelolaan berbasis masyarakat dan berkembangnya wirausaha-wirausaha pendukung kepariwisataan berbasis masyarakat (<i>community based tourism enterprise</i>)
				Tergalinya potensi investasi yang sesuai dengan karakteristik daerah dan mendukung ekonomi lokal	Meningkatnya investasi yang sesuai dengan karakteristik perekonomian daerah yang dikembangkan



5.2 Sasaran Pokok Daerah

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode pembangunan tahun ke – 20 (dua puluh). Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing – masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Sasaran pokok menjelaskan keterhubungan dengan visi/misi yang menunjukkan indikator kinerja beserta target masing – masing.

Tabel 0.2 Perumusan Sasaran Pokok

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PERIODE I: PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG YANG DIDUKUNG OLEH PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SUPRASTRUKTUR			
Sasaran Pokok:			
1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (%)	N/A	
2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerinrah daerah dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	
3. Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	
4. Terkendalinya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,47	
	Persentase penggunaan lahan sesuai tata ruang	N/A	
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,39 (Metode Lama)	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	N/A	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	N/A	
6. Terpenuhinya kebutuhan pangan berkelanjutan	Skor PPH Konsumsi	N/A	
7. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	16,72 (Tahun 2008)	
8. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	8,29	
	Indeks Gini	0,27	
9. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah	Persentase kawasan kumuh (%)	0,79	
	Akses aman air bersih (%)	73,08	
	Akses aman sanitasi (%)	58,16	
	Persentase penurunan luas genangan banjir	N/A	
	Luas sawah yang terairi irigasi (%)	N/A	
10. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan terpadu	Persentase sampah yang dikelola (%)	N/A	
11. Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Aksesibilitas	N/A	
	Moda <i>share</i>	N/A	
12. Meningkatnya pembangunan perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	N/A	
13. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan yang berbasis ekonomi kemasyarakatan/ ekonomi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,34	
	PDRB ADHK (juta rupiah)	20,52	
	PDRB ADHB (juta rupiah)	41,20	
	Laju inflasi (%)	3,15	



Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket.
14. Meningkatnya pertumbuhan investasi	Laju pertumbuhan investasi	4,73	
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PERIODE II: PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BERBAGAI BIDANG YANG DIDUKUNG OLEH KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SUPRASTRUKTUR YANG TERJANGKAU			
Sasaran Pokok:			
1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (%)	N/A	
2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerinrah daerah dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	
3. Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	
4. Terkendalinya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,8	
	Persentase penggunaan lahan sesuai tata ruang	N/A	
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,05	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,32	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,46	
6. Terpenuhinya kebutuhan pangan berkelanjutan	Skor PPH Konsumsi	78,60	
7. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,03	
8. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	8,00	
	Indeks Gini	0,40	
9. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah	Persentase kawasan kumuh (%)	0,72	
	Akses aman air bersih (%)	75,74	
	Akses aman sanitasi (%)	70,04	
	Persentase penurunan luas genangan banjir	N/A	
	Luas sawah yang terairi irigasi (%)	N/A	
10. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan terpadu	Persentase sampah yang dikelola (%)	N/A	
11. Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Aksesibilitas	N/A	
	Moda <i>share</i>	N/A	
12. Meningkatnya pembangunan perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	N/A	
13. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan yang berbasis ekonomi kemasyarakatan/ ekonomi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,89	
	PDRB ADHK (juta rupiah)	63,21	
	PDRB ADHB (juta rupiah)	85,79	
	Laju inflasi (%)	6,09	
14. Meningkatnya pertumbuhan investasi	Laju pertumbuhan investasi	5,08	
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PERIODE III: PENINGKATAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DIDUKUNG OLEH SDM BERKUALITAS DI BERBAGAI BIDANG			
Sasaran Pokok:			
1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (%)	65,25	



Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket.
2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerinrah daerah dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	50,01	
3. Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	43,19	
4. Terkendalinya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,46	
	Persentase penggunaan lahan sesuai tata ruang	58	
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,80	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,30	
6. Terpenuhinya kebutuhan pangan berkelanjutan	Skor PPH Konsumsi	94	
7. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,30	
8. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,41	
	Indeks Gini	0,38	
9. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah	Persentase kawasan kumuh (%)	0,15	
	Akses aman air bersih (%)	77,54	
	Akses aman sanitasi (%)	100	
	Persentase penurunan luas genangan banjir	4,0	
	Luas sawah yang terairi irigasi (%)	60	
10. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan terpadu	Persentase sampah yang dikelola (%)	75	
11. Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Aksesibilitas	0,85	
	Moda <i>share</i>	2,16	
12. Meningkatnya pembangunan perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7303	
13. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan yang berbasis ekonomi kemasyarakatan/ ekonomi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,19	
	PDRB ADHK (juta rupiah)	88,78	
	PDRB ADHB (juta rupiah)	98,06	
	Laju inflasi (%)	5,00	
14. Meningkatnya pertumbuhan investasi	Laju pertumbuhan investasi	2,80	
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PERIODE IV: PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG KOKOH, ADIL, DAN BERKELANJUTAN DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN			
Sasaran Pokok:			
1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (%)	73,12	
2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerinrah daerah dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	60	
3. Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	43,19	
4. Terkendalinya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,38	
	Persentase penggunaan lahan sesuai tata ruang	60,5	
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,67	



Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket.
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,20	
6. Terpenuhinya kebutuhan pangan berkelanjutan	Skor PPH Konsumsi	100	
7. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,00	
8. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	5,70	
	Indeks Gini	0,36	
9. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah	Persentase kawasan kumuh (%)	0,10	
	Akses aman air bersih (%)	80	
	Akses aman sanitasi (%)	100	
	Persentase penurunan luas genangan banjir	6,0	
10. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan terpadu	Luas sawah yang terairi irigasi (%)	70	
	Persentase sampah yang dikelola (%)	100	
11. Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Aksesibilitas	1,50	
	Moda <i>share</i>	3,15	
12. Meningkatnya pembangunan perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7679	
13. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan yang berbasis ekonomi kemasyarakatan/ ekonomi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,36	
	PDRB ADHK (juta rupiah)	119,64	
	PDRB ADHB (juta rupiah)	136,22	
	Laju inflasi (%)	4,50	
14. Meningkatnya pertumbuhan investasi	Laju pertumbuhan investasi	3,40	

Sasaran pokok yang telah dipetakan untuk setiap misi pembangunan jangka panjang akan dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan untuk masing – masing sasaran pokok disajikan sebagai berikut:

Tabel 0.3 Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum wilayah				
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik				
Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan				
	Terkendalinya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk				
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan				



MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	Terpenuhinya kebutuhan pangan berkelanjutan				
	Menurunnya tingkat pengangguran				
	Menurunnya tingkat kemiskinan				
Menciptakan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah				
	Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan terpadu				
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah				
	Meningkatnya pembangunan perdesaan				
Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan yang berbasis ekonomi kemasyarakatan / ekonomi lokal				
	Meningkatnya pertumbuhan investasi				



Tabel 0.4 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung

Visi: Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja Tahun 2025

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Realisasi Periode I (2005-2009)	Realisasi Periode II (2010-2015)	Target Periode III (2016-2021)	Target Periode IV (2022-2025)	Arah Kebijakan Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	9
1. Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib	a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (%)	N/A	N/A	65,25	73,12	Arah Kebijakan Periode 2005-2009: Pembangunan di berbagai bidang yang didukung oleh penyediaan infrastruktur dan suprastruktur
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	b. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	50,01	60	
3. Mewujudkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan	c. Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	N/A	N/A	43,19	43,19	
	d. Terkendalinya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk	1) Laju pertumbuhan penduduk 2) Persentase penggunaan lahan sesuai tata ruang	1,47 N/A	1,8 N/A	1,46 58	1,38 60,5	
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan	1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,39 (Metode Lama)	70,05	72,80	74,67	Arah Kebijakan Periode 2010-2015: Peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan suprastruktur yang terjangkau
		2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	N/A	93,32	95	100	
		3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	N/A	74,46	75,30	76,20	
	f. Terpenuhinya kebutuhan pangan berkelanjutan	Skor PPH Konsumsi	N/A	78,60	94	100	
	g. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	16,72 (Tahun 2008)	4,03	3,30	3,00	



REVISI RPJPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

Visi: Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja Tahun 2025									
Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Realisasi Periode I (2005-2009)	Realisasi Periode II (2010-2015)	Target Periode III (2016-2021)	Target Periode IV (2022-2025)	Arah Kebijakan Pembangunan		
1	2	3	4	5	6	7	9		
5. Menciptakan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan	h. Menurunnya tingkat kemiskinan	1) Tingkat kemiskinan	8,29	8,00	6,41	5,70	Arah kebijakan Periode 2016-2021		
		2) Indeks Gini	0,27	0,40	0,38	0,36			
	i. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah		1) Persentase kawasan kumuh (%)	0,79	0,72	0,15	0,10	Peningkatan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing	
			2) Akses aman air bersih (%)	73,08	75,74	77,54	80		
			3) Akses aman sanitasi (%)	58,16	70,04	100	100		
			4) Persentase penurunan luas genangan banjir (%)	N/A	N/A	4,0	6,0		
			5) Luas sawah yang terairi irigasi (%)	N/A	N/A	60	70		
	j. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan terpadu		Persentase sampah yang dikelola (%)	N/A	N/A	75	100		
	k. Meningkatnya konektivitas antar wilayah		1) Indeks Aksesibilitas	N/A	N/A	0,85	1,50		Arah Kebijakan Periode 2022-2025 Pemantapan perekonomian daerah yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan
			2) Moda <i>share</i>	N/A	N/A	2,16	3,15		
l. Meningkatnya pembangunan perdesaan		Indeks Desa Membangun (IDM)	N/A	N/A	0,7303	0,7679			
6. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing	m. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan yang berbasis ekonomi kemasyarakatan / ekonomi lokal	1) Laju pertumbuhan ekonomi (%)	4,34	5,89	6,19	6,36			
		2) PDRB							
		– ADHK (juta rupiah)	20,52	63,21	88,78	119,64			
		– ADHB (juta rupiah)	41,20	85,79	98,06	136,22			



Visi: Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja Tahun 2025							
Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Realisasi Periode I (2005-2009)	Realisasi Periode II (2010-2015)	Target Periode III (2016-2021)	Target Periode IV (2022-2025)	Arah Kebijakan Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	9
		3) Laju inflasi (%)	3,15	6,09	5,00	4,50	
	n. Meningkatnya pertumbuhan investasi	Laju pertumbuhan investasi (%)	4,73	5,08	2,80	3,40	

Sumber: Hasil Analisis, 2018



5.2.1 Penyesuaian Target Sasaran Pokok dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sinergi TPB di Kabupaten Bandung tergambar dalam visi yang diusung dalam pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025, yakni “Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja”. Selanjutnya, perwujudan visi dilaksanakan dalam 6 (enam) misi pembangunan beserta masing-masing sasaran pokoknya. Setiap misi dalam pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 di Kabupaten Bandung telah mengakomodasi 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 0.5 Sinergi TPB dengan Misi Kabupaten Bandung

Misi	Penjelasan	TPB
1	Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPB 1. Tidak ada Kemiskinan ▪ TPB 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, membangun kelembagaan yang efektif, Akuntabel dan inklutif
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPB 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, membangun kelembagaan yang efektif, Akuntabel dan inklutif
3	Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPB 6. Sanitasi dan Air Bersih ▪ TPB 11. Menjadi Kota dan Permukiman yang inklusif, aman, tangguh ▪ TPB 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi ▪ TPB 13. mengatasi perubahan iklim dan dampaknya ▪ TPB 15. Melindungi ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari ▪ TPB 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, membangun kelembagaan yang efektif, Akuntabel
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPB 1. Tidak ada Kemiskinan ▪ TPB 2. Menghilangkan Kelaparan ▪ TPB 3. Meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan Penduduk ▪ TPB 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif (Tidak ada di Crosscutting) ▪ TPB 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan ▪ TPB 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ▪ TPB 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif
5	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPB 2. Tidak ada Kelaparan/Ketahanan pangan ▪ TPB 6. Sanitasi dan Air Bersih ▪ TPB 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi
6	Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPB 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi ▪ TPB 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bandung, 2019

Berdasarkan hasil capaian TPB Kabupaten Bandung, masih terdapat target – target yang memiliki kesenjangan atau belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Target – target yang masih memiliki kesenjangan tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.



Tabel 0.6 Target TPB yang Memiliki Kesenjangan

PILAR	NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET TPB
Sosial	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
			1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
			1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
	2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
			2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
	3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
			3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
			3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-



PILAR	NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET TPB
				obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
	4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
			4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
			4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
			4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
			4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
	5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
			5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
			5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
			5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform



PILAR	NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET TPB
				serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.
Ekonomi	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
			8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
			8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
			8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
	9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.
			9,5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.
			17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk



PILAR	NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. TARGET	TARGET TPB
		Pembangunan Berkelanjutan		
Lingkungan	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
			6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
	12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12,7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
	15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
			15,6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.
	Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16,6
16,9				Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
16,10				Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
16.b				Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2019



Target – target yang memiliki kesenjangan ini sudah diintegrasikan ke dalam sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bandung. Misi 1 dapat diintegrasikan dengan target TPB 1 dan 16 yang masih terdapat kesenjangan terkait perlindungan sosial masyarakat, kerentanan masyarakat terhadap kejadian ekstrim, serta terkait kebencanaan. Kondisi ini sudah diintegrasikan dalam sasaran pokok di misi 1 yaitu tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat dengan nilai target 73,12% hingga tahun 2025. Misi 2 dapat diintegrasikan dengan target TPB 16 yang masih terdapat kesenjangan terkait kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Kondisi ini sudah diintegrasikan dalam sasaran pokok di misi 2 yang dinilai melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai target sebesar 60 di tahun 2025. Misi 3 dapat diintegrasikan dengan TPB 6, 11, 12, 13, dan 15 yang masih memiliki kesenjangan terkait peningkatan kualitas air, pengurangan polusi, perlindungan lingkungan, pelestarian dan restorasi pemanfaatan ekosistem. Kondisi ini telah diintegrasikan dalam indikator sasaran pokok di misi 3 yaitu indeks kualitas lingkungan hidup dengan nilai target 43,19 di tahun 2025 serta persentase penggunaan lahan sesuai tata ruang dengan nilai 60,5% di tahun 2025. Sementara itu, untuk pengintegrasian dengan TPB 16 pada misi 3 berkaitan dengan pemberian identitas dan pencatatan sipil yang sudah dituangkan dalam indikator sasaran pokok terkendalanya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk dengan target indikator laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,38 di tahun 2025.

Misi 4 berkaitan dengan TPB 1, 2, 3, 4, 5, 8, dan 9 dengan target – target TPB yang masih memiliki kesenjangan adalah terkait kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pangan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta ketenagakerjaan. Kondisi ini sudah diakomodir dalam 4 sasaran pokok yang termasuk ke dalam misi 4 yang dinilai melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Skor PPH Konsumsi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat kemiskinan, serta Indeks gini. Misi 5 berkaitan dengan TPB 2, 6, dan 12 dengan target yang masih memiliki kesenjangan dititikberatkan pada kondisi air bersih, sanitasi, dan persampahan. Hal tersebut sudah termasuk ke dalam sasaran pokok i dan j dengan indikator akses aman air bersih, akses aman sanitasi, serta persentase sampah yang dikelola. Target untuk masing – masing indikator tersebut di tahun 2025 adalah 80%, 100%, dan 100%. Target ini sudah disesuaikan dengan target universal dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Terakhir, misi 6 berkaitan dengan perekonomian yang dapat diintegrasikan pada TPB 8 dan 9 dengan target yang masih memiliki kesenjangan adalah terkait pertumbuhan produk domestik bruto, kapasitas usaha perekonomian rakyat, serta kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian. Semua kondisi tersebut sudah diintegrasikan ke dalam sasaran pokok di misi 6 dengan indikator sasaran pokok berupa PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, serta laju pertumbuhan investasi.



6.1 Pedoman Transisi

Periode pelaksanaan Perubahan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 adalah sampai dengan Tahun 2025. Sebelum Perubahan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 berakhir pada tahun 2025, maka pemerintah daerah Kabupaten Bandung harus menyusun rancangan awal RPJPD periode berikutnya paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD Tahun 2005-2025 berakhir. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan perencanaan pembangunan jangka panjang antarperiode.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan pedoman pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tahun 2025. RPJPD Kabupaten Bandung 2005-2025 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bandung. Perubahan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam:

1. Penyusunan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
2. RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 merupakan pedoman bagi penyusunan RTRW Kabupaten, RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Bandung berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, serta masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.



2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.
4. Dalam rangka implementasi RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Bappeda berkewajiban untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 ke dalam RPJMD Kabupaten Bandung sesuai dengan periode berkenaan.
5. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bandung, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan, serta pendanaan.
6. Dalam pelaksanaannya, Perubahan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
7. Hasil pelaksanaan pengawasan intern oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terhadap implementasi rencana pembangunan dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
8. Evaluasi Perubahan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten Bandung.

Keberhasilan pelaksanaan perubahan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Oleh karena itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bandung 2025: "Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Rajarha Tahun 2025"